



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program, yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023; dan
 - b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
- f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- i. BAB IX PENUTUP.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan Dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
 - a. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode ke empat; dan
 - b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode ke empat.
- (2) Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya.

- (3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 Maret 2019.

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 Maret 2019.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



Ir. ESKOP, MAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 46

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 180/474/III.1/HUK

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJMD Kabupaten Barito Timur digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, serta sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengingat RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah untuk :

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 terdiri dari 7 BAB dan 10 Pasal yang mengatur mengenai

pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Timur, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 38



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-32
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-56
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-31
3.3 Kerangka Pendanaan	III-34
BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2 Isu-Isu Strategis	IV-28
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1 Visi	V-1
5.2 Misi	V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
6.1 Strategi	VI-1
6.2 Arah Kebijakan	VI-12
6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis	VI-28
6.4 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	VI-36
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Daerah	VIII-1
8.2 Skenario dan Rekomendasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	VIII-49
BAB IX KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI	
9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-4
Tabel 2.2	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-4
Tabel 2.3	Statistik Klimatologi Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-9
Tabel 2.4	Luas dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016	II-13
Tabel 2.5	Luas dan Produksi Palawija di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-13
Tabel 2.6	Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-14
Tabel 2.7	Produksi Budidaya Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-15
Tabel 2.8	Gambaran Umum dan Potensi per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-15
Tabel 2.9	Potensi Lainnya per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-16
Tabel 2.10	Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan, Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-21
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Barito Timur, Tahun 2017	II-22
Tabel 2.12	Indikator Kependudukan Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 – 2017	II-23
Tabel 2.13	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur (Persen) Tahun 2013-2017	II-25
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur, Tahun 2013-2017	II-26
Tabel 2.15	PDRB Perkapita Barito Timur Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)	II-27
Tabel 2.16	Unsur Pembentuk IPM Kabupaten Barito Timur, 2013-2017	II-28
Tabel 2.17	Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Barito Timur, 2013-2017	II-32
Tabel 2.18	Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017	II-33
Tabel 2.19	Daya Terpasang, Produksi dan distribusi Listrik PT.PLNRayon Kab. Barito Timur, Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.20	Jumlah Pelanggan PDAM dan air yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.21	Perumahan Kumuh Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-35
Tabel 2.22	Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.23	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-38
Tabel 2.24	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Barito Timur, 2013-2017	II-40
Tabel 2.25	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Barito Timur	II-40
Tabel 2.26	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Barito Timur	II-41
Tabel 2.27	Statistik Perhubungan Kabupaten Barito Timur 2013-2017	II-41



Tabel 2.28	Statistik Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur	II-42
Tabel 2.29	Daya Dukung dan Daya Tampung Setiap Kecamatan Kabupaten Barito Timur	II-43
Tabel 2.30	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-45
Tabel 2.31	Perkembangan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-45
Tabel 2.32	Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.33	Data BUMDes Per-Kecamatan	II-46
Tabel 2.34	Perkembangan Jumlah Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2017	II-52
Tabel 2.35	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.36	Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Dan Nilai Produksi Pada Industri Kecil Dan Industri Menengah Di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2017	II-53
Tabel 2.37	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.38	Hasil Evaluasi AKIP Kab. Barito Timur Tahun 2014-2017	II-55
Tabel 2.39	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun 2013-2017	II-56
Tabel 2.40	Angka Pengeluaran PerKapita menurut Kelompok Barang Makanan dan non Makanan di Kabupaten Barito Timur (Ribuan Rp) Tahun 2013-2016	II-56
Tabel 2.41	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016	II-58
Tabel 2.42	Rasio Ketergantungan Tahun 2014-2016 Kabupaten Barito Timur	II-59
Tabel 2.43	Indikator Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017	III-4
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-7
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-7
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017 (dalam miliar)	III-8
Tabel 3.5	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017 (dalam miliar)	III-10
Tabel 3.6	Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017	III-11
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017 (dalam miliar)	III-12
Tabel 3.8	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun	III-13



	Anggaran 2013-2017	
Tabel 3.9	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-14
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017	III-15
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013– 2017	III-16
Tabel 3.12	Belanja Langsung APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017(dalam miliar)	III-18
Tabel 3.13	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2018	III-19
Tabel 3.14	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur	III-24
Tabel 3.15	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur	III-30
Tabel 3.16	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)	III-31
Tabel 3.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-32
Tabel 3.18	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-32
Tabel 3.19	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Barito Timur	III-35
Tabel 3.20	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur	III-40
Tabel 3.21	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur	III-41
Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan”	IV-8
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan “Belum meratanya pendapatan masyarakat”	IV-12
Tabel 4.3	Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016-2017	IV-14
Tabel 4.4	Kondisi Jalan Setiap Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	IV-15
Tabel 4.5	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pemerataan Pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan”	IV-16
Tabel 4.6	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia Barito Timur”	IV-20
Tabel 4.7	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah”	IV-23
Tabel 4.8	Maturitas SPIP menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah tahun 2016	IV-25



Tabel 4.9	Hasil Evaluasi AKIP Kab. Bartim Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017	IV-26
Tabel 4.10	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”	IV-27
Tabel 4.11	Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2011-2031	IV-66
Tabel 4.12	Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2011-2031	IV-75
Tabel 4.13	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur Tahun 2011-2031	IV-84
Tabel 5.1	Kesesuaian dan konsistensi antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023	V-8
Tabel 5.2	Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	V-10
Tabel 5.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023	V-15
Tabel 6.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2018-2023	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	VI-17
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Barito Timur	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VIII-5



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur	II-3
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur	II-6
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur	II-7
Gambar 2.4	Peta tutupan lahan Kabupaten Barito Timur	II-10
Gambar 2.5	Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur	II-19
Gambar 2.6	Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur	II-20
Gambar 2.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2017	II-21
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Serta Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2017	II-23
Gambar 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur, 2013-2017 (Milyar Rupiah)	II-24
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Timur	II-28
Gambar 2.11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-29
Gambar 2.12	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-30
Gambar 2.13	Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2017	II-31
Gambar 2.14	Jumlah Tindak Pidana Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-37
Gambar 2.15	Indeks Gini Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-39
Gambar 2.16	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	II-54
Gambar 2.17	Angka Kriminalitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2017	II-57
Gambar 2.18	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas Listrik Kabupaten Barito Timur, 2014-2017	II-58
Gambar 3.1	Perkembangan APBD Kab. Barito Timur Tahun 2013-2017 (dalam miliar)	III-2
Gambar 3.2	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kab. Barito Timur Tahun 2013-2017	III-17
Gambar 3.3	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kab. Barito Timur Tahun 2017 (%)	III-17
Gambar 4.1	Indeks Gini Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2017	IV-3
Gambar 4.2	Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur	IV-5
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2017	IV-7
Gambar 4.4	Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (Persen)	IV-11



Gambar 4.5	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah tahun 2017	IV-19
Gambar 4.6	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah tahun 2017	IV-22
Gambar 5.1	Hubungan Antar Pokok Visi Kabupaten Barito Timur	V-3
Gambar 5.2	Keterkaitan Antara Visi Dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur 2018-2023	V-7
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	VI-13
Gambar 6.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur	VI-35

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Proses penyusunannya menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah terpilih pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli



yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/ kota.

Dengan terpilihnya **Bupati Kabupaten Barito Timur (Ampera A.Y. Mebas, SE, MM) dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur (Habib Said Abdul Saleh)** dengan visi pembangunan “Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah”. Visi pembangunan kepala daerah terpilih akan dijabarkan kedalam RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi), akan menjamin keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan di daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2018–2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.



2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4. Pelaksanaan musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kabupaten Barito Timur. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Barito Timur menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Barito Timur.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala OPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.



6. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459) ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 ditetapkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Barito Timur secara berkesinambungan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah:

- a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan; dan



- d. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
- e. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2018-2023.
- f. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah
- g. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Timur.
- h. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

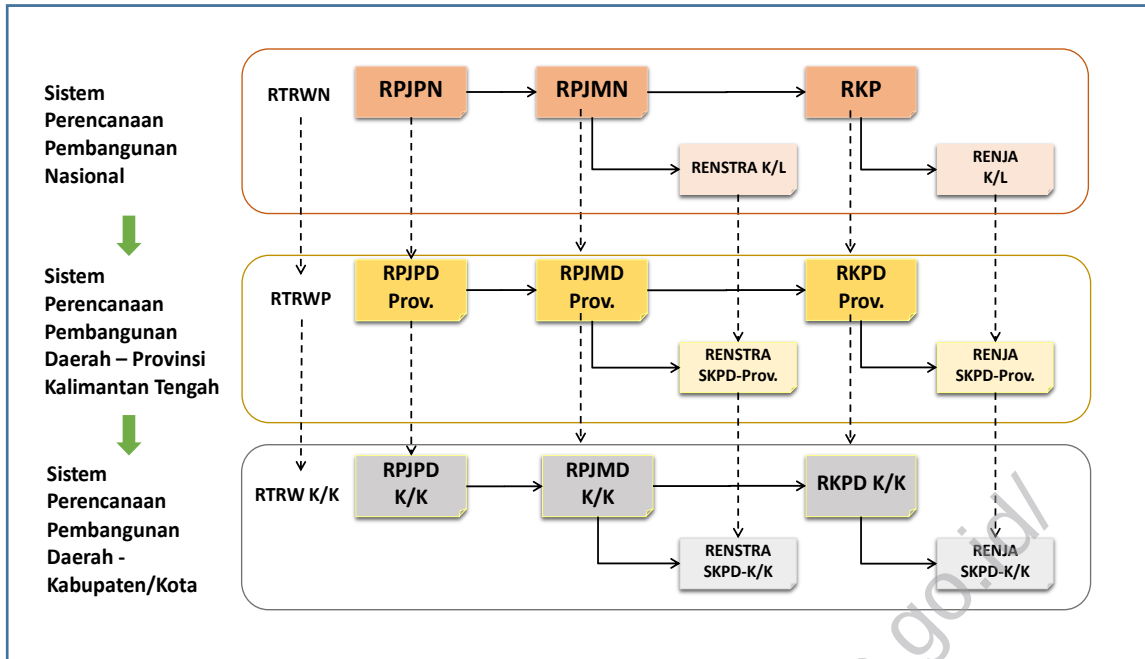
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan maupun penganggaran terutama RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan R-APBD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur wajib berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memerhatikan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan Kabupaten Barito Timur.

RPJMD Kabupaten Barito Timur juga harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur, untuk menyesuaikan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Barito Timur dengan kebijakan tahapan pembangunan dalam RPJMD. Sehingga RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 merupakan pencapaian dan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Barito Timur. Posisi RPJMD

Kabupaten Barito Timur apabila dilihat dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada berikut ini. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Timur merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program pembangunan Kabupaten Barito Timur, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur dan RPJM Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.
2. RPJMD Kabupaten Barito Timur merupakan acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. RPJMD Kabupaten Barito Timur yang berisi rencana pembangunan lima tahunan merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode tahunan.



4. RTRW Kabupaten Barito Timur menjadi pedoman dalam rencana pemanfaatan ruang. Dalam hal ini antara RTRW dan RPJMD mempunyai kepentingan yang saling terkait, agar penyusunan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Barito Timur.
5. Dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD Kabupaten Barito Timur.
6. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan prioritas (NAWACITA) dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi



dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Bupatike dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timurserta pagu anggaran setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 penanggungjawab bidang urusan/program Perangkat Daerah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terbaru.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara formal, Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur ini dikeluarkan, wilayah Kabupaten Barito Timur pernah berkembang dari Kabupaten Barito Timur menjadi Wilayah Pembantu Bupati Barito Timur, sejak undang-undang tersebut berlaku, maka secara resmi wilayah Barito Timur memisahkan diri dari Kabupaten Barito Selatan dan menjadi daerah otonom sendiri dengan nama Kabupaten Barito Timur dengan ibu kota Tamiang Layang.

A. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Barito Timur

Gambaran umum kondisi Kabupaten Barito Timur terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Barito Timur oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Barito Timur yang dilihat dari keempat aspek tersebut.



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang. Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Timur memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi Kota Transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur berada di bagian paling timur yang berdekatan dengan Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak dan posisi demikian sehingga arah perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan.

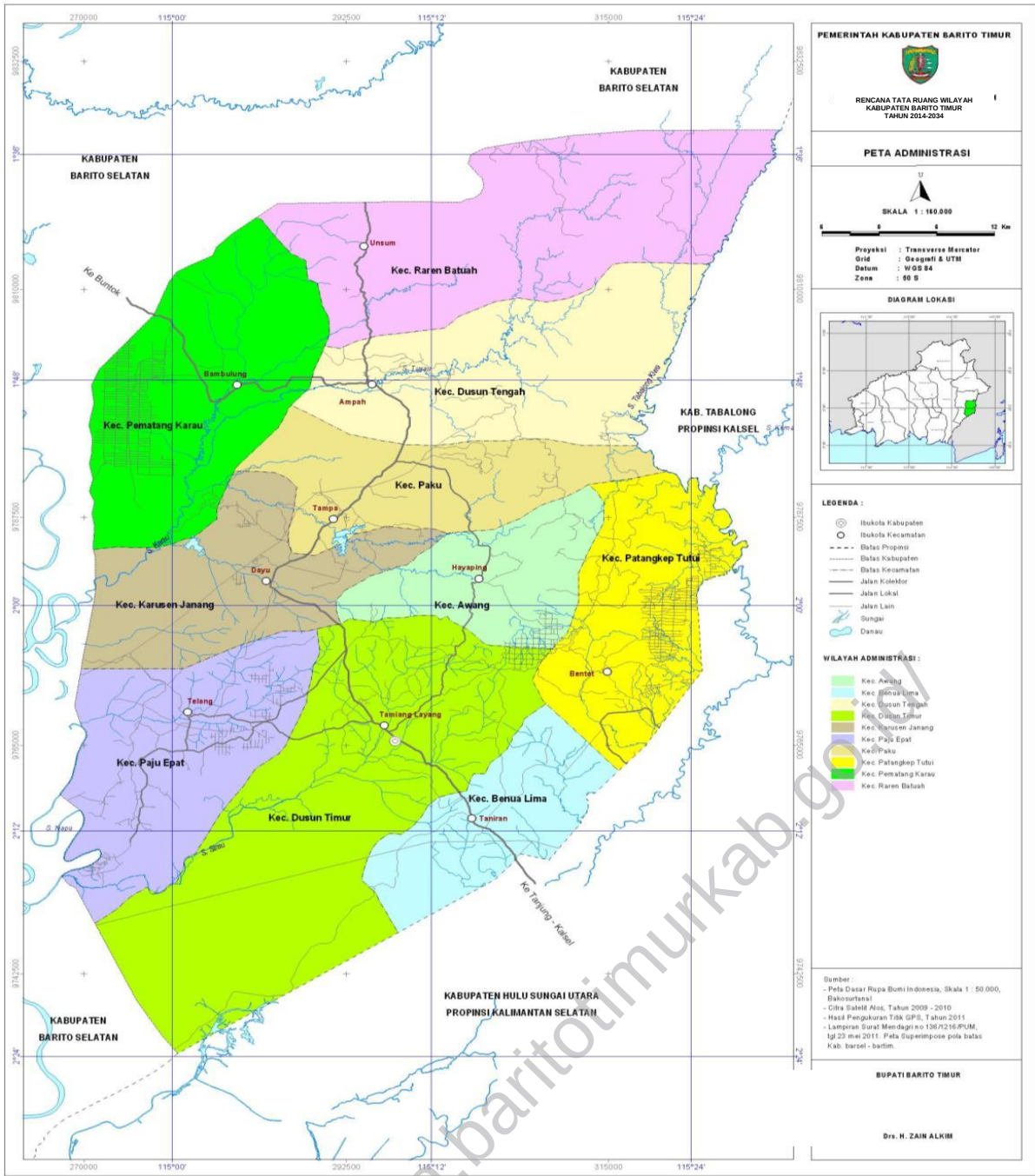
Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 3 tiga kelurahan, 101 desa termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).

Wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km² (atau 2,50 % dari luas Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 153.564 Km²), menduduki urutan ke-12 (dua belas) terluas dari 14 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak sekitar 418 Km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya).

Berikut pada tabel disajikan luas wilayah Kabupaten Barito Timur menurut kecamatan.



Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur Menurut Kecamatan
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
1.	Benua Lima	Pasar Panas	258	6,73
2.	Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70	22,63
3.	Paju Epat	Telang	664,30	17,33
4.	Awang	Hayaping	203	5,29
5.	Patangkep Tutui	Bentot	255	6,65
6.	Dusun Tengah	Ampah	371	9,68
7.	Raren Batuah	Unsum	186	4,85
8.	Paku	Tampa	272	7,09
9.	Karusen Janang	Dayu	178	4,64
10.	Pematang Karau	Bambulung	579	15,10
Barito Timur			3.834	100,00

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Paju Epat merupakan Kecamatan terluas, masing-masing 867,70 km² dan 664,30 km² atau luas kedua kecamatan tersebut mencapai 39,96% dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur, sedangkan Kecamatan Karusen Janang merupakan kecamatan yang paling kecil, yaitu 178 km².

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Timur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

No.	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Benua Lima	6	1	7
2.	Dusun Timur	16	1	17
3.	Paju Epat	9	0	9
4.	Awang	11	0	11
5.	Patangkep Tutui	11	0	11
6.	Dusun Tengah	7	1	8
7.	Raren Batuah	9	0	9
8.	Paku	12	0	12
9.	Karusen Janang	7	0	7
10.	Pematang Karau	13	0	13
Total		101	3	104

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang, secara geografis



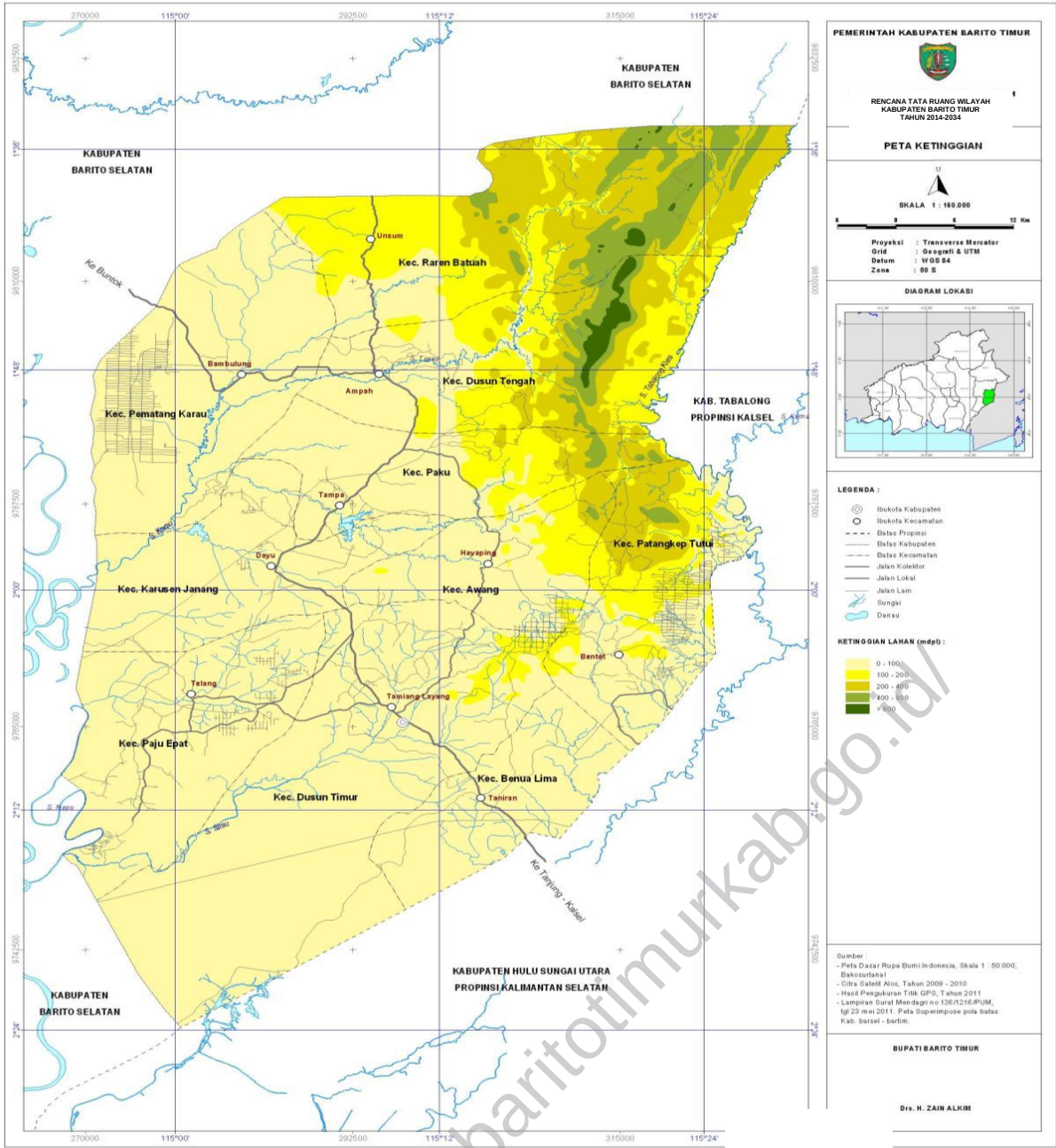
Kabupaten Barito Timur terletak di posisi geografis 1° 38' 38,1" Lintang Selatan - 2° 23' 34,2" Lintang Selatan dan 114° 56' 15" - 115° 26' 31,3" Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km².

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50-100m diatas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Pada umumnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0 - 2%, 2 - 15% dan 15 - 40 %. Wilayah dengan kemiringan 0 - 2% lebih banyak dijumpai di sisi barat, sedangkan wilayah dengan kemiringan 2 - 15% dan 15 - 40% masing-masing dapat dijumpai di sisi tengah yang membentang dari utara hingga selatan. Sementara itu, untuk wilayah dengan kemiringan di atas 40% dapat dijumpai di bagian sisi utara sebelah timur. Untuk lebih jelasnya mengenai topografi di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada Gambar berikut.

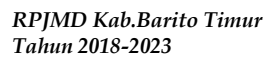


Gambar 2.2.
Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2024

Sedangkan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

d. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Barito Timur cukup banyak, antara lain: Sungai Karau, Sungai Tuyau, Sungai Sirau, dan Sungai Tabalong Kiwa, dan beberapa sungai kecil serta anak-anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut mengalir dari utara ke selatan dengan



pola aliran sungai adalah dendritik, yaitu pola aliran yang berkembang bebas dalam segala arah dan mempunyai banyak cabang. Saat ini sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ke berbagai kawasan, sebagai sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari penduduk untuk mandi, cuci, untuk kegiatan pertanian maupun lainnya. Kabupaten Barito Timur memiliki 4 (empat) hulu sungai, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: (1) Hulu Sungai Karau terletak di Kecamatan Dusun Tengah di Desa Baruyan, Desa Unsum, Desa Lenggang dan Desa Batuah; (2) Hulu Sungai Paku terletak di Kecamatan Dusun Tengah Desa Kalamus dan Desa Tamiang; (3) Hulu Sungai Sirau terletak di Kecamatan Dusun Timur Desa Pulau Padang dan Desa Jaar dan (4) Hulu Sungai Dayu di Kecamatan Dusun Timur Desa Dayu.

Dari ke empat hulu sungai tersebut mengalir dari arah utara ke selatan yang melalui wilayah Kabupaten Barito Timur yang merupakan saluran utama dalam sistem drainase sebagai saluran pembuangan akhir, baik sisa pembuangan dari limpasan air hujan maupun buangan dari rumah tangga.

e. **Kondisi Geologi**

Secara geologis, susunan atau struktur bebatuan di Kabupaten Barito Timur dibentuk oleh formasi geologi sebagai berikut, *Qh/Qvt = Swam Deposit Land, Clay, Ralelygravel, Mut And Decayet Wagelation Brown*, yang terbentuk oleh batuan vulkanik tak terpisahkan, berupa aliran lahar, konglomerat dan endapan kalsium lainnya, bersusunan antara andesit sampai *basalt*.

Berdasarkan informasi geologi, formasi geologi yang terbentuk di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis formasi, yaitu; Batuan Vulkanik, Formasi Alluvium, Formasi Berai, Formasi Dahor, Formasi Mortalat, Formasi Tanjung, Formasi Warukin dan Granit Kapur.

f. **Klimatologi**

Kondisi iklim di Kabupaten Barito Timur dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan



Oktober arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Sebagai daerah yang beriklim tropis wilayah Kabupaten Barito Timur rata-rata mendapat penyinaran matahari sebesar 51,48 sepanjang tahun, rata-rata suhu udaranya sepanjang 2017 relative sejuk, yaitu 27,36⁰, sedangkan rata-rata curah hujannya relative tinggi yaitu mencapai 232,06 mm per bulan.

Tabel 2.3.
Statistik Klimatologi
Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

Bulan	Rata-rata Suhu Udara	Rata-rata Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari	Curah Hujan
Januari	26,64	87,59	1.010,8	17	48,79	311,40
Februari	27,03	85,48	1.006,7	7	43,70	221,70
Maret	26,44	86,98	1.011,3	12	43,15	410,70
April	26,98	86,61	1.011,7	12	53,33	224,70
Mei	27,55	86,80	1.011,1	12	56,90	240,90
Juni	27,17	86,80	1.011,9	10	56,77	187,30
Juli	26,84	86,16	1.012,1	10	50,77	133,10
Agustus	26,84	87,00	1.011,4	8	44,29	209,60
September	27,67	83,57	1.012,1	10	57,87	84,80
Oktober	27,45	84,32	1.010,4	15	61,90	128,30
November	27,17	86,03	1.009,1	14	49,20	294,40
Desember	27,00	85,58	1.010,1	25	51,10	337,80

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

g. Penggunaan Lahan

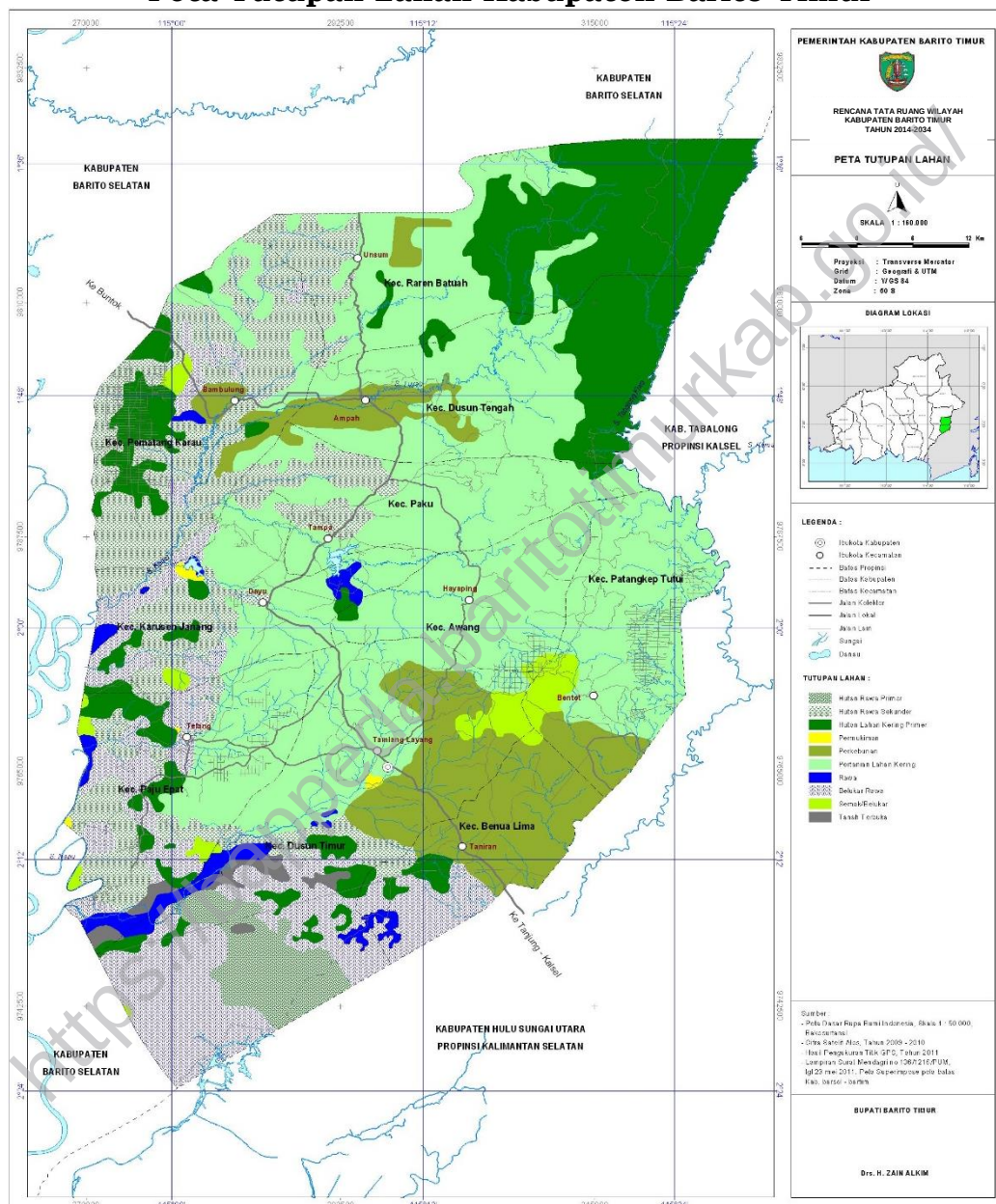
Penggunaan lahan atau tutupan lahan di Kabupaten Barito Timur terbagi ke dalam dua tipe lahan, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan basah terdiri dari belukar rawa, hutan rawa primer, rawa dan tubuh air, sisanya merupakan lahan kering. Dari luasan yang ada, lahan kering merupakan lahan yang memiliki lahan paling luas yaitu 325.485 Ha (84,89%), dan lahan basah 57.915 Ha (15,11%). Dari tutupan lahan (*landcoverage*) hasil analisis citra, di Kabupaten Barito Timur sebagian besar didominasi oleh semak/belukar yaitu 148.113 Ha (38,63%), diikuti hutan rawa sekunder 59.627 Ha (15,55%), dan hutan



lahan kering primer 55,467 Ha (14,47%). Pemanfaatan lahan yang paling kecil adalah permukiman 273 Ha dan tubuh air 268 Ha.

Di Kabupaten Barito Timur, proporsi lahan-lahan diluar kawasan hutan yang penguasaannya sudah di administrasikan masih sangat kecil. Proporsi lahan di luar kawasan hutan meliputi lahan-lahan di perkotaan, lahan transmigrasi, dan lahan perkebunan besar. Lahan-lahan tersebut dan lahan yang belum diadministrasikan sudah berupa pemukiman dan pertanian intensif yang berada di perdesaan dengan tingkat penguasaannya sangat tinggi. Sedangkan pada lahan-lahan pertanian yang penggarapannya tidak intensif, seperti ladang berpindah dan hutan rakyat, tingkat penguasaannya tergolong rendah.

Gambar 2.4.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Potensi Sumber Daya Alam Per Kecamatan

Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari potensi pertambangan, potensi pariwisata, potensi hutan, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, dan potensi perikanan. Adapun jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Timur berdasarkan data AMDAL Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 terdiri dari pertambangan batubara dengan luas kawasan 9.879 Ha tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah seluas 1.000 Ha; Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat seluas 2.213 Ha; Kecamatan Karusen Janang, Paku, Awang seluas 1.000 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui seluas 2.592 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui, Awang seluas 3.074 Ha. Bahan galian C seperti pasir kuarsa sebesar 8.447 Ha di Kecamatan Paju Epat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 bahwa Kawasan lindung berupa kawasan arboretum di Kecamatan Pematang Karau dengan luas 235,75 Hektar. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas 65.610,43 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Raren Batuah. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 39.697,01 Hektar terdapat di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah. Kawasan hutan produksi yang dapat di konversi dengan luas 32.405,55 Hektar terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Dusun Timur, Paku, Pematang Karau, Karusen Janang, Awang, Patangkep Tutui, dan Paju Epat. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di seluruh kecamatan dengan luas 24.026,93 Hektar. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Barito Timur dengan luas 29.530,82 Hektar.

Kawasan peruntukan industri dengan luas 1.266,33 Hektar terdiri dari kawasan industri di Kecamatan Pematang Karau dan kawasan industri di Kecamatan Paju Epat. Kawasan transmigrasi dengan luas 735,02 Hektar tersebar di masing-masing kecamatan kawasan permukiman perdesaan.



Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari wisata alam, wisata alam taman anggrek dan rencana penangkaran satwa di Murutuwu Kecamatan Paju Epat, wisata budaya, dan wisata alam buatan yang semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Kawasan peruntukan pertanian dengan luas 168.119,15 Hektar terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas 14.683,24 Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa padi sawah dan padi ladang dengan luas 2.383,71 Hektar tersebar di Kecamatan Patangkep Tutui, Awang, Kecamatan Paku dan Kecamatan Dusun Tengah. Kawasan pertanian lahan kering berupa jagung, ubi jalar, ubi kayu dengan luas 4.355,50 Hektar tersebar di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah.

Kawasan peruntukan perkebunan seluas 168.119,15 Hektar terdiri atas kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 86.635,39 Hektar sentra tanaman karet terdapat di seluruh kecamatan; sentra tanaman kelapa sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Patangkep Tutui, Paju Epat, Karusen Janang, Paku; sentra tanaman kelapa terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku; sentra tanaman kakao terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Tengah; sentra tanaman lada terdapat di Kecamatan Pematang Karau dan Dusun Tengah; sentra tanaman kemiri terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku. Kawasan perkebunan besar dengan luas 60.061,31 Hektar terdiri atas perkebunan besar swasta dengan komoditi karet terdapat di Kecamatan Awang, Karusen Janang. Perkebunan besar swasta dengan komoditi sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Paku, Karusen Janang, Paju Epat, Awang, Patangkep Tutui.

Potensi pertanian terdiri dari padi sawah dengan luas panen 6.792 ha dan total produksi 27.426 ton dengan rata-rata produktivitas 40,38 ton/Ha. Sedangkan komoditi padi ladang dengan luas panen 2.095 Ha dan total produksi sebesar 5.295 ton dengan rata-rata produktivitas 25,27 ton/ ha. Potensi pertanian ini dapat dikembangkan



di Kecamatan Paku dan Dusun Tengah, sehingga pengembangan potensi di kedua kecamatan tersebut diarahkan sebagai Kawasan Agropolitan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.
Luas dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Benua Lima	130	525	40,38	160	404	25,27
2	Dusun Timur	165	666	40,38	580	1.466	25,27
3	Paju Epat	-	-	-	117	296	25,27
4	Awang	298	1.203	40,38	30	76	25,27
5	P. Tutui	197	796	40,38	462	1.167	25,27
6	Dusun Tengah	2.644	10.676	40,38	256	647	25,27
7	Raren Batuah	172	695	40,38	239	604	25,27
8	Paku	1.375	5.552	40,38	155	392	25,27
9	Karusen Janang	180	727	40,38	85	215	25,27
10	P. Karau	1.631	6.586	40,38	11	28	25,27
Total		6.792	27.426	40,38	2.095	5.295	25,27

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

Potensi palawija di Kabupaten Barito Timur terdiri dari jagung dengan luas panen sebesar 8 Ha produksi jagung sebesar 20 ton, ubi kayu dengan luas panen sebesar 44 Ha produksi ubi kayu sebesar 674 ton, dan ubi jalar dengan luas panen sebesar 9 Ha produksi ubi jalar sebesar 85 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5.
Luas dan Produksi Palawija di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

No	Kecamatan	Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Benua Lima	-	-	7	107	-	-
2	Dusun Timur	-	-	2	31	2	19
3	Paju Epat	-	-	22	337	2	18
4	Awang	4	10	2	30	-	-
5	Patangkep Tutui	-	-	4	62	2	19
6	Dusun Tengah	4	10	1	15	2	19
7	Raren Batuah	-	-	5	77	-	-
8	Paku	-	-	1	15	-	-
9	Karusen Janang	-	-	-	-	-	-
10	Pematang Karau	-	-	-	-	1	9
Total		8	20	44	674	9	85

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018



Potensi perkebunan di Kabupaten Barito Timur terdiri dari kelapa, kopi, karet, kelapa sawit, kakao, dan lada. Dengan komoditi perkebunan utama adalah tanaman karet.

Potensi Peternakan yang telah ada di Kabupaten Barito Timur antara lain ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Populasi ternak besar (sapi potong dan kerbau) pada tahun 2017 berjumlah 2.524 ekor yang didominasi jenis sapi potong sebesar 1.521 ekor, sedangkan untuk ternak kerbau sebanyak 1.003 ekor. Populasi ternak kecil (kambingdan babi) pada tahun yang sama berjumlah 37.777 ekor yang didominasi ternak babi sebanyak 36.967 ekor, dan sisanya berupa ternak kambing sebanyak 810 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6.
Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2017

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi
1	Benua Lima	92	-	25	1.772
2	Dusun Timur	283	187	11	14.016
3	Paju Epat	161	796	58	1.691
4	Awang	15	-	-	3.729
5	Patangkep Tutui	51	-	10	1.135
6	Dusun Tengah	256	9	150	7.804
7	Raren Batuah	289	11	162	486
8	Paku	108	-	213	4.127
9	Karusen Janang	57	-	6	1.709
10	Pematang Karau	209	-	957	498
Total		1.521	1.003	810	36.967

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Produksi perikanan di Kabupaten Barito Timur berasal dari hasil perikanan darat yang dibedakan menjadi perikanan umum dan budidaya. Tahun 2016 produksi perikanan budidaya secara keseluruhan produksinya mengalami peningkatan sebesar 4,46% dari tahun sebelumnya. Untuk jenis perikanan darat dari perairan umum total produksinya mencapai 1.180,80 ton, dimana sebagian besar produksinya dihasilkan di Kecamatan Pematang Karau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.7.
Produksi Budidaya Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

No	Kecamatan	Budidaya Air Tawar (Ton)		Jumlah
		Kolam	Keramba	
1	Benua Lima	2,10	0,00	2,10
2	Dusun Timur	126,00	128,00	254,00
3	Paju Epat	22,00	185,00	207,00
4	Awang	14,00	0,00	14,00
5	Patangkep Tutui	7,00	0,00	7,00
6	Dusun Tengah	140,00	0,00	140,00
7	Raren Batuah	100,00	0,00	1.000,00
8	Paku	37,00	39,00	76,00
9	Karusen Janang	43,00	14,00	57,00
10	Pematang Karau	145,00	266,30	411,30
Total		636,10	580,70	623,30

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

Pengembangan wilayah Kabupaten Barito Timur merupakan tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi wilayah yang ada. Dan tujuannya adalah untuk pemerataan pertumbuhan di daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan pengembangan di daerah adalah dengan cara meningkatkan, mengembangkan dan mempromosikan suatu produk sehingga masyarakat dapat merasa bangga. Berikut gambaran umum dan potensi per kecamatan disajikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.8.
Gambaran Umum dan Potensi per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Potensi Sektor-Sub Sektor (berdasarkan nilai produksi, luas lahan, dan pengembangan eksisting)
Benua Lima	Taniran	258	6.816	Ayam kampung
Dusun Timur	Tamiang Layang	867,7	28.982	Padi Ladang, kacang panjang, terong, timun, bayam, duku, cempedak, sapi potong, babi, ayam kampung, itik
Paju Epat	Telang	664,3	4.835	Kelapa sawit, wisata, ubi kayu, nenas, rambutan, mangga, kerbau
Awang	Hayaping	203	6.104	Karet, jagung, kedelai
Patangkep Tutui	Bentot	255	9.165	Karet, ayam broiler, air minum
Dusun Tengah	Ampah Kota	371	25.914	Wisata, karet, padi sawah, jagung, kacang tanah, kacang panjang, durian, coklat, sapi potong, kolam ikan



Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Potensi Sektor-Sub Sektor (berdasarkan nilai produksi, luas lahan, dan pengembangan eksisting)
Raren Batuah	Unsum	186	8.962	Sapi potong
Paku	Tampa	272	8.627	Pisang, kambing
Karusen Janang	Dayu	178	5.354	Terdapat potensi namun belum spesifik
Pematang Karau	Bambulung	579	12.287	Karet, rotan, kelapa sawit, kelapa, kopi, keramba ikan

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.9.
Potensi Lainnya per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur

Kecamatan	Perusahaan Perdagangan Besar	IKM	Koperasi	Penunjang Wisata (Hotel dan Akomodasi Lainnya)	Persentase Jalan yang telah Aspal
Benua Lima	-	2.885	5	-	34,8
Dusun Timur	5	4.863	28	398	58,9
Paju Epat	1	870	7	-	48,3
Awang	-	887	10	-	22,7
Patangkep Tutui	1	949	9	-	38,9
Dusun Tengah	-	878	28	292	34,2
Raren Batuah	1	692	12	-	40,9
Paku	-	881	11	-	22,9
Karusen Janang	1	1.226	7	-	41,9
Pematang Karau	1	1.197	12	-	31,3

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang perlu didorong dan dikembangkan adalah:

- Kawasan Agropolitan Bambulung

Penetapan kawasan Agropolitan di Bambulung Kecamatan Pematang Karau dikarenakan kawasan ini merupakan pemasok utama tanaman padi di Kabupaten Barito Timur. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Kawasan Strategis Agropolitan, penyusunan DED prasarana kawasan yang



dikembangkan secara terpadu kawasan agropolitan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

- **Kawasan Perkotaan Tamiang Layang dan Perkotaan Ampah**

Tamiang Layang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Ampah sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perlu ditetapkan sebagai kawasan strategis perkotaan sebagai upaya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan kedepan. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan dan RTBL dan sub kawasan yang bernilai strategis serta penyusunan masterplan perkotaan.

- **Kawasan Minapolitan**

Kawasan minapolitan ini merupakan kawasan pengembangan budidaya perikanan yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati Tahun 2010 yang berada di Desa Tampa Kecamatan Paku.

- **Kawasan Tambak**

Kawasan perikanan milik masyarakat yang berada di wilayah Barito Timur perlu didorong pengembangannya untuk mendukung dan menunjang sektor unggulan kawasan.

c. **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Kawasan yang menuntut prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Kawasan rawan bencana alam; dan



- Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dan dilestarikan adalah Kawasan Konservasi Taman Anggrek di Desa Siong Kecamatan Paju Epat.

d. Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

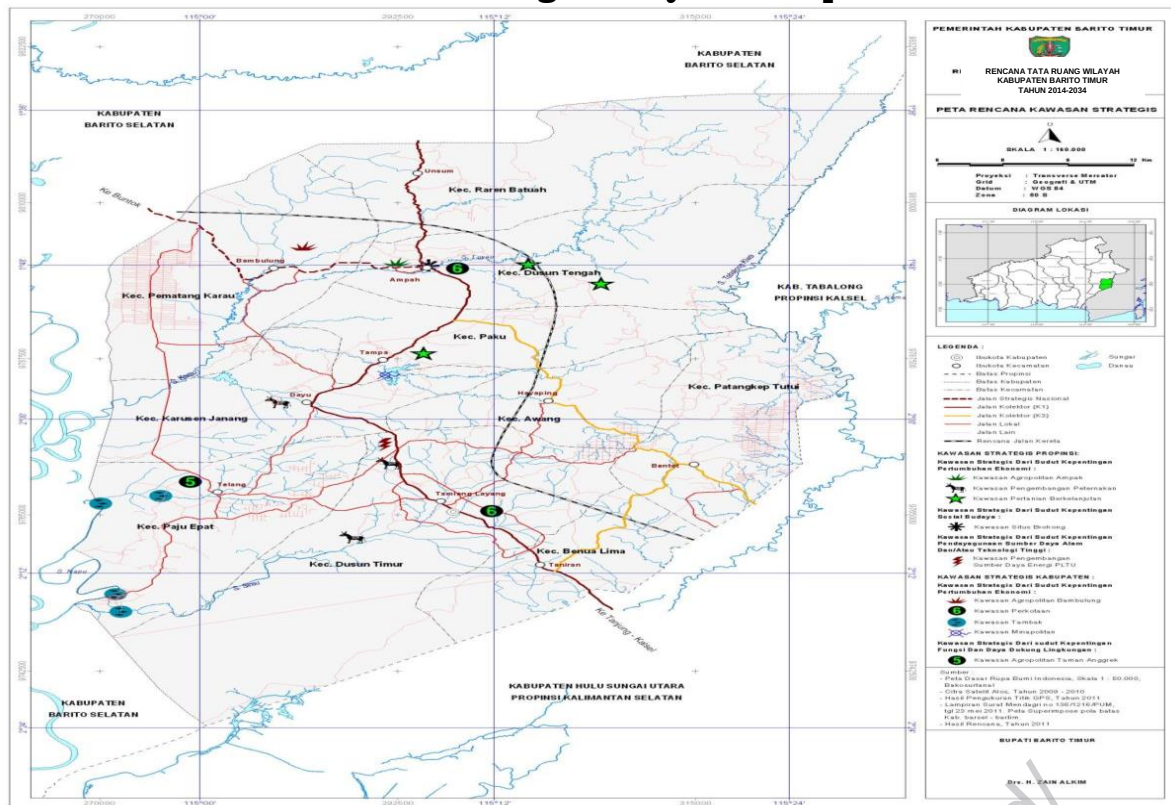
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi ini adalah kawasan strategis untuk pengembangan sumber daya energi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Karau di desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Desa Tampulangit, Juru Banu, Telang, Balawa, Telang Baru, dan Kali Napu Kecamatan Paju Epat; Desa Harara, Matarah, Gumpa Kecamatan Dusun Timur; Desa Wuram, Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang; Desa Apar Batu, Janah Jari, Gunung Karasik Kecamatan Awang; Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah; Desa Tarinsing Kecamatan Paku; Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima. Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya (stock pile Batu Bara) terdapat di Desa Lalap.

Pengembangan kawasan strategis ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dan memenuhi kebutuhan energi listrik yang diperlukan, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk kepentingan lainnya.

Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta pengawasannya, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.5.
Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

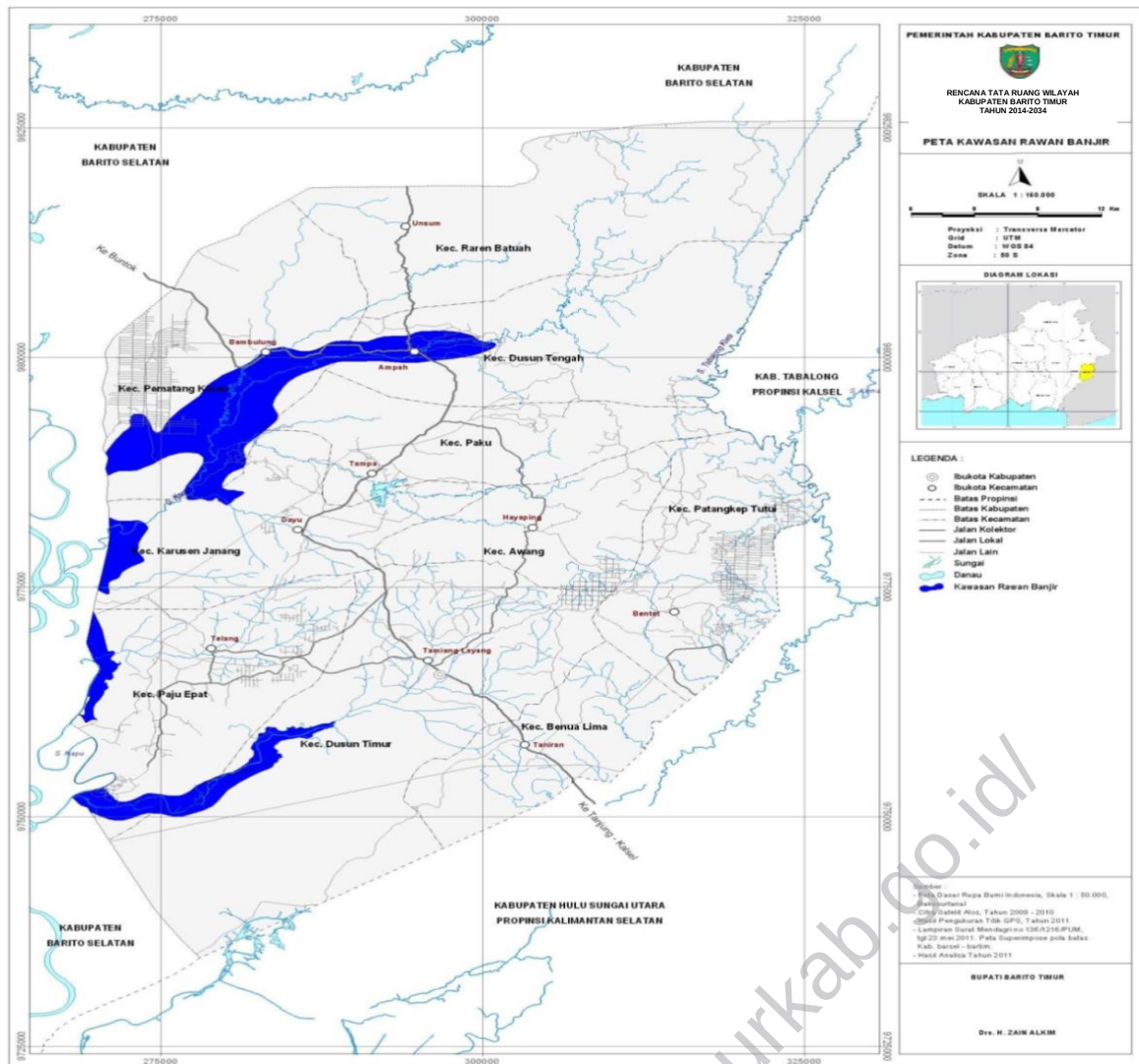
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan maupun puting beliung. Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang rawan terkena bencana alam banjir dan tanah longsor.

Kabupaten Barito Timur mempunyai kawasan rawan bencana yang beragam dan tersebar secara luas. Seluruh kawasan rawan bencana longsor, maupun banjir harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana, hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan masyarakat, disinsentif dapat dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Barito Timur umumnya berupa tanah longsor (erosi) dan banjir.



Gambar 2.6.
Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur



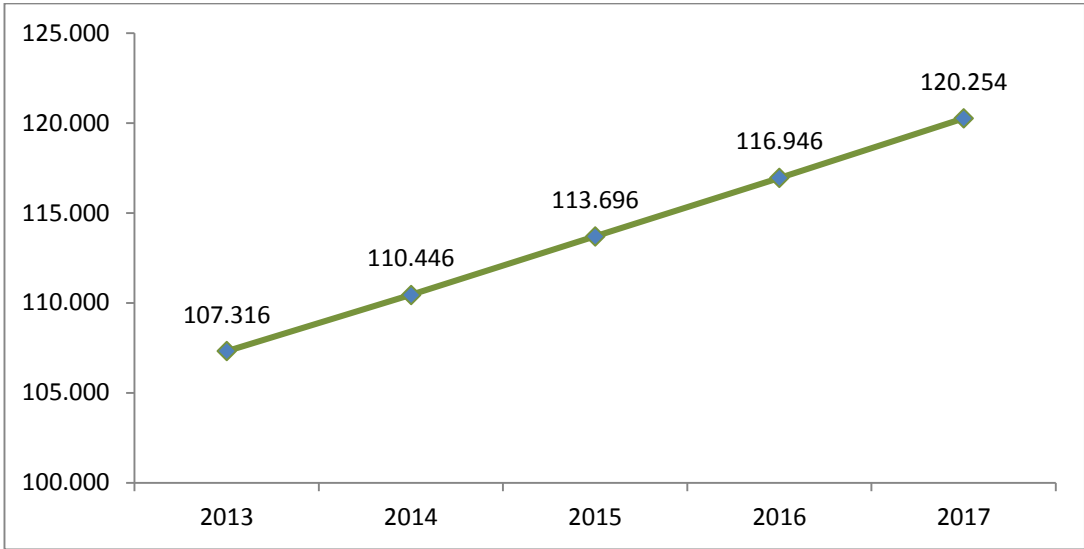
Sumber : RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

2.1.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur cenderung bertambah, pada tahun 2013 jumlah penduduk 107.316 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi 120.254 jiwa, bertambah 12.938 jiwa dalam lima tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.



Gambar 2.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

Dari data penduduk Kabupaten Kabupaten Barito Timur tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Kabupaten Barito Timursebanyak 120.254 jiwa dengan cakupan wilayah seluas 3.834 km2. Sedangkan kepadatan penduduk relatif rendah (kurang dari 100 jiwa/km2) yaitu sebanyak 31 jiwa yang menempati 1 km2. Kecamatan Dusun Timur merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 30.394 jiwa. Namun wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Dusun Tengah dengan kepadatan penduduk 71 jiwa per 1 km².

Tabel 2.10.
Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan,
Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Area	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Benua Lima	258,00	6.928	26,85
2	Dusun Timur	867,70	30.394	35,03
3	Paju Epat	664,30	4.976	7,49
4	Awang	103,00	6.175	59,95
5	Patangkep Tutul	155,00	9.503	61,31
6	Dusun Tengah	371,00	26.433	71,25
7	Raren Batuah	186,00	9.182	49,37
8	Paku	272,00	8.674	31,89
9	Karusen Janang	178,00	5.558	31,22
10	Pematang Karau	579,00	12.431	21,47
	Total	3.834,00	120.254	31,37

Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018



Berdasarkan jenis kelamin, komposisi perbandingan penduduk Barito Timur pada tahun 2017 yaitu 51,30 persen adalah laki-laki dan 48,70% adalah perempuan. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Barito Timur tahun 2017 sebesar 106 yang artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki Kabupaten Barito Timur berjumlah 61.692 jiwa dan penduduk perempuan dengan jumlah 58.292 jiwa.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten Barito Timur, Tahun 2017

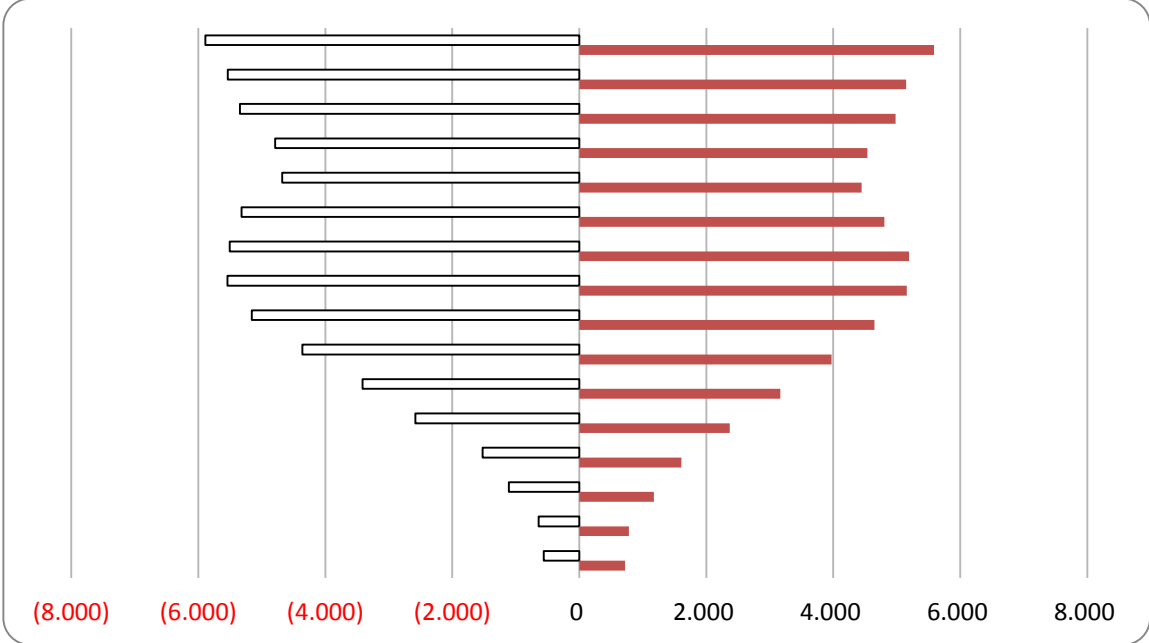
No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	
1	Benua Lima	3.657	3.271	6.928	112
2	Dusun Timur	15.422	14.972	30.394	103
3	Paju Epat	2.615	2.361	4.976	111
4	Awang	3.159	3.016	6.175	105
5	Patangkep Tutul	5.040	4.463	9.503	113
6	Dusun Tengah	13.433	13.000	26.433	103
7	Raren Batuah	4.837	4.345	9.182	111
8	Paku	4.490	4.184	8.674	107
9	Karusen Janang	1.869	2.689	5.558	107
10	Pematang Karau	6.440	5.991	12.431	107
Total		61.692	58.292	120.254	106

Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

Secara demografis komposisi penduduk Barito Timur berdasarkan kelompok umur tahun 2017 adalah kelompok umur 0-14 tahun sebesar 27,42 %, kelompok umur 15-59 (usia produktif) sebesar 66,08 %, dan kelompok umur 60 tahun ke atas (kelompok lanjut usia) sebesar 6,51 %.



Gambar 2.8.
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Serta Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2017



Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

Secara lengkap indikator kependudukan Barito Timur tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Indikator Kependudukan Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 – 2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Penduduk (Jiwa)	110.446	113.696	116.946	120.254
Laki-laki	56.835	58.539	60.246	61.692
Perempuan	53.611	55.157	56.700	58.292
Jumlah Rumah Tangga (Ruta)	29.026	29.900	30.755	31.625
Rata-rata ART (Jiwa/Ruta)	3,80	3,80	3,80	3,80
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	28,81	29,65	30,50	31,37
Sex Ratio (%)	106	106	106	106

Sumber : Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

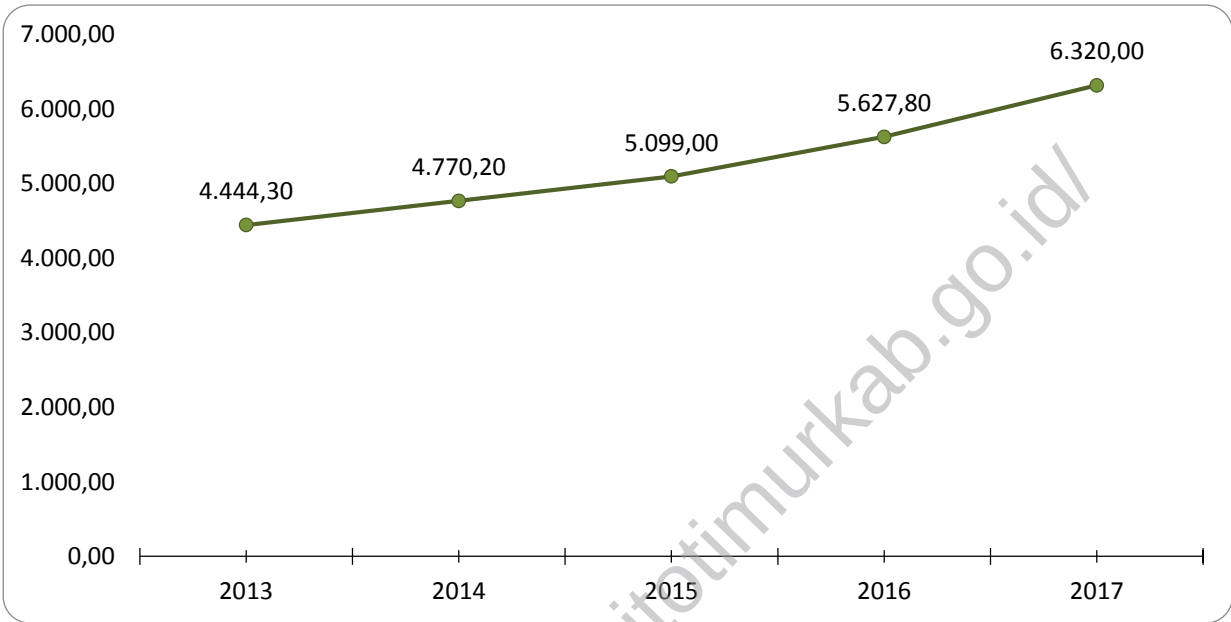
Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Salah satu indikator penting



untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penyajiannya PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB Kabupaten Barito Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, PDRB atas dasar harga berlaku nilainya telah mencapai 4.444,30 Milyar rupiah. Pada tahun 2016 sebesar 5.627,80 Milyar rupiah dan di tahun 2017 naik sebesar 12,30 persen menjadi 6.320,00 milyar rupiah. Secara lengkap PDRB ADHB tahun 2013-2017 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.9.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur, 2013-2017 (Milyar Rupiah)



Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

Distribusi PDRB Kabupaten Barito Timur sebagian besar masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kedua sektor tersebut walaupun mendominasi komposisi distribusi PDRB terhadap lapangan usaha, namun angkanya menurun dalam lima tahun terakhir. Sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi perlahan mulai meningkat. Pada tahun 2017 industri pengolahan meningkat sebesar 7,34 persen, sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 7,06 persen.



Tabel 2.13.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Barito Timur (Persen) Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,97	19,74	19,81	19,03	18,56
B	Pertambangan dan Penggalian	45,04	42,93	39,17	37,40	37,02
C	Industri Pengolahan	5,54	6,04	6,60	7,06	7,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06
F	Konstruksi	5,94	6,53	7,35	7,90	7,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,33	5,87	6,49	6,83	6,95
H	Transportasi dan Pergudangan	3,62	3,96	4,33	4,59	4,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,10	1,19	1,31	1,40	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	0,97	1,00	1,08	114,00	1,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	1,11	1,18	1,23	1,23
L	Real Estate	2,02	2,13	2,22	2,29	2,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,49	3,52	3,77	3,92	3,94
P	Jasa Pendidikan	3,98	3,95	4,44	4,82	4,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,37	1,53	1,64	1,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,49	0,51	0,57	0,58	0,61
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur terus menunjukkan tren yang positif, khususnya pada sektor pertanian dalam arti luas, bidang jasa hingga perdagangan. Dengan kekayaan alam yang ada, Kabupaten Barito Timur diyakini dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2017, sektor yang menunjukkan persentase tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 9,58 persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,35 persen, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9 persen. Secara



lebih rinci laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2017berdasar lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Barito Timur, Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,83	1,35	6,03	3,91	6,54
B	Pertambangan dan Penggalian	8,63	5,43	1,1	3,44	4,31
C	Industri Pengolahan	5,65	8,38	9,69	9,75	7,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,46	8,94	16,89	6,38	9,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,07	5,64	9,84	8,74	4,84
F	Konstruksi	11,98	10,08	12,37	8,86	5,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	793	10,81	8,94	9
H	Transportasi dan Pergudangan	7,48	8,33	8,21	9,46	7,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,14	8,87	9,57	9,08	7,98
J	Informasi dan Komunikasi	9,7	9,54	11,96	9,83	9,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,65	7,86	10,46	10,12	7,83
L	Real Estate	4,71	4,69	4,95	4,44	8,74
M,N	Jasa Perusahaan	8,01	4,48	5,89	5,43	8,2
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,91	2,9	8,53	6,69	6,18
P	Jasa Pendidikan	2,94	4,36	9,98	9,95	8,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,75	4,98	10,98	8,98	7,79
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,19	5,83	8,89	7,91	8,7
Produk Domestik Regional Bruto		6,73	5,25	5,16	5,5	5,98

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Perekonomian Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2013 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur mencapai 6,73 persen. Angka ini menurun di tahun berikutnya menjadi 5,25 persen di tahun 2014. Namun perlahan angka ini meningkat hingga di tahun 2017 sebesar 5,98 persen.

Apabila perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Timur diikuti dengan penambahan jumlah penduduk maka akan berdampak pada PDRB perkapita. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Barito Timur berdasarkan harga berlaku mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Kabupaten Barito Timur naik sebesar 5,51 persen



menjadi Rp 41,41 juta rupiah, dan meningkat sebesar 7,66 persen menjadi Rp 48,45 juta rupiah pada tahun 2016. Untuk harga konstan tahun 2013 tumbuh sebesar 3,49 persen menjadi Rp. 35,99 juta, tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 2,57 persen menjadi Rp. 38,57 juta rupiah.

Tabel 2.15.
PDRB Perkapita Barito Timur Tahun 2013-2016
(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita			
	ADHB	% Kenaikan	ADHK	% Kenaikan
2013	41,4	5,51	36,0	3,49
2014	43,2	4,29	36,8	2,26
2015	44,8	3,84	37,6	2,15
2016	48,1	7,30	38,6	2,57
2017	52,6	9,21	39,7	3,07

Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Barito Timur yang tercermin pada pendidikan, kesehatan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

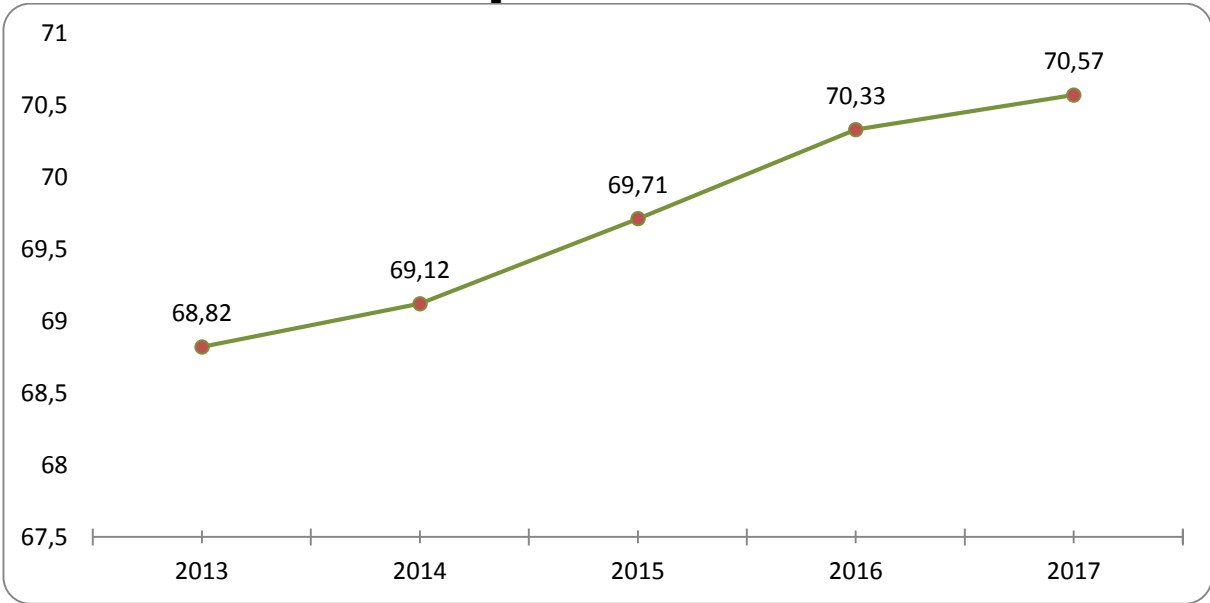
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusiaIPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Timur menunjukkan peningkatan selama periode 2013-2017, secara lengkap perkembangan IPM Barito Timur sebagai berikut:



Gambar 2.10.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Timur



Sumber: Kabupaten Barito Timur dalam Angka Tahun 2017

IPM Kabupaten Barito Timur mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 70,57 pada tahun 2017. Berikut komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia, yakni angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.16.
Unsur Pembentuk IPM Kabupaten barito Timur, 2013-2017

Unsur Pembentuk IPM	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,98	9,01	9,02	9,03	9,04
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	11,77	11,98	12,31	12,79	12,8
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,32	67,41	67,71	67,84	67,97
Paritas daya beli	Rp	10.450	10.465	10.570	10.631	10.808
IPM	%	68,82	69,12	69,71	70,33	70,57

Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

b. Pendidikan

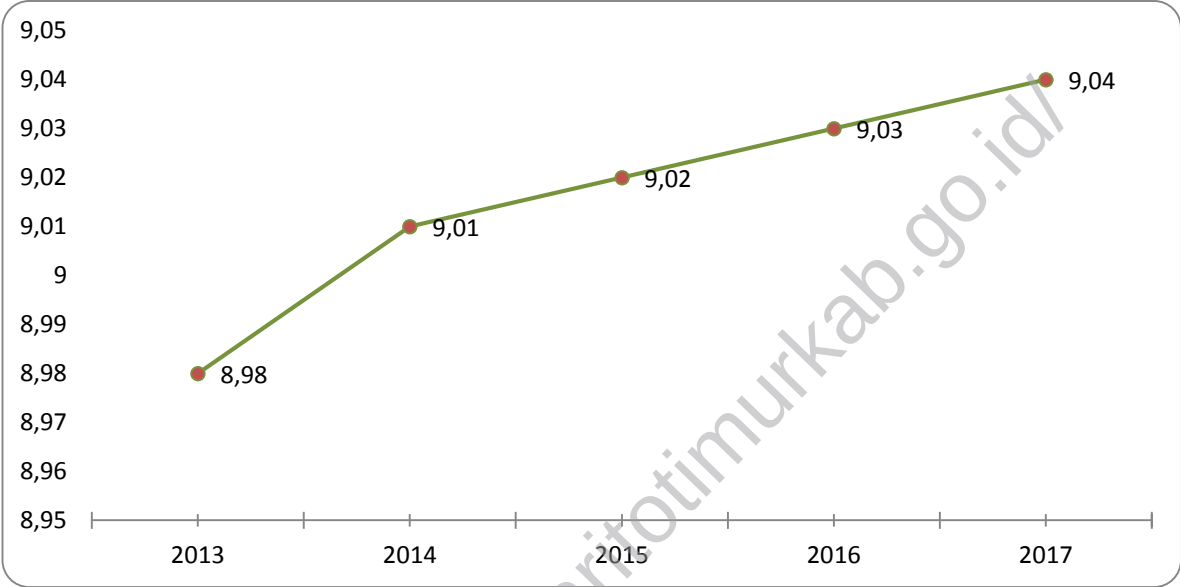
Indikator tingkat perkembangan pendidikan salah satunya dapat dievaluasi dengan melihat unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah



ditamatkan. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Timur cenderung meningkat setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 RLS Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Timur mencapai 9,04 yang meningkat dari tahun sebelumnya 9,03 di tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barito Timur rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 9,03 tahun atau tamat SMP, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.11.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017



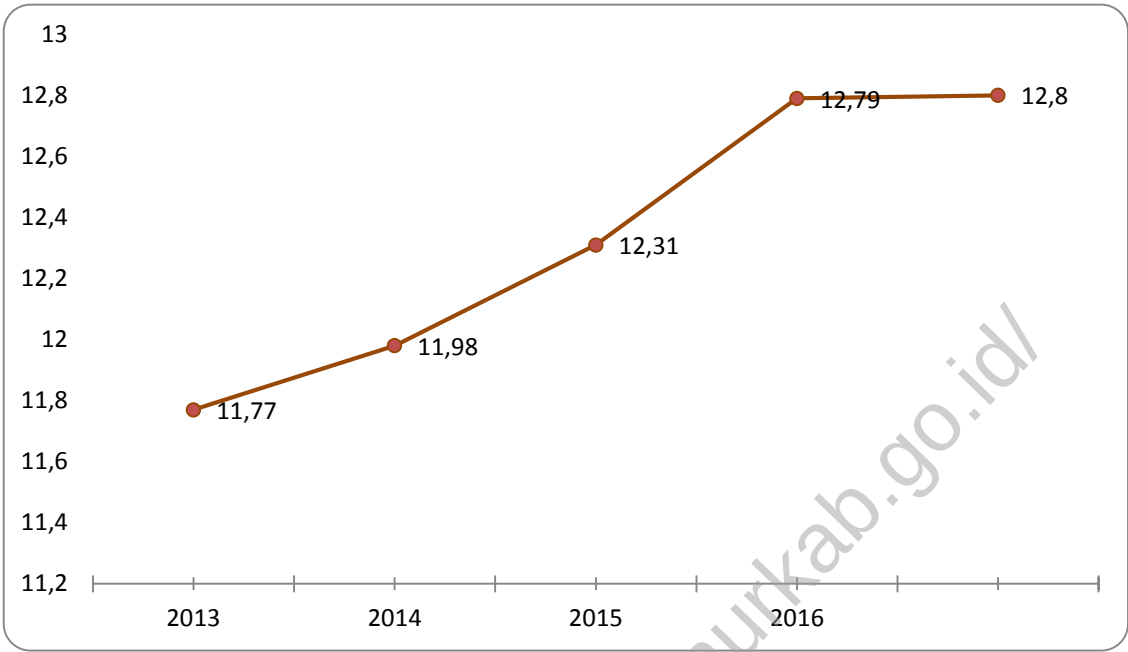
Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Harapan Lama Sekolah ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur 2017 mencapai 12,8 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 12 hingga 13 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan jenjang SMA/SMK maupun kuliah. Rincian kenaikan HLS dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.12.
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017



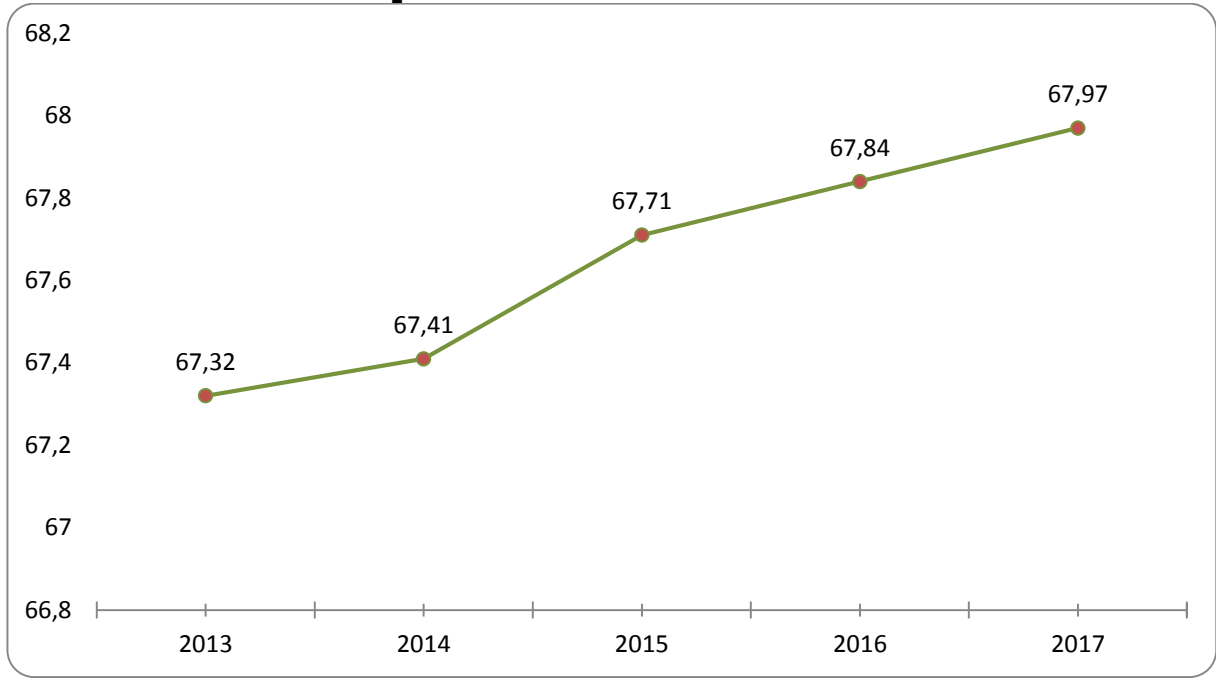
Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata lama hidup seseorang dari sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Barito Timur mengalami peningkatan. Angka harapan hidup Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017 sebesar 67,97 tahun yang berarti setiap bayi yang baru lahir hidup pada tahun 2017 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 67-68 tahun. Perkembangan nilai AHH Kabupaten Barito Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.13.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2017



Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018

Angka kematian ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian Ibu di Barito Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya yang terlihat pada tahun 2017 yang mencapai angka 50 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Sedangkan angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan perinatal. Disamping itu AKB juga berhubungan dengan pendapatan keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi di Barito Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana tahun 2017 sebanyak 6 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2016 hanya 2 kasus kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.



Tabel 2.17.
Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten barito Timur, 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	1/1000 KH	8/1000 KH	8/1000 KH	3/1000 KH	2/1000 KH	6/1000 KH
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	1/100.000 KH	338/100.000 KH	350/100.000 KH	208/100.000 KH	52/100.000 KH	50/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Barito Timur Tahun 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Aspek pelayanan umum terdiri dari dua aspek yakni fokus layanan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengolahan air didasarkan pada beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau pedesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Berdasarkan penentuan wilayah tersebut maka terdapat 20 desa/kelurahan yang merupakan area dengan tingkat resiko menengah dan tinggi yang dapat diatasi dalam jangka menengah melalui perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut dilakukan dengan program pemukiman (CLTS) dan sistem komunal karena dilakukan pada daerah padat penduduk, 20 desa/kelurahan tersebut tersebar pada 9 kecamatan yaitu:



- Kecamatan Pematang Karau (Desa Ketab dan di pinggir sungai)
- Kecamatan Dusun Tengah (Desa Rodok, Desa Ampah II, Desa Putai, Desa Sumber Garunggung)
- Kecamatan Raren Batuah (Desa Unsum, Desa Lenggang, Desa Puri, Desa Sibung)
- Kecamatan Paku (Desa Patung dan Desa Kalamus)
- Kecamatan Karusen Janang (Desa Dayu)
- Kecamatan Paju Epat (Desa Tampu Langit, Desa Juru Banu, Desa Kalinapu)
- Kecamatan Dusun Timur (Desa Haringen)
- Kecamatan Patangkep Tutui (Desa Bentot, Desa Ramania, Desa Pulau Padang)
- Kecamatan Awang (Desa Hayaping)

Rincian capaian kinerja bidang pekerjaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18.
Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	81,23	40	72,25	78,25	84,04
Rasio jaringan irigasi	%	49	12	71,5	75	85

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada fokus permukiman, indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per-satuan penduduk (di kota), rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, penduduk dengan aksesair minum, persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih menunjukan nilai capaian diatas target RPJMD pada tahun 2016 maupun 2017, sedangkan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi masih belum mencapai target dan rasio tempat ibadah per-satuan penduduk juga belum tersedia.

Distribusi tenaga listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Ampah dan Tamiang Layang mampu menjangkau



seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2016, jumlah pelanggan listrik sebanyak 31.588 pelanggan dengan jumlah listrik terjual berjumlah 28.598.334 Kwh. Pada Tahun 2017 jumlah pelanggan meningkat menjadi 33.720 pelanggan dengan jumlah listrik terjual berjumlah 29.253.120 Kwh.

Tabel 2.19.
Daya Terpasang, Produksi dan distribusi Listrik PT.PLN Rayon
Kabupaten Barito Timur, Tahun 2013-2017

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2013	1.200	31.852.792	22.275.821	44.958	6.360.969
2014	5.200	33.165.317	25.340.174	64.409	4.651.943
2015	6.600	34.146.102	31.135.106	56.105	4.007.608
2016	6.600	32.250.714	28.598.334	57.228	3.652.380
2017	6.600	32.956.071	29.253.120	66.204	3.702.951

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Pengadaan dan distribusi air minum (air bersih) di Kabupaten Barito Timur dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Timur. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah pelanggan PDAM yang cukup berarti tahun 2013 jumlah pelanggan 3.675, dan tahun 2017 meningkat menjadi 4.200 pelanggan. Walaupun terjadi kenaikan jumlah pelanggan air minum, apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Barito Timur, maka pelayanan air minum (air bersih) hanya mampu menjangkau 13,28 persen dari jumlah rumah tangga masyarakat Kabupaten Barito Timur. Selain itu tidak semua kecamatan dapat dijangkau oleh pelayanan PDAM.

Tabel 2.20.
Jumlah Pelanggan PDAM dan air yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah Air yang Disalurkan
2013	3.675	615.776
2014	3.739	695.891
2015	3.504	725.445
2016	4.049	775.482
2017	4.200	965.831

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Dusun Tengah merupakan kecamatan dengan luas kawasan perumahan kumuh terbesar dibandingkan Kecamatan



Pematang Karau dan Kecamatan Dusun Timur. Kecamatan Dusun Tengah dengan luas kawasan 14,10 Ha dan jumlah penduduk sebesar 25.916 jiwa, berada di Ampah Kota, permukiman tepian sungai dan padat penduduk. Kecamatan Dusun Timur dengan luas kawasan 11,65 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 28.982 jiwa berada di Tamiang Layang, permukiman tepian sungai dan padat penduduk. Kecamatan Pematang Karau dengan luas kawasan 9,00 Ha dan jumlah penduduk sebesar 12.287 jiwa berada di permukiman ditepian sungai dan padat penduduk. Kawasan perumahan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.21.
Perumahan Kumuh Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Luas Kawasan	Jumlah Penduduk	Lokasi
		(Ha)		
1	Kecamatan Dusun Tengah	14.10	25,916	Ampah Kota, permukiman tepian sungai dan padat penduduk
2	Kecamatan Pematang Karau	9.00	12,287	Permukiman tepian sungai dan padat penduduk
5	Kecamatan Dusun Timur	11.65	28,982	Tamiang Layang, permukiman tepian sungai dan padat penduduk
JUMLAH		34.75	67185.00	

Sumber: Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Timur Tahun 2016

Rincian capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.22.
Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	9,37	94,2	53,56	94,4	94,4
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota)	Rasio	3,66	18,34	21,34	27	28
Rasio rumah layak huni	%	60,53	53,1	87,27	94,57	94,57
Rasio permukiman layak huni	%	95	63,2	80,37	80,37	80,37
Persentase	%	67,3	18,1	23		26,7



INDIKATOR	SATUAN UKURAN	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
penduduk berakses air minum						

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

c. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman dan ketertiban masyarakat menunjukkan kemajuan, ditandai rendahnya tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, perlu dicermati kecenderungan dan realitas perkembangan kehidupan demokrasi dewasa ini, masih ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan, kesenjangan, dan distorsi dalam beberapa sendi kehidupan masyarakat, sehingga derajat kepatuhan atas berbagai norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat luas perlu lebih ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu-rambu hukum.

Salah satu sumber masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat yang berkembang di masyarakat adalah kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

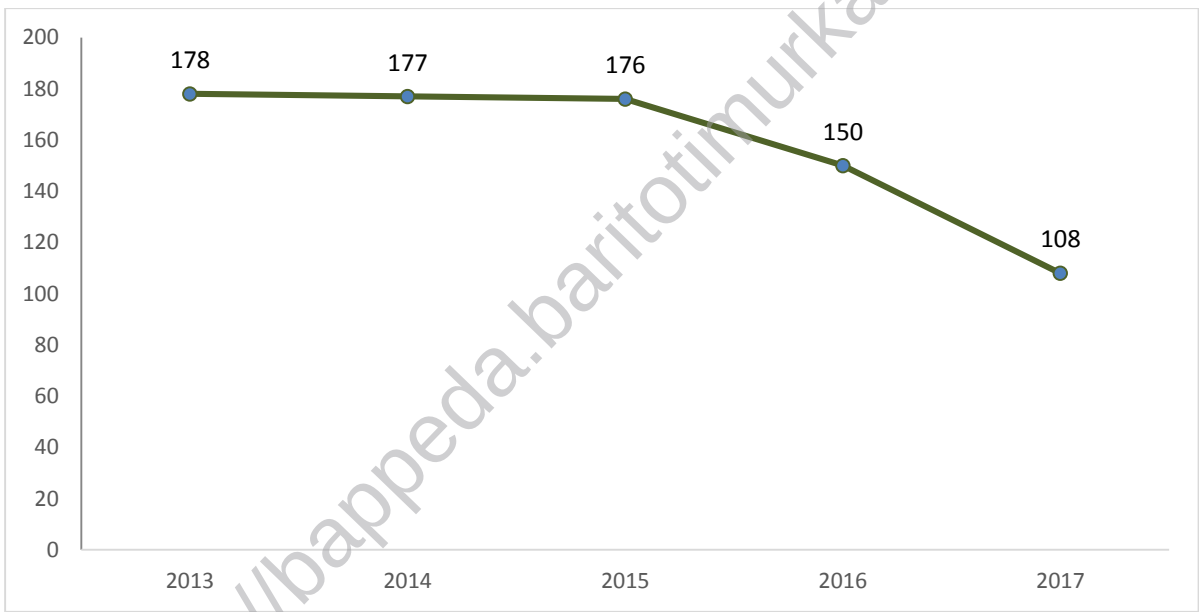
Pembangunan di bidang hukum terutama untuk mendukung terlaksananya tugas pemerintahan, telah memperlihatkan hasil yang cukup memadai. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) telah ditetapkan guna memberikan pelayan dan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Namun demikian ada beberapa masalah yang cukup mendasar yang dihadapi baik dalam skala nasional maupun lokal (daerah) mengenai pembangunan hukum, umumnya yaitu mencakup aspek hukum, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum dan budaya masyarakat. Pembangunan hukum meliputi bidang eksekutif, yudikatif,



legislatif dan profesi hukum. Persoalan hukum yang bersifat umum meliputi: proses pembentukan hukum yang belum sepenuhnya mengacu kepada kepentingan publik; penerapan hukum belum berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum; aparat hukum belum ditunjang oleh manajemen dan sarana yang memadai; Rendahnya akses publik untuk berpartisipasi; Belum adanya grand design pembangunan hukum sebagai hasil kesepakatan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, untuk melakukan perbaikan secara medasar untuk mencapai supremasi hukum. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif; Lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Barito Timur dalam lima tahun terakhir antara 2013-2017 menurun dari 178 kasus di Tahun 2013 menjadi 108 Tahun 2017. Penurunan tindak pidana ini menjadi gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Barito Timur menaati hukum yang berlaku.

Gambar 2.14.
Jumlah Tindak Pidana Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

d. Urusan Sosial

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah, selain faktor jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin



maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan, tetapi tingginya tingkat kemiskinan, tidak berarti jumlah penduduk miskin di suatu daerah itu lebih banyak dari pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, namun tergantung dari jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam daerah tersebut. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Ribuan)	Persentase
2013	338.470	9.500	8,52
2014	401.510	9.520	8,55
2015	415.710	9.510	8,41
2016	442.070	8.880	7,64
2017	467.090	8.560	7,17

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2013 sebesar 8,52 persen atau sebanyak 9.500 orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp.338.470,-. Persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. tahun 2017 jumlah penduduk miskin turun menjadi 7,17 persen atau sebesar 8.560 orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp.467.090,-.

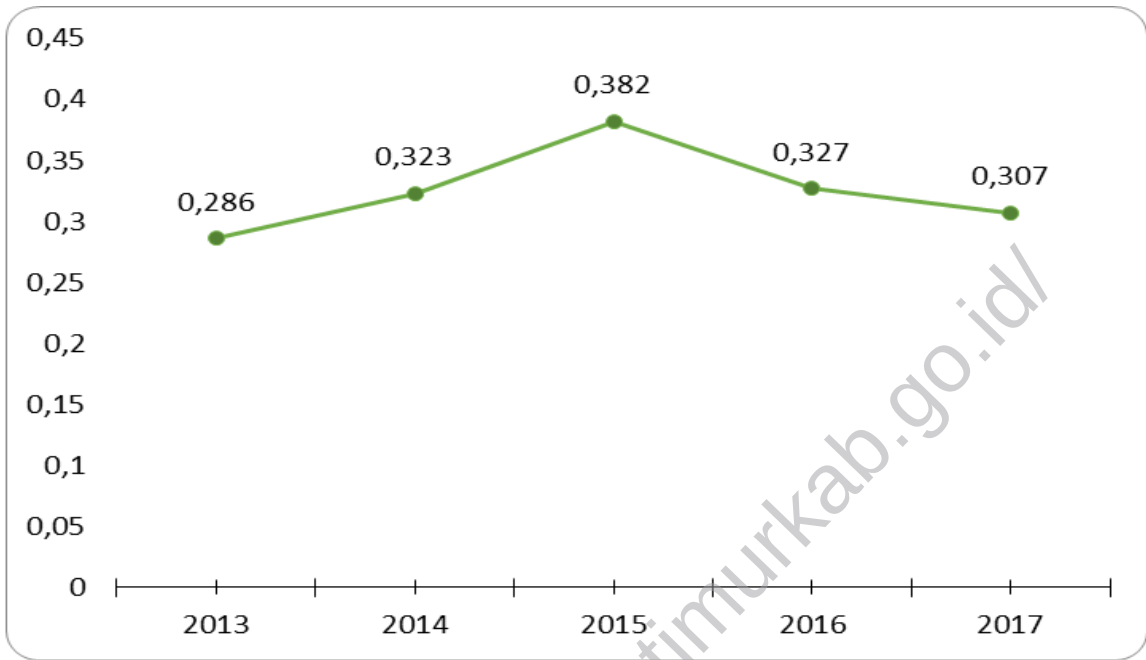
Tingginya angka kemiskinan disebabkan karena beberapa hal antara lain semakin lesunya kegiatan pertambangan batu bara sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja lokal, turunnya harga komoditi karet membuat tingkat perekonomian masyarakat/petani semakin menurun, serta terbatasnya peluang kerja turut andil dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Rasio gini merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Pada



tahun 2017, Kabupaten Barito Timur memiliki gini ratio sebesar 0,307 sehingga dapat dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Barito Timur termasuk dalam kategori sedang yang berarti bahwa tingkat pemerataan sedang, karena terletak diantara nilai 0,3 dan 0,4 atau dibawah angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang. Indeks Gini Kabupaten Barito Timur dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.15.
Indeks Gini
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

2.3.2. Fokus Layanan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Fokus layanan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

a. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Barito Timur tahun 2015 sebesar 80,43 persen mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 72,52 persen dan di tahun 2017, TPAK mencapai angka 95,32 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 adalah sebesar 4,68 persen lebih besar dibandingkan dengan tahun



2015 yaitu sebesar 2,14 persen, rincian penduduk berumur di atas 15 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Barito Timur, 2013-2017

No	Jenis Kegiatan Utama	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Angkatan Kerja	56.629	57.771	66.345	NA	65.243
	1. Bekerja	55.679	56.352	64.928	NA	62.188
	2. Penganggur	950	1.419	1.417	NA	3.055
II.	Bukan Angkatan Kerja	16.424	21.889	16.138	NA	22.795
	Jumlah	73.053	79.660	82.483	NA	88.038
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,52	72,52	80,43	NA	95,32
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,68	2,46	2,14	NA	4,68

Sumber: Data diolah dari Barito Timur Dalam Angka 2018

Tingginya angka pengangguran disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah, sebagai contoh buruh kasar, buruh kasar banyak yang didatangkan dari luar daerah menyebabkan tenaga lokal tidak terserap.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tindak kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2016-2017 menunjukkan angka penurunan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 7 kasus dan tahun 2017 sebanyak 2 kasus, seperti yang terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.25.
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Barito Timur

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	Januari - Mei 2018
1	Fisik	0	0	0
2	Psikis	3	1	1
3	Seksual	2	0	1
4	Penelantaran	2	1	1
5	Trafficking	0	0	1
6	Eksplorasi	0	0	0
7	Dan Lain-Lain	0	0	0
	JUMLAH	7	2	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Tindak kekerasan terhadap anak dari tahun 2016-2017 menunjukkan peningkatan pada kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual, dimana pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus dan tahun 2017 sebanyak 5 kasus. seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.26.
Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Barito Timur

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	Januari - Mei 2018
1	Fisik	1	3	1
2	Psikis	0	0	1
3	Seksual	1	2	1
4	Penelantaran	0	0	1
5	Trafficking	0	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0
7	Dan Lain-Lain	0	0	0
JUMLAH		2	5	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Urusan Perhubungan

Perkembangan kendaraan bermotor di Barito Timur memiliki dampak berbanding terbalik dengan arus penumpang angkutan umum. Peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor yang diiringi dengan penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum, khususnya di tahun 2017.

Infrastruktur perhubungan di Kabupaten Barito Timur juga ditingkatkan, dimana jumlah pelabuhan sungai dan terminal bis meningkat menjadi 7 unit pada tahun 2017. Panjang jalan pun secara umum ditingkatkan menjadi 968,97 km.

Tabel 2.27.
Statistik Perhubungan Kabupaten Barito Timur 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kendaraan bermotor	Unit	20.203	19.687	14.388	18.898	19.659
Jumlah Uji kir angkutan umum	Kali	1.368	2.630	1.102	952	743
Jumlah Pelabuhan sungai dan Terminal Bis	Unit	5	5	6	7	7
Panjang jalan Kabupaten	Km	934,28	965,47	968,97	968,97	968,97



Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Ribu Orang	427,4	448,5	743,9	345,7	349,5

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018

d. **Urusan Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Barito Timur memiliki ketahanan pangan yang cukup baik dimana rasio pemenuhan beras sudah berada di atas standar kecukupan pangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah terjadinya penurunan jumlah produksi sehingga hal tersebut patut menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.28.
Statistik Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio pemenuhan pangan (beras)	Kg	173,27	158,02	161,81	157,31	135,23
Jumlah produksi padi	Ton	31.143,00	31.042,00	32.721,00	32.721,00	28.923,09
kerawanan pangan	%	40	35	30	30	20
Skor pola pangan harapan	-	81,47	78,60	88,40	86,80	89,70
Ketersediaan pangan utama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Barito Timur, 2018

e. **Urusan Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH merupakan indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas air, yang diukur



berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup.

Daya dukung dan Daya tampung ketersediaan air di Kabupaten Barito Timur, termasuk kategori tinggi sebesar 117.358,68 ha (30,61%) dan kategori rendah sebesar 74.434,23 ha (19,41%). Untuk sebaran wilayah kecamatan, daya dukung dan daya tampung dominan tersebar di wilayah timur dan selatan seperti Kecamatan Patangkep Tutui dan Banua Lima, sedangkan kategori tinggi sampai tinggi tersebar di Kecamatan Paju Empat dan sebagian Kecamatan Reren Batuah.

Tabel 2.29.
Daya Dukung dan Daya Tampung Setiap Kecamatan
Kabupaten Barito Timur

No .	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Kec. Awang	-	2.771,81	1,80	14.877,80	69,11	17.720,51
2	Kec. Benua Lima	-	7.825,77	785,90	5.107,97	2.396,02	16.115,66
3	Kec. Dusun Tengah	-	9.737,68	9.687,53	20.176,41	5.012,96	44.614,57
4	Kec. Dusun Timur	-	21.394,37	9.301,17	16.086,90	34.559,17	81.341,60
5	Kec. Karusen Janang	-	1.579,81	9.501,10	2.827,67	8.062,17	21.970,76
6	Kec. Paju Epat	-	-	15.463,21	1.219,86	25.841,44	42.524,50
7	Kec. Paku	-	4.248,07	3.820,91	14.100,28	6.114,29	28.283,55
8	Kec. Patangkep Tutui	-	12.168,02	569,80	16.564,76	3.154,67	32.457,25
9	Kec. Pematang Karau	-	5.605,68	8.651,99	11.501,39	25.942,61	51.701,67
10	Kec. Reren Batuah	-	9.103,03	21.464,67	14.895,65	1.206,56	46.669,91
	Luas Total	-	74.434,23	79.248,09	117.358,68	112.359,00	383.400,00

Sumber: KLHS Barito Timur

Potensi lahan kritis di Kabupaten Barito Timur dominan merupakan daerah potensial kritis dan agak kritis yakni masing-masing sebesar 42,93% dan 30,49%, sedangkan kategori kritis sebesar 20,32%. Wilayah kecamatan dengan kategori potensi sangat kritis terdapat di Kecamatan Patangkep Tutui (7,10%) dan potensi kritis ada di Kecamatan Paju Empat (35,34%), dan Kecamatan Dusun Timur (23,59%).



Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan untuk hutan lahan kering primer sebesar 222 ton/ha, hutan rawa primer 122 ton/ha dan hutan rawa sekunder 92 ton/ha. Dengan luas hutan 121.478,90 ha maka total stok karbon di Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 19.049.888,31 ton. Daerah yang memiliki stok karbon tertinggi yakni Kecamatan Reren Batuah (28,36%) dan Pematang Karau (21,03%), sedangkan terendah ada di Kecamatan Awang hanya 0,33%.

Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari potensi pertambangan, potensi pariwisata, potensi hutan, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, dan potensi perikanan. Potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Timur berdasarkan data AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 terdiri dari pertambangan batubara dengan luas kawasan 9.879 Ha tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Tengah dan Reren Batuah seluas 1.000 Ha; Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat seluas 2.213 Ha; Kecamatan Karusen Janang, Paku, Awang seluas 1.000 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui seluas 2.592 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui, Awang seluas 3.074 Ha. Analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 masih sesuai tutupan lahan alami. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Barito Timur masih cukup efisien.

f. Urusan Penanaman Modal

Investasi baik asing, domestik maupun pemerintah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Timur. Pertumbuhan investasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu iklim investasi yang kondusif, kemudahan dan kejelasan prosedur serta kondisi makro ekonomi daerah tersebut. Jumlah investasi swasta nasional, PMA-PMDN di Kabupaten Barito Timur berdasarkan bidang usaha seperti pada tabel berikut.



Tabel 2.30.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Barito Timur
Tahun 2017

Bidang Usaha	PMDN	PMA	Jumlah
Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit	7	1	8
Perkebunan Tanaman Karet	1	0	1
Jasa Angkutan Pertambangan Batu Bara	1	0	1
Pertambangan Batu Bara	15	0	15
Industri Prduk dari Batu Bara	0	1	1
Pertambangan Batu Baara, Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Konstruksi	1	0	1
Pedagang Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	1	0	1
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI	1	0	1
Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus/Jasa Angkutan Bahan Bakar Cair	1	0	1
TOTAL	28	2	30

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito TImur Tahun 2017

g. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan olah raga di Kabupaten Barito Timur tampak pada tabel di bawah ini. Terjadi peningkatan jumlah gedung olah raga dan klub olah raga setiap tahun. Jumlah organisasi olahraga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebanyak 21 sedangkan tahun 2017 sebanyak 22. Jumlah organisasi pemuda tahun 2016 sebanyak 19 sedangkan tahun 2017 sebanyak 21. Jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2015-2017 sebanyak 58. Secara lengkap perkembangan seni budaya, pemuda dan olah raga pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
Perkembangan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah klub olah raga	0	0		10	10
2.	Jumlah gedung olah raga	15	1	1	14	14
3.	Jumlah Organisasi Olahraga	33	0	19	21	22
4.	Jumlah Organisasi Pemuda	39	0	19	19	21
5.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	52	0	58	58	58

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Bartim

h. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Barito Timur memiliki aset kebudayaan yang dapat dikembangkan menjadi festival budaya yang rutin dilakukan setiap tahun



untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Barito Timur. Festival budaya tersebut antara lain Festival Jari Janang Kalalawah (JAJAKA), Festival Lagu Daerah Nansarunai, dan Festival Pembangunan BARTIM EXPO.

Kebudayaan di Barito Timur perlu dilestarikan sebagai penghormatan bagi leluhur. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur membangun gedung kesenian sebagai sarana untuk mengekspresikan karya seniman. Dalam lima tahun jumlah grup kesenian di Kabupaten Barito Timur meningkat. Pada tahun 2017, jumlah grup kesenian di Kabupaten Barito Timur sebanyak 30 grup.

Tabel 2.32.
Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah grup kesenian	15	20	30	30	30
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Bartim

i. Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan dalam pencapaian perekonomian masyarakat desa, maka dapat dilihat dengan adanya BUMDes yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33.
Data BUMDes Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
1	Pematang Karau	Ketab	Ketab Mandiri	Keramba ikan
		Kupang Bersih		
		Muara Plantau	Hapakat Bersama	Moulding
		Bambulung	Karya Bersama	Wisata desa dan Musik Elektron
		Bararawa	Tambun Jaya	Perdagangan
		Pinang Tunggal	Pinang sejahtera	Perdagangan
		Muru Duyung	Nansarunai	Perdagangan
		Lebo	Sabuahan	Perdagangan
		Tuyau	Tuyau Jaya	Perdagangan
		Lampeong	Karya Bersama	Perdagangan
		Nagaleah	Maju Bersama	Jual saprodi pertanian
				Internet desa
		Tumpung Ulung	Jaya Bersama	



No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
		Sumber Rejo	Sumber Rejo Sejahtera	Ternak Sapi
				Jual saprodi pertanian
2	Dusun Tengah	Rodok	Rodok Karya Mandiri	Bidang Jasa
		Saing	Niwung Harapan	Internet desa
		Sumber Garunggung	Garunggung Mandiri	Toko Obat/Bahan pertanian
				Internet desa
		Netampin	Tetei Pamelum	Penangkapan bibit padi
				Peternakan
		Muara Awang	Awang Berjaya	Pengeloan air bersih
				Jual beli karet
		Ampah II	Tunas Harapan	Bidang Jasa
3	Raren Batuah	Putai	Putai Lestari	
		Unsum	Mirapakat	Jual gas LPG 3 kg
		Baruyan	Tetei Pamelum	Jual beli Getah Karet
				Jual gas LPG 3 kg
		Batuah	Batuah Maju Bersama	Pasar desa
				Sarang burung walet
				Kebun Karet Desa
				Jual gas LPG 3 kg
				Jual Pulsa Listrik
		Puri	Puri Jaya	Jual Sembako
		Lenggang	Jaya Lestari	Kios Desa
				Jual Sembako
				Penampung karet
				Jual gas LPG 3 kg
		Sibung	Sibung Maju Berkarya	Jual Pulsa
				Beli karet
		Malintut	UT. Jaya Malintut	Jual Beli Karet
		Turan Amis	Karya Bersama	Desa Wisata
				Internet desa
		Tangkum		Penyewaan perontok padi



No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
4	Paku	Luau Jawuk	Mandiri Luau Jawuk	Penyewaan Handtracktor
				Penampung karet
				Perikanan
		Patung	Arial Munge	Ternak itik pedaging
				penggemukan sapi
				Ikan kolam terpal
		Runggu Raya	Karya Bersama	simpan pinjam
				Pengadaan barang dan jasa telekomunikasi dan kelistrikan
				Usaha umum, outlet pembayaran rekening listrik
		Kalamus	Kalamus Berjaya	
		Tampa	Paku Sejahtera	Jual beli gabah, air mineral, desa wisata, Toko Desa
		Paku Beto	Paku Makmur	Jual alat Pertanian
				Jual beras merah
		Bantai Napu	Harapan Kahai	Jual gas LPG 3 kg, Token, Pulsa
		Tarinating	Bauntung Mupakat	Penjualan BBM
				Sarana air bersih
				Sewa barang inventaris desa
		Gandrung	Mira lalati	Jual beli sembako
		Simpang bingkuang	Harapan jari	Bebek organik
				Jual paket internet
5	Karusen Janang	Kupang Baru	Mara'al Nakayaan	Jual beli ayam petelur
				simpan pinjam
		Ipu Mea	Martang Janggut	Jasa Angkutan
		Wuran	Wulan membangun	
		Lagan	Lestari	Jual pulsa dan jasa transfer



No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
		Simpang nanang	Karusen Jaya	Penggemukan sapi potong
				Peternakan
				Agen Bank
		Dayu	Karya Bersama	Usaha bidang jasa
6	Paju Epat	Siong	Maju Bersama	Bengkel Motor
				Air bersih yang bisa dikonsumsi
		Murutawu	Murutawu Sejahtera	Saprodi Pertanian
				Penjualan gas LPG
		Malpe	Karya Bersama	Pengolahan air minum
		Tampulangit	Uriya Mandiri	Perdagangan
		Kalinapu	Mulia	Perikanan
		Juru Banu	Sumber Rejeki	abon ikan haruan
				Penjualan gas LPG
		Telang Baru	Sumber Usaha	Perdagangan
7	Dusun Timur	Telang	Pakat Rama	Pasar desa
		Magantis	Tunas Harapan	Perikanan
		Karang langit	Karuntu Jaya	Pengelolaan Pasar Desa
				Penyewaan tenda kursi
				Penitipan hasil usaha masyarakat
		Harigen	Sameh Ampun	Kerajinan Anyaman
		Harara	Totei Pamehun	Bidang Jasa
		Sarapat	Sarapat Mandiri	Perdagangan
		Pulau Patai	Amuan Sasameh	Pengelolaan air bersih, parkir pasar desa, perdagangan
		Dorong	Usaha Dagang Bersama	Jual Beli karet dna percetakan
		Didi	Daya Pakat	Multiguna
		Mangkarap	Kalungkung Jari Mangkarap	Perdagangan
		Matabu	Maburai	Toko ATK dan Foto Copy
		Maragut	Sumber Rejeki	Home industri (batako), Perdagangan dan Jasa Penyewaan



No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
		Matarah	Itung Janji	Perdagangan dan Penyewaan tenda kursi
		Sumur	Sumur Berjaya	Ternak Ayam petelor
				Penyewaan tenda kursi
		Jaweten	Barkat Sasameh	Perdagangan dan Jasa Penyewaan
8	Benua Lima	Bagok	Mira Putut	Perdagangan dan Penyewaan tenda kursi
		Gudang seng	Harapan Bersama	Penggilingan Padi
		Banyu Landas	Bauntang	Simpan pinjam, perdagangan, jasa pembayaran listrik, pertambangan dan jasa konstruksi
		Kandris	Harapan Jaya	Jasa dan perdagangan
		Bamban	Pangarawah	Perdagangan, peternakan
		Tewah Pupuh	Tewah Jari	Jasa pencucian motor, perdagangan dan peternakan
9	Patangkep Tutul	Lalap	Mitra Harapan Jaya	Simpan pinjam dan isi ulang air minum
		Ampari Bura	Harapan Bersama	Jual beli karet, isi ulang air minum, sembako
		Kambitin	Beringin Jaya	Perbengkelan
				Simpan pinjam
		Jango	Jango Sejahtera	Jual beli karet
				Jual pulsa
		Kotam	Kotam Membangun	Simpan pinjam, perdagangan, air isi ulang
		Mawani	Mawani Maju Bersama	Simpan pinjam dan jual beli karet
		Batang Nalong	Karya Sasameh	Jual beli Gabah
		Pulau Padang	Barakat Sabar	Perdagangan dan POM mini minyak



No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
		Ramania	Maju Bersama	Perdagangan dan isi ulang air minum
10	Awang	Danau	Unru Nyingkai	Jasa sewa tenda kursi
		Biwan	Biwan Bersama	Penggilingan Padi
		Ampari	Tetei Pakat	Perbengkelan
		Planggu	Lekang Watu	Penggilingan Padi
		Apar Batu	Apar Batu Jaya	Peternakan dan perdagangan
		Tangkan	Hamen Maju	Perdagangan dan Jasa Penyewaan
		Janah Jari	Rirung Munge	Perdagangan
		Bangkirayan	Gunung Sion	Perdagangan
		Wungkur Nanakan	Tunas Harapan	Jasa dan perdagangan
		Hayaping	Jarau Matudi	Peternakan dan perdagangan

Sumber Data: DPMD Kabupaten Barito Timur, Tahun 2018

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Timur.

a. Urusan Pariwisata

Jika dilihat dari berbagai sumber daya yang ada, maka potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari wisata alam, wisata alam taman anggrek dan rencana penangkaran satwa di Murutuwu Kecamatan Paju Epat, wisata budaya, dan wisata alam buatan yang semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Barito Timur. Dari seluruh potensi pariwisata tersebut, perlu adanya berbagai fasilitas penunjang dalam peningkatan kepariwisataan seperti akomodasi maupun penyediaan makan dan minum bagi wisatawan.

Jumlah hotel dan akomodasi lainnya menunjukkan jumlah yang semakin bertambah tiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah hotel dan akomodasi lainnya di Kabupaten Barito Timur berjumlah 17 buah dengan kapasitas kamar yang tersedia 270 kamar dengan 403 tempat



tidur. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan domestik sebanyak 10.969 orang.

Tabel 2.34.
Perkembangan Jumlah Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang					10.969

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

b. Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan komoditi utama Kabupaten Barito Timur untuk dikembangkan menjadi agribisnis. Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sektor perkebunan Kabupaten Barito Timur sedang dikembangkan dengan komoditi utama karet dan kelapa sawit. Kabupaten Barito Timur menghasilkan beraneka tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, karet, kelapa sawit, dan cacao. Tanaman perkebunan yang memiliki produksi tanaman paling banyak adalah karet sebanyak 11.862,78 ton pada tahun 2017. Produksi karet di Kabupaten Barito Timur sangat terkenal di dunia industri karena kualitasnya. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB dalam lima tahun menunjukkan angka yang semakin menurun. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang ingin mengembangkan pertanian sebagai basis ekonomi selain sektor pertambangan.

Tabel 2.35.
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	19,97	19,74	19,81	19,03	18,56
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,83	1,35	6,03	3,91	6,54

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

c. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang sedang berkembang di Kabupaten Barito Timur dan diharapkan bisa menjadi andalan ekonomi



Barito Timur. Sektor industri terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain industri kecil, industri menengah dan industri besar. Industri kecil dan industri menengah menjadi industri yang berkembang di Kabupaten Barito Timur. Sektor indutri kecil merupakan sektor industri yang mempunyai banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan industri menengah dan besar. Unit usaha industri kecil dan menengah menunjukkan masyarakat tidak terpaksa dalam harapan menjadi pegawai dan bekerja, namun membuka usaha dan memberikan lapangan kerja. Jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai produksi pada masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36.
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Dan Nilai Produksi Pada Industri Kecil Dan Indusri Menengah Di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2017

Klasifikasi industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Nilai Produksi (juta)
	Sedang	Kecil dan IKKRT	Sedang	Kecil dan IKKRT	
Industri Makanan		54		119	9.709.000
industri Minuman		38		53	966.720
Industri pakaian jadi		80		122	14.524.575
Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya	1	85	20	255	13.586.500
Industri percetakan dan reproduksi media rekaman		2		6	378.500
Industri farmasi, produk obat, dan jamu		3		6	108.000
Industri barang logam kecuali mesin dan peralatannya		112		117	4.419.200
Industri pengolahan lainnya	5	70	120	296	54.958.200
Jasa reparasi dan pemasangan mesin lainnya		178		249	21.454.850

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.37.
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	5,54	6,04	6,60	7,06	7,34
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan	%	5,65	8,38	9,69	9,75	7,84



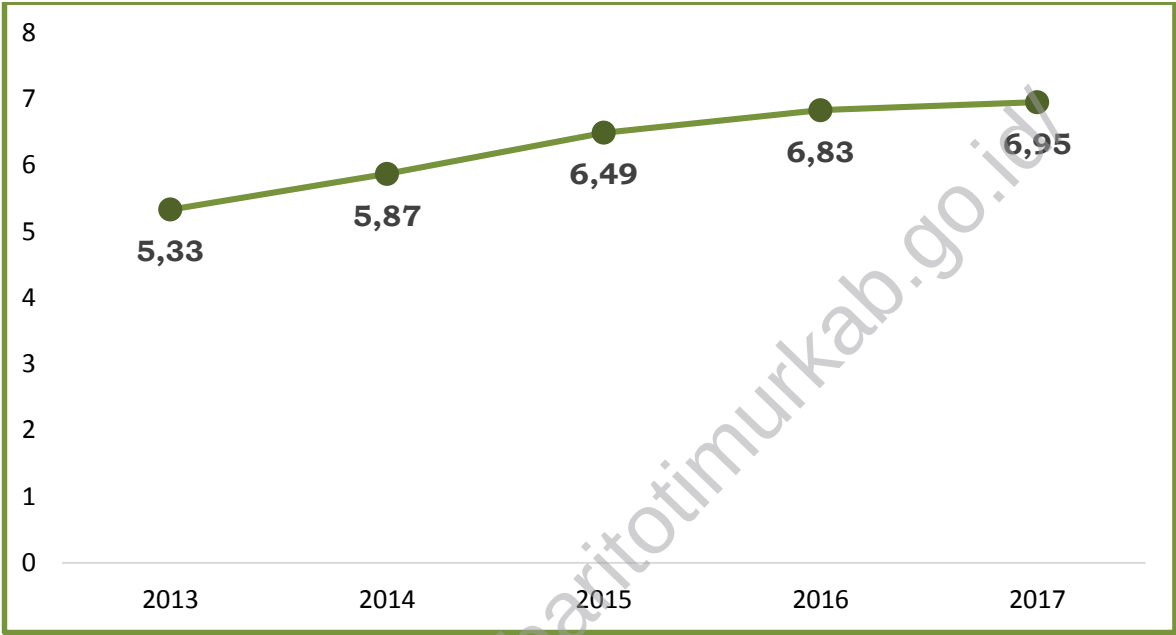
No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
	Perikanan						

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

d. **Urusan Perdagangan**

Sektor perdagangan di Barito Timur masih belum dioptimalkan, khususnya dari sisi kualitas produk dan pemasarannya. Meskipun begitu, pergerakan sektor ini dalam perekonomian di Barito Timur mengalami peningkatan yang terlihat dari meningkatnya kontribusi sektor perdagangan (termasuk reparasi kendaraan bermotor) dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2017 mencapai angka 6,95 persen.

Gambar 2.16.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

2.3.4. **Penunjang Urusan**

a. **Penyelenggaraan Pemerintah**

Keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.



Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur tahun 2017 adalah 48,86 dengan kategori C atau kategori kurang, masih belum memenuhi target CC.

Tabel 2.38.
Hasil Evaluasi AKIP Kab. Bartim Tahun 2014-2017

Komponen	Bobot	2014	Bobot	2015	2016	2017
Perencanaan Kinerja	35	14,29	30	13,46	15,16	
Pengukuran Kinerja	20	9,57	25	9,23	10,70	
Pelaporan Kinerja	15	7,47	15	8,94	9,12	
Evaluasi Kinerja	10	0,00	10	3,13	3,44	
Capaian Kinerja	20	10,48	20	10,31	9,40	
Total	100	41,81	100	45,07	47,82	48,86
Kategori		C		C	C	C

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2018

Selain dari LAKIP, dalam melihat kinerja pemerintah dapat terlihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mengevaluasinya, maka dirumuskan suatu indikator yakni Indeks Maturitas SPIP yang dapat melihat tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Pada tahun 2016, Indeks maturitas SPIP Kabupaten Barito Timur berada di level 1 sehingga masuk kategori rintisan. Rintisan berarti praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, kelemahan tidak teridentifikasi.

b. Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajiban penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Barito Timur di tahun 2017



memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.39.
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun 2013-2017

No	Tahun	Opini Publik
1.	2013	Tidak Wajar(TW)
2.	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WDP)
4.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan, yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan berarti semakin rendah tingkat kesejahteraannya, demikian juga sebaliknya. Angka pengeluaran menurut kelompok barang makanan tahun 2013-2016, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Angka Pengeluaran Per-Kapita Menurut Kelompok Barang Makanan
dan non Makanan di Kabupaten Barito Timur (Ribuan Rp)
Tahun 2013-2016

No	Tahun	Kelompok Barang Makanan (Ribuan Rp)	Kelompok Barang Non Makanan (Ribuan Rp)
1.	2013	504.962	437.908
2.	2014	570.814	535.142
3.	2015	512.031	611.432
4.	2016	555.760	653.629
5.	2017	602.210	481.779

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

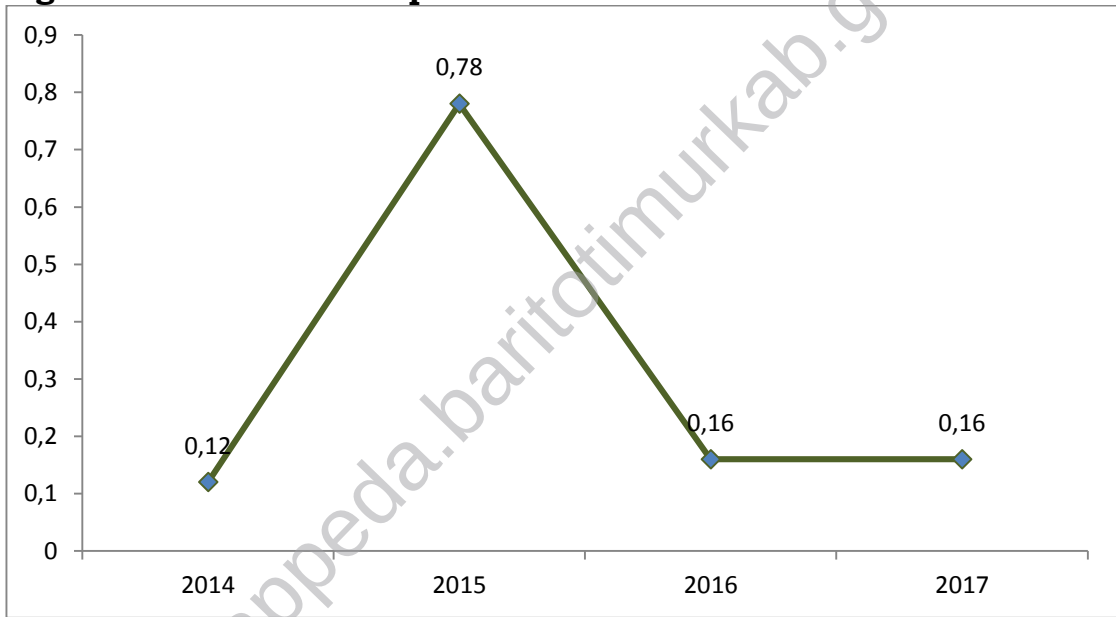


Tabel di atas menunjukkan tahun 2014 angka pengeluaran perkapita untuk barang makanan sebesar Rp. 570.814,- sedangkan tahun 2016 turun menjadi Rp. 555.760,- dengan demikian terjadi penurunan angka pengeluaran sebesar Rp.15.054,- ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

2.5.2.Fokus Investasi

Kriminalitas berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, juga aspek ekonomi. Tingginya angka kriminalitas akan berimbas pada perkembangan ekonomi. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi minat para investor dalam berinvestasi. Maka dari itu perlu adanya menjaga stabilitas keamanan, politik dan beberapa bidang penting lainnya untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Angka kriminalitas Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017 berada di angka 0,16.

Gambar 2.17.
Angka Kriminalitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2017



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

2.5.3.Fokus Infrastruktur

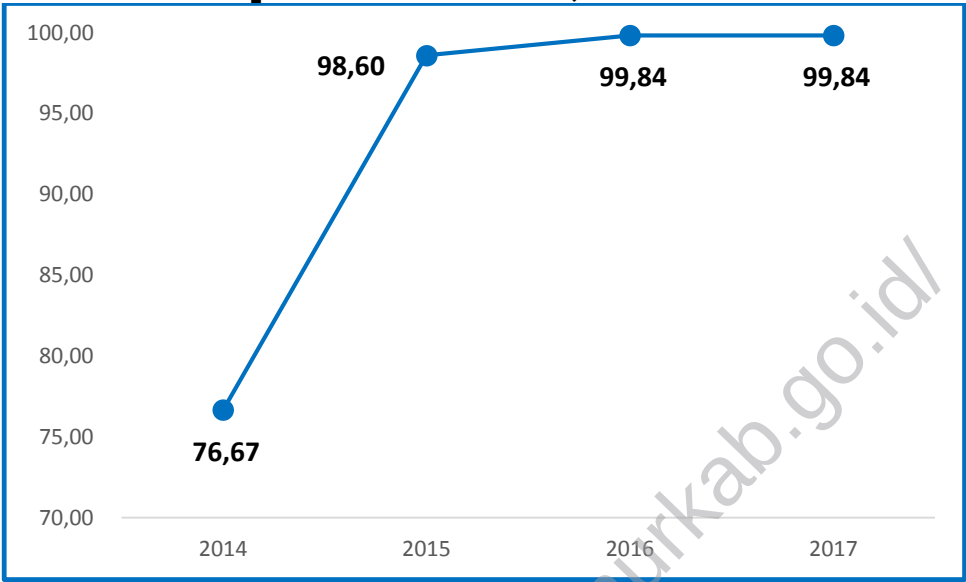
Fokus infrastruktur ditunjukan dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai untuk menunjang peningkatan daya saing ekonomi fokus infrastruktur ini terkait dengan luas wilayah yang produktif, sarana dan prasarana umum yang berdaya saing daerah,



dan masih banyak lainnya.

Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah adalah fasilitas listrik, supaya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Barito Timur secara layak selama 24 jam. Jika dilihat dari data yang ada, maka sebagian besar penduduk di Kabupaten Barito Timur sudah merasakan fasilitas listrik. Sebanyak 99,84 persen rumah tangga sudah menggunakan fasilitas listrik dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Gambar 2.18.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas Listrik (%)
Kabupaten Barito Timur, 2014-2017



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

2.5.4.Fokus Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pendidikan, jumlah PNS terbanyak adalah S1 sebanyak 1.838 orang; Diploma sebanyak 1.167 orang; Sekolah Menengah atas sebanyak 789 orang; S2 sebanyak 137 orang; Sekolah Menengah Pertama sebanyak 52 orang; Sekolah Dasar sebanyak 27 orang. Secara lengkap rasio penduduk yang memiliki pendidikan S1 dan S2 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016

NO	Uraian	2016
1.	Sekolah Dasar	27
2.	Sekolah Menengah Pertama	52
3.	Sekolah Menengah Atas	789
4.	Diploma I/II/III/Akademi	1.167
5.	S1	1.838



NO	Uraian	2016
6.	S2	137
Jumlah		4.010

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

Sedangkan angka *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan) penduduk usia belum/tidak produktif terhadap penduduk usia produktif di Kabupaten Barito Timur masih relatif tinggi. Berdasarkan Tabel 2.42 angka rasio ketergantungan berfluktuasi dari tahun 2014 sampai 2016. Tahun 2014 rasio ketergantungan sebesar 45 ini berarti setiap 100 orang dalam usia produktif menanggung 45 orang usia belum/tidak produktif, tahun 2015 rasio ketergantungan sebesar 44 dan tahun 2016 sebesar 46. Secara lengkap data rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Barito Timur terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.42.
Rasio Ketergantungan Tahun 2014-2016
Kabupaten Barito Timur

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	31.176	31.655	32.064
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	4.274	4.487	4.723
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	33.579	34.135	34.649
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	74.996	77.554	80.159
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)*100	45	44	46

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

B. Indikator Pembangunan Kabupaten Barito Timur

Berikut indikator pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur yang merupakan potret keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel 2.43.
Indikator Pembangunan Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013-2017

No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
Aspek kesejahteraan masyarakat							
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,73	5,25	5,16	5,5	5,98
1.2	Tingkat inflasi (Kalimantan	%	-	1,80	1,05	1,29	0,65



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Tengah)						
1.3a	Pdrb adhb	Milyar Rp	4.444,30	4.770,20	5.099,00	5.627,80	6.320,00
1.3b	Pdrb per kapita	Juta Rp	41,4	43,2	44,8	48,1	52,6
1.4	Indeks gini	%	0,286	0,323	0,382	0,327	0,307
1.5	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	8,52	8,55	8,41	7,64	7,17
1.6	Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan	%	50,56	76,27	82,95	75	82
1.7	Tingkat pengangguran	%	1,68	2,46	2,14	3,6	4,68
1.8	Pendapatan perkapita	Juta	41,4	43,2	44,8	48,1	52,6
1.9	Paritas daya beli	Rp	10.450	10.465	10.570	10.631	10.808
1.10	Jumlah penduduk	Jiwa	107.316	110.446	113.696	116.946	120.254
1.11	Pengeluaran perkapita	Rp	942.870	1.105.956	1.123.463	1.209.389	1.083.899
1.12	Ipm	%	68,82	69,12	69,7	70,33	70,57
II	Fokus kesejahteraan sosial						
2.1	Pendidikan						
2.1.2	Angka melek huruf	%	71,03	96,19	96,19	98,53	98,82
2.1.3	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,98	9,01	9,02	9,03	9,04
2.1.4a	Angka partisipasi kasar SD/ MI/ SDLB	%	95,87	111,74	109,65	109,65	109,65
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SMP/ MTs/ SMPLB	%	80,66	101,51	118,5	101,32	88
2.1.4c	Angka partisipasi kasar SLTA/ MA/ SMK	%	70,23	71,7	103	98,38	98,38
2.1.5a	Angka partisipasi murni SD/ MI/ SDLB	%	87,02	92,78	99	97	98,47
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ SMPLB	%	75,48	68,33	105	77,36	75,33
2.1.5c	Angka partisipasi murni SLTA/ MA/ SMK	%	64,74	47,92	115	71,24	59,02
2.2	Kesehatan						



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.2.2	Angka harapan hidup	Tahun	67	67,3	71,98	71,98	71,98
2.2.3	Persentase bayi gizi buruk	%	0,61	0,93	1,5	2,03	0,01
2.2.4	Jumlah Alat Kontrasepsi yang Digunakan oleh Penduduk						
	-Wow	unit	226	217	290	245	347
	-Mop	unit	8	8	8	16	8
	-Iud/spiral	unit	226	217	290	245	347
	-Susuk kb	unit	1.579	1.729	1.263	1.246	1.719
	-Suntik	unit	5.613	5.882	6.194	6.169	6.802
	-Pil	unit	8.391	7.834	8.014	8.040	8.069
	-Kondom	unit	315	222	138	120	121
2.2.5	Jumlah balita yang mendapat imunisasi	orang	21.811	15.000	22.647	24.274	24.571
III	Fokus Budaya dan Olahraga						
3.1	Kebudayaan						
3.1.1	Jumlah grup kesenian	grup	15	20	30	30	30
3.1.2	Jumlah gedung kesenian	unit	1	1	1	1	1
3.2	Pemuda dan Olahraga						
3.2.1	Jumlah klub olahraga	klub	-	-	-	10	10
3.2.2	Jumlah gedung olahraga	unit	15	1	1	14	14
Aspek pelayanan umum							
A	Urusan pemerintahan wajib						
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1.1	Urusan pendidikan						
1.1.1.a	Angka partisipasi sekolah SD/ MI	%	-	99,11	97,7	100	100
1.1.1.b	Angka partisipasi sekolah SLTP/ MTs	%	-	97,26	95,99	97,11	94,59
1.1.1.c	Angka partisipasi sekolah SLTA/ MA/ SMK	%	-	66,24	64,45	65,38	70,64
1.1.2a	Rasio Murid terhadap Guru SD Negeri	Per 1 guru	9	8	7	7	8
	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	8	9	8	11	10



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Swasta						
1.1.2b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP Negeri	Per 1 guru	10	9	8	9	9
	Rasio Murid terhadap Guru SLTP Swasta	Per 1 guru	9	11	10	11	9
1.1.2c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA Negeri	Per 1 guru	10	8	9	9	10
	Rasio Murid terhadap Guru SMK Negeri	Per 1 guru	9	7	7	7	8
	Rasio Murid terhadap Guru SLTA/SMK Swasta	Per 1 guru	9	10	7	10	7
1.1.3a	Rasiomurid SD Negeri terhadap sekolah		89	82	80	79	77
	Rasiomurid SD Swasta terhadap sekolah		137	150	151	179	167
1.1.3b	Rasiomurid SLTP Negeri terhadap sekolah		163	158	157	160	162
	Rasiomurid SLTP Swasta terhadap sekolah		161	184	188	184	183
1.1.3c	Rasiomurid SLTA Negeri terhadap sekolah		237	189	212	232	238
	Rasiomurid SMK Negeri terhadap sekolah		223	196	216	221	235
	Rasiomurid SLTA/SMK Swasta terhadap sekolah		155	161	152	154	153
1.1.4a	Angka putus sekolah SD/MI/SDLB	%					
1.1.4b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	0	0,51	0	0	0,31



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.1.4c	Angka putus sekolah SMA/ SMK/MA	%	0	1,21	0	0,15	1,26
1.2	Urusan kesehatan						
1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	per 100 Balita	1,9	1,47	1,52	1,46	1,46
	Jumlah posyandu	Unit	163	161	163	164	164
1.2.2a	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per 30.000 penduduk	57,88	74,56	75,15	86	86
	Jumlah puskesmas	Unit	11	11	11	11	11
1.2.3	Rasio tempat tidur rumah sakit	Per 1.000 penduduk	56	60	70	80	89
	Jumlah rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
1.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	18,09:100 .000	23,3:100. 000	21,73:100. 000	21,3 :100.000	25,73 :100.000
	Jumlah Dokter umum	orang	27	25	23	19	35
	Jumlah dokter spesialis	orang	3	3	5	5	9
	Jumlah dokter gigi	orang	6	5	5	6	5
	Jumlah bidan	orang	118	91	151	107	214
	Jumlah perawat	orang	254	243	168	232	274
1.2.6	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	1000 KH	8/1000 KH	8/1000 KH	3/1000 KH	2/1000 KH	6/1000 KH
1.2.7	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	1/100.00 0 KH	338/ 100.000 KH	350/ 100.000 KH	208/ 100.000 KH	52/ 100.000 KH	50/ 100.000 KH
Capaian indikator spm							
1.2.8	Pelayanan kesehatan ibu hamil					82,63	100
1.2.9	Pelayanan kesehatan ibu bersalin					77,17	100
1.2.10	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					84,56	100
1.2.11	Pelayanan kesehatan balita					88,61	100
1.2.12	Pelayanan					121,76	100



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	kesehatan pada usia pendidikan dasar						
1.2.13	Pelayanan kesehatan pada usia produktif					96,34	62,42
1.2.14	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					84,42	100
1.2.15	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					18,37	100
1.2.16	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (dm)					17,09	100
1.2.17	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (odgj) berat					7,14	100
1.2.18	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (tb)					107,64	49,01
1.2.19	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi hiv					100	100
1.2.20	Cakupan kunjungan ibu hamil k4		88,00	87,91	94,41	103,57	96,03
1.2.21	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani		29,00	75,77	82,45	25,83	88,43
1.2.22	Cakupan pertolongan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		94,00	95,50	110,67	104,19	110,74
1.2.23	Cakupan pelayanan nifas		94,00	96,20	100,87	134,11	101,11
1.2.24	Cakupan Neonatus dengan komplikasi		16,00	13,65	77,09	87,84	82,65



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	yang ditangani						
1.2.25	Cakupan kunjungan bayi		90,00	96,42	96,92	70,01	96,48
1.2.26	Cakupan desa/ kelurahan uci		29,00	86,36	84,62	89,39	91,35
1.2.26	Cakupan pelayanan anak balita		79,00	85,64	87,08	104,84	87,07
1.2.27	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan		100,00	38,35	58,43	99,14	57,63
1.2.28	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan		-	13,90	0,40	100,00	0,40
1.2.29	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		66,00	74,31	96,52	95,05	104,57
1.2.30	Cakupan Peserta KB aktif		116,00	96,97	87,71	91,48	95,56
1.2.31	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penemuan penderita pneumonia balita		100,00	10,30	34,70	36,35	42,10
1.2.32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penemuan penderita baru TB BTA +		33,00	42,86	48,23	71,23	72,09
1.2.33	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penderita DBD yang		100,00	60,53	87,10	94,05	85,71



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	ditangani						
1.2.34	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penemuan penderita Diare		96,00	356,73	36,65	34,65	36,02
1.2.35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100,00	2,90	36,96	36,96	36,72
1.2.36	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100,00	13,82	8,87	1,73	8,85
1.2.37	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam		-	20,00	12,50	-	12,50
1.2.38	Cakupan Desa Siaga aktif		7,00	63,87	70,37	83,02	75,00
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.3.1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	510,84	646,82	318,78	358,39	431,05
1.3.2	Rasio jaringan irigasi	-	49	12	71,5	75	85
1.3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	181	184	193	198	203
	Jumlah masjid	Unit					
	Jumlah Gereja dan Kapel Katholik	Unit	61	61	61	62	66
	Jumlah gereja protestan	Unit	190	188	190	194	202
	Jumlah pura	Unit	39	40	40	43	42



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	9,37	94,2	53,56	94,4	94,4
	Akses terhadap sanitasi layak	%					
1.3.5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	3,66	18,34	21,34	27	28
1.3.6	Rasio rumah layak huni	Per 1.000 penduduk	60,53	53,1	87,27	94,57	94,57
1.3.7	Rasio permukiman layak huni		95	63,2	80,37	80,37	80,37
1.3.8	Volume air yang disalurkan	m3	615.776	695.891	725.445	775.482	965.831
1.3.9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	20	18,1	21,1	49,5	49,5
1.3.10	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	20	42,1	45,1	48,4	48,4
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	%		0,13	0,13	76,2	76,2
1.4.2	Rumah tangga pengguna listrik	%		76,67	98,6	99,84	99,84
1.4.3	Rumah tangga ber sanitasi	%	9,37	94,2	53,56	94,4	94,4
1.4.4	Persentase rumah layak huni	%	60,53	53,1	87,27	94,57	94,57
1.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan	%	50,56	76,27	82,95	75	82
1.5.2	Angka kriminalitas			0,12	0,78	0,16	0,16
1.5.3	Jumlah terpidana	Kasus	126	140	142	140	181
1.6	Urusan sosial						
1.6.1	Garis kemiskinan	Rp.	338470	401.510	415.710	442.070	467.090



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah penduduk miskin	jiwa	9.500	9.520	9.510	8.880	8.560
1.6.2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	942.870	1.105.956	1.123.463	1.209.389	1.083.899
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
2.1	Urusan tenaga kerja						
2.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	77,52	72,52	80,43	NA	95,32
2.1.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	17	50	60	40	45
2.1.3	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,68	2,46	2,14	NA	4,68
2.1.4	Pencari Kerja yang ditempatkan	jiwa	765	1.115	1.009	1.300	1.315
	Penduduk bekerja	jiwa	55.679	56.352	64.928	NA	62.188
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,57	9	9,3	9,8	9,9
2.2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	92	92,2	92,4	100	92,8
2.2.3	Persentase KDRT	%	2,89	2,85	2,82	1,01	1,99
2.2.4	Tindak kekerasan terhadap perempuan	jiwa	1	2	2	7	2
2.3	Urusan pangan						
2.3.1	Rasio pemenuhan pangan (beras)	%\Kg	173,27	158,02	161,81	157,31	135,23
2.3.2	Jumlah produksi padi	Ton	31,143	31,042	32,721	32,721	
2.3.3	Kerawanan pangan	%	40	35	30	30	20
2.3.4	Skor pola pangan harapan		81,47	78,6	88,4	86,8	89,7
2.3.5	Ketersediaan pangan utama	%	100	100	100	100	100



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.3.6	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	Rp	942.870	1.105.956	1.123.463	1.209.389	1.083.899
2.4	Urusan pertanahan						
2.4.1	Luas lahan bersertifikat	ha	179,45	30,05	17.670,21	1.027,10	14.112,22
2.4.2	Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan	Jumlah	2.144	1.448	1.236	2.065	3.611
2.5	Urusan lingkungan hidup						
2.5.1	Persentase penanganan sampah	%	73	80	75	74	73
2.5.2	Persentase Penduduk berakses air minum	%		18	21,67	23,7	30,56
2.5.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	%		36	39,82	39,82	54,43
2.5.4	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%		0,13	0,13	76,2	76,2
2.5.5	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0
2.5.6	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0
2.5.7	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah/Provinsi		0	0	0	0	0
2.5.8	Hasil pengukuran indeks kualitas air		0	49,13	53,04	28,179	56,66
2.5.9	Hasil pengukuran indeks kualitas udara		0	0	0	97,736	83,9011
2.5.10	Persentase indeks kualitas tutupan lahan		0	0	0	0	0



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.5.11	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pennggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota	perusahaan	20	21	22	20	15
2.5.12	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1	2	3	5	5	5
2.5.13	Peningkatan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
2.5.14	Timbulan sampah yang ditangani	M ³ /tahun					19.384
2.5.15	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0	0	0	0	0
2.5.16	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	0	0	0	0	73
2.5.17	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota		0	0	0	0	Open dumping
2.5.18	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	izin	0	0	0	0	1



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.5.19	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	20	20	21	22	20	15
2.5.20	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	izin	0	0	0	0	0
2.5.21	Persentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK)	0%	0	0	0	0	0
2.5.22	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Ekosistem dan Keanakeragaman Hayati)	%	0	0	0	0	0
2.5.23	Presentase lahan kritis yang tertangani	%	0	0	0	0	0
2.5.24	Terlaksananya inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)/hak ulayat	0	0	0	0	0	0
2.5.52	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	dokumen	20	20	20	26	201
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.6.1	Rasio penduduk berktip per	%	72,48	50,25	80,43	71,41	83,89



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	satuan penduduk						
2.6.2	Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	Lembar	1.877	7.632	1.799	2.653	3.586
	Jumlah akta perkawinan yang dikeluarkan	Lembar	388	1.490	286	468	408
2.6.3	Kepadatan penduduk	Jiwa/ Km ²	-	32,96	28,37	28,60	29,07
2.6.4	Laju pertumbuhan penduduk	%	-	0,03	0,05	0,84	1,65
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	100	176	185	190	190
2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	103	39	50	75	75
2.7.3	Jumlah desa berstatus swasembada beras	%	6	12	12	12	12
2.7.4	Jumlah desa berstatus swasembada				3	3	3
2.7.5	Jumlah desa berstatus swadaya						74
2.7.6	Jumlah desa berstatus swakarya						24
2.7.7	Rasio pemenuhan pangan (beras)	KG	173,27	158,02	161,81	157,31	135,23
2.7.8	Jumlah produksi padi	TON	31.143,00	31.042,00	32.721,00	32.721,00	28.923,09
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
2.8.2	Rasio akseptor KB	-	83,79	79	84	85,92	123
2.8.3	Cakupan peserta KB aktif	pasangan	29,59	30,31	30,4	88,58	88,58
2.9	Urusan perhubungan						
2.9.1	Jumlah arus penumpang	Orang	427	449	450	346	350



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	angkutan umum						
2.9.2	Jumlah kendaraan bermotor	Unit	20.203	19.687	14.388	18.898	19.659
2.9.3	Jumlah Uji KIR angkutan umum	Kali	1.368	2.630	1.102	952	743
2.9.4	Jumlah Pelabuhan sungai dan Terminal Bis	Unit	5	5	6	7	7
2.9.5	Panjang jalan Kabupaten	Km	934,28	965,47	968,97	968,97	968,97
2.9.6	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	427,4	448,5	743,9	345,7	349,5
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika						
2.10.1	Jumlah jaringan komunikasi	%	33	33	34	37	37
2.10.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Per 1.000 penduduk	24	24	24	50	50
2.10.3	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	-	22	22	25	19	19
2.10.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	-	4	4	12	3	3
2.10.6	Rasio ketersediaan daya listrik	%		0,69	0,76	0,91	0,91
2.10.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%		76,67	98,6	99,84	99,84
2.10.7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%		80	82	82	82
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	46,33	53,54	90,77	90,77	90,77
2.11.2	Jumlah koperasi	unit	176	106	118	129	130
2.11.3	Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM	Unit	3.056	3.311	3.352	15.328	15.328



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.12	Urusan penanaman modal						
2.12.1	Rata-rata hari proses perijinan investasi	Hari	3-15	3-15	3-15	3-15	3-15
2.12.2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	38	39	40	41	43
2.12.3a	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rupiah	55,6	55,6	68,7	68,7	505,5
2.12.3b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Ribu US\$	84.084	31.590	61.517	62.044	4.879
2.12.4	Nilai investasi sektor industri	Rp.	Tidak ada laporan	Tidak ada laporan	Tidak ada laporan	Tidak ada laporan	Tidak ada laporan
2.12.5	Rasio daya serap tenaga kerja	-	300:1				
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga						
2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	39	0	19	19	21
2.13.2	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	33	0	19	21	22
2.13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	52	0	58	58	58
2.13.4	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	43		17	25	25
2.14	Urusan statistic						
2.14.1	Buku kab.barito timur dalam angka	-	1	1	1	1	1
2.14.2	Buku pdrb kab.barito timur	-	1	1	1	1	1
2.15	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
2.15.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk		0,01	0,002	0,003	0,003
2.15.2	Jumlah linmas	per 10.000 penduduk			0,0202	0,0202	0,0202
2.15.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	6	7	8	8	9



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.16	Perpustakaan dan Kearsipan						
2.16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jiwa		15.835	17.588	19.339	19.557
2.16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku		945	17.500	19.621	19.621
2.16.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun			60.190	71.928	101.120	101.300
2.16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buah					3.815
B	Urusan pemerintahan pilihan						
1	Urusan Kelautan dan Perikanan						
1.3	Produksi perikanan	Ton	998,5	1.026,60	1.130,40	1.180,80	1.268,40
2	Urusan pariwisata						
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	-	-	-	-	10.969
2.2	Jumlah Potensi Pariwisata yang telah di data	Obyek	3	4	4	7	18
2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang ada	Jenis	2	2	2	2	2
3	Urusan pertanian						
3.1	Luas sawah	Ha	8.065	8.065	8.065	8.843	9.374
3.2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	36,91	38,97	40,38	28,67	31,32
	Produktivitas padi ladang	kw/ha	24,43	25,06	25,27	17,06	15,58
3.3	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	19,97	19,74	10,81	10,03	18,56
3.4	Produksi padi	ton	31.143	31.042	32.721	25.012	28.505
3.5	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan,	%	2,83	1,35	6,03	3,91	6,54



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	dan Perikanan						
	Peternakan						
3.6	Jumlah produksi daging (sapi, kambing, babi)	Ton	243.019	273.997	263.086	206.304	368.382
3.7	Jumlah produksi daging ayam/ unggas	Ton	637.010	619.951	631.054	608.811	621.463
3.8	Jumlah Anjing yang di Vaksin untuk mencegah kasus Rabies	ekor	5.366	6.003	6.027	6.837	7.552
	Perkebunan						
3.10	Luas lahan perkebunan karet rakyat	Ha	54.173,02	54.373,02	54.373,02	54.167,02	54.260,18
3.11	Luas lahan perkebunan kopi rakyat	Ha	30,72	31,42	36,28	31,42	30,72
3.12	Luas lahan perkebunan kakao rakyat	Ha	68,66	74,01	82,66	79,36	74,01
3.13	Luas lahan perkebunan sawit rakyat	Ha	249,85	274,85	349,75	374,75	449,65
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	45,04	42,93	39,17	37,4	37,02
4.2	Produksi listrik	KWh	31.852.792	33.165.317	34.146.102	32.250.714	32.956.071
5	Urusan perdagangan						
5.1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	%	5,33	5,87	6,49	6,83	6,95
5.2	Jumlah pedagang besar	Unit	18	21	31	41	43
	Jumlah pedagang menengah	Unit	116	138	162	189	218
	Jumlah	Unit	126	131	152	170	210



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	pedagang kecil						
6	Urusan perindustrian						
6.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	5,54	6,04	6,60	7,06	7,34
6.2	Jumlah IKM	IKM	273	401	594	606	623
6.3	Tenaga kerja industri	orang	1.005	1.199	1.329	1.367	1.389
6.4	Nilai investsi industri	(000 Rp)	10.750	11.276	12.671,450	12.813,950	13.352,450
4	Aspek daya saing daerah						
4.1	Fokus kemampuan ekonomi daerah						
4.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	942.870	1.105.956	1.123.463	1.209.389	1.083.899
4.1.2	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	437.908	535.142	611.432	653.629	481.779
4.3	Fokus iklim berinvestasi						
4.3.1	Angka kriminalitas			0,12	0,78	0,16	0,16
4.3.2	Lama proses perijinan			3-15	3-15	3-15	3-4
4.3.3	Persenstase desa berstatus swasembada beras	buah	6	12	12	12	12
4.4	Fokus sumber daya manusia						
4.4.1	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)			71,45			
4.4.2	Rasio ketergantungan			45,00	44,00	46,00	31,79



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan mendapatkan informasi kemampuan riil keuangan daerah, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu tahun 2013 – 2018 dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan daerah yang sudah dilaksanakan dimasa lalu. Kemudian dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang, akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Barito Timur mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Kabupaten Barito Timur.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

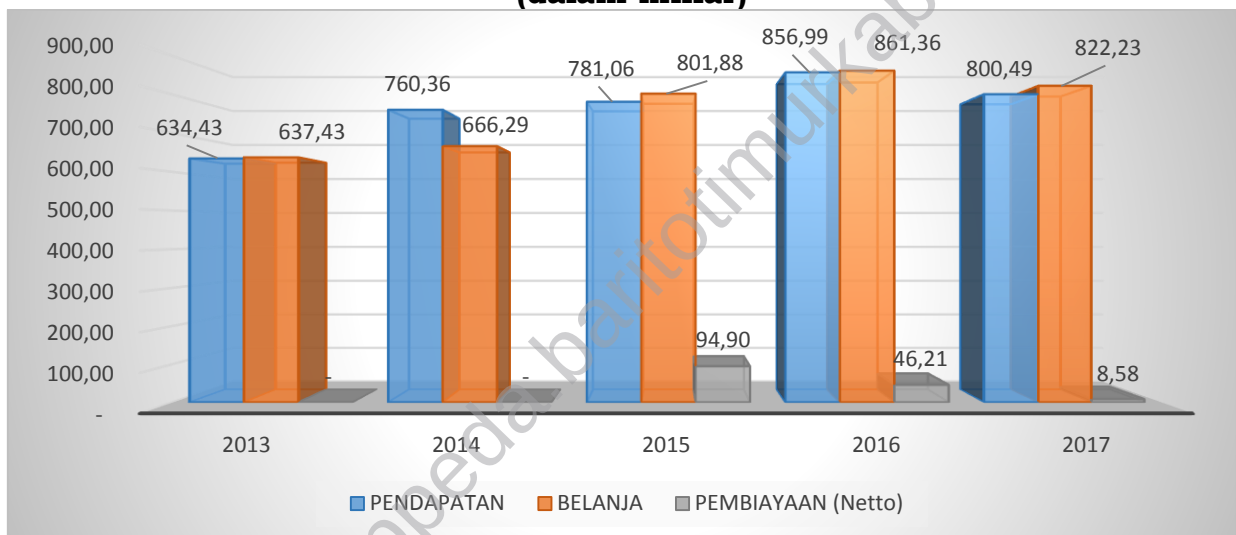
Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah



nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum, perkembangan pendapatan maupun belanja Kabupaten Barito Timur dari tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Pendapatan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2013 sebesar Rp. 634,43 miliar dan menjadi Rp. 800,49 miliar pada tahun 2017. Sedangkan pengeluaran belanja pada tahun 2013 sebesar Rp. 637,43 miliar dan meningkat hingga Rp. 822,23 miliar pada tahun 2017. Sedangkan pembiayaan (netto) secara tren mulai menurun dari tahun 2015 yang sebesar Rp. 94,90 miliar dan menjadi Rp. 8,58 miliar ditahun 2017.

Gambar 3. 1
Perkembangan APBD Kab. Barito Timur Tahun 2013-2017
(dalam miliar)



Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Struktur dan Realisasi Pendapatan



Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017 secara garis besar diuraikan dalam berikut ini:

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



Tabel 3. 1
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	PENDAPATAN	634.427.268.692	760.360.620.234	781.059.959.000	856.991.556.255	800.494.154.102	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15.688.848.273	60.796.731.625	37.869.997.230	34.092.360.685	85.515.924.312	40,38%
1.1.1	Pajak daerah	3.291.846.529	35.479.847.408	5.518.676.628	7.048.900.549	51.907.816.235	73,60%
1.1.2	Retribusi daerah	4.010.291.201	3.871.721.033	5.109.930.967	2.845.408.698	2.454.459.173	-9,35%
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.026.489.291	2.611.767.641	3.644.726.070	6.470.006.257	8.638.910.497	23,34%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	5.360.221.253	18.833.395.544	23.596.663.565	17.728.045.180	22.514.738.407	33,25%
1.2.	Dana Perimbangan	546.566.450.310	609.554.690.329	625.485.350.001	690.787.003.368	609.128.868.099	2,19%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	82.720.533.310	99.464.292.329	102.062.746.001	65.154.514.565	53.023.605.621	-8,51%
1.2.2	Dana alokasi umum	424.326.347.000	464.678.658.000	468.744.476.000	482.815.506.000	477.145.707.000	2,37%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.519.570.000	45.411.740.000	54.678.128.000	90.453.091.553	25.854.788.000	-8,14%
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	52.363.891.250	53.104.767.478	0,70%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.171.970.108	90.009.198.280	117.704.611.769	132.112.192.203	105.849.361.691	7,96%
1.3.1	Hibah	3.037.302.695	15.092.870.155	1.435.334.790	31.069.456.844	1.680.655.594	-11,16%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	20.091.114.065	22.595.274.367	19.427.739.175	24.145.026.359	26.567.196.097	5,75%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	37.789.426.000	44.282.576.000	61.342.732.000	1.212.544.000	-	-57,68%



No.	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				-		
1.3.6	Pendapatan Lainnya	11.254.127.348	8.038.477.758	35.498.805.804	75.685.165.000	77.601.510.000	47,13%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terakhir (2013-2017) selalu meningkat nilainya. Namun, peningkatan nilai pendapatan tersebut tidak diikuti peningkatan PAD secara konsisten. Meskipun secara tren nilai PAD dari tahun 2013-2017 terbilang meningkat, namun fluktuasi masih terjadi di dalamnya. PAD pernah meningkat secara signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dari Rp. 15,68 miliar menjadi Rp. 60,79 miliar. Namun dari tahun 2014 ke tahun 2016 nilainya justru menurun drastis menjadi Rp. 34,09 miliar di tahun 2016. Walaupun akhirnya di tahun 2017 terjadi peningkatan nilai PAD secara drastis menjadi Rp. 85,51 miliar, namun ketidakkonsistenan PAD tersebut perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Jika dianalisis secara lebih rinci, ketidakstabilan peningkatan PAD tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran hasil pajak daerah yang tidak menentu hasilnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka pengelolaan sumber-sumber pajak daerah harus lebih ditingkatkan.

Selain PAD, sumber pendapatan daerah yang lain seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah trennya semakin meningkat tiap tahun. Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Barito Timur pada tahun 2013 mencapai Rp. 546,566 miliar dan menjadi Rp. 609,128 miliar di tahun 2017. Sedangkan sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2013 sebesar Rp. 90,009 miliar dan menjadi Rp. 105,849 miliar di tahun 2017.

Untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah secara lebih jelas, maka dapat dilihat melalui capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) yang merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2013-2017 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2013



mencapai rasio 2,47% dan meningkat menjadi 8,00% pada tahun 2014, namun pada dua tahun selanjutnya yaitu 2015 dan 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 3,98%, yang kemudian pada tahun 2017 meningkat tajam mencapai angka 10,68%. Dari capaian DOFD pada lima tahun terakhir, dapat di rata-rata bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar pada angka 6,00%.

Secara keseluruhan perkembangan DOFD Kabupaten Barito Timur periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupate Barito Timur
Tahun 2013-2017

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2013	15.688.848.273	634.427.268.692	2,47%
2014	60.796.731.625	760.360.620.234	8,00%
2015	37.869.997.230	781.059.959.000	4,85%
2016	34.092.360.685	856.991.556.255	3,98%
2017	85.515.924.312	800.494.154.102	10,68%
Rata-rata	46.792.772.425	766.666.711.656	6,00%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Jika kita perbandingan kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan, maka dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) kontribusi PAD hanya sebesar 6,00%, Dana Perimbangan sebesar 80,62% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 13,38. Melihat rata-rata tersebut, peningkatan PAD harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kemandirian daerah.

Tabel 3. 3
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013-2017

No	PENDAPATAN DAERAH	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
1	Pendapatan Asli Daerah	2,47%	8,00%	4,85%	3,98%	10,68%	6,00%
2	Dana Perimbangan	86,15%	80,17%	80,08%	80,61%	76,09%	80,62%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11,38%	11,84%	15,07%	15,42%	13,22%	13,38%
	TOTAL	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Dengan struktur anggaran pendapatan yang demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur masih memiliki tingkat ketergantungan yang



sangat tinggi dengan Pemerintah Pusat, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus lebih memfokuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk menggali dan memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya daerah dalam peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat semakin mandiri dalam kemampuan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir target pendapatan khususnya pada pos PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak pernah mencapai target. Dengan kata lain bahwa realisasi PADmaupun Lain-lain Pendapatan yang Sah selalu dibawah target yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas keuangan daerah, maka sumber-sumber pendapatan khususnya dari PAD harus segera ditingkatkan. Adapun potensi penerimaan PAD harus segera dimanfaatkan.

Jika dilihat berdasarkan realisasi pendapatan terhadap target yang ditetapkan dalam beberapa tahun sebelumnya, maka sebagian besar target pendapatan daerah tidak tercapai. Target pendapatan daerah yang tercapai terjadi ditahun 2014 dimana pendapatan ditarget Rp. 741,54 miliar dan realiasinya Rp. 760,36 miliar. Sedangkan ditahun lainnya relatif selalu tidak tercapai.

Secara keseluruhan gambaran target dan realiasi komponen pendapatan daerah dari tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017
(dalam miliar)

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	PENDAPATAN	636,59	634,43	741,54	760,36	809,40	781,06	907,57	856,99	873,09	800,49
1	Pendapatan Asli Daerah	26,76	15,69	36,23	60,80	34,30	37,87	58,24	34,09	101,73	85,52
2	Dana Perimbangan	526,35	546,57	608,19	609,55	657,42	625,49	744,64	690,79	653,19	609,13
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	83,48	72,17	97,12	90,01	117,67	117,70	104,69	132,11	118,17	105,85

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode tahun 2013-2017 tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:(a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan data realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir, realisasi PAD yang mencapai target terjadi di tahun 2014 dan 2015 dimana target PAD tahun 2014 sebesar Rp. 36,23 miliar dan realisasinya mencapai Rp. 60,80 miliar, untuk target PAD tahun 2015 sebesar Rp. 34,30 miliar dan realisasinya mencapai Rp. 37,87 miliar.

Sedangkan realisasi PAD tahun 2013, 2016, dan tahun 2017 tidak mencapai target. Jika dilihat sedikit lebih rinci, sumber PAD yang realisasinya dalam kurun waktu 2013-2017 tidak pernah mencapai target ialah retribusi daerah. Untuk itu pengelolaan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan disamping juga tetap meningkatkan pengelolaan sumber PAD lainnya khususnya pajak daerah.

Jika dilihat secara umum, pada tahun 2017 sebagian besar PAD Barito Timur berasal dari pajak daerah dimana persentasenya mencapai 60,70 persen, padahal tahun-tahun sebelumnya pajak daerah berada jauh di bawah Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah. Disamping itu, retribusi daerah memiliki andil yang sangat rendah jika dibandingkan yang lain yakni hanya sebesar 2,45 milyar rupiah atau sebesar 2,86 persen dari total PAD. Hal ini dikarenakan retribusi daerah sangat jarang mencapai target PAD sehingga perlu adanya peningkatan “kantong-kantong” yang dapat meningkatkan PAD dari retribusi daerah. Sedangkan pada PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara umum mencapai target yang ditetapkan dimana pada tahun 2017 mencapai 8,64 milyar rupiah dengan proporsi sebesar 10,10 persen dari total PAD.

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017 secara garis besar diuraikan dalam Tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 3. 5
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017
(dalam miliar)

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	PENDAPATAN	636,59	634,43	741,54	760,36	809,40	781,06	907,57	856,99	873,09	800,49
1	Pendapatan Asli Daerah	26,76	15,69	36,23	60,80	34,30	37,87	58,24	34,09	101,73	85,52
a	Pajak daerah	6,38	3,29	7,56	35,48	7,76	5,52	26,00	7,05	50,41	51,91
b	Retribusi daerah	12,56	4,01	13,51	3,87	7,48	5,11	6,77	2,85	17,15	2,45
c	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3,03	3,03	2,61	2,61	3,70	3,64	5,18	6,47	7,15	8,64
d	Lain-lain PAD yang sah	4,79	5,36	12,54	18,83	15,36	23,60	20,29	17,73	27,02	22,51

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2013-2017 sebesar 97,67% (Tabel 3.6). PAD yang mengalami kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2014 dan 2017 yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan tahun 2014 sebesar 288% dengan realiasi sebesar Rp. 60,796 miliar dan tahun 2017 sebesar 151% dengan realisasi sebesar Rp. 85,515 miliar.

Tabel 3. 6
Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	PAD	Pertumbuhan
2013	15.688.848.273	-
2014	60.796.731.625	288%
2015	37.869.997.230	-38%
2016	34.092.360.685	-10%
2017	85.515.924.312	151%
Rata-rata	46.792.772.425	97,67%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

2) Dana Perimbangan

Bagian Dana Perimbangan ini adalah perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Dana Perimbangan merupakan pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3.7. dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2013–2017 realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan yang mencapai target terjadi di tahun 2013 dan 2014 saja. Target Dana Perimbangan di tahun 2013 sebesar RP. 526,35 miliar dan realisasinya Rp. 546,57 miliar. Sedangkan target Dana Perimbangan tahun 2014 sebesar RP. 608,19 miliar dan realisasinya sebesar Rp. 609,55 miliar.



Tabel 3.7
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017
(dalam miliar)

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	PENDAPATAN	636,59	634,43	741,54	760,36	809,40	781,06	907,57	856,99	873,09	800,49
2	Dana Perimbangan	526,35	546,57	608,19	609,55	657,42	625,49	744,64	690,79	653,19	609,13
a	Dana bagi hasil pajak	41,37	39,88	30,04	36,34	39,89	32,64	24,65	23,64	22,66	15,67
b	Dana bagi hasil bukan pajak (SDA)	21,13	42,84	68,06	63,12	80,45	69,42	42,45	41,52	48,15	37,35
c	Dana alokasi umum	424,33	424,33	464,68	464,68	468,74	468,74	482,82	482,82	477,15	477,15
d	Dana alokasi khusus	39,52	39,52	45,41	45,41	68,35	54,68	194,72	142,82	105,23	78,96

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



Jika dilihat dari pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2013-2017 sebesar 3,19% (Tabel 3.8) kenaikan penerimaan dari dana perimbangan yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,52% dan tahun 2016 sebesar 10,44%. Sedangkan penurunan yang cukup drastis terjadi di tahun 2017 dimana dana perimbangan turun sebesar 11,82%.

Realisasi pendapatan sumber Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 seperti yang disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran2013-2017

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan
2013	546.566.450.310	-
2014	609.554.690.329	11,52%
2015	625.485.350.001	2,61%
2016	690.787.003.368	10,44%
2017	609.128.868.099	-11,82%
Rata-rata	616.304.472.421	3,19%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Propinsi/Kabupaten/ Kota/ Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan.

Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013-2017 sebesar 11,96%. Pertumbuhan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 sebesar 24,71% dan tahun 2015 sebesar 30,77%. Sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2017 sebesar -19,88%. Artinya, terdapat penurunan capaian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2017 sebesar 19,88% dibandingkan realisasi 2016.



Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti yang disajikan dalam Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Pertumbuhan
2013	72.171.970.108	-
2014	90.009.198.280	24,71%
2015	117.704.611.769	30,77%
2016	132.112.192.203	12,24%
2017	105.849.361.691	-19,88%
Rata-rata	103.569.466.810	11,96%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2013-2017, disusun menggunakan pendekatan *money follow program* melalui penerapan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) atau belanja program dan kegiatan. Dalam beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017, realisasi belanja baik berupa BL maupun BTL besarnya selalu dibawah dari target pagu anggaran yang telah direncanakan.

Secara lengkap perkembangan target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun anggaran 2013-2017 terdapat pada Tabel 3.10 berikut ini:



Tabel 3.10
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017

No.	BELANJA DAERAH	TAHUN									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Target Anggaran	Realisasi	Target Anggaran	Realisasi	Target Anggaran	Realisasi	Target Anggaran	Realisasi	Target Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	364,26	321,12	394,35	343,25	487,89	417,53	498,90	474,75	523,85	501,80
2.	Belanja Langsung	339,83	316,31	403,23	323,04	433,08	384,35	497,17	386,61	408,90	320,43
	Jumlah	704,09	637,43	797,58	666,29	920,97	801,88	996,07	861,36	932,75	822,23

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



Jika dibandingkan antara realisasi dan target belanja daerah dalam kurun waktu 2013-2017, realisasi belanja secara keseluruhan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan disetiap tahunnya. Jika dilihat lebih rinci dalam kurun waktu tersebut, maka baik realisasi belanja tidak langsung (BTL) maupun belanja langsung (BL) semuanya tidak pernah mencapai target sama sekali.

Jika dilihat pertumbuhannya, Rata-rata pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2013-2017 sebesar 6,94% atau rata-rata nominal belanja sebesar RP. 757,83 miliar. Pertumbuhan belanja yang paling signifikan terjadi di tahun 2015 dari RP. 666,28 miliar ditahun 2014 menjadi Rp. 801,88 miliar ditahun 2016. Pertumbuhan yang negatif terjadi di tahun 2017, dimana besaran belanja daerah di tahun 2016 sebesar RP. 861,362 miliar menjadi Rp. 822,232 miliar di tahun 2017.

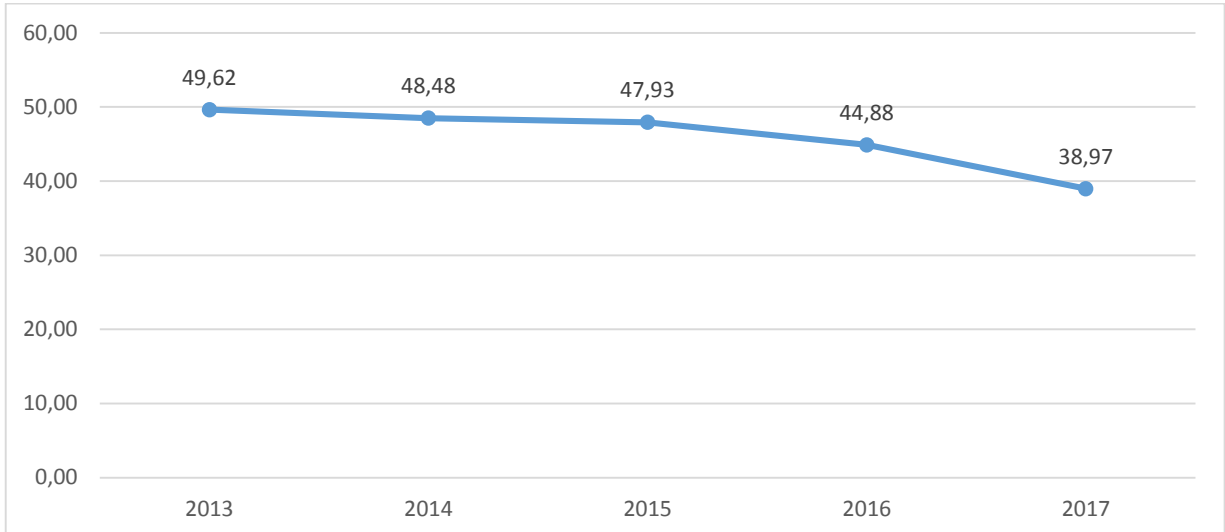
Tabel 3.11
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2013– 2017

Tahun	Belanja	Pertumbuhan
2013	637.431.025.410	-
2014	666.286.842.292	4,53%
2015	801.880.185.942	20,35%
2016	861.362.730.834	7,42%
2017	822.232.855.195	-4,54%
Rata-rata	757.838.727.935	6,94%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Dari sisi belanja daerah, kualitas belanja pembangunan dapat diindikasikan dari besaran dan peningkatan rasio belanja langsung terhadap total belanja. Semakin besar rasionya maka semakin berkualitas pula belanja pembangunan yang dilakukan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Barito Timur terus mengalami penurunan. Rasio belanja langsung terhadap total belanja pada tahun 2013 sebesar 49,62% dan terus menurun hingga mencapai 38,97% pada tahun 2017. Dengan melihat kondisi ini, untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Barito Timur maka kedepannya target proporsi belanja langsung harus terus ditingkatkan.

Gambar 3.2
Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
Kab. Barito Timur Tahun 2013-2017

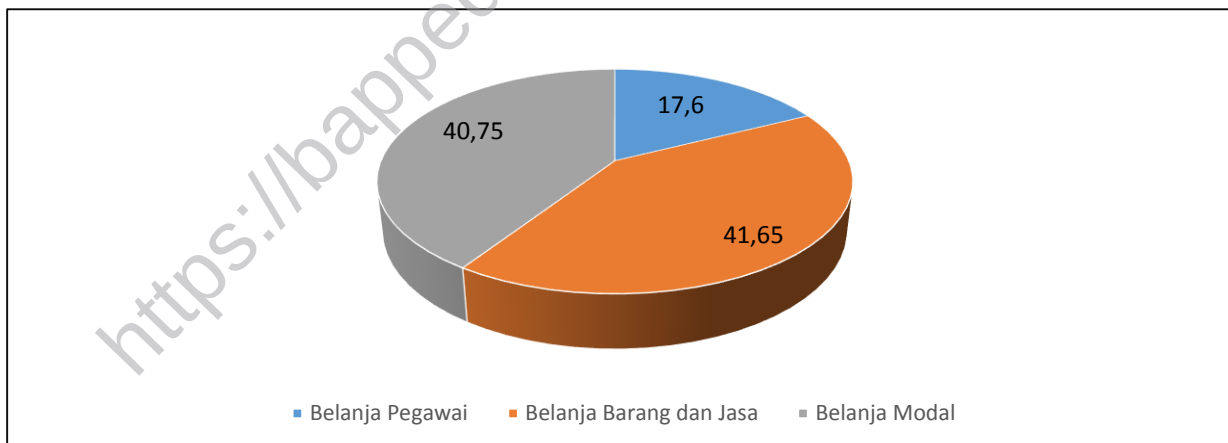


Sumber: BPS Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2013 – 2017 alokasi anggaran belanja langsung, 41,65 % digunakan untuk belanja barang dan jasa, disusul untuk belanja modal 40,75 % dan selanjutnya untuk belanja pegawai sebesar 17,60 % dari total belanja langsung (Gambar 3.3).

Skema struktur anggaran belanja langsung untuk masa 5 (lima) tahun kedepan akan didesain untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan memberikan alokasi anggaran untuk belanja modal lebih besar (atau untuk pelayanan masyarakat) kemudian untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai secara lebih efektif dan efisien.

Gambar 3. 3
Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



Jika dilihat lebih rinci dalam struktur realisasi belanja langsung, maka tren realisasi belanja langsung cenderung menurun. Tahun 2013 rasio realisasi belanja langsung mencapai 93,08%, menurun menjadi 80,11% pada tahun, 2014, meningkat kembali menjadi 88,75% di tahun 2015, dan terakhir tahun 2017 rasionya hanya mencapai 78,37%. Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan penyerapan anggaran belanja langsung dalam beberapa tahun terakhir cenderung kurang maksimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas belanja untuk masyarakat, setidaknya penyerapan anggaran perlu dimaksimalkan. Secara rinci perkembangan rasio antara target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Belanja Langsung APBD Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2013-2017(dalam miliar)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi BL	316,31	323,04	384,35	386,61	320,43
2	Target BL	339,83	403,23	433,08	497,17	408,90
3	Rasio	93,08%	80,11%	88,75%	77,76%	78,37%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Untuk perkembangan keseluruhan APBD Kabupaten Barito Timur dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.13.



Tabel 3.13
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2018

No.	Uraian	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN	634.427.268.692	760.360.620.234	781.059.959.000	856.991.556.255	800.494.154.102
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15.688.848.273	60.796.731.625	37.869.997.230	34.092.360.685	85.515.924.312
1.1.1	Pajak daerah	3.291.846.529	35.479.847.408	5.518.676.628	7.048.900.549	51.907.816.235
1.1.2	Retribusi daerah	4.010.291.201	3.871.721.033	5.109.930.967	2.845.408.698	2.454.459.173
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.026.489.291	2.611.767.641	3.644.726.070	6.470.006.257	8.638.910.497
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	5.360.221.253	18.833.395.544	23.596.663.565	17.728.045.180	22.514.738.407
1.2.	Dana Perimbangan	546.566.450.310	609.554.690.329	625.485.350.001	690.787.003.368	609.128.868.099
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	82.720.533.310	99.464.292.329	102.062.746.001	65.154.514.565	53.023.605.621
1.2.2	Dana alokasi umum	424.326.347.000	464.678.658.000	468.744.476.000	482.815.506.000	477.145.707.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.519.570.000	45.411.740.000	54.678.128.000	90.453.091.553	25.854.788.000
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	52.363.891.250	53.104.767.478
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.171.970.108	90.009.198.280	117.704.611.769	132.112.192.203	105.849.361.691
1.3.1	Hibah	3.037.302.695	15.092.870.155	1.435.334.790	31.069.456.844	1.680.655.594
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	20.091.114.065	22.595.274.367	19.427.739.175	24.145.026.359	26.567.196.097
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	37.789.426.000	44.282.576.000	61.342.732.000	1.212.544.000	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah				-	



No.	Uraian	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Daerah lainnya					
1.3.6	Pendapatan Lainnya	11.254.127.348	8.038.477.758	35.498.805.804	75.685.165.000	77.601.510.000
2	BELANJA	637.431.025.410	666.286.842.292	801.880.185.942	861.362.730.834	822.232.855.195
2.1	Belanja Tidak Langsung	321.122.337.682	343.246.937.046	417.528.181.926	474.752.029.380	501.798.950.134
2.1.1	Belanja Pegawai	257.638.189.146	287.250.383.585	321.654.416.656	317.970.242.373	321.263.724.956
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	25.479.075.000	18.611.564.200	17.495.050.000	33.193.787.499	33.783.317.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.741.617.500	2.741.990.000	244.600.000	268.660.000	225.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	2.234.650.000	6.755.521.797
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	26.814.267.280	34.192.999.261	77.684.115.270	120.634.689.508	139.321.386.381
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.999.188.756	-	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	316.308.687.727	323.039.905.245	384.352.004.016	386.610.701.454	320.433.905.061
2.2.1	Belanja Pegawai	33.876.701.125	40.894.204.674	41.656.779.500	104.563.893.874	83.613.561.121
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.547.061.530	143.026.343.351	181.968.845.174	136.197.474.791	113.069.750.187
2.2.3	Belanja Modal	135.884.925.072	139.119.357.221	160.726.379.343	145.849.332.789	123.750.593.752
	SURPLUS / DEFISIT	(3.003.756.718)	94.073.777.942	(20.820.226.943)	(4.371.174.579)	(21.738.701.093)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)			94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					



No.	Uraian	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah					
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti kepala daerah dan kepala bagian keuangan serta kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya mengenai posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Jumlah aset dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Tercatat nilai aset Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,155 triliun, menjadi Rp. 1,232 triliun pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp. 1,341 triliun pada tahun 2017.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar Kabupaten Barito Timur mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Nilai aset lancar pada tahun 2015 sebesar Rp. 115,03 miliar, menurun menjadi Rp. 65,688 miliar pada tahun 2016 dan menurun kembali menjadi Rp. 31,908 miliar pada tahun 2017.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang untuk Kabupaten Barito



Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 35,136 miliar dan meningkat menjadi Rp. 41,515 miliar pada tahun 2017. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 ke 2017 dimana nilai kewajiban pada tahun 2015 sebesar Rp. 782 juta menjadi Rp. 23,017 miliar pada tahun 2017. Nilai kewajiban pada tahun 2015 dan 2016 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek dan pada 2017 lebih dari 99% juga merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kabupaten Barito Timur meningkat dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,155 triliun menjadi 1,341 triliun pada tahun 2017. Itu menunjukkan bahwa sumberdaya keuangan daerah Kabupaten Barito Timur juga semakin baik.



Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Barito Timur

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1	ASET				
5.3.1.1	ASET LANCAR				
5.3.1.1.1	Kas				
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas daerah	93.638.802.154,64	41.227.250.874,91	4.279.633.226,69	-73
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	360.277.794,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	445.609.320,20	91.166,20	123.869,20	-32
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	0,00	3.010.098.385,40	4.055.300.812,40	17
5.3.1.1.1.5	Kas Lainnya	464.305.529,20	1.981.189.809,50	251.971.571,01	120
5.3.1.1.2	Piutang Pendapatan	16.973.567.570,01	14.803.916.935,41	13.523.964.574,22	-11
5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	1.225.117.614,00	1.583.317.228,00	4.016.749.988,54	91
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	(4.887.642.977,00)	(4.130.661.852,80)	(4.249.893.049,47)	-6
5.3.1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	35.812.886,85	41.112.958,25	74.270.375,00	48
5.3.1.1.6	Persediaan	6.775.756.053,90	7.172.373.601,17	9.956.148.255,49	22
	JUMLAH ASET LANCAR	115.031.605.945,80	65.688.689.106,04	31.908.269.623,08	-47
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	
	Investasi Jangka	0,00	0,00	0,00	



No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Panjang kepada Entitas Lainnya				
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	
	Dana Bergilir	0,00	0,00	0,00	
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
5.3.1.3	ASET TETAP				
5.3.1.3.1	Tanah	215.298.530.835,00	230.063.141.260,00	230.205.139.160,00	3



No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1.3.2	Peralatan dan mesin	193.066.372.023,91	215.924.473.981,30	218.177.290.618,20	6
5.3.1.3.3	Gedung dan bangunan	420.561.031.163,11	443.724.134.267,12	419.472.369.821,92	0
5.3.1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	474.800.133.472,69	565.935.224.147,69	630.345.055.525,69	15
5.3.1.3.5	Aset tetap lainnya	11.708.211.648,00	13.899.614.674,57	16.407.558.545,01	18
5.3.1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	5.821.696.223,00	5.027.895.028,00	3.507.455.728,00	-22
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(327.714.188.370,90)	(361.406.306.465,90)	(366.787.267.647,07)	6
	JUMLAH ASET TETAP	993.541.786.994,81	1.113.168.176.892,77	1.151.327.601.751,75	8
	DANA CADANGAN				
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.4	ASET LAINNYA				
5.3.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	2.877.556.175,67	2.879.135.876,64	2.491.750.224,10	-7
5.3.1.4.2	Aset Tidak Berwujud	629.489.600,01	812.252.866,67	646.761.766,67	4



No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1.4.3	Aset Lain-lain	8.016.549.607,00	8.320.184.959,84	113.779.833.293,28	636
	JUMLAH ASET LAINNYA	11.523.595.382,68	12.011.573.703,15	116.918.345.284,05	439
	JUMLAH ASET	1.155.233.196.627,29	1.232.488.350.296,95	1.341.669.793.010,88	8
5.3.2	KEWAJIBAN				
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.144.335,00	11.540.144,00	10.591.822,00	-10
	Utang Bunga				
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	62.084.561,33	86.955.350,00	281.341.812,50	132
5.3.2.1.3	Utang Beban	558.210.169,00	1.258.536.890,70	2.026.651.163,00	93
5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	148.830.036,84	148.830.036,84	20.550.515.506,00	6854
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	782.269.102,17	1.505.862.421,54	22.869.100.303,50	756
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Dalam Negeri	0	0		
5.3.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	148.830.036,84	
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0	148.830.036,84	



No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JANGKA PANJANG				
	JUMLAH KEWAJIBAN	782.269.102,17	1.505.862.421,54	23.017.930.340,34	761
5.3.3	EKUITAS				
5.3.3	EKUITAS	1.154.450.927.525,12	1.230.982.487.875,41	1.318.651.862.670,54	7
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.155.233.196.627,29	1.232.488.350.296,95	1.341.669.793.010,88	8

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Kab. Barito Timur TA. 2013-2018



3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,
5. serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
6. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
7. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.



2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD dan atau Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja, belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja tidak langsung pada belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta belanja langsung pada belanja pegawai terdiri dari insentif honor kegiatan, lembur dan lain-lain. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Barito Timur tahun 2015 hingga tahun 2017 relatif meningkat dari 417,52 miliar ditahun 2015 menjadi Rp. 501,79 miliar ditahun 2017. Jika besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut dibandingkan dengan total pengeluaran maka nilainya meningkat dari 52,07% ditahun 2015 menjadi 61,03% ditahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, maka besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur harus mulai ditekan untuk meningkatkan proporsi anggaran belanja kepada masyarakat. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Barito Timur

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran 2015	417.528.181.925,96	801.880.185.942,38	52,07%
2	Tahun Anggaran 2016	474.752.029.380,49	861.362.730.834,20	55,12%
3	Tahun Anggaran 2017	501.798.950.134,00	822.232.855.194,61	61,03%

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu, besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya.

Besaran surplus/defisit riil anggaran yang terjadi di Kabupaten Barito Timur dari tahun 2013-2017 relatif berfluktuasi. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat bahwa pada tahun 2014 terjadi surplus anggaran hingga mencapai Rp. 94,037 miliar. Namun pada tahun berikutnya terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran terbesar dalam kurun waktu 2013-2017 terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 21,73 miliar.

Tabel 3.16
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)

NO	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	634.427,27	760.360,62	781.059,96	856.991,56	800.494,15
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	637.431,03	666.286,84	801.880,19	861.362,73	822.232,86
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
	Surplus/Defisit riil	-3.003,76	94.073,78	-20.820,23	-4.371,17	-21.738,70

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Pada dasarnya, defisit riil anggaran yang terjadi pada tahun 2015-2017 dapat ditutup oleh pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA. Besaran SiLPA pada tahun 2015 sebesar Rp. 94,89 miliar atau sebesar 456% dari nilai defisit anggaran yang sejumlah Rp. 20,82 miliar. Sedangkan SiLPA tahun 2016 sebesar Rp. 46,20 miliar atau 10,57% dari nilai defisit anggaran yang sejumlah Rp. 4,37 miliar, dan SiLPA tahun 2017 sebesar Rp. 8,57 miliar atau sebesar 39% dari nilai defisit anggaran yang sejumlah



Rp. 21,73 miliar. Defisit anggaran yang terjadi di tahun 2017 perlu mendapat perhatian mengingat jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupnya. Oleh karena itu untuk menjaga kesehatan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan defisit anggaran harus memperhatikan proyeksi realistis penerimaan pembiayaan yang mungkin dicapai.

Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)		
		2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	456%	1057%	39%
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6	Penerimaan Piutang Daerah			

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Tabel 3.18
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	94.895.850.463,0 4	100,0 0	46.207.090.092,0 1	100,00	8.576.313.788,10	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	6.462.497.229,74	6,81	(23.807.180.668,08)	(51,52)	(14.807.335.643,78)	(172,65)
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(34.274.435.740,16)	(36,12)	(53.856.846.282,00)	(116,56)	(135.519.516.703,14)	(1.580,16)
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	21.130.164.133,0 0	22,27	30.735.920.844,0 0	66,52	698.317.674.880,93	8.142,40
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						



No	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
7.	Kegiatan lanjutan						

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendapatan merupakan bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Kerangka pendanaan dijadikan dasar sebagai acuan dalam menetapkan jumlah anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya. Oleh karena itu, kualitas pembangunan daerah juga dipengaruhi oleh kualitas kerangka pendanaan yang disusun.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Analisis proyeksi pendapatan dan belanja dilakukan untuk mengetahui estimasi besaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Barito Timur dalam kurun waktu 2019-2023. Proyeksi ini dilakukan berdasarkan pada data realisasi APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dengan melihat kondisi masa lalu dan pertumbuhan yang ada maka dapat dilakukan proyeksi untuk tahun 2019 hingga 2023. Selain itu dalam memroyeksi, yang perlu menjadi pertimbangan adalah berbagai variabel yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan kedepannya, baik faktor yang bersifat *tangible* maupun *intangible*. Oleh karena itu, proyeksi yang dilakukan tidak semata-mata didasarkan pada rata-rata pertumbuhan masa lalu semata, namun melihat beberapa faktor lainnya yang dirasa memengaruhi.

Pendapatan di proyeksi tumbuh antara 3-4% pertahun dimana komponen didalamnya yaitu PAD di prediksi tumbuh $\pm 3\%$, dana perimbangan diprediksi tumbuh $\pm 4,5\%$, begitu juga sumber lain-lain pendapatan yang sah diprediksi tumbuh $\pm 1,3-14\%$.

Belanja di proyeksi tumbuh antara $\pm 3-8\%$ pertahun dimana pertumbuhan belanja tidak langsung diprediksi sebesar $\pm 4\%$, dan belanja langsung diprediksi tumbuh sebesar $\pm 4\%$.

Defisit anggaran tahun 2019 diprediksi sebesar Rp. 53,58 miliar dan akan terus menurun hingga menjadi surplus Rp. 5 miliar pada tahun 2023. Proyeksi besaran surplus/defisit anggaran tersebut sudah memperhatikan nilai proyeksi pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupnya.

Adapun proyeksi pertumbuhan pendapatan dan belanja tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.19
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Barito Timur

NO	URAIAN	Kondisi Awal 2018	PROYEKSI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	854.899.784.470	954.296.756.601	987.159.378.560	1.025.191.307.119	1.065.124.832.103	1.107.055.033.336
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	41.628.415.463	88.437.482.415	88.437.482.415	91.008.367.915	93.707.797.690	96.542.198.954
1.1.1	Pajak daerah	10.262.162.779	38.503.000.000	38.503.000.000	40.428.150.000	42.449.557.500	44.572.035.375
1.1.2	Retribusi daerah	1.906.769.752	12.932.710.000	12.914.710.000	13.560.445.500	14.238.467.775	14.950.391.164
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.635.182.355	8.629.483.615	8.629.483.615	8.629.483.615	8.629.483.615	8.629.483.615
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	20.824.300.576	28.372.288.800	28.390.288.800	28.390.288.800	28.390.288.800	28.390.288.800
1.2.	Dana Perimbangan	673.685.666.773	713.792.040.000	745.633.432.200	779.066.894.011	814.172.028.911	851.032.420.555
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	76.114.768.831	72.627.918.000	76.259.313.900	80.072.279.595	84.075.893.575	88.279.688.253
1.2.2	Dana alokasi umum	478.975.191.000	491.080.267.000	515.634.280.350	541.415.994.368	568.486.794.086	596.911.133.790
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.601.152.010	73.119.659.000	76.775.641.950	80.614.424.048	84.645.145.250	88.877.402.512
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	68.994.554.932	76.964.196.000	76.964.196.000	76.964.196.000	76.964.196.000	76.964.196.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	139.585.702.235	152.067.234.186	153.088.463.945	155.116.045.193	157.245.005.502	159.480.413.827



NO	URAIAN	Kondisi Awal 2018	PROYEKSI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.3.1	Hibah	13.000.000.000	14.359.800.000	14.122.500.000	14.828.625.000	15.570.056.250	16.348.559.063
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	23.551.127.235	25.170.595.186	26.429.124.945	27.750.581.193	29.138.110.252	30.595.015.765
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	27.750.000.000	27.096.175.000	27.096.175.000	27.096.175.000	27.096.175.000	27.096.175.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.3.6	Pendapatan Lainnya	73.784.575.000	83.940.664.000	83.940.664.000	83.940.664.000	83.940.664.000	83.940.664.000
2	BELANJA	833.125.412.914	960.133.786.721	1.003.339.807.123	1.049.746.436.009	1.074.559.557.939	1.112.055.033.336
2.1	Belanja Tidak Langsung	541.949.731.875	545.307.909.924	574.354.246.221	595.871.005.667	618.383.432.505	651.940.107.546
2.1.1	Belanja Pegawai	340.587.363.084	366.174.308.153	384.523.428.608	403.749.600.038	423.937.080.040	445.133.934.042
2.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	58.395.778.780	13.934.700.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	889.520.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	5.143.571.000	7.024.949.880	7.024.949.880	7.024.949.880	7.024.949.880
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	141.627.070.011	154.955.330.771	152.705.867.733	154.996.455.749	157.321.402.585	159.681.223.624



NO	URAIAN	Kondisi Awal 2018	PROYEKSI				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	291.175.681.039	414.825.876.797	428.985.560.902	453.875.430.342	456.176.125.434	460.114.925.790
2.2.1	Belanja Pegawai	67.196.792.198	74.610.663.072	85.797.112.180	94.585.091.822	95.064.543.764	96.624.134.416
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.365.117.464	199.269.392.537	150.144.946.316	184.997.629.480	185.935.382.682	186.346.544.945
2.2.3	Belanja Modal	89.613.771.377	140.945.821.189	193.043.502.406	174.292.709.040	175.176.198.988	177.144.246.429
	SURPLUS / DEFISIT	21.774.371.556	(5.837.030.120)	(16.180.428.563)	(24.555.128.890)	(9.434.725.836)	(5.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	4.269.041.405	5.837.030.120	16.180.428.563	24.555.128.890	9.434.725.836	5.000.000.000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	4.269.041.405	5.837.030.120	16.180.428.563	24.555.128.890	9.434.725.836	5.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah						
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman						
3.1.6	Penerimaan piutang daerah						



NO	URAIAN	Kondisi Awal 2018	PROYEKSI				
			2019	2020	2021	2022	2023
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah						
3.2.3	Pembayaran pokok utang		-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah						
	PEMBIAYAAN NETTO	4.269.041.405	5.837.030.120	16.180.428.563	24.555.128.890	9.434.725.836	5.000.000.000

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendapanaan digunakan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk belanja langsung pembangunan dalam kurun waktu 2019-2023. Penghitungan kerangka pendanaan setidaknya memperhatikan beberapa hal diantaranya besaran penerimaan yang mungkin didapat dan besaran pengeluaran daerah yang mungkin terjadi. Penerimaan yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran yang terdiri dari belanja wajib dan mengikat dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran tersebut yang nantinya akan menjadi kapasitas riil keuangan daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2019 hingga 2023 diproyeksi mengalami fluktuasi. Kapasitas riil ditahun 2019 diproyeksi sebesar Rp. 414.825 miliar, tahun 2020 diproyeksi sebesar Rp. 428.985 miliar, tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp. 453.875 miliar, tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp. 456.176miliar dan tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 460.114miliar. Adapun besaran kapasitas riil keuangan secara lengkap daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.20
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Timur

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	954.296.756.601	987.159.378.560	1.025.191.307.119	1.065.124.832.103	1.107.055.033.336
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.837.030.120	16.180.428.563	24.555.128.890	9.434.725.836	5.000.000.000
3	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0
Total penerimaan		960.133.786.721	1.003.339.807.123	1.049.746.436.009	1.074.559.557.939	1.112.055.033.336
Dikurangi:						
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	545.307.909.924	574.354.246.221	595.871.005.667	618.383.432.505	651.940.107.546
Kapasitas riil kemampuan keuangan		414.825.876.797	428.985.560.902	453.875.430.342	456.176.125.434	460.114.925.790

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



Tabel 3.21
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Timur

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	414.825.876.797	428.985.560.902	453.875.430.342	456.176.125.434	460.114.925.790
2	Prioritas I	128.307.730.840	128.655.397.482	129.755.080.048	130.965.524.901	132.129.447.220
3	Prioritas II	85.594.634.414	94.351.148.734	116.492.579.332	114.980.969.849	111.762.306.933
4	Prioritas III	200.923.511.543	205.979.014.686	207.627.770.962	210.229.630.684	216.223.171.637

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan daerah bertujuan untuk memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat serta mengatasi permasalahan daerah. Pembangunan yang berkualitas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan daerah. Dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan daerah maka perlu dilakukan perumusan kebijakan publik, selanjutnya dalam perumusan kebijakan publik, salah satu hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Dalam suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah yang berasal dari permasalahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Selain itu, permasalahan pembangunan bisa dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan periode lalu untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

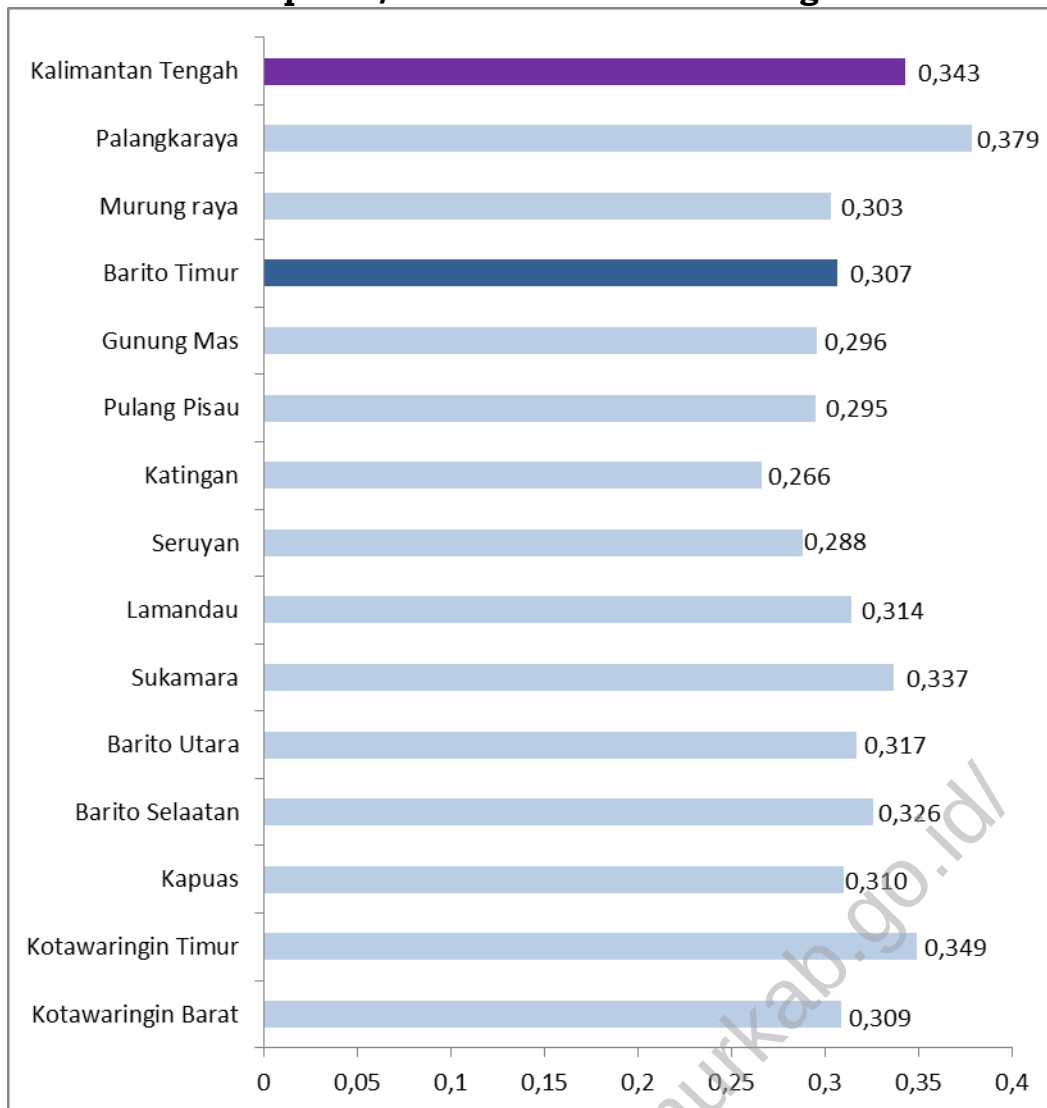


Pembangunan daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kehidupan antari ndividu semakin terasa. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini,” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Pada tahun 2017, Kabupaten Barito Timur memiliki rasio gini sebesar 0,307 sehingga dapat dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Barito Timur termasuk dalam kategori sedang yang berarti bahwa tingkat pemerataan sedang, karena terletak diantara nilai 0,3 dan 0,4 atau dibawah angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang.

Indeks Gini Kabupaten Barito Timur hampir mendekati kategori rendah, sehingga Kabupaten Barito Timur harus konsisten dalam menggalakkan program kesejahteraan bagi masyarakat. Dilihat pada tabel di bawah ini, indeks gini kabupaten Barito Timur masih di atas Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 4.1
Indeks Gini Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2017



Sumber: Kalimantan Tengah dalam angka 2018

Indeks Gini yang menyatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang, maka dapat disimpulkan masih terdapat pendapatan penduduk yang tidak merata. Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah **“Belum meratanya kesejahteraan masyarakat Barito Timur”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh fokus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

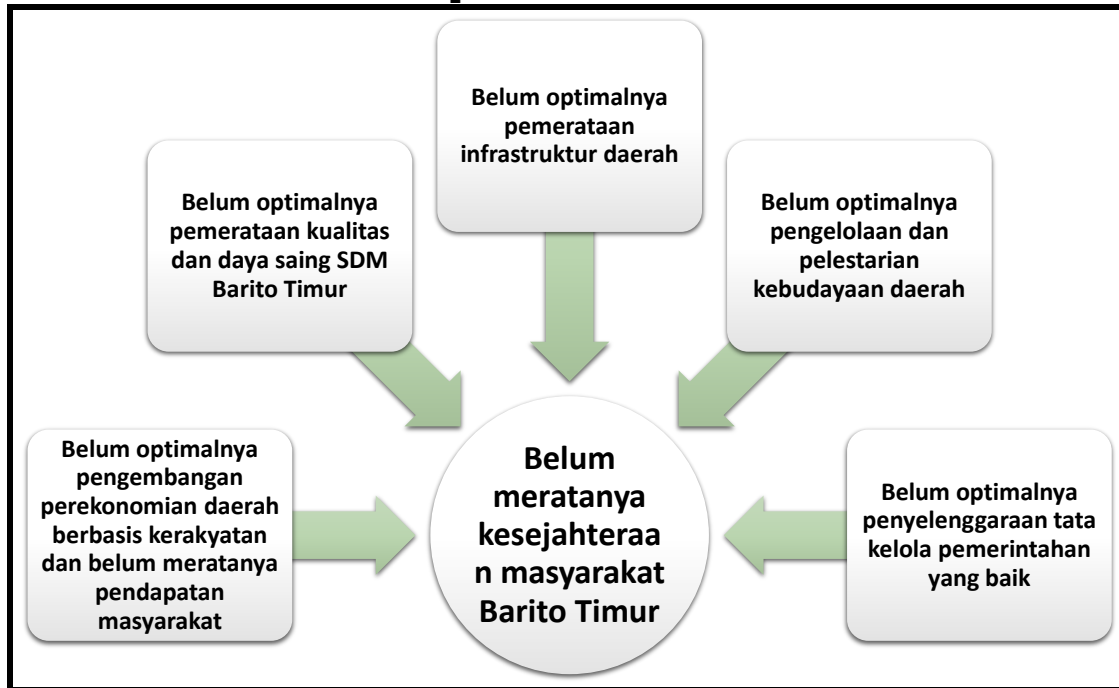
1. Fokus Ekonomi: Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat



2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar: Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia: Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Barito Timur
4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya: Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah
5. Fokus Permasalahan Birokrasi: Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan kelima fokus permasalahan, maka akan diketahui fokus pembangunan Barito Timur dalam lima tahun kedepan. Melalui fokus pembangunan yang menjabarkan permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari permasalahan dari aspek urusan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Sehingga diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan utama, fokus permasalahan serta permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur yang disajikan pada Gambar 4.2 sebagai berikut.

Gambar 4.2
Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Timur



Fokus permasalahan dan permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar diatas mempunyai permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik per bidang urusan. Penjabaran permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Fokus Permasalahan Perekonomian Daerah

Perekonomian memegang peran yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal dan belum meratanya pendapatan masyarakat.

A. Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan dan Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat

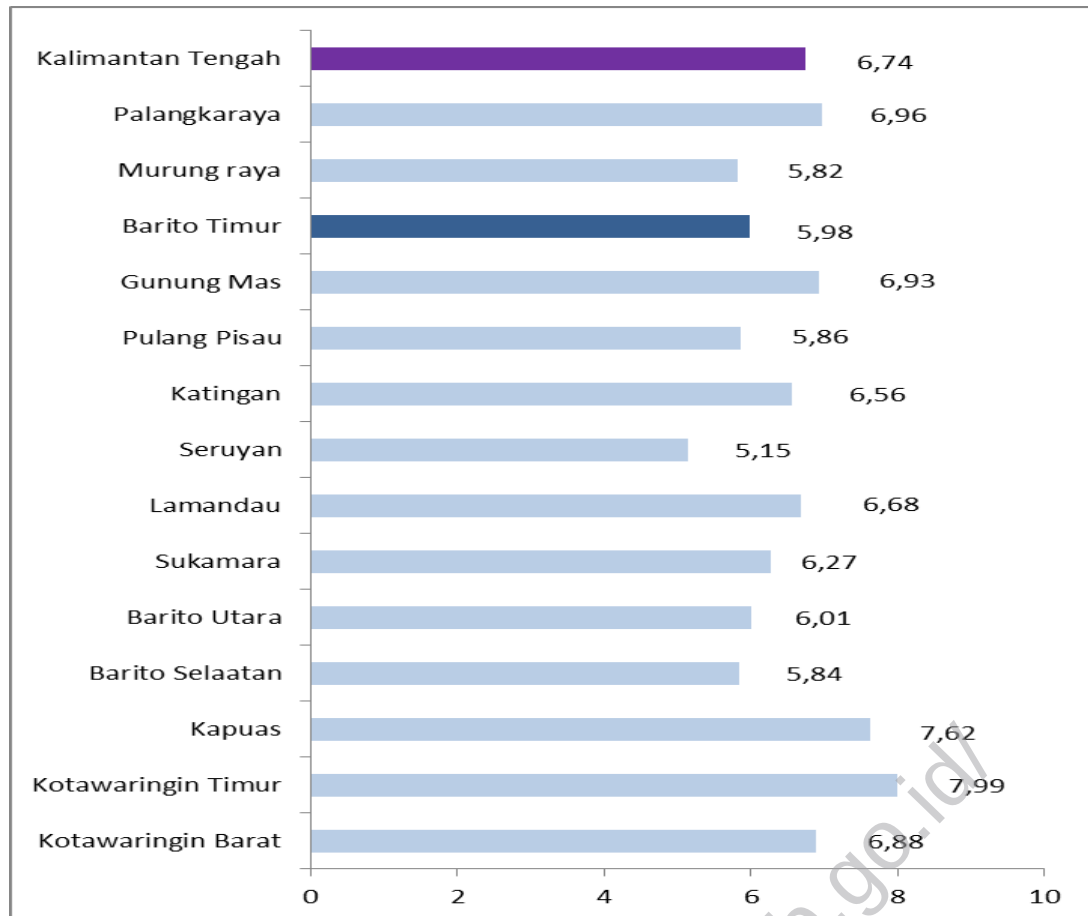
- **Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan**



Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya merupakan sektor yang diunggulkan sebagai sektor yang berkontribusi lebih dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam perkembangannya, sektor pertanian dan turunannya sedang dalam tahap menjadi sektor yang paling diunggulkan dibandingkan dengan pertambangan. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan secara langsung sudah merusak ekosistem yang ada di Barito Timur.

Sektor pertanian dan turunannya yang menjadi unggulan ini belum berkembang secara maksimal. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor ekonomi kerakyatan, dimana 55,61 persen pekerja usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor ini. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Gambar 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2017



Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka 2018

Dilihat pada gambar di atas, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Timur berada pada urutan teratas ke 10 dari 14 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2017. Kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang tertinggi adalah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebesar 7,99 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Seruyan yaitu sebesar 5,15 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur juga berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,74 persen di tahun 2017.

Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang mumpuni, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian



ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan	Urusan Pertanian	Masih rendahnya mutu hasil dan produktivitas sektor pertanian	Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengolah hasil pertanian
			Belum adanya alat-alat pertanian yang belum memadai
			Masih rendahnya kemampuan akses petani terhadap pupuk dan bibit unggul
			Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Urusan perikanan dan Kelautan	Masih rendahnya produktivitas sektor perikanan	Masih rendahnya tingkat produksi perikanan
			Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan
			Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani pembudidaya dan nelayan
	Urusan pariwisata	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Barito Timur.	Belum tersedianya obyek wisata yang memadai
			Kurang maksimalnya aksesibilitas ke Obyek Wisata
			Kurang optimalnya sinergisitas lintas sektoral



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
			dalam bidang kepariwisataan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan para pelaku usaha pariwisata
			Kurang tersedianya sarana dan prasarana di Destinasi Wisata
			Kurang optimalnya informasi dan promosi potensi Pariwisata Kabupaten Barito Timur
			Kurang optimalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kepariwisata
	Urusan Koperasi dan UMKM	Belum optimalnya peranan koperasi dan UMKM dalam perekonomian kerakyatan	masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat
			Belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat
			Masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik
			Jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta yang rendah terutama dikalangan Penduduk asli
			Masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya
	Urusan Industri	Masih rendahnya daya saing produk industri kecil menengah	Belum maksimalnya inovasi produk hasil industri
			Akses pemasaran hasil industri masih terbatas
			Hasil industri belum berkualitas ekspor
	Urusan Perdagangan	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan	Akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit
			Daya beli masyarakat masih rendah
			Jumlah pedagang masih rendah



➤ **Belum meratanya pendapatan masyarakat**

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Barito Timur. Salah satu pendekatan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat adalah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendekatan ini memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Asumsinya jika pendapatan masyarakat meningkat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat.

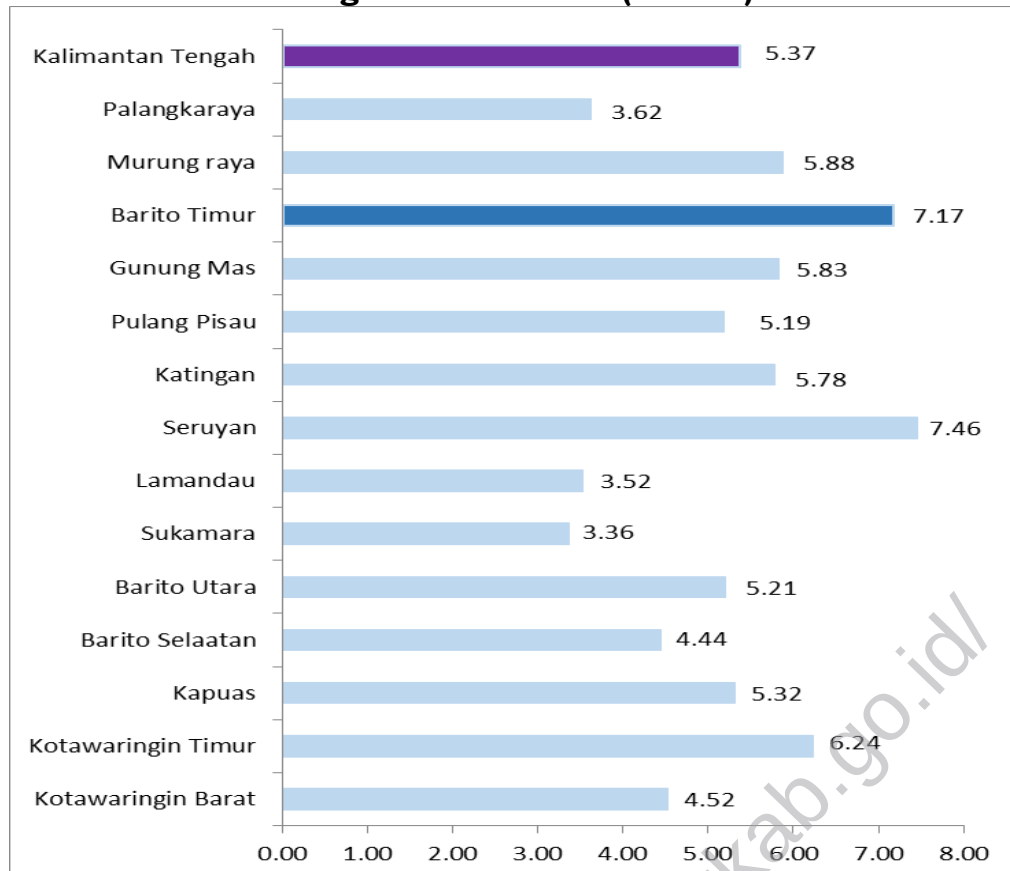
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi (per kapita per bulan) di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Barito Timur selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini masih wajar karena kenaikan biaya hidup atau juga menyangkut kesejahteraan dan pendapatan masyarakat bertambah. Pada tahun 2017 garis kemiskinan mencapai 467.090 sedangkan jumlah penduduk miskin sebesar 8.560 atau 7,17 persen dari total penduduk Kabupaten Barito Timur.

Garis kemiskinan Kabupaten Barito Timur menunjukkan angka Rp 467.090,- per bulan, dengan asumsi apabila jumlah anggota keluarga ada 4 orang maka pengeluaran keluarga miskin mencapai Rp 1.900.000,- atau masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Barito Timur sebesar Rp 2.300.000,-. Sebanyak 92,83 masyarakat Barito Timur hidup di atas garis kemiskinan, sedangkan sisanya di bawah garis kemiskinan.

Dilihat pada tabel di bawah, Angka kemiskinan kabupaten Barito Timur berada di urutan ke 13 dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah yaitu sebesar 7,17 persen dari total penduduk Barito Timur pada tahun 2017. Angka kemiskinan Kabupaten Barito Timur juga berada diatas angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,37 dari total penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2017. Angka kemiskinan tertinggi diperoleh Kabupaten Seruyan sebesar 7,46, sedangkan angka kemiskinan dengan nilai terkecil se Provinsi

Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamara dengan nilai sebesar 3,35.

Gambar 4.4
Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (Persen)



Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka 2018

Tingginya angka kemiskinan disebabkan karena beberapa hal antara lain semakin lesunya kegiatan pertambangan batu bara sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja lokal, turunnya harga komoditi karet membuat tingkat perekonomian masyarakat/petani semakin menurun, serta terbatasnya peluang kerja turut andil dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Angka kemiskinan Kabupaten Barito Timur perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pemberantasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan belum tepat sasaran, dan hal ini merupakan kebijakan yang hanya bersifat sementara karena dengan adanya bantuan ini nyatanya tidak mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Barito Timur,



hal ini mengindikasikan penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran dan belum efektif.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Rumusan Permasalahan
“Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah	
Belum meratanya pendapatan masyarakat	Urusan Sosial	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS	Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS	
			Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum	
			Belum adanya wadah sarana pembinaan/pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan	
			belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA	
	Urusan Pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran	Masih Kurangnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Urusan Ketenagakerjaan		Belum Optimalnya Perluasan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja (adanya gep lapangan kerja dan pencari kerja)	
			Belum Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
			Belum Optimalnya pengawasan ketenagakerjaan	
			Urusan Penanaman modal	Masih rendahnya iklim investasi
	Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang			



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
			dalam investasi berusaha

2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan untuk jaminan sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi, dan sarana perhubungan. Namun realitanya, pembangunan infrastruktur dasar ini tidak dirasakan pada masyarakat di daerah terpencil. Dari fokus permasalahan infrastruktur dasar terdapat permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih belum merata.

A. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai yang ditunjukkan dengan jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat, Panjang Jalan di Kabupaten Barito Timur sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 968,97 km belum mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi jalan, 89,70 km merupakan jalan negara; 75,30 km jalan provinsi; dan 803,97 km jalan kabupaten. Kondisi jalan yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa tidak ada perbaikan jalan atau penambahan jalan baru.



Tabel 4.3.
Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016-2017

Keadaan		Status jalan					
		Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kab./Kota	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
I	Jenis Permukaan						
a	Diaspal	89,70	89,70	64,50	64,50	223,16	269,48
b	Kerikil			9,80	9,80	318,69	338,29
c	Tanah			1,00	1,00	262,12	196,20
d	Tidak Dirinci						
	Jumlah	89,70	89,70	75,30	75,30	803,97	803,97
II	Kondisi Jalan						
a	Baik	85,00	85,00	28,80	28,80	236,49	236,49
b	Sedang	4,70	4,70	5,00	5,00	173,99	173,99
c	Rusak			16,00	16,00	218,63	218,63
d	Rusak Berat			25,50	25,50	174,86	174,86
	Jumlah	89,70	89,70	75,30	75,30	803,97	803,97
III	Kondisi Jalan						
a	Kelas I						
b	Kelas II	89,70	89,70	75,30	75,30	5,60	5,60
c	Kelas III						
d	Kelas III A						
e	Kelas III B						
f	Kelas III C					279,50	279,50
g	Kelas Tidak Dirinci					518,87	518,87
	Jumlah	89,70	89,70	75,30	75,30	803,97	803,97

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Masih di tahun yang sama, di tahun 2017 terdapat 231,90 km jalan rusak dan 76,94 jalan rusak berat. Jika dilihat pada tabel di bawah ini, pembangunan jalan di Kabupaten Barito Timur belum merata. Hal ini bisa dilihat dari jalan di Kecamatan Paju Epat yang hanya memiliki panjang jalan 19,86 km dalam kondisi baik, padahal luas wilayahnya sebesar 664,30 km². Hal ini berbeda jauh dengan Kecamatan Dusun Timur dengan panjang jalan baik 141,60 km. hal ini tidak mengherankan bahwa Dusun Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Barito Timur.

Tabel 4.4.
Kondisi Jalan Setiap Kecamatan
Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

No	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	Benua Lima	18,33	14,84	27,72	10,80	71,68
2	Dusun Timur	141,60	38,13	29,00	2,61	211,34
3	Paju Epat	19,86	6,80	18,84	12,71	58,20
4	Awang	39,79	25,88	40,10	5,16	110,93
5	Patangkep Tutul	23,99	24,35	20,00	16,81	85,15
6	Dusun Tengah	96,49	39,98	26,54	8,82	171,82
7	Raren Batuah	19,44	8,99	0,34	6,27	35,04
8	Paku	42,38	27,22	29,64	5,73	104,97
9	Karusen Janang	15,99	26,19	17,78	5,02	64,98
10	Pematang Karau	13,19	16,72	21,94	3,01	54,86
	Total	431,05	229,09	231,90	76,94	968,97

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Dalam fokus infrastruktur pemukiman pada tahun 2017, indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota) sebanyak 28 persen, rasio rumah layak huni sebesar 94,57 persen, rasio permukiman layak huni sebesar 80,37 persen, penduduk dengan akses air minum sebesar 26,37 persen. Angka ini menunjukkan nilai capaian diatas target RPJMD pada 2017 sudah tercapai. Sedangkan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi masih belum mencapai target sebesar 94,4 persen pada tahun 2017.

Pembangunan infrastruktur dasar terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terkadang terkendala oleh masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini harus mampu diawasi dan dikendalikan penuh oleh pemerintah, agar pembangunan tetap berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah perurusan sebagai berikut.



Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pemerataan Pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan Pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil	Meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat
			Belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan
		belum optimalnya kesesuaian penataan ruang dengan RTRW	Adanya kecenderungan ketidakserasian pemanfaatan tata ruang dan ketidaktertiban dalam penggunaan tanah
			Masih rendahnya pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukan
			Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota dan proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota belum ditentukan
	Urusan perumahan dan pemukiman	Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan pemukiman	Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan
			Masih adanya permukiman kumuh baik perdesaan maupun perkotaan
			Rumah tangga bersanitasi tidak layak masih banyak terdapat di perdesaan maupun perkotaan
			Jaringan listrik dan komunikasi belum optimal terutama di pedesaan
	Urusan perhubungan	Mobilitas barang dan orang belum	Belum ada sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, pengolah, pembuangan (disposal), dan sistem pakai ulang (reuse)
			Sarana dan prasarana perhubungan belum memadai



Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		menjangkau daerah terpencil	kesenjangan pelayanan jaringan transportasi antara kawasan kota dan pedesaan
			Fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan baik jalan maupun sungai masih kurang dan belum merata ke seluruh wilayah kab. Barito timur
			Pengawasan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan dan sungai belum terlaksana dengan maksimal
	Urusan Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Masih lemahnya fungsi Pengawasan dan Penanganan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
			Belum adanya upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati
			Meningkatnya ancaman terhadap pengrusakan kawasan lindung, areal hutan tropis, dan daerah resapan air
			Menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan serta ancaman pencemaran lingkungan yang semakin tinggi
			Pengelolaan sampah belum efektif dan efisien
			Meluasnya wilayah yang mengalami kerusakan ekosistem
			Beberapa perusahaan yang beroperasi belum mengantongi AMDAL dan belum memiliki izin lingkungan

3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas



masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di berbagai sektor pembangunan daerah. Dari fokus permasalahan Sumber Daya Manusia terdapat permasalahan pokok yaitu Sumber Daya Manusia Barito Timur belum berdaya saing secara optimal.

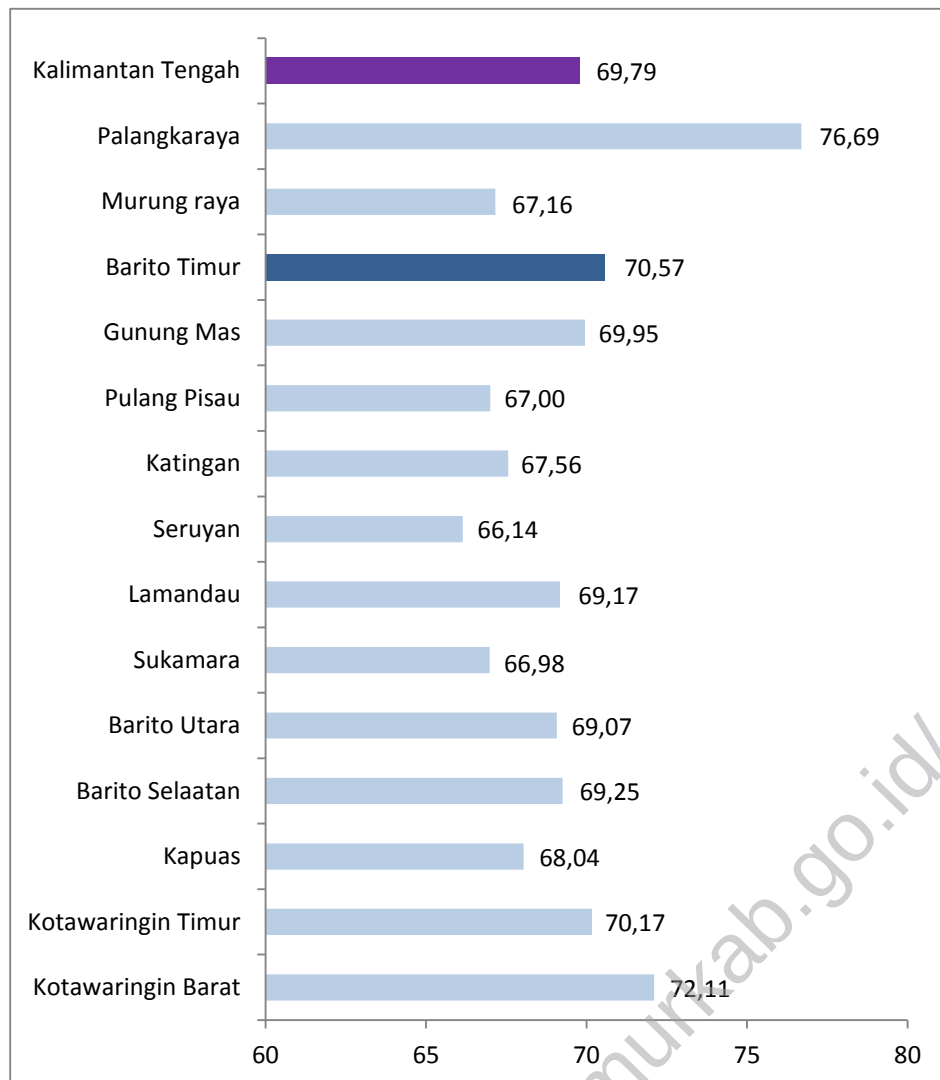
A. Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Barito Timur

Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (attitude) yang baik. Sehingga tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik namun juga mampu mengembangkan budaya yang mampu memberikan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif.

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak keahlian yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

IPM Kabupaten Barito Timur berada di urutan ke 3 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yaitu sebesar 70,57 pada tahun 2017. IPM Kabupaten Barito Timur diatas angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 69,79 pada tahun 2017. Angka IPM tertinggi diperoleh Kota Palangkaraya sebesar 79,69, sedangkan IPM dengan nilai terkecil se Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Seruyan dengan nilai IPM sebesar 66,14.

Gambar 4.5
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah Tahun 2017



Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2018

Dengan melihat posisi dan kondisi kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik, namun bukan berarti hal ini tidak menjadi suatu permasalahan. Hal ini harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan inovasi yang akan meningkatkan kualitas daya saing manusia yang mampu bersaing.

Dilihat dari permasalahan pokok sumber daya manusia, Barito Timur belum berdaya saing secara optimal, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.



Tabel 4.6.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber daya
Manusia Barito Timur”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia Barito Timur	Urusan pendidikan	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar
			Masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan
			Masih rendahnya tingkat kepercayaan orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan ke luar kota
	Urusan kesehatan	Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan bagi masyarakat	Sarana dan prasarana penunjang kesehatan masih belum memadai
			Distribusi tenaga kesehatan masih belum merata dan ada sebagian tenaga kesehatan masih belum terpenuhi (dokter gigi, perawat gigi, analisis kesehatan)
			Pencapaian pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah
			Proses pengadaan obat-obatan terkendala kebijakan
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan, kelurahan, dan desa
			Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan

4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya

Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi sering kali menyebabkan gesekan dalam masyarakat.



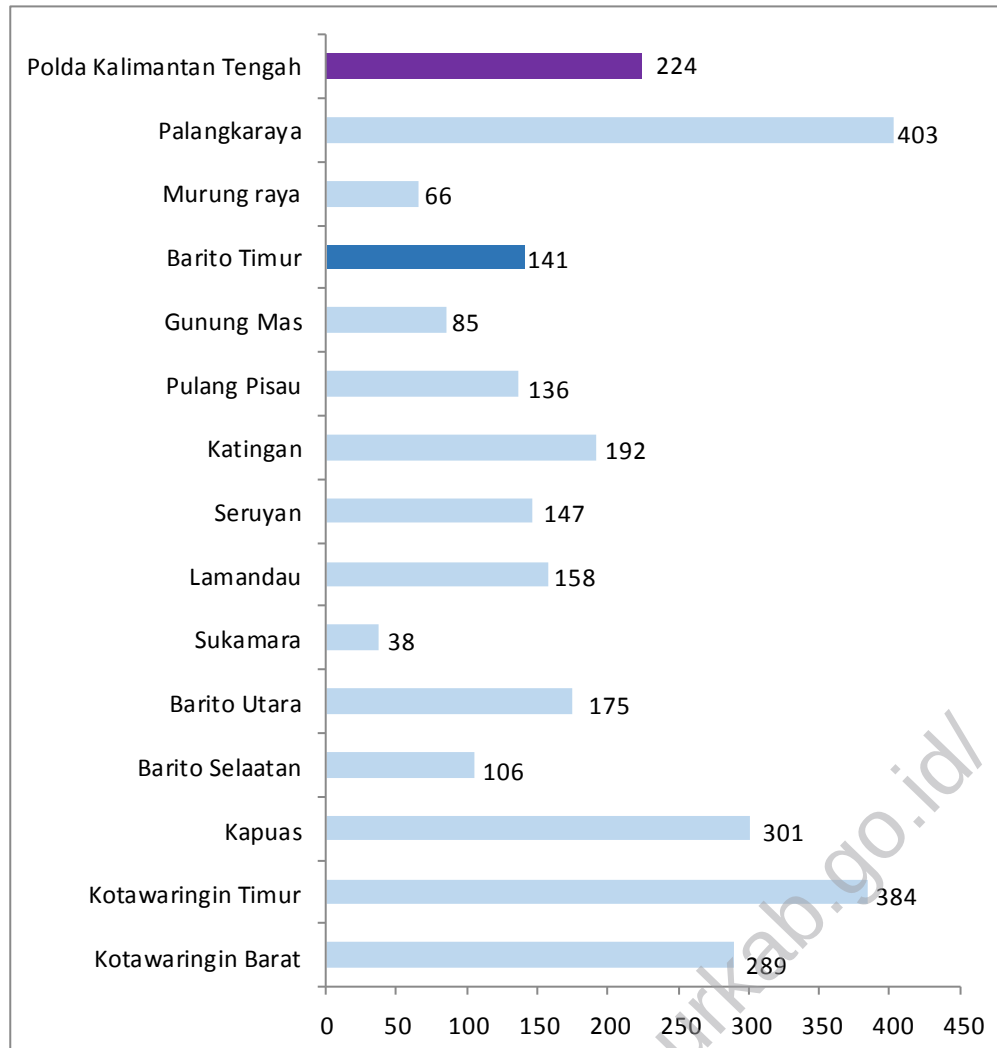
Semua unsur perbedaan ini harus dipelajari dan dimengerti agar tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dari fokus permasalahan keragaman budaya terdapat permasalahan pokok, yaitu belum terwujudnya manusia Barito Timur yang beragama dan berbudaya.

A. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah

Agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena agama mempunyai peran yang penting sebagai penyelamat, perdamaian, kontrol sosial, pemupuk rasa solidaritas dan berfungsi sebagai sublimatif atau perubahan ke tingkat yang lebih baik. Sedangkan budaya adalah nilai leluhur yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Dua hal ini berbeda dan butuh pendewasaan diri untuk meyatukan keduanya. Perbedaan pada bidang lainnya apabila tidak disikapi dengan bijaksana juga akan menyebabkan perpecahan yang mengganggu ketentraman dan keamanan.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan rendahnya tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban kabupaten Barito Timur berada di urutan ke 6 dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah yaitu sebesar 141 pelanggaran pada tahun 2017. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban Kabupaten Barito Timur di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 224 pada tahun 2017. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban tertinggi diperoleh Kota Palangkaraya sebesar 403 pelanggaran, sedangkan nilai terkecil se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamar dengan nilai IPM sebesar 38 pelanggaran.

Gambar 4.6
Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah Tahun 2017



Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2018

Ketentraman dan keamanan merupakan salah satu aspek yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat. Dengan ketentraman dan kewanan maka hidup masyarakat akan lebih tenang dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Dalam bidang ini, pembangunan di Kabupaten Barito Timur masih mempunyai kendala itu masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang politik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat bergerak cepat mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini. Pentingnya kenyamanan kota akan mempengaruhi investasi, perekonomian masyarakat, dan dinamika sosial dalam masyarakat.



Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah per-urusan sebagai berikut.

Tabel 4.7.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	Urusan Kebudayaan	Masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional	Masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional
			Masih kurangnya aktraksi budaya daerah
			uranginya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Budaya Tradisional
			Masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang komplek situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma'anyan lawangan.
	Urusan Pemuda dan olahraga	Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan
			Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat
			Masih rendahnya prestasi pemuda olahraga
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan
			meningkatnya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja



5. Fokus Permasalahan Birokrasi

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat timbulnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, dan akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Dari fokus permasalahan birokrasi terdapat permasalahan pokok yaitu masih rendahnya kinerja pemerintah daerah.

A. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Evaluasi kinerja menunjukkan hasil kemajuan pemerintah daerah dalam mengemban tugasnya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

Salah satu pengukuran keberhasilan birokrasi adalah maturitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas system pengendalian intern organisasi tersebut. Level maturitas SPIP Kabupaten Barito Timur mencapai angka 1,37 atau berada di level 1. Level maturitas Kabupaten Barito Timur di bawah level maturitas Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di level 2. Target kinerja bidang aparatur negara dalam RPJMN tahun 2015-2019, menetapkan bahwa indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5. Hal ini tentu menjadi



pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk mencapai level 3.

Tabel 4.8.
Maturitas SPIP menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah
Tahun 2016

No	Pemerintah Daerah	Skor Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP
1	Kotawaringin Barat	1,57	1
2	Kotawaringin Timur	2,41	2
3	Kapuas	1,59	1
4	Barito Selatan	1,55	1
5	Barito Utara	-	-
6	Sukamara	-	-
7	Lamandau	2,50	2
8	Seruyan	1,40	1
9	Katingan	2,05	2
10	Pulang Pisau	1,34	1
11	Gunung Mas	1,53	1
12	Barito Timur	1,37	1
13	Murung Raya	-	-
14	Palangkaraya	1,92	1
15	Kalimantan Tengah	2,28	2

Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2018

Keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Berdasarkan Surat KemenPAN-RB No B/292/AA.05/2018 Perihal Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2018. Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja



hasil evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur tahun 2017 adalah C atau kategori kurang masih belum memenuhi target CC. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2014 meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.9.
Hasil Evaluasi AKIP Kab. Bartim Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

Komponen	Bobot	2014	Bobot	2015	2016	2017
Perencanaan Kinerja	35	14,29	30	13,46	15,16	
Pengukuran Kinerja	20	9,57	25	9,23	10,70	
Pelaporan Kinerja	15	7,47	15	8,94	9,12	
Evaluasi Kinerja	10	0,00	10	3,13	3,44	
Capaian Kinerja	20	10,48	20	10,31	9,40	
Total	100	41,81	100	45,07	47,82	48,86
Kategori		C		C	C	C

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP

Melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Barito Timur memberikan informasi yang terbebas dari salah saji material. Walaupun akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang cukup baik, namun pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur masih terkendala dengan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu perlu upaya dalam meningkatkan peranan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah

Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antar pihak, dapat menciptakan efektifitas implementasi strategi yang



dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.

Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.10.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Urusan perencanaan pembangunan	Rendahnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Belum optimalnya pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal
			Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel belum sepenuhnya terlaksana	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan belum optimal
			Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif
		Belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa	
	Urusan Komunikasi dan Informatika		Rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi administrasi
	Urusan Keuangan		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optiml
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan kinerja aparatur sipil	Masih Belum Seluruh Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan
	Urusan Kepegawaian		Manajemen SDM Aparatur masih belum optimal



Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Negara yang belum optimal	Pembinaan dan penegakan disiplin aparatur masih belum efektif.
	Urusan Komunikasi dan Informatika		Belum optimal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut, dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing.

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals* (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan



rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 23. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 23 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;



2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi



pengguruan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Barito Timur, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propaganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan



Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Barito Timur yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Globalisasi Ekonomi Dunia

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa semakin tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah contoh dimana Indonesia tidak bisa lagi mengelak bahwa sebagai bagian dari dunia internasional mau tidak mau harus ikut bergabung demi kelangsungan perjalanan sebuah bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan aliansi ekonomi antara negara-negara ASEAN dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kebijakan-kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri dari negara-negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada arah kebijakan ditingkat nasional dan pada gilirannya akan beresonansi ketingkat daerah termasuk di Kabupaten Barito Timur. Oleh karena itu, ketika merumuskan isu strategis Kota Selatan itulah patut perlu memperhatikan dan memperhitungkannya sehingga masyarakat kedepannya akan siap beradaptasi.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk akibat *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari

rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun juga mampu mengeksplor segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.



f. Industri 4.0

Pada tahun 2020, dunia industri mulai memasuki era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah tren automasi industri dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur yang mana didalamnya termasuk teknologi cloud computing, cyber-physical system dan Internet of Things (IoT). Istilah “smart factory” akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 seperti saat ini kita mendengar istilah smartphone, smartcard dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefix smart. Istilah “Industri 4.0” dicetuskan oleh Pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu.

Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (Fourth Industrial Revolution). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Jadi, bisa disimpulkan Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Keempat.

Dirangkum dari World Economic Forum (WE), pada tahun 2020 saat era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai, ada sepuluh soft skill yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. Soft skill tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (Complex Problem Solving), berpikir kritis (Critical Thinking), kreatifitas (Creativity), manajemen SDM (People Management), koordinasi (Coordinating), kecerdasan emosional (Emotional Intelligence), pengambilan keputusan (Judgment and Decision Making), orientasi pada layanan (Service Orientation), negosiasi (Negotiation) dan kelenturan berpikir (Cognitive Flexibility).

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional

A. RPJMN 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang



menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT,
MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG
ROYONG”**

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.



Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan Pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor

nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia, Kalimantan juga merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

4.2.3. Isu atau Kebijakan Daerah

Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Barito Timur, dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Barito Timur antara lain telaahan terhadap dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, serta RTRW Kabupaten Barito Timur.

a. Telaahan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahap Ke-tiga (Tahun 2015-2020)

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”. Adapun misi pembangunan jangka panjang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah



4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, sesuai tahapan RPJMD ke-tiga (tahun 2015-2020),



pembangunan daerah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam 5 (lima) tahun ketiga tahapan RPJPD (2015-2020), prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.



9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

b. Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD ketiga (2016-2021), pembangunan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

**“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**

Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu Maju, Mandiri, dan Adil yang bertujuan untuk mencapai Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Ketiga elemen ini yaitu maju, mandiri, dan adil diharapkan dapat

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Elemen maju, mandiri, dan adil ini mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis, serta visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, maka misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

c. Telaahan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Periode 2019-2024)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2008 hingga tahun 2028. Visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2005–2025 ditetapkan sebagai berikut.

Berdasarkan kondisi diatas, tantangan dan prediksi yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan



modal dasar berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dimiliki, maka visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2004-2020 tidak dilakukan revisi. Artinya visi pembangunan Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam RPJP tahun 2004-2020 akan tetap digunakan sebagai visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2008-2028, yaitu:

**“BARITO TIMUR YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN
BERKELANJUTAN.”**

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi pembangunan Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Rakyat.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Politik, Hukum, Keamanan serta Ketertiban.
4. Memacu Pembangunan Infrastruktur.
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Pemanfaatan Dan Keberlanjutan SDA Dan Lingkungan Hidup.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan.

Dengan visi dan misi tersebut, diharapkan terwujud masyarakat yang “Maju, Sejahtera” secara ekonomi dan non ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, kreatif, sanggup bersaing dalam globalisasi di berbagai bidang, yang tercermin pada kemampuan daerah dalam menyediakan sandang, pangan dan papan, serta toleransi, interaksi, dan budaya yang sehat sebagai jati diri daerah. Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah “Gumi Jari Janang Kalalawah” yang artinya : Daerah yang Subur Makmur dan Sejahtera Untuk Selama-lamanya.



Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2018 – 2023 adalah memfokuskan pada daya saing perekonomian Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Bersamaan dengan itu, kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik dan meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat, terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai,

terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

d. Telaahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. Perwujudan kalimantan tengah sebagai lumbung pangan;
- e. Perwujudan kalimantan tengah sebagai lumbung energi;



- f. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- g. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- (2) Sistem Jaringan Prasarana utama;
- (3) Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung, Raya Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi darat:

1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan, mencakup:

Rencana pengembangan jaringan jalan:

- ✓ Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:



Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.

- ✓ Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi:

Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km

- ✓ Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :

- (1) Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;
- (2) Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
- (3) Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
- (4) Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
- (5) Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
- (6) Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
- (7) Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
- (8) Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
- (9) Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh;
- (10) Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
- (11) Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
- (12) Tampa – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
- (13) Rikut Jawa (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
- (14) Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.



2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:

✓ Jaringan angkutan sungai dan danau:

- (1) Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
- (2) Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;
- (4) Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;
- (5) Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
- (6) Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
- (7) Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang - Kuala Pembuang;
- (8) Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean - Hanjalipan;
- (9) Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda;
- (10) Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
- (11) Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb. Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai - Pagatan;
- (12) Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantan - Muara Sebangau;
- (13) Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya - Pulang Pisau – Maluku - Pangkoh – Bahaur;
- (14) Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;



- (15) Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
- (16) Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh - Montalat - Buntok - Bangkuang - Mengkatip - Telang Baru - Jenamas - Banjarmasin;
- (17) Anjir Serapat: Banjarmasin - Kapuas;
- (18) Anjir Kelampayan: Pulang Pisau - Mandomai;
- (19) Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang - Mintin;
- (20) Terusan Raya: Kuala Kapuas - Bahaur; dan
- (21) Terusan Hantipan: Pulau Hanaut - Pagatan.

✓ **Jaringan angkutan penyeberangan :**

- (1) Kumai - Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
- (2) Bahaur - Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- (3) Kumai - Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- (4) Bahaur - Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

- 1) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi:
 - Jalur kereta api Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung;
 - Jalur kereta api Puruk Cahu - Kuala Kurun - Rabambang - Palangka Raya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas;
 - Jalur kereta api Rabambang - Tumbang Samba - Sampit - Kuala Pembuang - Teluk Segintung;
 - Jalur kereta api Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Kumai; dan
 - Jalur kereta api Kudangan - Nanga Bulik - Kumai.



- 2) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api dengan:
 - Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
 - Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan
 - Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.
- 3) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

c. Sistem jaringan transportasi laut;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

- ✓ Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- ✓ Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- ✓ Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- ✓ Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

d. Sistem jaringan transportasi udara;

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

a. Rencana sistem jaringan energi, mencakup;

1) Pembangkit Tenaga Listrik;



- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik, meliputi;

- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit



- Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
 - ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
 - ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
 - ✓ Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
 - ✓ Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
 - ✓ Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
- 3) **Gardu Induk (GI)**, terdiri atas; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu
- 4) **Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)**, mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok
- 5) **Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi**, berupa Jaringan pipa tranmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari;

1) **Sistem Jaringan Backbone;**

Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem



proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut

2) **Remote Metro Junction (RMJ);**

Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio

3) **Sistem Jaringan Akses**

Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (Verry Small Aperture Terminal)

c. Rencana sistem sumberdaya air, terdiri atas:

1) **Wilayah Sungai (WS), mencakup;**

a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi:

- ✓ Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai;
- ✓ Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;

b) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.

c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:

- ✓ Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segintung; dan
- ✓ Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

2) **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ, meliputi;**

a) **Bendung** Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di



Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;

- b) **Bendungan** Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau;
 - c) **Embung** Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
 - d) **Danau** Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - e) **Situ** Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau
- 3) **Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak**, terdiri dari;
- **Daerah Irigasi (DI)**
- 4) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam);** DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI



Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.

a) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi,** meliputi:

- ✓ Kabupaten Barito Timur, yaitu:
 - DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
 - DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
- ✓ Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha).
- ✓ Kabupaten Katingan, yaitu:
 - DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
 - DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)

b) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten** meliputi:

- ✓ Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha
- ✓ Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 25 Ha
- ✓ Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.000 Ha
- ✓ Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 400 Ha
- ✓ Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 750 Ha
- ✓ Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi dengan luas pelayanan 631 Ha
- ✓ Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi dengan luas pelayanan 3.750 Ha
- ✓ Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha
- ✓ Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha



➤ **Daerah Rawa (DR)**

a) **Daerah Rawa Kewenangan Pusat**, meliputi:

- ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi),
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan)
- ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/lokasi Eks PLG).

b) **Daerah Rawa Kewenangan Provinsi**, meliputi:

- ✓ DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21.925 Ha/13 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi),



- **Daerah Rawa Tambak**, di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 5) **Pengamanan Pantai, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km**, meliputi:
- ✓ Pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
 - ✓ Pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
 - ✓ Pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
 - ✓ Pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
 - ✓ Pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
 - ✓ Pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).
- 6) **Instalasi Pengolahan Air Minum**, mencakup:
- Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:
 - ✓ Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai
 - ✓ Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota
- 7) **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai**, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.



Adapun **rencana pola ruang provinsi** pada **kawasan budidaya** terdiri atas:

a. **Hawasan peruntukan hutan produksi** meliputi:

- 1) Hutan produksi terbatas (HPT) seluas $\pm 3.335.571$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Hutan produksi tetap (HP) seluas $\pm 3.896.706$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas $\pm 2.258.274$ Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas $\pm 624.101.04$ Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. **Non kawasan hutan** seluas $\pm 2.629.779$ Ha dengan peruntukan sebagai berikut:

1) **Kawasan peruntukan pertanian** meliputi:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas $\pm 187.814,65$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas $178.572,86$ Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas $\pm 64.001,81$ Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas $\pm 37,385$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
- d) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;
- e) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter ($2,5$ Km) sebelah kanan dan 2.500 meter ($2,5$ Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang



pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- f) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.
- 2) **Kawasan Peternakan** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) Kawasan peruntukan perikanan laut seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - a) Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b) Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- 6) **Kawasan peruntukan pariwisata** disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
- 7) **Kawasan peruntukan permukiman** terdiri atas:
 - a) Kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;



- b) Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) **Kawasan peruntukan transmigrasi** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) Kawasan peruntukan technopark perkebunan, technopark pertambangan, technopark perikanan, technopark kehutanan, technopark pertanian, technopark peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 10) **Kawasan peruntukan lainnya, yaitu:**
 - a) Kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ± 65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
 - d) Hutan Monumental seluas ± 600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. **Kawasan peruntukan pertambangan** yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha



serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
dan

- b. **Kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi** di 14 Kabupaten/Kota.

e. Telaahan RTRW Kabupaten Barito Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur sebagai suatu rencana penataan ruang wilayah yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah. Untuk mencapai pola dan struktur ruang Kabupaten Barito Timur 2011-2031 diperlukan perwujudan RTRW Kabupaten Barito Timur yang diuraikan program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Barito Timur.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



**Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun
2011-2031**

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
I	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman			
1	Peningkatan Fungsi PKL Tamiang Layang	Peningkatan kapasitas PDAM	Tamiang Layang	
		Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan	Tamiang Layang	
		Peningkatan jaringan drainase	Tamiang Layang	
		Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang	
		Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba	Tamiang Layang	
		Pembangunan fasilitas sosial dan umum	Tamiang Layang	
		Pembangunan kawasan taman kota	Tamiang Layang	
2	Peningkatan Fungsi PKLp Ampah	Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Ampah	
		Peningkatan daerah irigasi	Ampah	
		Pengembangan Puskesmas Rawap Inap	Ampah	
		Pembangunan sarana transportasi	Ampah	
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Ampah	
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Ampah	
3	Peningkatan Fungsi PPK Taniran, Bambulung, Bentot,	Penyusunan RDTR	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
	Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	Penyusunan peraturan zonasi	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan tata batas hutan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan fasilitas penunjang pertanian	Bambulung	
		Pembangunan gudang pengumpul pertanian	Bambulung	
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Bambulung	
		Pembangunan jalan akses perkebunan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, air bersih, limbah, sampah, dan lain-	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	



No.		Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
			lain).		
			Pengembangan Puskesmas	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain).	
			Pengembangan sarana dan prasarana wisata		
II		Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi			
	1	Peningkatan Jalan	Peingkatan kualitas ruas jalan Strategis Nasional		
	2	Pembangunan Jalan	Pembangunan jalan lokal	di seluruh kecamatan	
			Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan	
	3	Perbaikan Jalan	Perbaikan jalan lokal	di seluruh kecamatan	
			Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan	
			Pembangunan Terminal Tipe C	Taniran, Bentot, Hayaping, Bambulung	
	4	Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga serta bandara	Pembangunan Pelabuhan khusus	Telang Baru	
			Dermaga Wisata Danau Undan	Benua Lima	
III		Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air			
	1	Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi Hulu Sungai, Anak Sungai dan Danau	Kabupaten Barito Timur	
			Pengamanan hulu sungai. Anak	Kabupaten Barito Timur	



No.		Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
			sungai, Danau		
	2	Irigasi	perbaikan irigasi teknis yang rusak	Kabupaten Barito Timur	
			pemeliharaan saluran irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur	
	3	Air Bersih	Peningkatan areal layanan PDAM	Seluruh kecamatan	
			Pembangunan bak penampung air	Seluruh kecamatan	
	4	Penanganan longsor/banjir	Pembangunan Turap/Siring/Bronjong	Kecamatan Pematang Karau,	
			Sosialisasi	Paku, Raren Batuah, dan Dusun Tengah	
	IV		Sistem Jaringan Prasarana Energi		
	1	Peningkatan Energi	Optimalisasi pemanfaatan PLTD berbasis masyarakat	Seluruh kecamatan	
			Perluasan layanan listrik	Kabupaten Barito Timur	
V		Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi			
	1	Pembangunan	Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kabupaten Barito Timur	
	2	Penyusunan data base	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kabupaten Barito Timur	
VI		Sistem Jaringan Prasarana Permukiman			
	1	Peningkatan perbaikan pemukiman	Perbaikan perumahan semi permanen/tidak permanen	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan	
	2	Pembangunan	Perumahan PNS	Tamiang Layang	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
	prasarana pemukiman	Pembangunan perumahan perkotaan	Tamiang Layang & Ampah	
		Pembangunan IPAL	Tamiang Layang & Ampah	
		Pembangunan drainase	Kabupaten Barito Timur	
		Pembangunan jalan lokal/lingkungan	di seluruh PPK dan desa-desa	

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031

Tabel 4.11.
Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur
Tahun 2011-2031

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
I Perwujudan Kawasan Lindung				
1	Perwujudan Kawasan Lindung terhadap kawasan bawahannya	Mengendalikan kegiatan hutan agar tetap terpelihara:	Seluruh kecamatan Mangaris	
		a Identifikasi dan inventarisasi data kawasan lindung		
		b Mengembalikan dan menjaga kawasan lindung lainnya (kawasan arboretum)		
		c Rehabilitasi dan konversi kawasan lindung		
		Meningkatkan serta mempertahankan luasan dan fungsi kawasan lindung:		
		a Pemantauan dan pembatasan kegiatan hutan		
		b Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi hutan		
		c Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan		
		d Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
			instansi pemerintah dan masyarakat setempat	Kabupaten Barito Timur	
		Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung:			
		a	Penegakan hukum bagi kegiatan ilegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu		
		b	Kegiatan Rahabilitasi, Redeliniasi kawasan lindung		
		c	Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif		
2	Kawasan Konservasi dan resapan air	Mengendalikan kegiatan kawasan agar tetap terpelihara:		Seluruh kecamatan	
a	Identifikasi dan inventarisasi data kawasan konservasi				
b	Rehabilitasi dan konversi kawasan konservasi				
Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan					
a	Pemantauan dan pembatasan kegiatan kawasan				
b	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi dan resapan air				
3	Kawasan Lindung Setempat Sempadan Sungai	a	Pembangunan tanggul sungai	Seluruh kecamatan	
		b	Pemeliharaan tanggul sungai		
		c	Pemeliharaan tebing sungai		
		d	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai		
		e	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang di tepi sungai		
4	Sempadan Danau/Waduk	a	Penataan dan pemanfaatan kawasan danau/waduk	Seluruh kecamatan	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
		b	Rehabilitasi dan konservasi kawasan danau/waduk		
		c	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk		
		d	Pengembangan kegiatan ekonomi/wisata		
5	Kawasan Mata Air	a	Pemeliharaan kawasan mata air		
6	Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam	Mengendalikan kegiatan kawasan Taman Wisata Alam:		Seluruh kecamatan	
		a	Identifikasi dan inventarisasi data Taman Wisata Alam		
		b	Rehabilitasi dan konversi Taman Wisata Alam		
		c	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang		
7	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Mengendalikan kegiatan kawasan cagar budaya:		Seluruh kecamatan	
		a	Penyusunan peraturan zonasi		
		b	Rehabilitasi cagar budaya yang mengalami kerusakan		
		c	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang		
8	Rawan Bencana Alam	Mitigasi bencana banjir & longsor adalah :		Kecamatan Pematang Karau, Petangkep Tutui, Karuseng Janang, Paku, Raren Batuah, dan Dusun Tengah	
		a	Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya		
		b	Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi tebing sungai yang dekat dengan pemukiman		
		c	Pembangunan jalur evakuasi bencana alam		
		d	Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air		
		e	Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan didaerah penyangga dan resapan air		
		f	Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
		g	Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor		
		h	Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor		
		i	Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor		
		j	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanahongsor		
II	Perwujudan Kawasan Budidaya				
1	Perwujudan HP	a	Pemetaan tata batas kawasan hutan produksi	Kabupaten Barito Timur	
		b	Identifikasi jenis dan kawasan hutan produksi		
		c	Program pemulihan dan pengembangan hutan produksi		
		d	Pembangunan kerjasama pengelolaan kawasan hutan produksi		
		e	Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan		
2	Perwujudan Kawasan Pertanian	a	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Kecamatan Paju Epat, Dusun Tengah, Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Timur, Petangkep Tutui	
		b	Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi,		
		c	pengolahan hasil panen, pemadaran hasil pertanian (terminal agribisnis)		
		d	Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan		
		e	Pengembangan padi organik bersertifikat yang bernilai ekonomi tinggi		
		f	Pemberian insentif kepada petani/pengusaha bidang pertanian		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
		g	Penguatan lembaga petani, pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran		
a	Perwujudan Pertanian Lahan Kering	a	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Karusen Janang, Dusun Timur, Petangkep Tutui, Awang, Paju Epat	
		b	Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan		
		c	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan		
		d	Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		
		e	Penguatan kelembagaan petani serta pemodalan		
		f	Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)		
b	Perwujudan Pertanian Lahan Basah	a	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah, Dusun Tengah, Karusen Janang, Petangkep Tutui	
		b	Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		
		c	Penguatan kelembagaan dan pemasaran serta pemodalan		
		d	penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)		
3	Perwujudan Kawasan Perkebunan	a	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Seluruh kecamatan	
		b	Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :		
		-	Subsistem Hulu : sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)		
		-	Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
		-	Subsistem Hilir (<i>Down Stream</i>) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan		
		c	Subsistem Kelembagaan (<i>Supporting Institution</i>) perbankan, transportasi.		
		d	Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Kebun)		
4	Perwujudan Kawasan Perikanan	a	Pengembangan budidaya perikanan	Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, dan Paku	
		b	Peningkatan produksi perikanan		
		c	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung peternakan		
		d	Pengadaan bibit dan peralatan		
		e	Penyuluhan		
5	Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	a	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi	Seluruh wilayah	
		b	Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi		
		c	Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan mineral		
		d	Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan		
		e	Pengembangan dan Penataan Wilayah bidang pertambangan dan energi		
		f	Pengembangan energi alternatif		
		g	Melakukan kajian pengembangan energi alternatif		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
6	Perwujudan Kawasan Pariwisata	h	Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif		
		i	Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan		
		j	pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif		
		a	Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Seluruh wilayah pariwisata	
		b	Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata		
		c	Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		
		d	Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		
		e	Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu manajemen promosi pariwisata daerah		
		f	Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan		
		g	Pembinaan Sumber Daya Insan Pariwisata (Sanggar dan Pesanggrahan)		
7	Perwujudan Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan			
		a	Pembangunan perumahan pegawai	Tamiang Layang	
		b	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Ampah	
		c	Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas	Seluruh Kecamatan	
		d	Pembangunan jalan lingkungan	Seluruh Kecamatan	
		e	Pembangunan sistem jaringan prasarana air minum	Seluruh Kecamatan	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
		f	Pengembangan sistem jaringan prasarana listrik	Seluruh Kecamatan	
		g	Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi	Seluruh Kecamatan	
		h	Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan limbah	Seluruh Kecamatan	
		i	Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam	Kecamatan Pematang Karau,	
		j	Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana	Seluruh Kecamatan	
		Permukiman Perdesaan			
		a	Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan		
		b	Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya		
		c	Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana alam	Seluruh Kecamatan	
		d	Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah		
		e	Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman		
8	Sektor Pengairan	Pengendalian banjir dan konservasi sumber-sumber air melalui:			
		a	Pembuatan Tabat	Kabupaten Barito Timur	
		Pengembangan jaringan Irigasi			
		Peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi			
9	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah,	a	Fasilitiasi Kredit Usaha Rakyat	Seluruh Kecamatan	
		b	Fasilitasi kesehatan usaha dan permodalan		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017- 2021
	Keuangan dan Koperasi	c	Fasilitasi jaminan keamanan investasi rakyat		
III	Sub Sektor Tata Ruang				
		a	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Barito Timur	
1	Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga				
a	Sub Sektor Pendidikan	a	Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang	
		b	Pembangunan SMU STANDAR NASIONAL/ INTERNASIONAL	Tamiang Layang	
		c	Pembangunan SMK STANDAR NASIONAL / INTERNASIONAL	Tamiang Layang	
		d	Pembangunan SMP/ sederajat	Kabupaten Barito Timur	
		e	Pembangunan SD/ sederajat	Seluruh Kecamatan	
		f	Pembangunan TK	Seluruh Kecamatan	
		g	Rehabilitasi bangunan sekolah	Seluruh Kecamatan	
		h	Pemeliharaan gedung sekolah	Seluruh Kecamatan	
		i	Pembangunan ruang kelas	Seluruh Kecamatan	
b	Sub Sektor Kebudayaan	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan			
		a	Inventarisasi Keanekaragaman Kebudayaan	Kabupaten Barito Timur	
		b	Penggalian Seni Budaya Khas Daerah	Kabupaten Barito Timur	
c	Sub Sektor Olahraga	a	Pengembangan Stadion Olah Raga Standar Nasional	Tamiang Layang	

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031



Tabel 4.12.
Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur
Tahun 2011-2031

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
1	Perwujudan Kawasan Agropolitan	Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan irigasi teknis	Ampah dan Bambulung	
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan	Ampah dan Bambulung	
		Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi,		
		komunikasi, air bersih dan energi bagi pengembangan kawasan agropolitan	Ampah dan Bambulung	
		Pengelolaan agrikultura dan agroindustri yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani.	Ampah dan Bambulung	
		Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis dan peningkatan kualitas pengusaha (petani dan aparatur)	Ampah dan Bambulung	
		Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan yang saling mendukung dan menguatkan termasuk pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata	Ampah dan Bambulung	
		Menjalin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian.	Ampah dan Bambulung	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
		Pengembangan kelembagaan petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi balai penyuluhan pengembangan terpadu.	Ampah dan Bambulung	
		Peningkatan perdagangan / pemasaran termasuk pengembangan terminal agribisnis dan pusat lelang/show room hasil pertanian.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan percobaan / pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Ampah dan Bambulung	
2	Perwujudan Kawasan pertanian berkelanjutan dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis	Penetapan batas kawasan pengembangan irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur	
		Penyusunan masterplan kawasan pertanian irigasi teknis yang padat karya dan berorientasi ekspor.	Kabupaten Barito Timur	
		Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang dan sub kawasan penunjang	Kabupaten Barito Timur	
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan pertanian	Kabupaten Barito Timur	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
		Peningkatan dan penyiapan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat)	Kabupaten Barito Timur	
3	Perwujudan Kawasan Pengembangan Peternakan	Pembangunan sarana dan prasarana inti kawasan peternakan	Kecamatan Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, danPematang Karau, Dusun Dusun Timur	
		Peningkatan sarana prasarana transportasi kawasan		
		Peningkatan pelayanan prasarana (sanitasi, air bersih, drainase)		
		Pemasaran hasil produksi peternakan		
		Peningkatan sumberdaya manusia		
		Penyuluhan		
		Sosialisasi dan penyiapan masyarakat		
4	Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi	Melakukan kajian suberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan	Kabupaten Barito Timur	
		Pengembangan dan penataan wilayah bidang energi		
		Pengembangan energi alternatif		
		Melakukan kajian pengembangan energi alternatif		
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif		
		Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan		
5	Perwujudan Kawasan Sosial Budaya	Penyusunan masterplan kawasan Situs bersejarah Brohong	Dusun Tengah	
		Penyusunan peraturan zonasi		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
		Penyusunan DED		
		Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan Situs		
		Pemeliharaan kawasan		
6	Perwujudan Kawasan Perkotaan	Peningkatan peran dan pelayanan pasar menjadi pasar regional	Ampah	
		Pembangunan perguruan tinggi	Tamiang Layang	
		Peningkatan sekolah menengah umum menjadi bertaraf internasional	Tamiang Layang	
		Peningkatan pelayanan sanitasi kebersihan perkotaan	Tamiang Layang dan Ampah	
		Pembangunan gedung olah raga & kesenian	Tamiang Layang	
		Pembangunan pusat pertokoan	Tamiang Layang & Ampah	
		Peningkatan RSUD	Tamiang Layang	
		Pembangunan perumahan karyawan	Tamiang Layang	
7	Perwujudan Kawasan Tambak	pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perikanan	Kecamatan Paju Epat	
		Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan		
		Bantuan bibit dan peralatan		
		Penyuluhan		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017- 2021
8	Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi	Penyusunan peraturan zonasi kawasan	Kecamatan Dusun Tengah	
		Penyediaan peralatan energi listrik dan sumberdaya manusia		
		Pembangunan sarana prasarana pengembangan kawasan		
9	Perwujudan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Penyusunan peraturan zonasi kawasan	Desa Siong Kecamatan Paju Epat	
		Pembangunan gedung pusat penelitian		
		Pengembangbiakan jenis anggrek		
		Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan		

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031

4.2.4. Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Barito Timur yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Barito Timur hanya melaksanakan 16 tujuan yang terbagi dalam 220 indikator TPB dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur dan sudah mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu: pilar sosial : 24, ekonomi : 1, lingkungan : 0, hukum dan tata kelola : 0.
 - b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4



- pilar pembangunan yaitu pilar sosial : 20, pilar ekonomi : 8, pilar lingkungan : 3, pilar hukum dan tata kelola : 0.
- c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial : 0, pilar ekonomi : 3, pilar lingkungan : 0, pilar hukum dan tata kelola adalah : 6.
 - d. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur tetapi tidak ada data sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial : 52, pilar ekonomi : 46, pilar lingkungan : 26, pilar hukum dan tata kelola adalah : 31.
2. Hasil FGD para pemangku kepentingan diperoleh bahwa isu strategis pilar sosial, ekonomi dan pilar lingkungan sejumlah 25 isu strategis dan isu prioritas 6, sedangkan isu sesuai TPB prioritas 8 sebagai berikut:
- a. Nomor TPB 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
 - b. Nomor TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
 - c. Nomor TPB 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
 - d. Nomor TPB 6: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
 - e. Nomor TPB 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
 - f. Nomor TPB 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
 - g. Nomor TPB 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
 - h. Nomor TPB 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.



- i. Nomor TPB 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
3. OPD yang sudah melaksanakan TPB berdasarkan Kategori pencapaian TPB sebagai berikut:
 - a. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 11 OPD dengan total 30 indikator.
 - b. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 8 OPD dengan total 29 indikator
 - c. OPD yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 5 OPD dengan total 11 indikator
 - d. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 22 OPD dengan total 150 indikator
4. Berdasarkan hasil kajian 6 muatan KLHS, diperoleh beberapa isu atau permasalahan yang perlu dipertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023 sebagai berikut:
 - a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan
Untuk menjamin ketersediaan air pada setiap kecamatan di Kabupaten Barito Timur tetap mencukupi kebutuhan hidup layak penduduk, maka di harapkan masyarakat setempat mampu mempertahankan fungsi lahan menurut aspek konservasi. Untuk mencegah degradasi, maka langkah yang dilakukan oleh manajemen pertanian dan perkebunan adalah dengan mempertahankan wilayah lindung/konservasi sebagai penampung alami. Oleh karena itu, potensi sumber daya air yang tersedia perlu direncanakan dengan baik pemanfaatan dan konservasinya.

Daya dukung dan daya tampung air memiliki lima hierarki kategori di setiap kawasannya dimana untuk Kabupaten Barito Timur, sebagian besar daya dukung dan daya tampung berada pada kategori tinggi seluas 117.358,68 ha (30,61%) dan paling kecil berada pada kategori rendah sebesar 74.434,23 ha (19,41%).



b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis. Untuk potensi banjir, wilayah Kabupaten Barito Timur memiliki potensi rendah yakni sebesar 94,45% dan kategori tinggi hanya sebesar 5,5%. Wilayah Kecamatan Pematang Karau dan Dusun Timur merupakan daerah dengan potensi banjir tinggi, karena wilayah ini merupakan daerah sungai dan memiliki topografi yang lebih rendah

c. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

1) Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem pangan di Kabupaten Barito Timur terlihat bahwa dari 10 kecamatan, jasa ekosistem pangan pada klasifikasi rendah sampai sangat tinggi, namun terdapat 3 kecamatan yang dominan sangat tinggi yaitu: Kecamatan Dusun Timur, Patangkep Tutui dan Kecamatan Pematang Karau.

2) Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Barito Timur terlihat bahwa rata-rata dari 10 kecamatan pada klasifikasi sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, namun terdapat 4 kecamatan yang dominan sangat tinggi yaitu: Kecamatan Dusun Timur, Karusen Janang, Paju Epat, dan Kecamatan Pematang Kurau.

d. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Prinsip eko-efisiensi penting menjadi bagian dalam proses penentuan KRP RPJMD di Kabupaten Barito Timur terutama dalam upaya mensinergikan dan mengintegrasikan dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Hasil analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 Ha atau 99,31 masih sesuai tutupan lahan alami

e. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

1) Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.



- 2) Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem.
- 3) Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan untuk hutan lahan kering primer sebesar 222 ton/ha, hutan rawa primer 122 ton/Ha dan hutan rawa sekunder 92 ton/Ha. Dengan luas hutan 121.478,90 ha maka total stok karbon di Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 19.049.888,31 ton.

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

- 1) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dikaji dengan melakukan *overlay* rencana status kawasan hutan terhadap keanekaragaman hayati sumberdaya *biodiversity* dan rencana pola ruang budidaya di RTRW Kabupaten Barito Timur.
 - 2) Berdasarkan hasil analisis untuk status kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai penunjukan kawasan hutan lindung dan KSA/KPA menunjukkan bahwa sekitar 30,57 Ha atau 0,006% sebagai kawasan terbangun, 3767,91 ha atau 0,68 % dan alami 550.225,68 atau 99,31 Ha.
5. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang terkait langsung terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diperlukan upaya tambahan 6 indikator
 6. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
 - a. Tidak perlu adanya upaya tambahan (BAU)
 - b. Perlu upaya tambahan 28 indikator
 - c. Tidak perlu upaya tambahan 1 indikator
 7. Berdasarkan hasil perumusan skenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPB dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2019, adapun indikator dan targetnya disajikan pada Tabel ber



Tabel 4.13.

Program pada Indikator TPB yang menjadi pertimbangan untuk Diintegrasikan Kedalam Dokumen RPJMD

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES No. 59	Skenario
Indikator yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD yang terkait langsung DDDT-LH				
1	1.4.1.(d)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	100%	Diperlukan upaya tambahan
2	1.4.1.(e)	indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	Diperlukan upaya tambahan
Indikator yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD yang tidak terkait langsung DDDT-LH				
1	1.3.1.(a)	Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	95%	Tidak perlu upaya tambahan
2	1.3.1.(b)	Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
3	1.3.1.(c)	Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
4	1.3.1.(d)	Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Meningkat menjadi 2,8 Juta	Diperlukan upaya tambahan
5	1.4.1.(h)	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Meningkat menjadi 82,2%	Diperlukan upaya tambahan
6	2.2.2.(c)	Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	92,5%	Diperlukan upaya tambahan



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES No. 59	Skenario
7	3.1.2.(a)	Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85%	Diperlukan upaya tambahan
8	3.4.1.(a)	Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	95%	Diperlukan upaya tambahan
9	3.7.1.(b)	Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
10	3.7.2.(a)	Indikator Total Fertility Rate (TFR)	Menurun menjadi 2,28	Diperlukan upaya tambahan
11	4.1.1.(a)	Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 84,2%	Diperlukan upaya tambahan
12	4.1.1.(a)	Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 84,2%	Diperlukan upaya tambahan
13	4.1.1.(d)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 114,09%	Diperlukan upaya tambahan
14	4.1.1.(e)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Meningkat menjadi 106,94%	Diperlukan upaya tambahan
15	4.2.2.(a)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 77,2%	Tidak diperlukan upaya tambahan
16	5.5.1*	Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
17	5.5.2*	Indikator Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
18	5.6.1.(a)	Indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
19	6.2.1.(c)	Indikator Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES No. 59	Skenario
		(STBM)		
20	6.2.1.(d)	Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Meningkat 55%	Diperlukan upaya tambahan
21	8.3.1.(a)	Indikator Persentase tenaga kerja formal	Meningkat 51%	Diperlukan upaya tambahan
22	8.3.1.(b)	Indikator Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
23	8.5.2.(a)	Indikator Tingkat setengah pengangguran	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
24	8.9.1.(a)	Indikator Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat menjadi 20 juta	Diperlukan upaya tambahan
25	8.9.1.(b)	Indikator Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat menjadi 20 juta	Diperlukan upaya tambahan
26	8.9.1.(c)	Indikator Jumlah devisa sektor pariwisata	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
27	9.c.1.(a)	Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
28	9.c.1.(b)	Indikator Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan
29	15.1.1.(a)	Indikator Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	Diperlukan upaya tambahan



4.2.5. Isu-Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar

Secara administratif, Kabupaten Barito Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan serta Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di Kalimantan Selatan. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang diambil mempertimbangkan ketiga kabupaten. Berikut ini adalah telaah isu atau kebijakan strategis Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan janji-janji politik yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih periode 2017-2022, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU
DAN MANDIRI, SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT
YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING
DILANDASI IMAN DAN TAQWA”.**

Misi pembangunan dari visi di atas sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi..
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.



5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan antara lain:

1. Pemerataan infrastruktur wilayah
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas
3. Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tentram
4. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung ekonomi unggulan daerah
6. Peningkatan partisipasi publik
7. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

b. Kabupaten Tabalong

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2014, maka pembangunan Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) terarah pada visi:

“MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terhadap sebuah keinginan yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai



sebuah daerah yang tatanan masyarakatnya diarahkan kepada masyarakat madani yang beretika dan bermoral serta mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman yang didukung oleh sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak. Adapun MISI pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamais
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya

Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka strategi pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah:

1. Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, budaya kerja dan penanggulangan penyakit masyarakat
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Peningkatan pendapatan riil per kapita
5. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas
6. Penanggulangan kemiskinan
7. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
8. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik
9. Pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
11. Pengembangan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, olahraga dan seni budaya daerah



12. Pengembangan potensi pariwisata daerah
13. Peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi
14. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
15. Peningkatan pendapatan daerah
16. Peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan
17. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah
18. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan
19. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah
20. Penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentramanan dan kenyamanan
21. Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu
22. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa

c. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur. Visi bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2017-2022 adalah

“Hulu Sungai Utara MANTAP”

Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamais, dan Produktif. Adapun Misi yang mendukung Visi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya
3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumber daya lokal dengan berlandaskan potensi daerah;



4. Membangun infrastuktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal;
5. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memerhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran tercapai adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah
2. Peningkatan sistem pemerintahan yang berkualitas, efektif, dan efisien
3. Pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan
4. Peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah
6. Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakan aturan dan perundang-undangan yang berlaku
7. Pemantapan integrasi ekonomi anta sektor primer, sekunder dan tersier
8. Pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian, dan kedauletan pangan, perdagangan, hotel, rumah makan serta sektor strategis lainnya
9. Penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
10. Percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan MDG's
11. Peningkatan mutu dan layanan pendidikan formal dan informal, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan
12. Pemantapan pemahaman dan pengamalan serta layanan keagamaan
13. Penyediaan layanan sosial, pemuda, olahraga, budaya, seni dan pariwisata
14. Peningkatan layanan serta pemerataan akses kesehatan
15. Peningkatan infrastruktur wilayah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur sosial lainnya
16. Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem rawa



4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan

Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan masa depan Barito Timur. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar, di sisi lain, sektor pertambangan bukan menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan besaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga konstan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Selain itu, pentingnya perhatian dan fokus pembangunan di sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang miskin bekerja di sektor ini.

b. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat. Dengan dan lewat pendidikan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang



kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

c. Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan dorongan yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat berfungsi. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Barito Timur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

d. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

e. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa



(*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Kabupaten Barito Timur dikatakan belum melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Namun upaya untuk mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) penting untuk menghidupkan semangat kompetisi antar unit kerja pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat luas terhadap perkembangan reformasi birokrasi, namun penting diperhatikan bahwa status ini seharusnya tidak bersifat statis dan merupakan upaya konkret dalam perubahan ke arah yang lebih terlembaga dan berkesinambungan.

f. Pelestarian lingkungan hidup

Sumber daya alam ada batasan dan sifat bawaan, jika alam dieksploitasi tanpa aturan akan menimbulkan bencana bagi seluruh lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya peningkatan aktivitas perekonomian dengan kualitas lingkungan hidup akan memicu beberapa persoalan seperti bencana alam berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, hingga perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu isu internasional.

Masyarakat harus mendapatkan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan salah satunya tambang. Serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk menjadi tempat hidup bagi manusia, fauna dan flora serta ekosistem lainnya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan



lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hial alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

g. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal daerah

Pembangunan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak hanya terbatas pada fisik sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya, pendidikan saja, namun juga mencakup pada pembangunan diri masyarakatnya, religius, dan adat istiadatnya. Masyarakat Barito Timur sebagian besar merupakan tumpuk dayak Ma'anyan (sebenarnya bukan hanya Ma'anyan namun juga Lawangan). Pada saat ini, masyarakat Barito Timur menjadi sebuah daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ada banyak suku-suku diluar Ma'anyan dan Lawangan yang datang dan tinggal di daerah ini, seperti Ngaju, Batak, Jawa, dan lainnya. Kekayaan budaya lokal daerah ini perlu untuk terus dikembangkan agar menjadi salah satu asset budaya yang menjadi daya tarik wisata daerah dan diintegrasikan dengan potensi pariwisata yang ada. Eksotika dan kekhasan budaya di kabupaten Barito Timur bisa kita jumpai pada upacara-upacara atau ritual kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Maanyan. Beberapa ritual kematian yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat yaitu Ejambe, Ngadatun, Mia, Ngatang, Siwah, Isi dari berbagai upacara kematian biasanya berupa pertunjukan berbagai kesenian atau tari-tarian tradisional Dayak Maanyan seperti Gintur, Giring-Giring, Dasas, Ebu Lele, dan sebagainya, sehingga para pengunjung bebas untuk menikmati kebudayaan lokal daerah. Hal ini menjadi keasyikan tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengeksplorasi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Pada momen-momen ini pemerintah daerah harus lebih responsif dengan meningkatkan promosi potensi wisata dan budaya sehingga banyak wisatawan yang



tertarik untuk berkunjung dan berwisata di Kabupaten Barito Timur.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD Kabupaten Barito Timur), merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah, salah satu hal yang penting adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*). Perumusan kebijakan pembangunan didasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, permasalahan, serta isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan menjadi satu komponen penting dalam arsitektur kinerja, hal ini dikarenakan *impact* merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan pembangunan maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023 sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Timur baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi bupati dan wakil bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan



permasalahan pembangunan di Kabupaten Barito Timur, serta visi, misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh bupati dan wakil bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA
MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH"**

Penjelasan Visi:

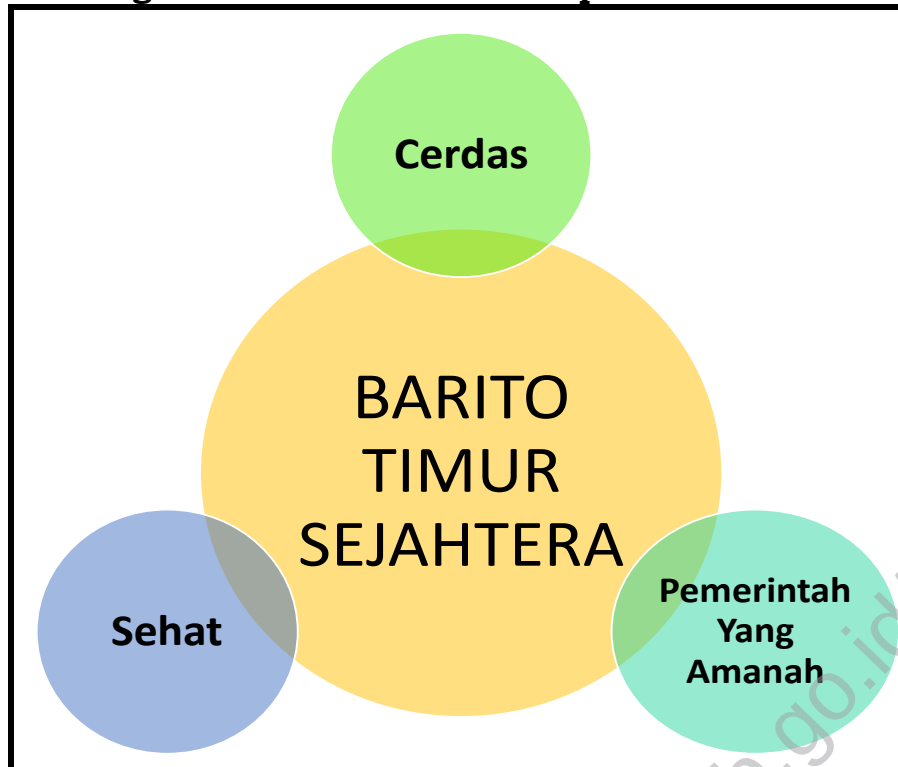
Visi tersebut di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Sehat** adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan aktifitas secara produktif baik ekonomi maupun sosial.
2. **Cerdas** adalah kemampuan untuk belajar dengan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.
3. **Sejahtera** adalah keadaan atau kondisi masyarakat yang baik, dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dapat diartikan juga terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.
4. **Pemerintahan Yang Amanah** adalah pemerintah yang mampu memberikan pelayanan dengan maksimal dan sebesar-besarnya prioritas pembangunan untuk kemakmuran dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas, makna dari visi Kabupaten Barito Timur adalah Kabupaten Barito Timur ingin mewujudkan daerah yang mensejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, akan tercipta daerah dengan masyarakat yang kuat, mandiri, handal, tangguh dan nyaman serta sejahtera.

Dengan merujuk pernyataan pokok visi Kabupaten Barito Timur di atas maka hubungan antar elemen visi Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur terlihat pada gambar berikut :

Gambar 5.1.
Hubungan Antar Pokok Visi Kabupaten Barito Timur



Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kabupaten Barito Timur, maka pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal daerah. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan masyarakat yang sehat, cerdas dan pemerintahan yang amanah. Sehingga diharapkan Kabupaten Barito Timur akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata diseluruh lapisan masyarakat.

5.2. M i s i

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.



Dalam upaya mengoperasionalkan visi “Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Barito Timur pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia;
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga; dan
5. Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Penjelasan dari masing masing misi adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama: Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan

Peningkatan ekonomi kerakyatan Kabupaten Barito Timur dikembangkan melalui kearifan lokal masyarakat dengan memerhatikan kemampuan dan tradisi masyarakat yang baik sehingga sejumlah strategi dan arah kebijakan meliputi penelitian dan pengembangan teknologi, inovasi teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kerakyatan serta penyediaan alat-alat pertanian, peternakan dan perkebunan dapat terselenggara dengan baik. Selain itu kemajuan koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri. Ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan turunannya maupun dalam



pengembangan koperasi dan UMKM merupakan cikal bakal perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Misi kedua: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan yang dikembangkan melalui kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur diperlukan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menunjang kinerja. Dalam upaya meningkatkan penataan kesehatan masyarakat perlu strategi dan arah kebijakan yaitu dengan meningkatkan kapasitas kinerja tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga medis dan paramedis, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kesehatan, perbaikan standarisasi pelayanan kesehatan, penyediaan puskesmas rawat inap, Puskesmas dan Polindes. Sedangkan dari segi pendidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan sehingga proses belajar mengajar dapat terlayani dengan baik sehingga standar mutu pendidikan secara maksimal.

3. Misi ketiga: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan sekaligus menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat, baik yang berbasis ekonomi kerakyatan maupun sektor-sektor ekonomi modern. Peningkatan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, sumber daya air, air bersih maupun kelitrikan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur. Demi memperlancar akses mobilitas masyarakat, jalan dan jembatan perlu mendapat perbaikan baik dari kecamatan ke desa, antar desa, bahkan dari desa ke akses jalan utama. Pemanfaatan sumber daya air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pengembangan irigasi teknis juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih.



Sedangkan infrastruktur kelistrikan diharapkan seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur dapat terlayani listrik dengan baik. Selain infrastruktur dasar, kelestarian lingkungan perlu dijaga untuk masa yang panjang sehingga dapat dimanfaatkan bagi pariwisata yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Barito Timur.

4. Misi keempat: Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga

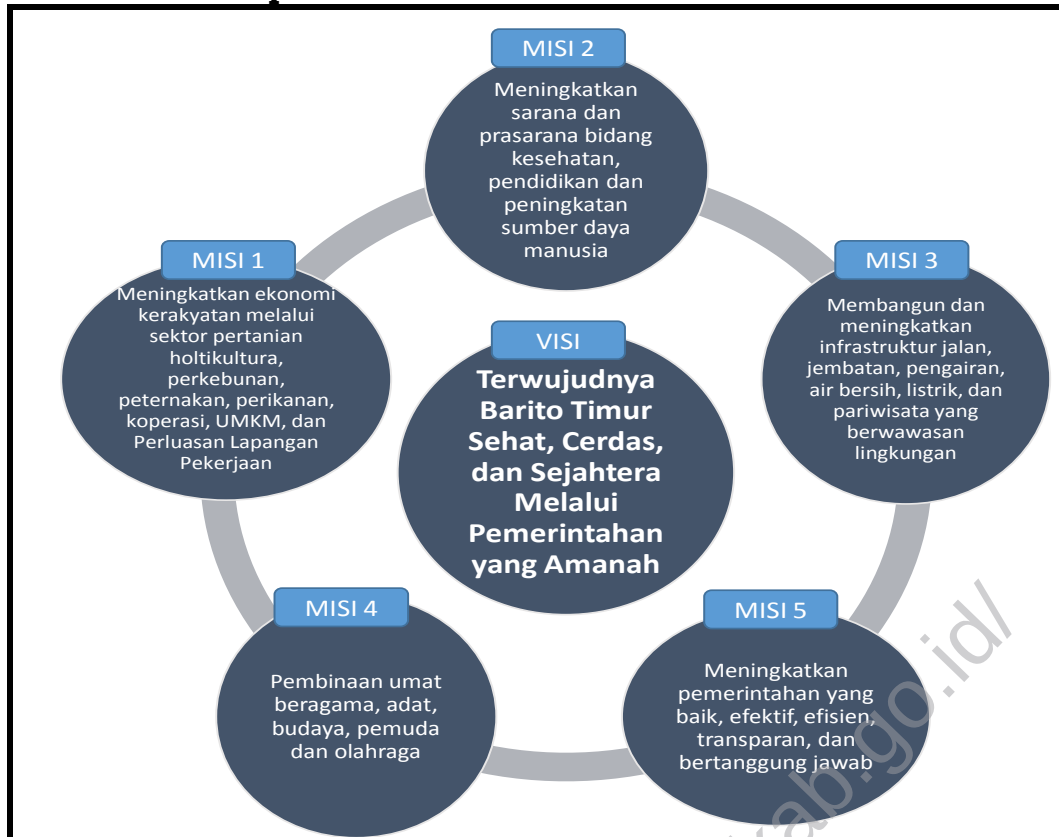
Pembinaan umat beragama merupakan suatu kewajiban di wilayah Republik Indonesia, terlebih di wilayah Kabupaten Barito Timur yang memiliki keberagaman sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Dengan, terpeliharanya kebudayaan di wilayah Barito Timur, budaya leluhur tetap lestari dan dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata kebudayaan. Pembinaan pemuda dan olahraga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menghasilkan pemuda yang berprestasi dan olahragawan handal.

5. Misi kelima: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab

Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang baik maka Pemerintah harus terus berupaya menyempurnakan aparaturnya dari segi organisasi, manajemen, sistem dan prosedur, termasuk pembinaan pegawai (ASN). Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang baik dengan memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi, memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, penyediaan fasilitas kerja dengan perangkat kerja yang memadai, optimalisasi analisis jabatan dengan penempatan aparatur, perencanaan dan informasi, menyediakan fasilitas teknologi informasi, penerapan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat, jelas, dan terukur, penguatan regulasi kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemerintah daerah.

Keterkaitan antara visi dengan misi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 5.2.
Keterkaitan Antara Visi Dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023



Dengan demikian visi mewujudkan Kabupaten Barito Timur mengandung makna terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM yang mampu bersaing dan perubahan pola pikir kearah yang produktif dalam memanfaatkan potensi alam dan potensi nilai dan asset budaya sebagai kekuatan yang mendorong peningkatan daya saing dengan dukungan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Dalam upaya sinkronisasi setiap kebijakan pembangunan daerah, maka perlu adanya kesesuaian dan konsistensi antara kebijakan pembangunan kabupaten dengan provinsi selaku perpanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat. Tak terkecuali perencanaan pembangunan Barito Timur juga memiliki upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan konsistensi setiap kebijakan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dapat dilihat kesesuaian misi pembangunan pada tabel berikut.



Tabel 5.1
Kesesuaian dan konsistensi antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023

No	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2023	MISI RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR
1	Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan
2	Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur	Misi 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, Pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
3	Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
4	Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 1 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan
5	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 2 : Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
6	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, Pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Misi 4 : Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga.



No	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2023	MISI RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR
7	Misi 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
8	Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 1 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Barito Timur dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kabupaten Barito Timur selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan tujuan Pembangunan Jangka Menengah di atas dan keberlanjutan kinerja Pembangunan Jangka Panjang maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah pembangunan Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:



Tabel 5.2
Indikator Tujuan Pembangunan
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Data Awal	Target 2023
Misi 1 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan			
T1. Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	LPE	5,98	7,50
	Tingkat Kemiskinan	7,17	5,17
Misi 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia			
T2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM	IPM	70,57	73,50
	IPG	88,36 (2015)	91,50
Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan			
T3. Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Indeks Gini	0,307	0,275
	IKLH	NA	66,65
Misi 4 : Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga			
T4. Terwujudnya masyarakat yang beragama dan berbudaya	Angka Kriminalitas	0,16	0
Misi 5 : Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab			
T5. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	85

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Salah satu wujud kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingkat perekonomian yang baik dan konsisten. Karena itu Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus berusaha menciptakan upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta mengembangkan tatanan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkeadilan, melalui optimalisasi potensi sumber daya alam secara umum dan sistem



perdagangan yang adil untuk menopang kemajuan industri, mengembangkan pariwisata yang tangguh, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal lainnya, melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan inti Kabupaten Barito Timur. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah semakin terbukanya berbagai akses hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penjuru wilayah sehingga masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, dan berdaya saing. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - LPE sektor Pertanian
 - LPE sektor Industri Pengolahan
- Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah kunjungan wisatawan
 - PDRB Sektor pariwisata
- Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Pengeluaran perkapita
- Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Nilai Investasi Nilai investasi berskala nasional (PMDN)
 - Nilai investasi berskala nasional (PMA)
 - Tingkat Pengangguran Terbuka

2. Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM

Peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia merupakan kunci sukses terwujudnya setiap tujuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang berarti penduduk Kabupaten Barito Timur merupakan pelaksana pembangunan daerah sekaligus yang menikmati hasil-hasil

pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan Kabupaten Barito Timur harus memperhatikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan, karena nilai budaya sesungguhnya merupakan aset dalam pembangunan melalui aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Barito Timur yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan kemandiraan dalam memberikan sumbangsih optimal dan kesempatan yang lebih terbuka bagi penduduk Kabupaten Barito Timur dalam mengembangkan kesejahteraan hidupnya di masa mendatang. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Rata-rata lama sekolah
 - Harapan Lama Sekolah
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Angka harapan hidup
- Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

3. Tujuan 3: Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan perlu memperhatikan tata ruang yang disusun dalam rencana tata ruang agar dapat berdayaguna. Pembangunan pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, sekaligus tangguh terhadap potensi bencana yang ada. Peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur daerah akan juga ikut mendorong

produktifitas masyarakat dan pembangunan daerah. maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase panjang jalan kondisi baik
 - Persentase RT yang terakses air bersih
 - Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)
 - Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)
- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Status Indeks Kualitas Air
 - Status Indeks Kualitas Udara
 - Tutupan Lahan

4. Tujuan 4: Terwujudnya masyarakat yang beragama dan berbudaya

Masyarakat yang beragama dan berbudaya merupakan masyarakat yang mempunyai perilaku/akhlak yang berbudi luhur. Masyarakat yang seperti ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Dengan masyarakat yang beragama, maka segala kebaikan dalam unsur keagamaan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Kemudian kehidupan berbudaya perlu diterapkan oleh masyarakat karena budaya merupakan kekayaan sejati daerah. Dengan mengembangkan budaya daerah maka masyarakat akan mengikuti aturan segala norma yang berlaku dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian tujuan diatas, sasaran pembangunan ini adalah:

- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)
- Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase wirausaha baru



- Meningkatkan prestasi olahraga. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi
- Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya

5. Tujuan 5: Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Predikat Akuntabilitas Kinerja
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah kasus korupsi
- Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Nilai IKM (Nilai Interval)

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikatornya diatas, berikut akan disajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, beserta target pembangunan dari tahun 2018-2023.



Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH									
MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
M.1 Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan									
Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	LPE		5,98	6,49	6,74	6,99	7,25	7,50	7,50
	Tingkat Kemiskinan		7,17	6,77	6,37	5,97	5,57	5,17	5,17
	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah	LPE sektor Pertanian	6,54	7,03	7,27	7,51	7,76	8,00	8,00
		LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	8,56	8,92	9,28	9,64	10,00	10,00
	Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah	PDRB Sektor pariwisata	NA	4,2	4,7	5,3	5,8	6,3	7,32
		Jumlah kunjungan wisatawan	10.969	11.479	11.735	11.990	12.245	12.500	12.500
	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.222.659	1.291.995	1.361.330	1.430.665	1.500.000	1.500.000
	Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	570 Milyar (2013)	700	850	800	950	1000	1000



VISI : TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH									
MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
			pengangguran	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	5,70 Juta US\$ (2013)	7,00	8,50	8,00	9,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,68	3,79	3,34	2,89	2,45	2,00	2,00
M.2 Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia									
Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM	IPM		70,57	71,59	72,065	72,53	73	73,50	73,50
	IPG		88,36 (2015)	89,8	90,21	90,62	91,03	91,50	91,50
	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	9,04	9,19	9,27	9,35	9,42	9,50	9,50
		Harapan Lama Sekolah	12,8	13,48	13,77	14,05	14,34	14,63	14,63
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	67,97	68,65	68,99	69,32	69,66	70,00	70,00
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	75,8 (2015)	80,40	81,55	82,70	83,85	85,00	85,00
M.3 Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan									
Meningkatkan infrastruktur	Indeks Gini		0,307	0,296	0,291	0,286	0,28	0,275	0,275
	IKLH		NA	61,02	63,15	65,08	65,87	66,65	66,65



VISI : TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH									
MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase panjang jalan kondisi baik	44,48	54,65	59,74	64,83	69,91	75,00	75,00
		Persentase RT yang terakses air bersih	76,2	84,13	88,10	92,07	96,03	100,00	100
		Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	34,75	23,17	17,38	11,58	5,79	0	0
		Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	100	100
	Meningkatkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	73%	80%	75%	74%	73%	72%	72%
		Status Indeks Kualitas Air	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Status Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Tutupan Lahan	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
M.4 Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga									
Terwujudnya	Angka Kriminalitas	0,16	0,15	0,1	0,1	0	0	0	



VISI : TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH									
MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
masyarakat yang beragama dan berbudaya	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	108	72	54	36	18	0	0
	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	Persentase wirausaha baru	NA	20	30	40	50	60	70
	Meningkatkan prestasi olahraga	Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	231 atlet	250	267	289	300	380	450
	Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah	Jumlah penyelenggaraa n event seni dan budaya	3 event budaya	3	4	5	5	6	6
M.5 Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab									
Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		NA	76	78	80	82	85	85
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	BB	BB	A	A



VISI : TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH									
MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Jumlah kasus korupsi	4 (2018)	3	2	1	0	0	0
	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu	Nilai IKM (Nilai Interval)	3,198	3,225	3,245	3,265	3,285	3,305	3,533



RPJMD Kab.Barito Timur
Tahun 2018-2023

BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan melayani masyarakat.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap pencapaian sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas Pembangunan jangka Menengah.



Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan.
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah).
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur tahun 2018–2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2018-2023

VISI: Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah				
Tujuan	Sasaran		Strategi Daerah	
Misi 1 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan				
T1.Mewujudkan perekonomian daerah yang merata	1	Meningkatnya daya saing eknomi unggulan daerah	1	Pengembangan perekonomian daerah berbasis



VISI: Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah				
Tujuan dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Sasaran		Strategi Daerah	
	2	Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah		ekonomi kerakyatan
	3	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	2	Percepatan pengentasan kemiskinan
			3	Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat
	4	Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran	4	Percepatan pengembangan iklim investasi daerah dan Pengurangan pengangguran
Misi 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia				
T3.Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM	5	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan
	6	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
	7	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	6	Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan				
T4.Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	8	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	7	Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah
	9	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	8	Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan
Misi 4 : Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga				
T5.Terwujudnya masyarakat yang	10	Meningkatkan keamanan dan	9	Penciptaan kehidupan



VISI: Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah				
Tujuan		Sasaran		Strategi Daerah
beragama dan berbudaya		kenyamanan dalam kehidupan masyarakat		masyarakat yang aman, damai, dan berbudi luhur
	11	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan		
	12	Meningkatkan prestasi olahraga		
	13	Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah		
Misi 5 : Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab				
T6.Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	14	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	10	Penerapan Reformasi Birokrasi
	15	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		
	16	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu		

Penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah diatas adalah sebagai berikut:

1) **Strategi : Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan**

Pembangunan perekonomian daerah merupakan hasil dari proses pengolahan sumber sumber daya alam yang mempunyai nilai sehingga meningkatkan pendapatan. Potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Timur cukup melimpah tidak hanya pada sektor pertambangan melainkan juga pada komoditi unggulan Kabupaten Barito Timur yaitu Sektor Perkebunan, dengan komoditi unggulannya adalah sub sektor Pertanian dengan komoditi yang diunggulkan berupa jagung, kedelai, nanas, pisang, ubi jalar dan ubi kayu, sub sektor perikanan adalah perikanan tangkap

dan budidaya, sub sektor peternakan komoditinya adalah sapi, babi dan kambing sedangkan Sub sektor Jasa yaitu wisata alam.

Dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pemerintah perlu mengakomodir dan mendukung pembangunan ekonomi pada masyarakat yang mayoritas berpendapatan rendah dengan memanfaatkan berbagai potensi unggulan daerah yang telah tersedia secara maksimal. Pengelolaan yang berkualitas akan menciptakan produk-produk unggulan daerah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga akan meningkatkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat dan perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur. Seperti contohnya dari sektor pertanian dan turunannya, perlu diarahkan pada agribisnis sehingga produk yang dijual sampai dengan pemasaran terintegrasi dengan baik, selain itu mengembangkan forum kemitraan akan menguntungkan petani dan pelaku ekonomi.

Pembangunan sektor pertanian ini juga berdampak pada pemenuhan pangan bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Barito Timur. Alur ketahanan pangan antara lain ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai upaya meningkatkan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, dan seimbang.

2) Strategi : Percepatan pengentasan kemiskinan

Percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap karena kompleksitas permasalahan yang melingkupinya. Hal ini juga dilakukan untuk mengawal dan mendukung penuh program Pemerintah Pusat dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga diharapkan dapat terlaksana dengan optimal dan kemiskinan dapat semakin berkurang. Selain itu, perencanaan dan strategi yang matang dalam pengentasan kemiskinan menjadi tolok ukur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan program-program yang tepat sasaran. Jika hal tersebut diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang proporsional, maka kemungkinan percepatan pengentasan kemiskinan dapat terlaksana semaksimal dan seoptimal mungkin. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara



komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Barito Timur perlu melakukan beberapa upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

3) Strategi : Optimalisasi Pengembangan Koperasi, UKM serta Industri Dalam Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat Barito Timur sangat rentan dengan pola dan struktur perdagangan atau sistem jual beli barang, sehingga koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat bisa menjadi penengah dalam memangkas proses hulu ke hilir yang merugikan masyarakat. Sektor perdagangan Barito Timur yang cukup berkembang dan UKM-UKM yang dibentuk oleh masyarakat mampu berkembang dengan baik perlu menjadi sorotan pemerintah daerah untuk mendukung dengan memberikan penyuluhan dan fasilitasi para wirausahaan UKM, IKM dan industri rumah tangga agar masyarakat dapat mempunyai pertahanan perekonomian yang tangguh dalam menjalankan usahanya. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah dapat bertahan dan terus berkembang sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Optimalisasi peningkatan industri terutama industri kecil maupun industri menengah perlu dikembangkan dengan memanfaatkan hasil SDA yang ada di Kabupaten Barito Timur, seperti pengolahan karet menjadi ban, sarung tangan karet maupun olahan karet lainnya. Sehingga keberagaman hasil perkebunan menjadi barang jadi akan lebih bernilai daripada barang mentahnya.

4) Strategi : Percepatan pengembangan iklim investasi daerah dan Pengurangan pengangguran

Kondisi daerah yang kondusif merupakan syarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia daerah yang mumpuni, mengakibatkan iklim investasi dapat berkembang. Dengan ini diharapkan mampu menarik investasi lokal daerah maupun asing untuk berinvestasi yang akan mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Pengembangan investasi



diikuti dengan peningkatan pelayanan perijinan bagi pengembang maupun masyarakat. Dinas terkait perlu memberikan edukasi terlebih dahulu kepada investor terutama investor perkebunan dan pertambangan yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Barito Timur.

Permasalahan gap antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan pengembangan iklim investasi. Hal ini karena iklim investasi dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja yang memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Barito Timur. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan.

5) Strategi :Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk kualitas SDM secara kepribadian dan kualitas manusia secara normatif. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan sumber daya manusia di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis akan membaik. Aksesibilitas pendidikan di daerah tertinggal juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan dibidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya kesehatan harus mulai disadari oleh masyarakat, dengan kondisi kesehatan yang prima masyarakat akan mampu melakukan segala aktivitas dengan optimal. Dengan kesadaran yang tinggi tentang kesehatan akan menggiring masyarakat pada pola hidup sehat. Sehingga akan lebih berhati-hati dalam memilih makanan



yang dimakan. Kemudian akan lebih meningkatkan kesehatan dengan menjaga pola hidup yang sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.

6) Strategi : Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungannya. Pola ketimpangan gender diatas menjadi ancaman tersendiri dalam perwujudan keadilan gender (*gender equity*) dan kesetaraan gender (*gender equity*).

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan kemampuan disegala bidang. Sasaran yang diharapkan yakni tercapainya Indeks Pembangunan Gender sebagai indikatornya, yang dilihat dari proporsi perempuan yang berada pada tingkat manajerial. Pada hakekatnya, sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan, selain itu perempuan ini adalah pencetak generasi penerus bangsa. Dengan sumber daya perempuan yang berkualitas akan menciptakan generasi/anak-anak yang berkualitas.



7) Strategi : Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah

Infrastruktur merupakan aspek penting bagi suatu wilayah untuk maju dan bersaing dengan wilayah lain. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Dengan akses infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan, maka diharapkan masyarakat dapat maju dan berkembang serta tidak ada kesenjangan dan keterisolasian suatu wilayah. Selain itu kualitas infrastruktur yang baik juga akan mampu menarik investasi yang dapat mempercepat jalannya pembangunan suatu wilayah. Penyediaan infrastruktur sebagian besar masih dilakukan oleh pemerintah. Peran swasta cenderung lebih banyak terlibat dalam penyediaan infrastruktur yang bersifat komersil. Sedangkan, infrastruktur dasar yang bersifat publik dan sosial terutama di kawasan terpencil dan perdesaan disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, umumnya pembangunan infrastruktur dasar terutama di wilayah perdesaan atau perbatasan pertumbuhannya sangat lambat. Peningkatan infrastruktur ini diprioritaskan untuk meningkatkan pengembangan wisata dan pemasaran hasil produksi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Timur sebagian besar didominasi oleh sektor pariwisata dan pertanian. Oleh sebab itu, diharapkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur ini akan mempercepat pergerakan perekonomian Kabupaten Barito Timur sehingga perekonomian dapat meningkat. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.



8) Strategi : Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan

Peningkatan kualitas pengelolaan pemanfaatan SDA harus diiringi dengan pembangunan lingkungan. Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam perlu disadari bahwa pemerintah daerah juga harus bersiap untuk menjaga dan ikut melestarikan lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan eksplorasi secara besar-besaran SDA tanpa memperhatikan lingkungan maka akan terjadi degradasi lingkungan hidup. Hal ini akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem alam yang suatu hari nanti akan memberikan dampak yang tidak lazim dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Barito Timur. Maka dari itu, perlu siasat/strategi yang mampu mengkolaborasikan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, kualitas lingkungan Kabupaten Barito Timur juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan ekosistem. Permasalahan persampahan dan kualitas air sungai juga perlu diperhatikan mengingat sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Selain itu, area penghijauan juga menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Barito Timur karena masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

9) Strategi : Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan berbudi luhur

Kehidupan yang aman merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Dengan ini keamanan perlu ditingkatkan dengan pelayanan dari aparat kemaan yang bertindak tegas jika ada tindakan/kasus kriminal sehingga masyarakat mempunyai rasa jera dan tidak mengulangi tindakan yang merugikan orang lain. Untuk mendukung hal tersebut maka kehidupan beragama selain sebagai hal yang didasarkan untuk meingkatkan kualitas hidup beragama, juga merupakan kesadaran dari masing masing individu dalam meningkatkan kualitas beragama, selain itu juga pemerintah harus ikut memberikan perhatian khusus untuk melaksanakan kegiatan keagamaan maupun menunjang sarana dan prasarana keagamaan sebagai wujud dari peran pemerintah untuk mendukung kualitas pelayanan kehidupan beragama.



Melihat perkembangan saat ini terdapat generasi “Milenial” yang mayoritas merupakan manusia muda pada usia produktif. Untuk mampu mengarahkan pada aktivitas yang positif maka pemuda/pemudi ini memerlukan media dan fasilitas untuk mengembangkan diri, salah satunya melalui olahraga. Pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga merupakan suatu kerangka peningkatan sumber daya manusia untuk menunjang kualitas pemuda dan prestasi melalui pembinaan olahraga. Pentingnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan prestasi di bidang pemuda dan olahraga. Kabupaten Barito Timur memperoleh peringkat ke 10 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, membanggakan karena peringkat diperoleh dengan kondisi yang terbatas. Sehingga, untuk meningkatkan prestasi olahraga pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur perlu memerhatikan sarana dan prasarana olahraga serta kesejahteraan atlet dan pelatihnya.

Indonesia tidak terlepas dari kekayaan Cagar Budaya dan merupakan warisan budaya daerah yang membutuhkan kepedulian dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Apabila cagar budaya ini dikelola dengan baik dan profesional, maka akan memberi keuntungan secara ekonomis, baik dari sektor pajak untuk kas daerah dan bisnis. Untuk dapat melestarikan cagar budaya, maka harus dilakukan berbagai upaya, sehingga warisan budaya bangsa tersebut tetap dapat dilihat dan dinikmati.

10) Strategi : Penerapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan



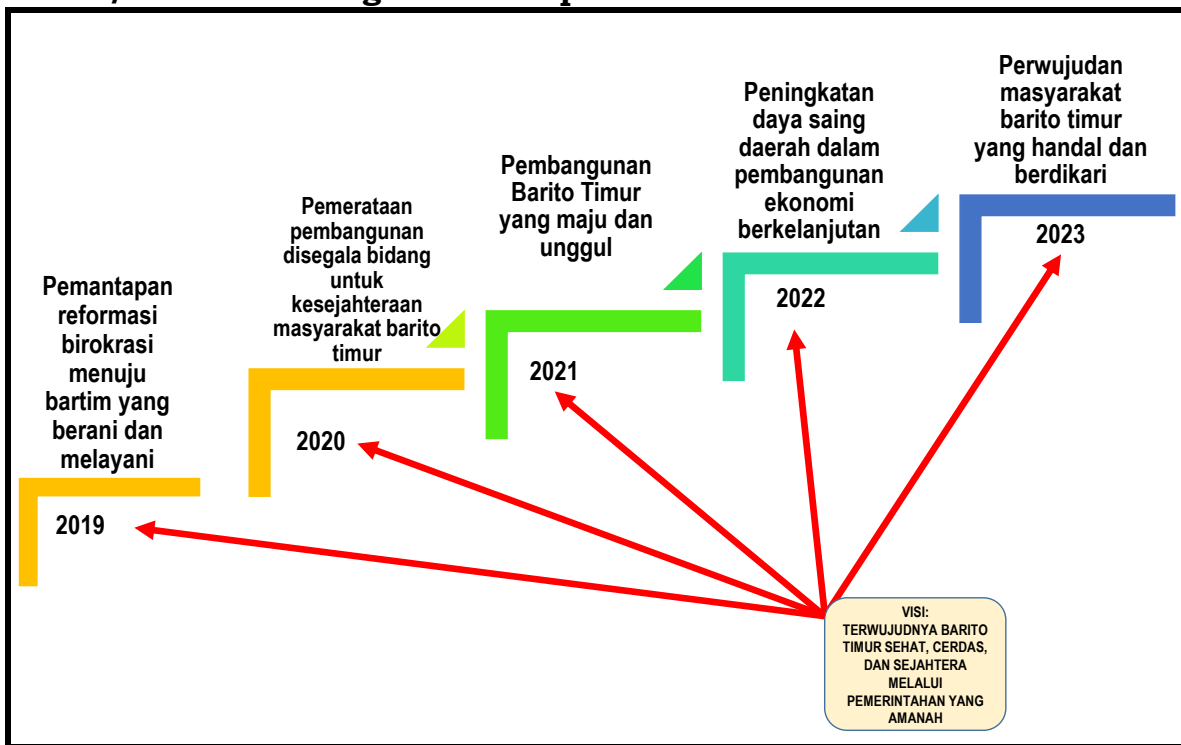
akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 6. 1
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang terjadi saat ini dan hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Berikut adalah arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur periode 2018-2023.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2019)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2019 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2019. Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah

“PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU BARTIM YANG BERANI DAN MELAYANI”



Untuk menjawab tema tersebut pada tahun 2019 yang harus dilakukan adalah pemantapan dan perbaikan pelayanan publik dan merestrukturisasi tata kelola pemerintahan. Pada tahun ini, diharapkan birokrasi Barito Timur meningkatkan kemampuan dalam menjalankan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN dan berani memberantas korupsi serta dengan segenap hati melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2020)

Arah kebijakan pada tahun 2020, pembangunan di Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2019. Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Barito Timur mulai fokus pada pemerataan pembangunan di berbagai bidang yaitu bidang SDM yang berfokus pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 adalah

**“PEMERATAAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BARITO TIMUR”**

Untuk menjawab tema tersebut pada tahun 2020 yang harus dilakukan adalah menjadikan Kabupaten Barito Timur sebagai kabupaten yang sejahtera yaitu penguatan kualitas SDM, peningkatan akses jalan dan jembatan terutama pada wilayah terpencil, kemudian peningkatan perekonomian masyarakat makro dan mikro yang kuat sehingga mampu menciptakan peluang investasi yang cepat dan mengurangi pengangguran sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2021)

Arah kebijakan pada tahun 2021, menitikberatkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara layak. Selanjutnya pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2021 berfokus pada pengembangan sumberdaya potensi daerah dengan bertemakan:



“PEMBANGUNAN BARITO TIMUR YANG MAJU DAN UNGGUL”

Melalui tema di atas, pembangunan Kabupaten Barito Timur menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Barito Timur memiliki infrastruktur yang memadai dan memiliki SDM yang berkualitas dan mumpuni untuk mendukung pembangunan.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2022)

Arah kebijakan pada tahun 2022, pembangunan Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 pembangunan Kabupaten Barito Timur menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2022 adalah

“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN”

Pada tahun ini pembangunan berfokus pada pembangunan pada sektor perekonomian makro dan mikro. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing seluruh potensi daerah agar mampu berinovasi dan melipatgandakan nilai dan kegunaannya. Sehingga produk-produk unggulan daerah mampu bersaing dengan produk dari luar dan perekonomian daerah dapat menjadi lebih kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi ini diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai bentuk syukur dalam rangka keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023, pembangunan Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ini, pembangunan Kabupaten Barito Timur pada bidang SDM, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pada tahun 2023 masyarakat Kabupaten Barito Timur menjadi masyarakat yang maju, handal dalam menyelesaikan



berbagai masalah dan lebih mandiri. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 adalah

“PERWUJUDAN MASYARAKAT BARITO TIMUR YANG HANDAL DAN BERDIKARI”

Sesuai tema di atas, maka pembangunan daerah dititikberatkan pada pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian. Dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri lokal, dibutuhkan inovasi seperti pengembangan industri kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kabupaten Barito Timur dapat lebih mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur.

Berikut ini disajikan keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur 2018-2023.



Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah	Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan	Peningkatan pendapatan petani dan pekebun						1	Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa						2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
								3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan
								4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
								5	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Agribisnis
								6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
								7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
		Peningkatan produktivitas sektor						8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
		perikanan						9	Program Peningkatan Produksi Perikanan
								10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
								11	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
								12	Program Pengembangan Pasar Daerah
		Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah						13	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Pengembangan kawasan industri potensial						14	Program Perumusan Kebijakan Bidang Industri Kecil dan Menengah
								15	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Kimia, Tekstil, Transportasi, dan Telematika



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah		Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/ kelurahan						16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan pengelolaan daerah/ obyek pariwisata						17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan						18	Program Pengembangan Kemitraan
Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat						19	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
								20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
								21	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
								22	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
	Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat							23	Program peningkatan pemberdayaan sosial
		Peningkatan peranan koperasi dalam mendukung usaha masyarakat						24	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
		Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat						25	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM
								26	Program Peningkatan Akses Usaha Bagi UMK dan Koperasi kepada Sumber Daya Produktif
		Optimalisasi akses permodalan bagi wirausaha						27	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM
								28	Program Pembinaan Kemitraan UMKM
								29	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
								30	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya investasi daerah	Percepatan pengembangan iklim	Peningkatan daya tarik investasi						31	Program Pengembangan Iklim Investasi
dalam mengurangi pengangguran	investasi daerah dan Pengurangan pengangguran	daerah						32	Program Pengendalian Penanaman Modal
		Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif						33	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha						34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
								35	Program Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan
								36	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum						37	Program Pendidikan Anak Usia Dini
								38	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
								39	Program Pendidikan Non Formal dan Informal



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								40	Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik						41	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
								42	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan						43	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung hidup sehat						44	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
								45	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas sapsras kesehatan						46	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pusk/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
		Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin						47	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
								48	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan						49	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
		Penguatan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak						50	Program Perlindungan Perempuan
								51	Program Perlindungan Anak
		Peningkatan keluarga yang sehat dan sejahtera						52	Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Meningkatnya pemenuhan	Percepatan pembangunan	Pembangunan infrastruktur dasar						53	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	infrastruktur aksesibilitas antar wilayah	masyarakat						54	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
								55	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
		Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan						56	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan yang sehat						57	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Peningkatan pengembangan rumah layak huni						58	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
		Peningkatan jaringan listrik dan komunikasi terutama dipedesaan						59	Program Pengembangan Ketenaga Listrikan
								60	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan						61	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Peningkatan aksesibilitas antar							



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
		wilayah desa dan kecamatan						62	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan						63	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup						64	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
								65	Program Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan
		Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representatif						66	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
								67	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam	Penciptaan kehidupan masyarakat yang	Peningkatan pelayanan keamanan dan						68	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
kehidupan masyarakat	aman dan damai	ketertiban masyarakat						69	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan		Penguatan kualitas daya saing pemuda dan olahraga						70	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatkan prestasi olahraga								71	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah		Peningkatan promosi penyelenggaraan budaya tradisional daerah						72	Program Pengelolaan Keberagaman Budaya
		Optimalisasi pemeliharaan situs-situs budaya dan cagar budaya daerah						73	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan	Penerapan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas manajemen SDM aparatur						74	Program Pendidikan Kedinasan



SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			2019	2020	2021	2022	2023		
Pemerintahan daerah		Peningkatan dan penegakan kedisiplinan aparat aparatur						75	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Optimalisasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran						76	Program perencanaan pembangunan daerah
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		Penguatan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan						77	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Peningkatan efektivitas kelembagaan birokrasi pemerintah						78	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu		Optimalisasi pelayanan sesuai standar SPM						79	Program Penataan Administrasi Kependudukan
								80	Program Peningkatan Penataan Pelayanan Terpadu



6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan (Kawasan Strategis)

Pengembangan wilayah pada kawasan strategis ini merupakan salah satu bagian pembangunan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menegaskan perencanaan pembangunan selaras dengan arahan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Maka dari itu, perlu menyelaraskan arahan perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Barito Timur dengan perencanaan pembangunan wilayah kawasan strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Pembangunan Kewilayahan (Kawasan Strategis) Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kewilayahan ini ditinjau berdasarkan dokumen perencanaan pada level nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, tinjauan-tinjauan dan data pendukung lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan. Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) diperlukan untuk menentukan daerah potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564 km². Pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 14 kabupaten/kota. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118, 49 km²). Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, komoditi pertanian dan pertambangan di Kalimantan Tengah masih cukup stabil, sehingga dapat dikembangkan menjadi industri hulu.

➤ Pengembangan Potensi Prioritas di Kalimantan Tengah



Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibagi menjadi 3 Zona. Antara lain Zona 1 (Barat), Zona 2 (Tengah), dan Zona 3 (Timur), dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

Tabel 6.2
Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah

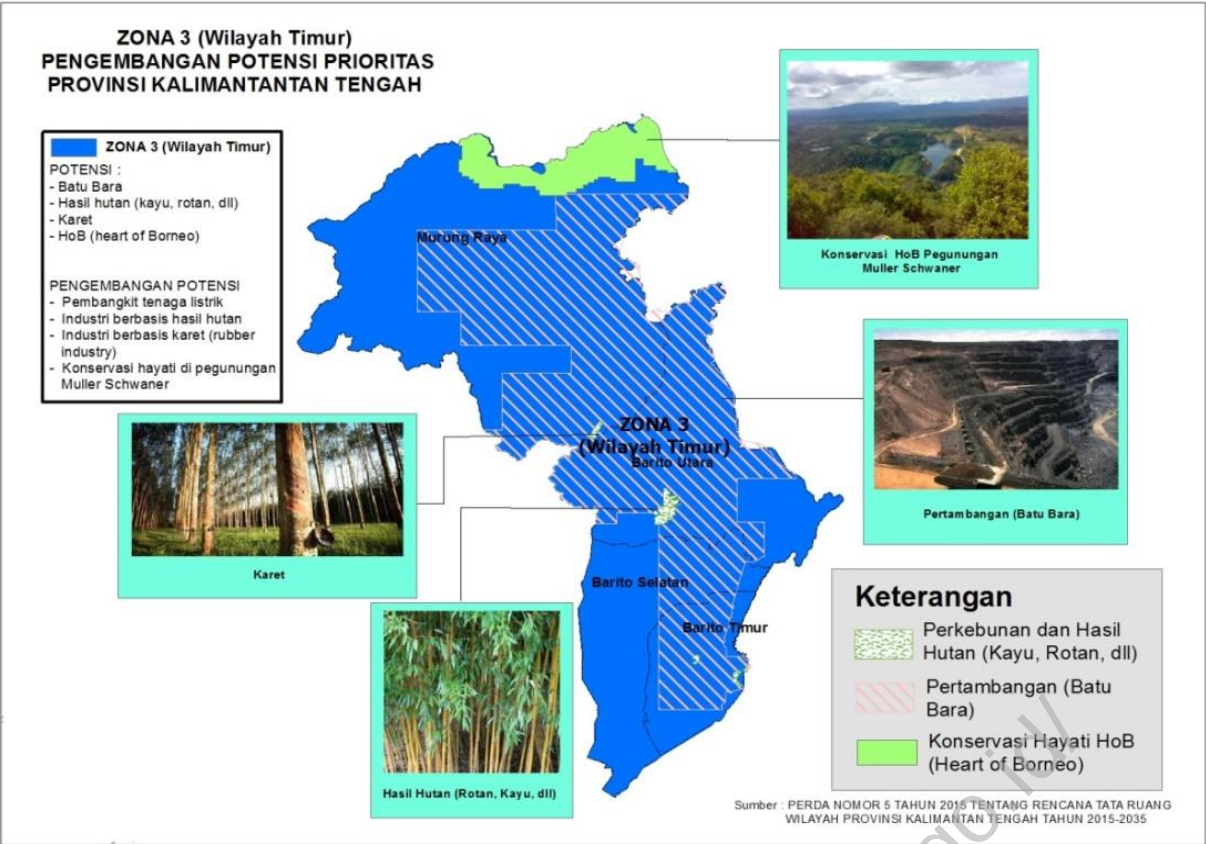
No	Zona	Kabupaten/Kota	Potensi	Pengembangan Potensi
1	Zona 1 (Barat)	• Sukamara • Lamandau • Kotawaringin Barat • Seruyan • Kotawaringin Timur	- Kelapa Sawit (CPO) - Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll) - Perikanan tangkap - Pariwisata	➤ Industri berbasis sawit ➤ Industri berbasis metal ➤ Industri berbasis perikanan tangkap ➤ Taman Nasional Tanjung Puting
2	Zona 2 (Tengah)	• Katingan • Gunung Mas • Palangka Raya • Pulang Pisau • Kapuas	- Pertanian (tanaman pangan) - Perikanan darat - Pariwisata	➤ Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas) ➤ Budidaya perikanan sungai ➤ Taman Nasional Sebangau
3	Zona 3 (Timur)	• Murung Raya • Barito Utara • Barito Selatan • Barito Timur	- Batubara - Hasil hutan (kayu, rotan, dll) - Karet - HOB (<i>Heart Of Borneo</i>)	➤ Pembangkit tenaga listrik ➤ Industri berbasis hasil hutan ➤ Industri berbasis karet (<i>rubber industry</i>) ➤ Konservasi Hayati di pegunungan <i>Muller Schwaner</i>

Sumber: Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035

Secara spasial, pengembangan potensi prioritas dan pengembangan potensi masing-masing zona di Kalimantan Tengah melalui pembagian wilayah atau zonasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6.1.
Pengembangan Potensi pada Zona 3
(Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur)



Sumber : Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035



Berikut dijelaskan arahan pengembangan wilayah strategis Kabupaten Barito Timur dari Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Kabupaten Barito Timur

Kabupaten Barito Timur memiliki potensi daerah yaitu sektor pertanian tanaman pangan, hortukultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, transportasi dan pariwisata. Kabupaten Barito Timur memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan wilayahnya. Sumberdaya tambang Barito Timur sangat melimpah. Jenis pertambangan di Kabupaten Barito Timur salah satunya adalah pertambangan batubara. Batubara merupakan sumberdaya alam yang sifatnya tak terbaharukan. Selain barang tambang, Kabupaten Barito Timur memiliki banyak objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi ecowisata yang berbasis budaya.

Dari berbagai potensi tersebut Sektor perdagangan menjadi unggulan Kabupaten Barito Timur dengan komoditi utama perdagangan karet. Hampir 70 persen masyarakat menyandarkan hidupnya pada karet. Ketertarikan masyarakat terhadap karet tidak lepas dari besarnya peluang pemasaran karet. Berapapun karet yang dihasilkan pasti habis terjual karena permintaanya yang sangat tinggi. pemasaran hingga keluar daerah terbuka lebar. Bahan baku juga selalu tersedia, produksi karet cukup melimpah di Barito Timur.

Tabel 6.2.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis
Komoditi Perdagangan KaretKabupaten Barito Timur

Peluang	Tantangan
▪ Pemasaran sangat terbuka karena permintaan karet tinggi. ▪ Mendapat dukungan pemerintah daerah. ▪ Pengiriman keluar daerah sangat terbuka. ▪ Mayoritas penduduk memiliki usaha perkebunan karet.	▪ Kebutuhan pasar internassional lebih untuk jenis karet sintetis bukan karet alami. ▪ Sering terjadi kecurangan timbangan dari pihak pembeli karet yang merugikan masyarakat penjual karet. ▪ Belum adanya asosiasi pedagang karet. ▪ Harga karet terkadang turun drastic. ▪ Belum adanya pabrik karet lokal.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan



▪ Pemasaran mudah dan lancar. ▪ Bahan baku mudah diperoleh dan banyak tersedia. ▪ Produksinya cukup melimpah.	▪ Kualitas karet masih belum standar ekspor

B. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan kebijakan yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, bahwa kawasan strategis provinsi di Kabupaten Barito Timur terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Barito Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan Agropolitan di Ampah Kecamatan Dusun Tengah; dan
- b. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis, yaitu di Tampa Kecamatan Paku dengan luas kurang lebih 350 Ha dan Kecamatan Dusun Tengah di Desa Batu Puti dengan luas kurang lebih 150 Ha, dan Desa Talohen dengan luas kurang lebih 75 Ha.
- c. Kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan peternakan kerbau rawa di desa Pulau Patai, peternakan sapi di desa Sumur (Ranch Mini Bangi) Kecamatan Dusun Timur dan di desa Dayu Kecamatan Karusen Janang.

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yang menjadi ciri sebagai bukti peninggalan sejarah dan/atau budaya masyarakat kabupaten Barito Timur adalah Kawasan Adat Masyarakat Umat Hindu Kaharingan yang berupa Situs Brohong di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah



C. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di kabupaten Barito Timur adalah kawasan strategis untuk pengembangan sumber daya energi PLTU (PT. Rimau Energi Mining) di desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Barito Timur maka arah pengembangan wilayah strategis dijabarkan sebagai berikut.

a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang perlu didorong dan dikembangkan adalah:

- **Kawasan Agropolitan Bambulung**

Penetapan kawasan Agropolitan di Bambulung Kecamatan Pematang Karau dikarenakan kawasan ini merupakan pemasok utama tanaman padi di Kabupaten Barito Timur. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Kawasan Strategis Agropolitan, penyusunan DED prasarana kawasan yang dikembangkan secara terpadu kawasan agropolitan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

- **Kawasan Perkotaan Tamiang Layang dan Perkotaan Ampah**

Tamiang Layang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Ampah sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perlu ditetapkan sebagai kawasan strategis perkotaan sebagai upaya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan kedepan. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan dan RTBL dan sub kawasan yang bernilai strategis serta penyusunan masterplan perkotaan.

- **Kawasan Minapolitan**

Kawasan minapolitan ini merupakan kawasan pengembangan budidaya perikanan yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati Tahun 2010 yang berada di desa Tampa Kecamatan Paku.



- **Kawasan Tambak**

Kawasan perikanan milik masyarakat yang berada di wilayah Barito Timur perlu didorong pengembangannya untuk mendukung dan menunjang sektor unggulan kawasan.

- b. **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- kawasan yang menuntut prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- kawasan rawan bencana alam; dan
- kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dan dilestarikan adalah Kawasan Konservasi Taman Anggrek di Desa Siong Kecamatan Paju Epat.

- c. **Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi ini adalah kawasan strategis untuk pengembangan sumber daya energi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Karau di desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Desa Tampulangit, Juru Banu, Telang,

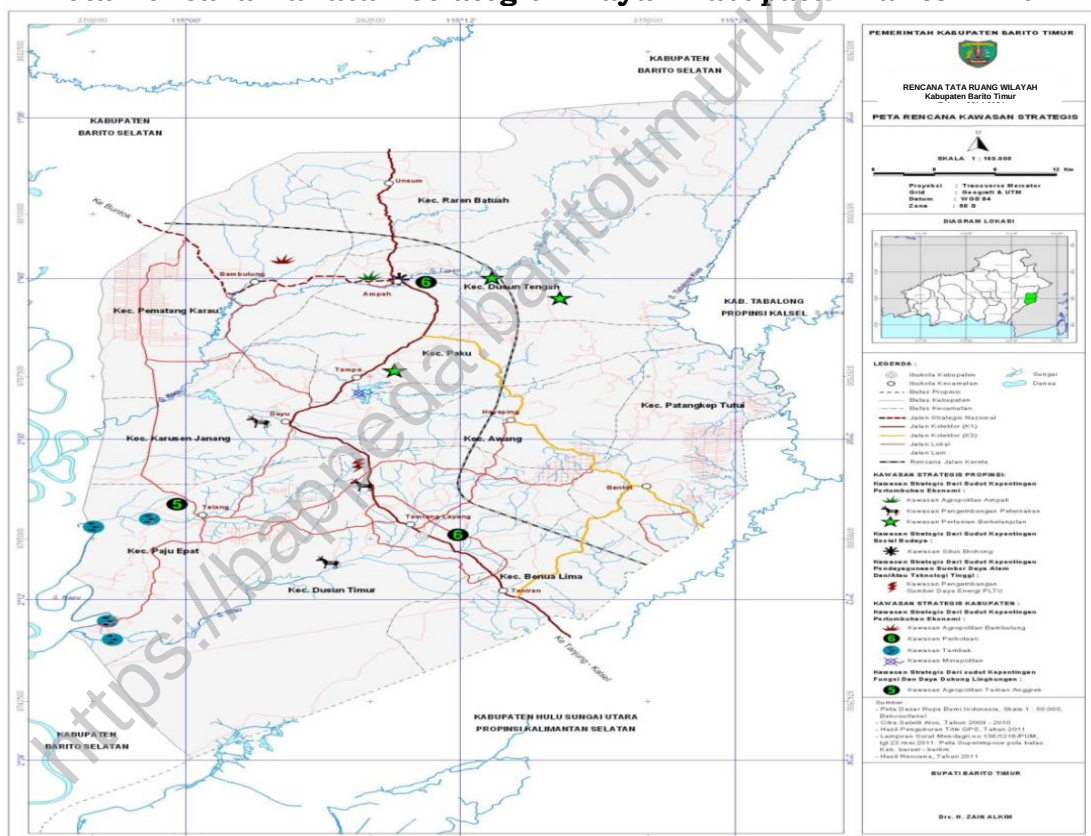


Balawa, Telang Baru, dan Kali Napu Kecamatan Paju Epat; Desa Harara, Matarah, Gumpa Kecamatan Dusun Timur; Desa Wurana, Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang; Desa Apar Batu, Janah Jari, Gunung Karasik Kecamatan Awang; Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah; Desa Tarinsing Kecamatan Paku; Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima. Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya (*stock pile* Batu Bara) terdapat di Desa Lalap.

Pengembangan kawasan strategis ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dan memenuhi kebutuhan energi listrik yang diperlukan, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk kepentingan lainnya.

Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta pengawasannya, penyusunan *masterplan* prasarana kawasan, serta pengelolaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 6.2.
Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034



6.4. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023. Program-program pembangunan Kabupaten Barito Timur untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Berikut rumusan program pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra Perangkat Daerah dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Lampiran I (tabel 6.3)



<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah anggaran yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Secara keseluruhan, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 7.1. yang merupakan tabel kerangka pendanaan dan Tabel 7.2 yang merupakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Barito Timur

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	414.825.876.797,43	428.985.560.902,37	453.875.430.342,00	456.176.125.434,00	460.114.925.790,00
2	BELANJA	960.133.786.720,93	1.003.339.807.123,37	1.049.746.436.009,00	1.074.559.557.939,00	1.112.055.033.336,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	545.307.909.923,50	574.354.246.221,00	595.871.005.667,00	618.383.432.505,00	651.940.107.546,00
2.1.1	Belanja Pegawai	366.174.308.152,50	384.523.428.608,00	403.749.600.038,00	423.937.080.040,00	445.133.934.042,00
2.1.3	Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.934.700.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	5.143.571.000,00	7.024.949.880,00	7.024.949.880,00	7.024.949.880,00	7.024.949.880,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	154.955.330.771,00	152.705.867.733,00	154.996.455.749,00	157.321.402.585,00	159.681.223.624,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	414.825.876.797,43	428.985.560.902,37	453.875.430.342,00	456.176.125.434,00	460.114.925.790,00
2.2.1	Belanja Pegawai	74.610.663.072,00	85.797.112.180	94.585.091.822	95.064.543.764	96.624.134.416
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.269.392.536,64	150.144.946.316	184.997.629.480	185.935.382.682	186.346.544.945
2.2.3	Belanja Modal	140.945.821.188,79	193.043.502.406	174.292.709.040	175.176.198.988	177.144.246.429

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				URUSAN WAJIB DASAR															
				DINAS PENDIDIKAN												Dinas Pendidikan			
1	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	16.614.396.689,48	100%	16.624.396.689,80	100%	16.724.396.689,80	100%	16.794.396.689,80	100%	83.561.983.448,68	Dinas Pendidikan		
1	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	328.192.750,00	95%	329.192.750,00	95%	330.192.750,00	95%	340.192.750,00	95%	1.687.963.750,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	58.410.300,00	95%	58.410.300,00	95%	60.810.300,00	95%	62.810.300,00	95%	323.251.500,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	76.608.000,00	B	76.608.000,00	B	78.608.000,00	B	80.608.000,00	B	395.040.000,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Pendidikan Anak Usia Dini			412.646.800,00		432.646.800,00		442.646.800,00		502.646.800,00		2.455.185.221,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A			13.352.368.450,00		13.566.778.555,20		13.598.749.212,20		14.273.619.666,20		69.578.135.549,80	Dinas Pendidikan		
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B											-	Dinas Pendidikan		
1	01	01	18	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun			1.706.196.000,00		1.706.196.000,00		1.716.196.000,00		2.049.066.454,00		2.152.066.454,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		90%	1.431.593.000,00	92%	1.531.593.000,00	95%	1.531.593.000,00	97%	1.581.593.000,00	100%	1.681.593.000,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah negeri yang pengelolaannya baik		100%	79.007.600,00	100%	80.007.600,00	100%	85.007.600,00	100%	102.007.600,00	100%	458.038.000,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	23	Program Pendidikan Masyarakat	Rasio lembaga pendidikan masyarakat yang dibina		80%	205.067.500,00	85%	255.067.500,00	90%	255.067.500,00	92%	286.067.500,00	95%	1.301.337.500,00	Dinas Pendidikan		
1	01	01	25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rasio sekolah yang memperoleh dan mengelola dana BOS dengan baik		100%	14.445.000.000,00	100%	14.445.000.000,00	100%	14.445.000.000,00	100%	14.445.000.000,00	100%	72.225.000.000,00	Dinas Pendidikan		
				JUMLAH				48.709.487.089,48		49.105.897.195,00		49.268.267.852,00		50.518.008.760,00		51.471.959.981,00	Dinas Pendidikan		
				DINAS KESEHATAN												Dinas Kesehatan			
2	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	10.860.485.000,00	100%	10.862.485.000,00	100%	10.866.000.000,00	100%	10.869.000.000,00	100%	54.329.970.000,00	Dinas Kesehatan		
2	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	737.000.000,00	95%	739.000.000,00	95%	742.000.000,00	95%	744.000.000,00	95%	3.712.000.000,00	Dinas Kesehatan		
2	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	253.910.000,00	95%	255.000.000,00	95%	257.000.000,00	95%	259.000.000,00	95%	1.283.910.000,00	Dinas Kesehatan		
2	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	78.000.000,00	85%	80.000.000,00	90%	822.000.000,00	92,50%	824.000.000,00	95%	2.634.000.000,00	Dinas Kesehatan		

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
2	01	01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif		90%	84.100.000,00	92%	90.000.000,00	95%	92.000.000,00	97%	94.000.000,00	100%	98.000.000,00	100%	458.100.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100%	266.674.000,00	100%	270.000.000,00	100%	272.000.000,00	100%	276.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	1.364.674.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan pembinaan pengembangan lingkungan sehat		90%	245.460.000,00	92%	247.000.000,00	95%	249.000.000,00	97%	253.000.000,00	100%	258.000.000,00	100%	1.252.460.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rasio temuan kasus penyakit menular yang ditangani		100%	1.128.257.500,00	100%	1.140.000.000,00	100%	1.144.000.000,00	100%	1.146.000.000,00	100%	1.150.000.000,00	100%	5.708.257.500,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan fasilitas kesehatan rujukan yang terstandar		80%	1.149.659.500,00	85%	1.688.817.986,00	90%	1.840.516.802,00	95%	2.069.238.000,00	100%	2.478.237.000,00	100%	9.226.469.288,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan JKN pada masyarakat miskin		100%	76.865.000,00	100%	80.000.000,00	100%	84.000.000,00	100%	86.000.000,00	100%	90.000.000,00	100%	416.865.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	25	Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas dan Pustu dalam kondisi baik		100%	144.581.485,00	100%	150.000.000,00	100%	154.000.000,00	100%	156.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	764.581.485,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		95%	116.411.000,00	95%	120.000.000,00	97%	124.000.000,00	97%	126.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	616.411.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	33	Program Operasional Puskesmas	Rasio Puskesmas yang beroperasi dengan baik		100%	3.105.490.215,00	100%	3.110.000.000,00	100%	3.112.000.000,00	100%	3.114.000.000,00	100%	3.120.000.000,00	100%	15.561.490.215,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	34	Program Penyuluhan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat		100%	401.785.000,00	100%	405.000.000,00	100%	407.000.000,00	100%	409.000.000,00	100%	415.000.000,00	100%	2.037.785.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	37	Program DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	Rasio fasilitas kesehatan yang mendapat bantuan DAK		75%	9.351.831.000,00	80%	9.351.831.000,00	85%	9.351.831.000,00	90%	9.351.831.000,00	95%	9.351.831.000,00	95%	46.759.155.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	38	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kefarmasian (DAK FISIK)	Persentase pemenuhan ketersediaan alat kesehatan dan obat pada fasilitas kesehatan		80%	8.945.268.000,00	85%	8.945.268.000,00	90%	8.945.268.000,00	95%	8.945.268.000,00	100%	8.945.268.000,00	100%	44.726.340.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	39	Program Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		95%	1.842.000.000,00	95%	1.842.000.000,00	97%	1.842.000.000,00	97%	1.842.000.000,00	100%	1.842.000.000,00	100%	9.210.000.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	40	Program Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Rasio Puskesmas yang terakreditasi		90%	1.237.861.000,00	95%	1.237.861.000,00	100%	1.237.861.000,00	100%	1.237.861.000,00	100%	1.237.861.000,00	100%	6.189.305.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	01	41	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	persentase keluarga yang terdata dalam Program Indonesia Sehat		80%	148.850.000,00	85%	152.000.000,00	90%	154.000.000,00	95%	156.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	770.850.000,00	Dinas Kesehatan
2	01	02	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	4.731.347.500,00	100%	4.733.000.000,00	100%	4.736.000.000,00	100%	4.739.000.000,00	100%	4.745.000.000,00	100%	23.684.347.500,00	RSUD Tamiang Layang
2	01	02	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	RSUD Tamiang Layang

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
2	01	02	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	RSUD Tamiang Layang		
2	01	02	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	32.000.000,00	85%	34.000.000,00	90%	38.000.000,00	92,50%	41.000.000,00	95%	50.000.000,00	95%	195.000.000,00	RSUD Tamiang Layang
2	01	02	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	-	B	-	B	-	B	-	B	-	RSUD Tamiang Layang		
2	01	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana RSUD		80%	9.358.301.000,00	85%	9.358.301.000,00	90%	9.358.301.000,00	92,50%	9.358.301.000,00	95%	9.358.301.000,00	95%	46.791.505.000,00	RSUD Tamiang Layang
2	01	02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio ruang pelayanan kesehatan dalam kondisi baik		90%	355.583.015,00	92%	650.000.000,00	95%	790.000.000,00	97%	900.000.000,00	100%	1.150.000.000,00	100%	3.845.583.015,00	RSUD Tamiang Layang
2	01	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan pelayanan kesehatan yang terjalin		1	17.510.500,00	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00	1	35.000.000,00	1	123.510.500,00	RSUD Tamiang Layang
2	01	02	36	Program Badan Layanan Umum Daerah				12.495.000.000,00		12.495.000.000,00		12.495.000.000,00		12.495.000.000,00		12.495.000.000,00		62.475.000.000,00	RSUD Tamiang Layang
				JUMLAH				67.164.230.715,00		68.056.563.986,00		69.137.777.802,00		69.518.499.000,00		70.260.498.000,00		344.137.569.503,00	RSUD Tamiang Layang
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															DPUTR
3	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	3.532.792.650,00	100%	3.552.792.650,00	100%	3.553.792.650,00	100%	3.554.792.650,00	100%	3.556.792.650,00	100%	17.750.963.250,00	DPUTR
3	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	791.214.508,00	95%	795.214.508,00	95%	796.214.508,00	95%	797.214.508,00	95%	799.214.508,00	95%	3.979.072.540,00	DPUTR
2	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	82.500.000,00	95%	83.000.000,00	95%	84.000.000,00	95%	85.000.000,00	95%	85.700.000,00	95%	420.200.000,00	Dinas Kesehatan
3	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	210.000.000,00	85%	212.000.000,00	90%	213.000.000,00	92,50%	214.000.000,00	95%	215.000.000,00	95%	1.064.000.000,00	DPUTR
3	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	18.336.500,00	B	19.336.500,00	B	20.500.000,00	B	21.000.000,00	B	21.300.000,00	B	100.473.000,00	DPUTR
3	01	01	7	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rasio panjang jalan perluas wilayah			31.044.572.030,00		31.544.572.030,00		31.644.572.030,00		31.744.572.030,00		31.794.572.030,00		157.772.860.150,00	DPUTR
3	01	01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan dan jembatan		85%	574.830.000,00	87%	574.830.000,00	90%	574.830.000,00	92%	574.830.000,00	95%	574.830.000,00	95%	2.874.150.000,00	DPUTR
3	01	01	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik (km)			4.935.710.120,00		5.170.710.110,00		5.175.710.110,00		5.210.710.110,00		5.260.710.110,00		25.753.550.560,00	DPUTR
3	01	01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		85%	4.282.023.250,00	87%	4.297.023.250,00	90%	4.299.023.250,00	92%	4.298.023.250,00	95%	4.300.023.250,00	95%	21.476.116.250,00	DPUTR

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
3	01	01	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas daya tampung embung			157.475.000,00		158.475.000,00		159.475.000,00		160.475.000,00		161.475.000,00		797.375.000,00	DPUTR
3	01	01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum layak			4.695.369.000,00		4.695.369.000,00		4.695.369.000,00		4.695.369.000,00		4.695.369.000,00		23.476.845.000,00	DPUTR
3	01	01	28	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik genangan		20%	2.543.126.750,00	40%	2.547.126.750,00	70%	2.549.126.750,00	90%	2.550.126.750,00	100%	2.555.126.750,00	100%	12.744.633.750,00	DPUTR
3	01	01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan (km2)		50%	5.882.856.000,00	60%	6.092.856.000,00	70%	15.619.329.112,00	80%	13.831.692.500,00	90%	9.714.692.500,00	90%	51.141.426.112,00	DPUTR
3	01	01	31	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan kebutuhan dokumen tata ruang		30%	524.764.000,00	50%	528.764.000,00	75%	529.964.000,00	90%	530.764.000,00	100%	532.764.000,00	100%	2.647.020.000,00	DPUTR
3	01	01	32	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		30%	159.999.990,00	50%	160.500.000,00	75%	161.000.000,00	90%	162.000.000,00	100%	163.000.000,00	100%	806.499.990,00	DPUTR
3	01	01	33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW		80%	37.160.010,00	80%	40.160.010,00	85%	41.160.010,00	85%	42.160.010,00	90%	42.160.010,00	90%	202.800.050,00	DPUTR
3	01	01	38	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	Rasio panjang jalan yang telah ditingkatkan		65%	25.734.105.850,00	70%	25.734.105.850,00	75%	25.734.105.850,00	81%	25.734.105.850,00	88%	25.734.105.850,00	88%	128.670.529.250,00	DPUTR
3	01	01	40	Kegiatan Penunjang				462.150.000,00		462.150.000,00		462.150.000,00		462.150.000,00		462.150.000,00		2.310.750.000,00	DPUTR
				JUMLAH				85.668.985.658,00		86.668.985.658,00		96.313.322.270,00		94.668.985.658,00		90.668.985.658,00		453.989.264.902,00	DPUTR
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman															DPKPP
4	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.736.929.500,00	100%	1.737.295.000,00	100%	1.738.295.000,00	100%	1.739.295.000,00	100%	1.741.295.000,00	100%	8.693.109.500,00	DPKPP
4	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	545.088.200,00	95%	546.088.200,00	95%	547.088.200,00	95%	548.088.200,00	95%	550.088.200,00	95%	2.736.441.000,00	DPKPP
4	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	56.000.000,00	95%	57.000.000,00	95%	58.000.000,00	95%	59.000.000,00	95%	60.000.000,00	95%	290.000.000,00	DPKPP
4	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	110.400.000,00	85%	111.400.000,00	90%	112.000.000,00	92,50%	113.000.000,00	95%	114.000.000,00	95%	560.800.000,00	DPKPP
4	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	73.005.000,00	B	74.005.000,00	B	75.000.000,00	B	76.000.000,00	B	77.000.000,00	B	375.010.000,00	DPKPP
4	01	01	9	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat pengelolaan keuangan dan aset		baik	32.600.000,00	baik	33.000.000,00	baik	34.000.000,00	baik	35.000.000,00	baik	36.000.000,00	baik	170.600.000,00	DPKPP
4	01	01	15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			3.337.454.361,30		3.340.454.360,37		3.345.454.361,00		3.346.454.361,00		3.350.454.361,00		16.720.271.804,67	DPKPP
4	01	01	22	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Rasio permukiman layak huni			2.330.133.500,00		2.340.133.500,00		2.345.133.500,00		2.350.133.500,00		2.360.133.500,00		11.725.667.500,00	DPKPP
4	01	01	23	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah				43.835.000,00		44.835.000,00		45.835.000,00		46.835.000,00		48.835.000,00		230.175.000,00	DPKPP
4	01	01	25	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			1.244.195.000,00		5.715.031.217,00		12.311.406.052,00		10.397.827.372,00		5.257.002.465,00		34.925.462.106,00	DPKPP

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
4	01	01	26	Program Kebersihan Kawasan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			1.118.549.199,00	1.119.549.199,00		1.120.549.199,00		1.121.549.199,00		1.124.549.199,00		5.604.745.995,00	DPKPP	
4	01	01	27	Program Pengembangan Ketenaga Listrikian	Rasio pemenuhan kebutuhan listrik untuk ruang publik		100%	2.179.901.900,00	100%	2.180.901.900,00	100%	2.181.901.900,00	100%	2.182.901.900,00	100%	2.186.901.900,00	100%	10.912.509.500,00	DPKPP
4	01	01	31	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh			291.660.400,00	292.660.400,00		293.660.400,00		294.660.400,00		298.660.400,00		1.471.302.000,00	DPKPP	
				JUMLAH				13.099.752.060,30	17.592.353.776,37		24.208.323.612,00		22.310.744.932,00		17.204.920.025,00		94.416.094.405,67	DPKPP	
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														Bakesbangpol	
5	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	957.812.300,00	100%	958.012.300,00	100%	958.312.300,00	100%	960.312.300,00	100%	961.312.300,00	100%	4.795.761.500,00	Bakesbangpol
5	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	106.527.500,00	95%	107.027.500,00	95%	107.327.500,00	95%	108.327.500,00	95%	109.327.500,00	95%	538.537.500,00	Bakesbangpol
5	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	20.075.000,00	95%	21.075.000,00	95%	21.375.000,00	95%	22.075.000,00	95%	23.075.000,00	95%	107.675.000,00	Bakesbangpol
5	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	7.600.000,00	B	8.000.000,00	B	8.300.000,00	B	10.000.000,00	B	11.000.000,00	B	44.900.000,00	Bakesbangpol
5	01	01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan wilayah pelaksanaan deteksi dini ancaman keamanan		100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.300.000,00	100%	50.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	194.300.000,00	Bakesbangpol
5	01	01	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase potensi gangguan keamanan yang terdeteksi		100%	42.722.000,00	100%	43.722.000,00	100%	44.022.000,00	100%	78.022.000,00	100%	80.022.000,00	100%	288.510.000,00	Bakesbangpol
5	01	01	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi lainnya		70%	258.454.500,00	75%	260.454.500,00	80%	260.754.500,00	85%	307.754.500,00	90%	308.754.500,00	90%	1.396.172.500,00	Bakesbangpol
5	01	01	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				41.045.000,00	42.045.000,00		42.545.000,00		70.545.000,00		75.545.000,00		271.725.000,00	Bakesbangpol	
5	01	01	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan wilayah pendidikan politik masyarakat		100%	125.407.200,00	100%	124.390.133,00	100%	124.701.579,00	100%	186.048.694,00	100%	1.288.050.494,00	100%	1.848.598.100,00	Bakesbangpol
5	01	01	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi		70%	44.000.000,00	75%	45.000.000,00	80%	45.200.000,00	85%	47.000.000,00	90%	48.000.000,00	90%	229.200.000,00	Bakesbangpol
5	01	01	23	Program Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi				196.000.000,00	197.000.000,00		197.300.000,00		200.300.000,00		201.300.000,00		991.900.000,00	Bakesbangpol	
				JUMLAH				1.823.643.500,00	1.831.726.433,00		1.835.137.879,00		2.040.384.994,00		3.176.386.794,00		10.707.279.600,00	Bakesbangpol	
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran														Satpol PP Damkar	
5	02	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	5.132.645.393,00	100%	5.133.115.393,00	100%	5.133.815.393,00	100%	5.134.815.393,00	100%	5.139.815.393,00	100%	25.674.206.965,00	Satpol PP Damkar
5	02	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	120.673.200,00	95%	121.143.200,00	95%	121.843.200,00	95%	122.843.200,00	95%	124.843.200,00	95%	611.346.000,00	Satpol PP Damkar

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
5	02	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	326.147.100,00	95%	326.617.100,00	95%	327.317.100,00	95%	328.317.100,00	95%	330.317.100,00	95%	1.638.715.500,00	Satpol PP Damkar
5	02	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	30.450.000,00	85%	30.920.000,00	90%	31.620.000,00	92,50%	32.620.000,00	95%	34.620.000,00	95%	160.230.000,00	Satpol PP Damkar
5	02	01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan wilayah pelaksanaan patroli keamanan		100%	792.400.800,00	100%	793.400.800,00	100%	794.470.000,00	100%	802.470.000,00	100%	1.382.470.000,00	100%	4.565.211.600,00	Satpol PP Damkar
5	02	01	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase potensi gangguan keamanan yang ditangani		100%	131.704.000,00	100%	132.704.000,00	100%	133.404.000,00	100%	137.813.723,00	100%	153.273.354,00	100%	688.899.077,00	Satpol PP Damkar
5	02	01	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi			312.460.000,00		312.930.000,00		313.630.000,00		314.630.000,00		316.630.000,00		1.570.280.000,00	Satpol PP Damkar
5	02	01	24	Program Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan				74.546.875,00		75.024.970,00		75.724.970,00		76.724.970,00		78.724.970,00		380.746.755,00	Satpol PP Damkar
				JUMLAH				6.921.027.368,00		6.925.855.463,00		6.931.824.663,00		6.950.234.386,00		7.560.694.017,00		35.289.635.897,00	Satpol PP Damkar
				Dinas Sosial															Dinas Sosial
6	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	897.845.350,00	100%	898.845.350,00	100%	899.845.350,00	100%	890.845.350,00	100%	892.000.000,00	100%	4.479.381.400,00	Dinas Sosial
6	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	115.000.000,00	95%	116.000.000,00	95%	117.000.000,00	95%	118.000.000,00	95%	119.000.000,00	95%	585.000.000,00	Dinas Sosial
6	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	-	95%	-	95%	-	95%		95%		95%	-	Dinas Sosial
6	01	01	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rasio anak terlantar yang dibina		50%	57.600.000,00	60%	58.600.000,00	65%	59.600.000,00	70%	60.000.000,00	75%	61.000.000,00	75%	296.800.000,00	Dinas Sosial
6	01	01	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		50%	265.442.000,00	60%	266.442.000,00	65%	267.442.000,00	70%	268.000.000,00	75%	269.000.000,00	75%	1.336.326.000,00	Dinas Sosial
6	01	01	20	Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina		50%	141.629.250,00	60%	161.687.440,00	65%	162.687.440,00	70%	172.687.440,00	75%	176.000.000,00	75%	814.691.570,00	Dinas Sosial
6	01	01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan		50%	285.190.000,00	60%	286.190.000,00	65%	287.190.000,00	70%	288.000.000,00	75%	290.000.000,00	75%	1.436.570.000,00	Dinas Sosial
6	01	01	22	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			690.000.000,00		700.000.000,00		1.397.422.553,00		1.492.160.386,00		1.629.402.214,00		5.908.985.153,00	Dinas Sosial
6	01	01	23	Program peningkatan pemberdayaan sosial	Rasio tenaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan			202.435.000,00		203.435.000,00		204.435.000,00		205.000.000,00		210.000.000,00		1.025.305.000,00	Dinas Sosial
6	01	01	24	Program Perencanaan dan Pelaporan				25.954.267,50		26.954.268,00		27.954.268,00		28.500.000,00		29.000.000,00		138.362.803,50	Dinas Sosial
6	01	01	25	Program Pengendalian Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian	Persentase data pegawai yang terkelola dengan baik		100%	64.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	66.000.000,00	100%	67.000.000,00	100%	68.000.000,00	100%	330.000.000,00	Dinas Sosial

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
6	01	01	27	Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Jumlah jenis bantuan stimulan yang diberikan		4	184.455.000,00	4	194.455.000,00	4	194.455.000,00	4	204.455.000,00	4	211.000.000,00	4	988.820.000,00	Dinas Sosial
6	01	01	33	Program Pembinaan Lansia Terlantar	Rasio lansia terlantar yang dibina		50%	66.200.000,00	52%	67.200.000,00	55%	68.200.000,00	57%	69.000.000,00	60%	70.000.000,00	60%	340.600.000,00	Dinas Sosial
				JUMLAH				2.995.750.867,50		3.044.809.058,00		3.752.231.611,00		3.863.648.176,00		4.024.402.214,00		17.680.841.926,50	Dinas Sosial
				URUSAN WAJIB NON DASAR															
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															Dinakertrans
1	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.068.021.000,50	100%	1.069.021.000,50	100%	1.070.000.000,00	100%	1.071.000.000,00	100%	1.200.050.089,00	100%	5.478.092.090,00	Dinakertrans
1	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	181.455.367,50	95%	182.455.367,50	95%	183.500.000,00	95%	185.000.000,00	95%	195.070.380,00	95%	927.481.115,00	Dinakertrans
1	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	31.100.000,00	95%	32.000.000,00	95%	33.000.000,00	95%	34.000.000,00	95%	45.000.000,00	95%	175.100.000,00	Dinakertrans
1	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	78.588.000,00	B	79.500.000,00	B	81.000.000,00	B	82.000.000,00	B	90.000.000,00	B	411.088.000,00	Dinakertrans
1	01	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			126.932.000,00		128.000.000,00		129.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		647.932.000,00	Dinakertrans
1	01	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja			52.554.000,00		53.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		95.000.000,00		335.554.000,00	Dinakertrans
1	01	01	18	Program Pengawasan, Hubungan Industrial, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			167.391.000,00		168.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		190.500.000,00		870.891.000,00	Dinakertrans
1	01	01	18	Program Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa			170.927.500,00		171.000.000,00		172.000.000,00		174.000.000,00		195.000.000,00		882.927.500,00	Dinakertrans
1	01	01	19	Program Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			557.993.400,00		940.922.069,50		2.147.577.285,00		2.026.585.146,00		2.415.537.656,00		8.088.615.556,50	Dinakertrans
1	01	01	21	Program Perencanaan dan Pelaporan	Persentase dokumen rencana dan laporan yang tepat waktu		100%	9.824.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.824.000,00	100%	14.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	61.148.000,00	Dinakertrans
1	01	01	20	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			177.652.599,50		178.652.599,50		179.000.000,00		205.000.000,00		223.000.000,00		963.305.199,00	Dinakertrans
				JUMLAH				2.622.438.867,50		3.013.051.037,00		4.236.901.285,00		4.173.585.146,00		4.796.158.125,00		18.842.134.460,50	Dinakertrans
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															DPPPA
2	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	612.631.997,00	100%	613.631.997,00	100%	615.631.997,00	100%	618.631.997,00	100%	620.031.997,00	100%	3.080.559.985,00	DPPPA
2	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	71.000.000,00	95%	72.000.000,00	95%	73.700.000,00	95%	74.700.000,00	95%	76.000.000,00	95%	367.400.000,00	DPPPA
2	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	18.000.000,00	95%	19.000.000,00	95%	20.900.000,00	95%	21.900.000,00	95%	23.000.000,00	95%	102.800.000,00	DPPPA

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
2	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	5.539.716,00	B	6.539.716,00	B	7.659.716,00	B	10.659.716,00	B	12.659.716,00	B	43.058.580,00	DPPPA
2	01	01	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah peraturan / ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup anak		1	169.109.000,00	1	199.109.000,00	1	254.334.415,00	1	264.334.415,00	1	314.334.415,00	1	1.201.221.245,00	DPPPA
2	01	01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				531.641.000,00		570.964.708,00		670.964.708,00		699.009.061,00		805.480.065,00		3.278.059.542,00	DPPPA
2	01	01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			181.750.000,00		182.750.000,00		184.000.000,00		187.000.000,00		189.000.000,00		924.500.000,00	DPPPA
2	01	01	19	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT terhadap perempuan yang ditangani		100%	25.000.000,00	100%	26.500.000,00	100%	69.900.000,00	100%	71.000.000,00	100%	73.000.000,00	100%	265.400.000,00	DPPPA
2	01	01	20	Program Perlindungan Anak	Rasio KDRT terhadap anak yang ditangani		100%	25.000.000,00	100%	204.161.854,00	100%	304.161.854,00	100%	324.161.854,00	100%	374.161.854,00	100%	1.231.647.416,00	DPPPA
				JUMLAH				1.639.671.713,00		1.894.657.275,00		2.201.252.690,00		2.271.397.043,00		2.487.668.047,00		10.494.646.768,00	DPPPA
				Dinas Ketahanan pangan															Ketahanan Pangan
3	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	714.487.300,00	100%	715.487.300,00	100%	717.487.300,00	100%	719.487.300,00	100%	725.587.300,00	100%	3.592.536.500,00	Ketahanan Pangan
3	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	44.000.000,00	95%	45.000.000,00	95%	47.000.000,00	95%	49.000.000,00	95%	55.500.000,00	95%	240.500.000,00	Ketahanan Pangan
3	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	18.000.000,00	95%	19.400.000,00	95%	21.000.000,00	95%	23.000.000,00	95%	26.500.000,00	95%	107.900.000,00	Ketahanan Pangan
3	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	-	85%	-	90%	-	92,50%	-	95%	-	95%	-	Ketahanan Pangan
3	01	01	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			367.000.000,00		1.074.845.968,00		1.375.752.836,00		1.529.760.994,00		1.721.593.141,00		6.068.952.939,00	Ketahanan Pangan
3	01	01	19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Ketersediaan pangan utama			63.144.430,00		113.144.430,00		213.144.430,00		263.144.430,00		463.144.430,00		1.115.722.150,00	Ketahanan Pangan
				JUMLAH				1.206.631.730,00		1.967.877.698,00		2.374.384.566,00		2.584.392.724,00		2.992.324.871,00		11.125.611.589,00	Ketahanan Pangan
				Dinas Lingkungan Hidup															DLH
5	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	2.053.641.299,75	100%	2.054.641.299,75	100%	2.055.641.299,75	100%	2.056.641.299,75	100%	2.060.841.299,75	100%	10.281.406.498,75	DLH
5	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	117.000.000,00	95%	118.000.000,00	95%	119.000.000,00	95%	119.500.000,00	95%	120.200.000,00	95%	593.700.000,00	DLH
5	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	21.500.000,00	95%	22.500.000,00	95%	23.500.000,00	95%	24.000.000,00	95%	24.500.000,00	95%	116.000.000,00	DLH

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
5	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	15.000.000,00	85%	16.000.000,00	90%	17.000.000,00	92,50%	17.500.000,00	95%	18.900.000,00	95%	84.400.000,00	DLH
5	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	36.000.000,00	B	37.000.000,00	B	38.000.000,00	B	38.500.000,00	B	39.900.000,00	B	189.400.000,00	DLH
5	01	01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan		70%	474.676.000,00	75%	478.676.000,00	80%	480.676.000,00	85%	485.676.000,00	90%	495.676.000,00	90%	2.415.380.000,00	DLH
5	01	01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rasio Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			312.291.000,00		316.291.000,00		318.291.000,00		323.291.000,00		343.291.000,00		1.613.455.000,00	DLH
5	01	01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan			47.451.400,00		54.437.635,25		57.019.672,25		63.024.360,25		80.007.875,25		301.940.943,00	DLH
5	01	01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan Pelayanan Informasi Status Kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produk biomassa			20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		22.500.000,00		27.840.000,00		113.340.000,00	DLH
5	01	01	20	Program Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL			1.448.097.727,00		1.449.097.727,00		1.450.097.727,00		1.450.597.727,00		1.455.597.727,00		7.253.488.635,00	DLH
5	01	01	28	Program Penigkatan dan Pemeliharaan Lokasi Tpa	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota			161.290.000,00		162.290.000,00		163.290.000,00		163.790.000,00		177.190.000,00		827.850.000,00	DLH
5	01	01	25	Program Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan lingkungan hidup			481.986.000,00		484.986.000,00		486.986.000,00		491.986.000,00		501.986.000,00		2.447.930.000,00	DLH
				JUMLAH				5.188.933.426,75		5.214.919.662,00		5.231.501.699,00		5.257.006.387,00		5.345.929.902,00		26.238.291.076,75	DLH
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															Disdukcapil
2	06	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.286.780.110,00	100%	1.292.780.110,00	100%	1.292.980.110,00	100%	1.299.241.100,00	100%	1.306.251.100,00	100%	6.478.032.530,00	Disdukcapil
2	06	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	124.664.000,00	95%	125.664.000,00	95%	126.784.000,00	95%	129.970.000,00	95%	133.410.000,00	95%	640.492.000,00	Disdukcapil
2	06	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	31.456.000,00	95%	31.556.000,00	95%	31.626.000,00	95%	34.873.000,00	95%	37.133.000,00	95%	166.644.000,00	Disdukcapil
2	06	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	-	85%	-	90%	-	92,50%	-	95%	-	95%	-	Disdukcapil

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
2	06	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	-	B	-	B	-	B	-	B	-	Disdukcapil		
2	06	01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan keluarga yang memiliki dokumen kependudukan secara lengkap			911.004.000,00		982.349.909,00		985.034.725,00		1.178.608.173,00		1.289.455.251,00	5.346.452.058,00	Disdukcapil	
				JUMLAH				2.353.904.110,00		2.432.350.019,00		2.436.424.835,00		2.642.692.273,00		2.766.249.351,00	12.631.620.588,00	Disdukcapil	
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													DPMD		
7	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	933.624.575,00	100%	934.524.575,00	100%	935.624.000,00	100%	936.324.000,00	100%	937.624.000,00	4.677.721.150,00	DPMD	
7	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	268.800.000,00	95%	269.200.000,00	95%	269.320.000,00	95%	271.420.000,00	95%	272.520.000,00	1.351.260.000,00	DPMD	
7	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	23.400.000,00	95%	24.100.000,00	95%	24.520.000,00	95%	25.580.000,00	95%	25.670.000,00	123.270.000,00	DPMD	
7	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	25.000.200,00	B	25.732.200,00	B	25.822.200,00	B	26.211.220,00	B	26.561.220,00	129.327.040,00	DPMD	
7	01	01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan organisasi masyarakat yang diberdayakan			391.097.355,00		400.835.274,00		401.491.180,00		404.459.339,00		413.640.535,00	2.011.523.683,00	DPMD	
7	01	01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)			160.000.000,00		160.178.920,00		160.334.826,00		175.302.985,00		151.387.180,00	807.203.911,00	DPMD	
7	01	01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat			290.000.000,00		285.378.920,00		286.474.825,00		303.942.985,00		308.124.181,00	1.473.920.911,00	DPMD	
7	01	01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih		60%	40.000.000,00	65%	41.600.000,00	70%	41.750.000,00	75%	4.183.000,00	80%	42.330.000,00	169.863.000,00	DPMD	
7	01	01	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK aktif		75%	1.280.000.000,00	80%	1.284.000.000,00	85%	1.289.225.000,00	90%	1.301.000.000,00	95%	1.301.500.000,00	6.455.725.000,00	DPMD	
				JUMLAH				3.411.922.130,00		3.425.549.889,00		3.434.562.031,00		3.448.423.529,00		3.479.357.116,00	17.199.814.695,00	DPMD	
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													DPPKB		
8	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.385.829.250,00	100%	1.387.829.250,00	100%	1.388.829.250,00	100%	1.389.829.250,00	100%	1.390.000.000,00	6.942.317.000,00	DPPKB	
8	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	10.750.000,00	95%	12.750.000,00	95%	13.750.000,00	95%	14.750.000,00	95%	16.000.000,00	68.000.000,00	DPPKB	
8	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	-	DPPKB	
8	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	43.400.000,00	85%	45.400.000,00	90%	46.000.000,00	92,50%	47.000.000,00	95%	49.000.000,00	230.800.000,00	DPPKB	

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
8	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	20.000.000,00	B	21.500.000,00	B	22.000.000,00	B	22.500.000,00	B	23.000.000,00	B	109.000.000,00	DPPKB
8	01	01	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif			252.034.000,00		375.403.787,00		377.648.435,00		381.778.250,00		429.521.817,00		1.816.386.289,00	DPPKB
8	01	01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49			60.640.000,00		100.640.000,00		102.640.000,00		104.640.000,00		144.640.000,00		513.200.000,00	DPPKB
8	01	01	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/Kr yang Mandiri	Ratio Akseptor KB			78.035.000,00		79.035.000,00		80.135.000,00		81.000.000,00		83.000.000,00		401.205.000,00	DPPKB
8	01	01	28	Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Pergerakan	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		70%	291.427.700,00	75%	391.427.700,00	80%	392.427.700,00	85%	396.427.700,00	90%	436.427.700,00	90%	1.908.138.500,00	DPPKB
8	01	01	29	Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		80%	119.182.900,00	82%	120.182.900,00	85%	121.282.900,00	90%	122.082.900,00	94%	123.082.900,00	94%	605.814.500,00	DPPKB
8	01	01	30	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Persentase program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	%	82%	4.159.720.000,00	85%	4.259.720.000,00	86%	4.261.720.000,00	90%	4.265.720.000,00	95%	4.295.720.000,00	95%	21.242.600.000,00	DPPKB
				JUMLAH				6.421.018.850,00		6.793.888.637,00		6.806.433.285,00		6.825.728.100,00		6.990.392.417,00		33.837.461.289,00	DPPKB
				Dinas Perhubungan															Dishub
9	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.495.415.400,00	100%	1.492.415.400,00	100%	1.493.415.400,00	100%	1.494.415.400,00	100%	1.496.415.400,00	100%	7.472.077.000,00	Dishub
9	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	18.450.000,00	95%	20.450.000,00	95%	21.450.000,00	95%	22.450.000,00	95%	26.450.000,00	95%	109.250.000,00	Dishub
9	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	66.550.000,00	95%	68.550.000,00	95%	69.550.000,00	95%	70.550.000,00	95%	72.550.000,00	95%	347.750.000,00	Dishub
9	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	-	85%	-	90%	-	92,50%	-	95%	-	95%	-	Dishub
9	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	25.000.000,00	B	27.000.000,00	B	28.000.000,00	B	29.000.000,00	B	31.000.000,00	B	140.000.000,00	Dishub
9	01	01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum			-		-		-		-		-		-	Dishub
9	01	01	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik		70%	115.900.000,00	75%	815.900.000,00	80%	819.900.000,00	85%	881.486.776,00	90%	903.629.097,00	90%	3.536.815.873,00	Dishub
9	01	01	17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase layanan angkutan darat dan sungai			134.448.500,00		434.448.500,00		536.448.500,00		586.448.500,00		592.000.000,00		2.283.794.000,00	Dishub

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
9	01	01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub		
9	01	01	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan	85%	251.320.783,00	87%	402.650.201,00	90%	403.434.200,00	92%	404.434.200,00	95%	464.434.200,00	95%	1.926.273.584,00	Dishub	
				JUMLAH			2.107.084.683,00		3.261.414.101,00		3.372.198.100,00		3.488.784.876,00		3.586.478.697,00		15.815.960.457,00	Dishub	
				Dinas Komunikasi dan Informatika													Diskominfo		
10	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang	100%	1.027.363.570,00	100%	1.029.363.570,00	100%	1.030.363.570,00	100%	1.032.363.570,00	100%	1.034.363.570,00	100%	5.153.817.850,00	Diskominfo	
10	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95%	72.800.000,00	95%	74.000.000,00	95%	76.000.000,00	95%	79.000.000,00	95%	82.000.000,00	95%	383.800.000,00	Diskominfo	
10	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	Diskominfo	
10	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%	-	85%	-	90%	-	92,50%	-	95%	-	95%	-	Diskominfo	
10	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	9.500.000,00	B	10.500.000,00	B	12.500.000,00	B	14.500.000,00	B	16.500.000,00	B	63.500.000,00	Diskominfo	
10	01	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah	60%	51.000.000,00	65%	52.000.000,00	70%	54.000.000,00	75%	56.000.000,00	80%	59.000.000,00	80%	272.000.000,00	Diskominfo	
10	01	01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		310.157.000,00		330.157.000,00		335.157.000,00		485.157.000,00		555.157.000,00		2.015.785.000,00	Diskominfo	
10	01	01	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM bidang kominfo yang terlatih	60%	39.810.000,00	65%	41.010.000,00	70%	43.010.000,00	75%	45.010.000,00	80%	47.500.000,00	80%	216.340.000,00	Diskominfo	
10	01	01	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Persentase kegiatan pembangunan yang dapat diakses publik		1.767.355.754,00		1.782.410.485,00		1.784.636.172,00		1.849.207.036,00		1.882.046.076,00		9.065.655.523,00	Diskominfo	
10	01	01	20	Program Penyelenggaraan Persandian	Cakupan informasi pemerintah penting yang tersandikan	60%	40.000.000,00	65%	42.000.000,00	70%	44.000.000,00	75%	46.000.000,00	80%	48.000.000,00	80%	220.000.000,00	Diskominfo	
10	01	01	21	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat ketersediaan dukungan peralatan persandian	70%	51.400.000,00	75%	53.000.000,00	80%	54.000.000,00	85%	56.000.000,00	90%	58.000.000,00	90%	272.400.000,00	Diskominfo	
				JUMLAH			3.369.386.324,00		3.414.441.055,00		3.433.666.742,00		3.663.237.606,00		3.782.566.646,00		17.663.298.373,00	Diskominfo	
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian													Dinkop UKM Perin		
11	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang	100%	913.131.500,00	100%	915.131.500,00	100%	917.131.500,00	100%	918.131.500,00	100%	1.009.131.500,00	100%	4.672.657.500,00	Dinkop UKM Perin	
11	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95%	625.700.000,00	95%	627.700.000,00	95%	629.000.000,00	95%	630.000.000,00	95%	639.000.000,00	95%	3.151.400.000,00	Dinkop UKM Perin	
11	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	95%	30.000.000,00	95%	32.000.000,00	95%	33.000.000,00	95%	34.000.000,00	95%	38.000.000,00	95%	167.000.000,00	Dinkop UKM Perin	

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
11	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	95.000.000,00	85%	96.000.000,00	90%	97.000.000,00	92,50%	98.000.000,00	95%	100.500.000,00	95%	486.500.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	57.000.000,00	B	58.000.000,00	B	59.000.000,00	B	60.000.000,00	B	63.000.000,00	B	297.000.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	15	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan UMKM dan koperasi (%)			248.845.000,00		298.845.000,00		818.845.000,00		812.845.000,00		876.845.000,00		3.056.225.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM baru		5	76.073.000,00	5	226.073.000,00	5	230.073.000,00	5	230.073.000,00	5	376.073.000,00	5	1.138.365.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	17	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rasio UKM yang dibina		60%	30.000.000,00	65%	31.000.000,00	70%	35.000.000,00	75%	36.000.000,00	80%	39.000.000,00	80%	171.000.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	18	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif			667.285.500,00		867.285.500,00		1.054.306.922,00		1.052.151.022,00		893.323.462,00		4.534.352.406,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	19	Program Peningkatan Akses Usaha Bagi UMK dan Koperasi kepada Sumber Daya Produktif	Rasio UMK dan koperasi yang difasilitasi		80%	40.000.000,00	85%	42.000.000,00	90%	44.000.000,00	95%	45.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	221.000.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	20	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan rata-rata penghasilan koperasi dan umkm		5%	120.000.000,00	5%	122.000.000,00	5%	124.000.000,00	5%	125.000.000,00	5%	130.000.000,00	5%	621.000.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	20	Program Perumusan Kebijakan Bidang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah kebijakan bidang IKM yang diterbitkan		1	274.180.000,00	1	274.180.000,00	1	276.180.000,00	1	277.180.000,00	1	282.180.000,00	1	1.383.900.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	21	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Kimia, Tekstil, Transportasi, dan Telematika	Jumlah industri Logam, Mesin, Kimia, Tekstil, Transportasi, dan Telematika			70.597.000,00		72.597.000,00		73.597.000,00		74.597.000,00		79.697.000,00		371.085.000,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	21	Program Peningkatan Daya Saing Sdm Koperasi dan UMKM	Rasio UMK dan koperasi yang dibina		80%	416.039.500,00	85%	418.039.500,00	90%	420.039.500,00	95%	421.039.500,00	100%	429.039.500,00	100%	2.104.197.500,00	Dinkop UKM Perin
11	01	01	22	Program Pembinaan Kemitraan UMKM	rasio kemitraan umkm yang dibina			25.000.000,00		140.589.078,00		140.589.078,00		141.589.078,00		142.589.078,00		590.356.312,00	Dinkop UKM Perin
				JUMLAH				3.688.851.500,00		4.221.440.578,00		4.951.762.000,00		4.955.606.100,00		5.148.378.540,00		22.966.038.718,00	Dinkop UKM Perin
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															DPMPTSP
12	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.001.071.250	100%	1.003.071.250	100%	1.003.871.250	100%	1.004.871.250	100%	1.007.871.250	100%	5.020.756.250	DPMPTSP
12	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	65.000.000	95%	68.000.000	95%	68.100.000	95%	70.000.000	95%	73.000.000	95%	344.100.000	DPMPTSP
12	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	27.410.714	95%	28.410.714	95%	28.710.714	95%	30.000.714	95%	33.000.714	95%	147.533.570	DPMPTSP
12	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	117.280.000	85%	118.280.000	90%	118.880.000	92,50%	120.167.560	95%	123.167.560	95%	597.775.120	DPMPTSP

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
12	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	23.980.000	B	24.980.000	B	25.080.000	B	26.500.000	B	30.000.000	B	130.540.000	DPMPTSP
12	01	01	23	Program Perlindungan Dunia Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah	Cakupan pengawasan perlindungan dunia usaha			97.135.000		174.135.000		195.335.000		234.335.000		300.335.000		1.001.275.000	DPMPTSP
12	01	01	18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan perizinan secara elektronik			18.060.000		94.060.000		115.260.000		113.968.445		190.260.000		531.608.445	DPMPTSP
12	01	01	19	Program Peningkatan Penataan Pelayanan Terpadu	Cakupan pelayanan perzininan yang tertata dan berstandar			1.650.000		28.783.828		31.488.445		40.580.000		73.206.526		175.708.799	DPMPTSP
12	01	01	20	Program Peningkatan Pengelolaan Kemudahan Pelayanan	Rasio pengaduan masyarakat yang ditangani		100%	62.260.000	100%	65.260.000	100%	67.260.000	100%	68.260.000	100%	71.260.000	100%	334.300.000	DPMPTSP
12	01	01	21	Program Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah kerjasama investasi yang dijalin			42.000.000		45.000.000		47.000.000		48.000.000		51.000.000		233.000.000	DPMPTSP
12	01	01	22	Program Pengembangan Iklim Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			25.000.000		28.000.000		30.000.000		31.000.000		34.000.000		148.000.000	DPMPTSP
12	01	01	23	Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Usaha				62.570.000		65.570.000		67.570.000		68.570.000		71.570.000		335.850.000	DPMPTSP
				JUMLAH				1.543.416.964		1.743.550.792		1.798.555.409		1.856.252.969		2.058.671.050		9.000.447.184	DPMPTSP
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga															Disbudparpora
16	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.513.886.850	100%	1.523.886.850	100%	1.543.886.850	100%	1.545.886.850	100%	1.546.886.850	100%	7.674.434.250	Disbudparpora
16	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	123.775.000	95%	125.775.000	95%	126.775.000	95%	129.775.000	95%	130.775.000	95%	636.875.000	Disbudparpora
16	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	36.800.000	95%	38.000.000	95%	39.000.000	95%	40.000.000	95%	41.000.000	95%	194.800.000	Disbudparpora
16	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	-	85%	-	90%	-	92,50%	-	95%	-	95%	-	Disbudparpora
16	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	13.755.000	B	14.055.000	B	16.055.000	B	17.055.000	B	18.055.000	B	78.975.000	Disbudparpora
16	01	01	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif		70%	580.865.000	75%	600.865.000	80%	604.865.000	85%	607.865.000	90%	609.865.000	90%	3.004.325.000	Disbudparpora
16	01	01	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda			-		-		-		-		-		-	Disbudparpora
16	01	01	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan pelatih bersertifikat		50%	-	55%	-	60%	-	65%	-	70%	-	70%	-	Disbudparpora
16	01	01	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan olahraga		90%	765.000.000	95%	810.723.707	100%	991.192.350	100%	1.001.192.350	100%	1.101.192.350	100%	4.669.300.757	Disbudparpora
16	01	01	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga		65%	-	75%	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-	Disbudparpora

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
16	01	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan untuk pariwisata		1	45.000.000	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.000.000	1	55.000.000	1	254.500.000	Disbudparpora
16	01	01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		5	815.000.000	5	825.000.000	5	830.000.000	5	840.000.000	5	850.000.000	5	4.160.000.000	Disbudparpora
16	01	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rasio obyek wisata yang dipasarkan		100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	51.500.000	100%	53.000.000	100%	55.000.000	100%	254.500.000	Disbudparpora
16	01	01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rasio destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan		70%	1.572.108.000	75%	1.642.108.000	80%	1.972.108.000	85%	1.631.287.800	90%	1.663.892.833	90%	8.481.504.633	Disbudparpora
16	01	01	17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina		80%	75.000.000	85%	78.000.000	90%	80.000.000	95%	90.000.000	100%	100.500.000	100%	423.500.000	Disbudparpora
				JUMLAH				5.586.189.850		5.758.413.557		6.306.882.200		6.009.062.000		6.172.167.033		29.832.714.640	Disbudparpora
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															Perpus & Arsip
18	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	669.128.810	100%	679.128.810	100%	691.128.810	100%	693.128.810	100%	695.128.810	100%	3.427.644.050	Perpus & Arsip
18	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	134.120.000	95%	136.120.000	95%	141.120.000	95%	144.280.000	95%	146.280.000	95%	701.920.000	Perpus & Arsip
18	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	18.800.000	95%	19.700.000	95%	21.700.000	95%	22.300.000	95%	24.300.000	95%	106.800.000	Perpus & Arsip
18	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	20.000.000	B	21.000.000	B	23.000.000	B	24.000.000	B	26.000.000	B	114.000.000	Perpus & Arsip
18	01	01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			30.000.000		32.000.000		32.000.000		36.000.000		38.000.000		168.000.000	Perpus & Arsip
18	01	01	23	Program Pengembangan Perpustakaan Daerah	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan			47.250.000		48.550.000		54.050.000		58.050.000		60.000.000		267.900.000	Perpus & Arsip
18	01	01	24	Program Pelaksanaan dan Pelayanan Perpustakaan				60.825.000		80.825.000		84.825.000		88.825.000		90.825.000		406.125.000	Perpus & Arsip
18	01	01	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase arsip yang dialihmediakan		60%	80.000.000	70%	205.000.000	80%	300.000.000	90%	390.000.000	100%	430.000.000	100%	1.405.000.000	Perpus & Arsip
18	01	01	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah dokumen/arsip daerah yang terkelola		50%	20.000.000	60%	109.000.000	70%	200.000.000	80%	244.053.291	90%	262.805.870	90%	835.859.161	Perpus & Arsip
18	01	01	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan penyuluhan kepada perangkat daerah		100%	63.540.000	100%	160.982.956	100%	244.562.817	100%	294.562.817	100%	324.562.817	100%	1.088.211.407	Perpus & Arsip
18	01	01	22	Program Pelayanan Perpustakaan Skpd, Sekolah dan Perpustakaan Keliling	Cakupan pelayaan perpustakaan keliling		100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	49.000.000	100%	54.000.000	100%	56.000.000	100%	243.000.000	Perpus & Arsip
				JUMLAH				1.183.663.810		1.536.306.766		1.841.386.627		2.049.199.918		2.153.902.497		8.764.459.618	Perpus & Arsip
				URUSAN PILIHAN															
				Dinas Perikanan															Dinas Perikanan
1	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.350.673.300	100%	1.351.673.300	100%	1.352.673.300	100%	1.363.673.300	100%	1.373.673.300	100%	6.792.366.500	Dinas Perikanan
1	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	413.854.633	95%	433.854.633	95%	437.854.633	95%	457.854.633	95%	471.854.633	95%	2.215.273.165	Dinas Perikanan

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
1	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	56.925.000	95%	58.925.000	95%	59.925.000	95%	60.725.000	95%	62.325.000	95%	298.825.000	Dinas Perikanan
1	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	25.690.000	B	27.690.000	B	29.690.000	B	31.690.000	B	32.390.000	B	147.150.000	Dinas Perikanan
1	01	01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Cakupan kelompok budidaya ikan yang dibina		50%	2.626.330.000	60%	2.876.330.000	70%	3.326.330.000	80%	3.396.330.000	85%	3.312.534.180	85%	15.537.854.180	Dinas Perikanan
1	01	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan kelompok nelayan perikanan tangkap yang dibina		50%	1.767.150.700	60%	1.872.976.737	70%	2.028.201.422	80%	2.077.371.667	85%	2.313.201.422	85%	10.058.901.948	Dinas Perikanan
1	01	01	25	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Agribisnis				208.325.000		210.325.000		212.325.000		214.325.000		215.725.000		1.061.025.000	Dinas Perikanan
1	01	01	27	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Rata-rata produksi perikanan kelompok peternak ikan			67.640.000		72.640.000		72.640.000		74.540.000		75.740.000		363.200.000	Dinas Perikanan
				JUMLAH				6.516.588.633		6.904.414.670		7.519.639.355		7.676.509.600		7.857.443.535		36.474.595.793	Dinas Perikanan
				Dinas Pertanian															Dinas Pertanian
3	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	3.616.801.370	100%	3.626.801.370	100%	3.636.801.370	100%	3.646.801.370	100%	3.649.801.370	100%	18.177.006.850	Dinas Pertanian
3	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	1.320.478.178	95%	1.330.478.178	95%	1.332.478.178	95%	1.341.478.178	95%	1.342.478.178	95%	6.667.390.890	Dinas Pertanian
3	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	320.400.000	95%	322.400.000	95%	331.400.000	95%	333.400.000	95%	334.400.000	95%	1.642.000.000	Dinas Pertanian
3	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	87.671.700	B	88.671.700	B	90.671.700	B	92.671.700	B	97.671.700	B	457.358.500	Dinas Pertanian
3	01	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani			820.701.300		821.601.300		951.601.300		1.001.601.300		1.081.601.300		4.677.106.500	Dinas Pertanian
3	01	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			8.385.907.480		9.085.907.480		9.485.907.480		9.495.907.480		10.065.035.043		46.518.664.963	Dinas Pertanian
3	01	01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Nilai ekspor produk pertanian			510.658.350		570.658.350		570.658.350		580.658.350		645.658.350		2.878.291.750	Dinas Pertanian
3	01	01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rasio kelompok tani yang menggunakan teknologi		40%	241.295.000	45%	291.295.000	50%	291.295.000	55%	295.295.000	60%	323.295.000	60%	1.442.475.000	Dinas Pertanian
3	01	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi padi sawah (ton)			4.834.100.700		5.391.183.468		5.791.183.468		5.805.193.194		6.605.193.194		28.426.854.024	Dinas Pertanian
3	01	01	19		Produksi perkebunan (ton)													-	Dinas Pertanian
3	01	01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rasio penyuluh tani yang diberdayakan		80%	1.251.599.650	85%	1.261.599.650	90%	1.261.599.650	95%	1.270.599.650	100%	1.319.599.650	100%	6.364.998.250	Dinas Pertanian
3	01	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rasio kasus temuan bahan pangan asal hewan tidak layak konsumsi yang ditangani		100%	181.491.300	100%	190.491.300	100%	190.491.300	100%	195.491.300	100%	203.491.300	100%	961.456.500	Dinas Pertanian

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
3	01	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging ternak (ton)			3.798.042.600		4.298.042.600		4.436.720.980		4.446.720.980		4.846.720.980		21.826.248.140	Dinas Pertanian
3	01	01	28	Program Pemantapan Sistem Penyuluh Pertanian	Rasio penyuluh terhadap jumlah petani			-		-		-		-		-		-	Dinas Pertanian
3	01	01	31	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Rasio kasus temuan penyakit ternak yang ditangani		100%	436.240.788	100%	447.240.788	100%	447.240.788	100%	453.240.788	100%	464.240.788	100%	2.248.203.940	Dinas Pertanian
				JUMLAH				25.805.338.416		27.726.371.184		28.818.049.564		28.959.059.290		30.979.186.853		142.288.055.307	Dinas Pertanian
				Dinas Perdagangan															Dinas Perdagangan
6	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.350.535.000	100%	1.351.535.000	100%	1.353.535.000	100%	1.354.700.000	100%	1.356.700.000	100%	6.767.005.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	213.702.000	95%	214.702.000	95%	215.602.000	95%	216.802.000	95%	218.000.000	95%	1.078.808.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	58.249.000	95%	59.249.000	95%	60.000.000	95%	61.500.000	95%	62.700.000	95%	301.698.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	25.000.000	85%	26.000.000	90%	27.500.000	92,50%	28.700.000	95%	30.000.000	95%	137.200.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	20.000.000	B	21.000.000	B	22.500.000	B	23.500.000	B	25.000.000	B	112.000.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan			530.440.000		531.440.000		532.740.000		535.740.000		537.000.000		2.667.360.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase sengketa perdagangan yang diselesaikan		100%	1.439.500.000	100%	1.456.654.221	100%	1.466.654.221	100%	1.479.412.122	100%	1.516.760.898	100%	7.358.981.462	Dinas Perdagangan
6	01	01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Tingkat ketersediaan bahan/ barang strategis kebutuhan masyarakat		100%	497.415.000	100%	498.415.000	100%	499.000.000	100%	501.650.000	100%	503.000.000	100%	2.499.480.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	20	Program Pengembangan Pasar Daerah	Rasio pasar daerah yang representatif		80%	2.993.657.000	85%	3.023.657.000	90%	3.052.314.281	95%	3.152.314.281	100%	3.202.314.281	100%	15.424.256.843	Dinas Perdagangan
6	01	01	21	Program Perlindungan Masyarakat	Cakupan pelindungan konsumen		100%	120.000.000	100%	121.500.000	100%	123.000.000	100%	127.000.000	100%	129.000.000	100%	620.500.000	Dinas Perdagangan
6	01	01	22	Program Peningkatan Iklim Usaha dan Kapasitas Berusaha				15.000.000		16.500.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000		86.500.000	Dinas Perdagangan
				JUMLAH				7.263.498.000		7.320.652.221		7.369.845.502		7.499.318.403		7.600.475.179		37.053.789.305	Dinas Perdagangan
				PENUNJANG URUSAN															
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															BAPPEDA
3	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.356.626.750	100%	1.357.626.750	100%	1.376.626.750	100%	1.408.000.000	100%	1.410.000.000	100%	6.908.880.250	BAPPEDA
3	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	129.888.000	95%	130.888.000	95%	172.395.489	95%	214.000.000	95%	216.000.000	95%	863.171.489	BAPPEDA
3	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	35.000.000	95%	36.000.000	95%	36.000.000	95%	38.000.000	95%	40.000.000	95%	185.000.000	BAPPEDA

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
3	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	25.000.000	85%	26.000.000	90%	30.000.000	92,50%	32.000.000	95%	34.000.000	95%	147.000.000	BAPPEDA
3	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	126.900.000	B	128.000.000	B	130.900.000	B	133.000.000	B	135.000.000	B	653.800.000	BAPPEDA
3	01	01	31	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan dokumen tata ruang		100%	189.888.000	100%	301.000.000	100%	303.000.000	100%	310.000.000	100%	360.000.000	100%	1.463.888.000	BAPPEDA
3	01	01	32	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase konsistensi ruang			-		-		-		-		-		-	BAPPEDA
3	01	01	33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW			-		-		-		-		-		-	BAPPEDA
3	01	01	21	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi			102.027.000		110.027.000		112.027.000		144.000.000		158.000.000		626.081.000	BAPPEDA
3	01	01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				-		-		-		-		-		-	BAPPEDA
3	01	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/infromasi perencanaan		50%	405.787.600	55%	525.787.600	60%	535.410.712	65%	587.000.000	70%	687.000.000	70%	2.740.985.912	BAPPEDA
3	01	01	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rasio wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah mempunyai dokumen rencana pengembangannya		50%	-	55%	-	60%	-	65%	-	70%	-	70%	-	BAPPEDA
3	01	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen rencana daerah		100%	1.866.937.022	100%	1.309.732.511	100%	1.333.732.511	100%	1.383.789.782	100%	2.025.545.392	100%	7.919.737.218	BAPPEDA
3	01	01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rata-rata capaian kinerja OPD bidang ekonomi		90%	108.975.000	92%	115.975.000	94%	117.975.000	96%	134.975.000	97%	140.000.000	97%	617.900.000	BAPPEDA
3	01	01	26	Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra	Rata-rata capaian kinerja OPD bidang pendidikan dan kesra		90%	198.126.600	92%	300.000.000	94%	302.000.000	96%	327.000.000	97%	335.000.000	97%	1.462.126.600	BAPPEDA
3	01	01	27	Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja OPD bidang kependudukan dan pemerintahan		90%	83.238.200	92%	194.500.000	94%	196.000.000	96%	225.000.000	97%	235.000.000	97%	933.738.200	BAPPEDA
3	01	01	28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja OPD bidang pemerintahan		90%	118.635.200	92%	220.000.000	94%	222.000.000	96%	250.000.000	97%	260.000.000	97%	1.070.635.200	BAPPEDA
3	01	01	32	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Rasio kajian litbang yang diterapkan		10%	178.474.800	20%	300.474.800	30%	304.000.800	40%	310.000.000	50%	360.000.000	50%	1.452.950.400	BAPPEDA
				JUMLAH				4.925.504.172		5.056.011.661		5.172.068.262		5.496.764.782		6.395.545.392		27.045.894.269	BAPPEDA
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				-											BPKAD
4	05	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang	0												12.524.024.700	
							100%	2.499.924.940	100%	2.500.024.940	100%	2.501.024.940	100%	2.511.024.940	100%	2.512.024.940	100%		BPKAD
4	05	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	0,3												2.251.716.500	
							100%	424.143.300	100%	425.143.300	100%	426.143.300	100%	486.143.300	100%	490.143.300	100%		BPKAD
4	05	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	0,3	95%	45.356.650	100%	45.856.650	B	45.856.650	100%	46.856.650	100%	46.856.650	100%	230.783.250	BPKAD

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
4	05	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	0,4	100%	150.000.000	B	150.000.000	100%	150.000.000	100%	152.000.000	100%	153.000.000	100%	755.000.000	BPKAD
4	05	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	B	98.667.500	100%	98.767.500	100%	98.967.500	100%	100.967.500	B	101.967.500	100%	499.337.500	BPKAD
4	05	01	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD	0	100%	3.510.837.550	100%	3.513.395.869	100%	3.519.345.074	100%	3.687.641.124	100%	3.992.566.326	100%	18.223.785.943	BPKAD
				JUMLAH				6.728.929.940		6.733.188.259		6.741.337.464		6.984.633.514		7.296.558.716		34.484.647.893	BPKAD
				BADAN PENDAPATAN DAERAH															Bapenda
4	06	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.616.220.625	100%	1.621.131.292	100%	1.623.131.292	100%	1.633.131.292	100%	1.643.131.292	100%	8.136.745.793	Bapenda
4	06	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	648.467.315	95%	658.467.315	95%	659.467.315	95%	670.467.315	95%	674.467.315	95%	3.311.336.575	Bapenda
4	06	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	34.275.000	95%	36.275.000	95%	37.275.000	95%	38.275.000	95%	39.275.000	95%	185.375.000	Bapenda
4	06	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	28.524.700	85%	29.524.700	90%	30.524.700	92,50%	31.524.700	95%	33.524.700	95%	153.623.500	Bapenda
4	06	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	-	B	-	B	-	B	-	B	-	B	-	Bapenda
4	06	01	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD		5%	1.090.861.165	5%	1.100.861.165	5%	1.103.949.822	5%	1.593.390.915	5%	1.894.648.943	5%	6.783.712.010	Bapenda
				JUMLAH				3.418.348.805		3.446.259.472		3.454.348.129		3.966.789.222		4.285.047.250		18.570.792.878	Bapenda
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia															BKPSDM
5	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.140.309.325	100%	1.142.309.325	100%	1.143.309.325	100%	1.143.509.325	100%	1.188.438.977	100%	5.757.876.277	BKPSDM
5	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	113.834.808	95%	113.934.808	95%	113.934.808	95%	114.834.808	95%	116.834.808	95%	573.374.040	BKPSDM
5	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	31.665.000	95%	31.765.000	95%	31.865.000	95%	32.665.000	95%	32.865.000	95%	160.825.000	BKPSDM
5	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	353.940.000	85%	354.940.000	90%	355.940.000	92,50%	356.940.000	95%	359.940.000	95%	1.781.700.000	BKPSDM
5	01	01	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pelayanan kepegawaian secara elektronik		70%	86.211.000	75%	86.311.000	80%	87.211.000	85%	87.897.611	90%	89.211.000	90%	436.841.611	BKPSDM
5	01	01	33	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			1.448.593.000		1.462.213.216		1.479.593.000		1.480.593.000		1.481.593.000		7.352.585.216	BKPSDM

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
5	01	01	34	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			896.636.450		910.256.666		1.890.832.307		1.890.832.307		1.939.556.102		7.528.113.832	BKPSDM
5	01	01	35	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KORPRI				50.000.000		51.000.000		51.800.000		51.900.000		52.800.000		257.500.000	BKPSDM
5	01	01	36	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	35.000.000	B	35.600.000	B	36.000.000	B	37.700.000	B	38.800.000	B	183.100.000	BKPSDM
				JUMLAH				4.156.189.583		4.188.330.015		5.190.485.440		5.196.872.051		5.300.038.887		24.031.915.976	BKPSDM
				Inspektorat															Inspektorat
2	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	849.640.000	100%	889.640.000 178.625.000 19.000.000 260.990.000 129.400.000 1.513.146.418	100%	869.640.000	100%	870.640.000	100%	878.640.000	100%	4.358.200.000	Inspektorat
2	01	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	148.625.000	95%		95%	168.625.000	95%	169.625.000	95%	172.625.000	95%	838.125.000	Inspektorat
2	01	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	18.000.000	95%		95%	19.000.000	95%	12.000.000	95%	13.100.000	95%	81.100.000	Inspektorat
2	01	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	250.990.000	85%		90%	260.990.000	92,50%	262.990.000	95%	264.990.000	95%	1.300.950.000	Inspektorat
2	01	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	125.400.000	B		B	129.400.000	B	130.400.000	B	132.400.000	B	647.000.000	Inspektorat
2	01	01	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan		100%	1.336.451.970	100%		100%	1.350.721.047	100%	1.453.371.518	100%	1.546.172.640	100%	7.199.863.593	Inspektorat
				JUMLAH				2.729.106.970		2.990.801.418		2.798.376.047		2.899.026.518		3.007.927.640		14.425.238.593	Inspektorat
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah															Set DPRD
1	04	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	10.036.136.520	100%	10.037.136.520	100%	10.038.136.520	100%	10.040.136.520	100%	10.045.136.520	100%	50.196.682.600	Set DPRD
1	04	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	772.457.500	95%	773.457.500	95%	774.457.500	95%	784.457.500	95%	797.457.500	95%	3.902.287.500	Set DPRD
1	04	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	171.830.000	95%	172.830.000	95%	173.830.000	95%	178.830.000	95%	184.830.000	95%	882.150.000	Set DPRD
1	04	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	1.215.566.700	85%	1.217.566.700	90%	1.219.566.700	92,50%	1.278.566.700	95%	1.289.566.700	95%	6.220.833.500	Set DPRD
1	04	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	243.749.000	B	249.749.000	B	251.749.000	B	255.749.000	B	260.749.000	B	1.261.745.000	Set DPRD
1	04	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				11.347.186.120		11.347.763.048		11.354.944.533		11.367.823.512		11.606.505.279		57.024.222.492	Set DPRD

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
1	04	01	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah perda inisitaif DPRD yang ditetapkan		2	156.480.000	2	158.480.000	2	159.480.000	2	178.480.000	2	208.480.000	2	861.400.000	Set DPRD
				JUMLAH				23.943.405.840		23.956.982.768		23.972.164.253		24.084.043.232		24.392.724.999		120.349.321.092	Set DPRD
				PENDUKUNG URUSAN															
				Sekretariat Daerah															SetDa
1	03	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	12.408.016.344	100%	12.418.016.344	100%	12.428.016.344	100%	12.429.016.344	100%	12.430.016.344	100%	62.113.081.720	SetDa
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	6.079.219.458	100%	6.080.219.458	100%	6.085.219.458	100%	6.086.219.458	100%	6.087.219.458	100%	30.418.097.290	SetDa
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		100%	50.650.000	100%	51.650.000	100%	52.650.000	100%	53.000.000	100%	54.000.000	100%	261.950.000	SetDa
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		100%	869.995.500	100%	870.995.500	100%	872.995.500	100%	873.995.500	100%	874.495.500	100%	4.362.477.500	SetDa
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sekretariat Daerah	Persentase tugas kedinasan sekretariat daerah yang terfasilitasi		100%	3.095.275.924	100%	3.098.275.924	100%	3.100.275.924	100%	3.101.275.924	100%	3.102.275.924	100%	15.497.379.620	SetDa
				Program Kebijakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang mendapatkan bantuan		100%	332.759.700	100%	334.759.700	100%	335.759.700	100%	335.959.700	100%	336.559.700	100%	1.675.798.500	SetDa
				Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data/infromasi potensi wilayah		100%	50.000.000	100%	51.000.000	100%	52.000.000	100%	52.000.000	100%	53.000.000	100%	258.000.000	SetDa
				Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase arsip yang dialihmediakan		100%	383.440.000	100%	384.440.000	100%	385.440.000	100%	385.440.000	100%	385.980.000	100%	1.924.740.000	SetDa
				Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan		100%	8.758.259.671	100%	8.760.259.671	100%	8.791.259.671	100%	8.792.259.671	100%	8.892.259.671	100%	43.994.298.355	SetDa
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD		100%	267.057.800	100%	269.057.800	100%	270.057.800	100%	270.557.800	100%	280.557.800	100%	1.357.289.000	SetDa
				Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih		100%	636.812.800	100%	639.812.800	100%	641.812.800	100%	642.112.800	100%	662.112.800	100%	3.222.664.000	SetDa
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik		100%	510.000.000	100%	518.000.000	100%	519.000.000	100%	520.000.000	100%	540.000.000	100%	2.607.000.000	SetDa
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			100%	82.162.500	100%	83.162.500	100%	84.162.500	100%	85.162.500	100%	95.162.500	100%	429.812.500	SetDa
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik		100%	153.053.350	100%	155.053.350	100%	157.053.350	100%	157.653.350	100%	167.653.350	100%	790.466.750	SetDa
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah perda yang ditetapkan		100%	1.059.686.500	100%	1.061.686.500	100%	1.066.686.500	100%	1.067.686.500	100%	1.090.686.500	100%	5.346.432.500	SetDa

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	93.072.500	100%	98.072.500	100%	100.072.500	100%	101.072.500	100%	130.072.500	100%	522.362.500	SetDa
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase tugas kedinasan kepala daerah yang terfasilitasi		100%	3.718.442.000	100%	3.728.442.000	100%	3.752.442.000	100%	3.752.942.000	100%	3.915.592.704	100%	18.867.860.704	SetDa
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			100%	235.575.000	100%	245.575.000	100%	251.575.000	100%	251.775.000	100%	259.775.000	100%	1.244.275.000	SetDa
				Program Daerah Otonomi Baru	Persentase batas desa yang telah tertata		100%	374.610.000	100%	378.610.000	100%	380.610.000	100%	381.610.000	100%	398.610.000	100%	1.914.050.000	SetDa
				Program Pemilihan dan Penyedia Pelayanan Barang dan Jasa			100%	25.095.000	100%	25.195.000	100%	30.195.000	100%	30.205.000	100%	62.205.000	100%	172.895.000	SetDa
				Program Penyelenggaraan Pembinaan ASN dalam Pengadaan Barang/Jasa	Rasio ASN yang dibina		100%	115.310.000	100%	116.310.000	100%	119.310.000	100%	119.410.000	100%	121.410.000	100%	591.750.000	SetDa
				Program Penyelenggaraan Pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa	Rasio SDM pengadaan barang/jasa yang bersertifikat		100%	105.310.000	100%	106.310.000	100%	109.310.000	100%	109.410.000	100%	139.410.000	100%	569.750.000	SetDa
				Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan			100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	35.000.000	100%	140.000.000	SetDa
				Program Pengendalian SDA dan Kehutanan			100%	235.760.000	100%	242.760.000	100%	278.760.000	100%	278.800.000	100%	295.800.000	100%	1.331.880.000	SetDa
				Program Penataan Kelembagaan	Rasio keterisian jabatan		100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	87.000.000	100%	87.000.000	100%	103.000.000	100%	442.000.000	SetDa
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			100%	9.582.500.000	100%	9.597.755.112	100%	9.621.247.676	100%	9.621.385.955	100%	10.621.385.955	100%	49.044.274.698	SetDa
				JUMLAH				49.327.064.047		49.426.419.159		49.599.911.723		49.612.950.002		51.134.240.706		249.100.585.637	SetDa
				Kecamatan Dusun Tengah															Kec. Dusun Tengah
1	09	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	1.266.200.341	100%	1.267.200.341	100%	1.268.200.341	100%	1.275.200.500	100%	1.295.200.500	100%	6.372.002.023	Kec. Dusun Tengah
1	09	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	239.895.573	95%	239.905.573	95%	240.005.573	95%	261.005.573	95%	265.005.573	95%	1.245.817.865	Kec. Dusun Tengah
1	09	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	41.250.000	95%	41.500.000	95%	42.000.000	95%	48.000.000	95%	50.000.000	95%	222.750.000	Kec. Dusun Tengah
1	09	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	28.807.900	85%	28.900.900	90%	29.500.000	92,50%	35.000.000	95%	36.000.000	95%	158.208.800	Kec. Dusun Tengah
1	09	01	27	Program Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa	Cakupan desa yang mendapat pembinaan		100%	251.032.000	100%	251.132.000	100%	252.432.000	100%	297.514.268	100%	329.638.457	100%	1.381.748.725	Kec. Dusun Tengah
1	09	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	448.250.275	100%	449.250.275	100%	450.000.000	100%	482.000.000	100%	483.000.000	100%	2.312.500.550	Kel. Ampah Kota
1	09	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	21.500.000	95%	21.800.000	95%	22.000.000	95%	29.000.000	95%	30.000.000	95%	124.300.000	Kel. Ampah Kota

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	Targe t	Pagu	
1	09	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	19.200.000	95%	19.300.000	95%	20.000.000	95%	30.000.000	95%	35.000.000	95%	123.500.000	Kel. Ampah Kota
1	09	01	15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan		95%	119.400.000	95%	119.800.000	95%	120.000.000	95%	150.000.000	95%	158.000.000	95%	667.200.000	Kel. Ampah Kota
1	09	01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		95%	247.320.000	95%	248.348.239	95%	249.480.864	95%	297.715.133	95%	329.839.321	95%	1.372.703.557	Kel. Ampah Kota
				JUMLAH				2.682.856.089	10	2.687.137.328	10	2.693.618.778	10	2.905.435.474	10	3.011.683.851	10	13.980.731.520	Kec. Dusun Tengah
				Kecamatan Pematang Karau														Kec. Pematang Karau	
1	10	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	848.548.000	100%	848.648.000	100%	847.500.000	100%	873.966.667	100%	905.905.178	100%	4.324.567.845	Kec. Pematang Karau
1	10	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	260.012.510	95%	260.512.510	95%	261.814.510	95%	298.981.177	95%	312.919.689	95%	1.394.240.396	Kec. Pematang Karau
1	10	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	16.515.000	95%	16.815.000	95%	17.500.000	95%	20.000.000	95%	25.000.000	95%	95.830.000	Kec. Pematang Karau
1	10	01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat			162.000.000		163.805.464		165.181.811		203.309.840		255.248.350		949.545.465	Kec. Pematang Karau
				JUMLAH				1.287.075.510	3	1.289.780.974	3	1.291.996.321	3	1.396.257.684	3	1.499.073.217	3	6.764.183.706	Kec. Pematang Karau
				Kecamatan Awang														Kec. Awang	
1	11	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	637.650.000	100%	637.850.000	100%	638.200.000	100%	671.613.334	100%	698.853.110	100%	3.284.166.444	Kec. Awang
1	11	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	362.500.000	95%	362.900.000	95%	363.000.000	95%	393.313.333	95%	427.553.109	95%	1.909.266.442	Kec. Awang
1	11	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	15.000.000	95%	15.500.000	95%	16.000.000	95%	20.300.000	95%	25.500.000	95%	92.300.000	Kec. Awang
1	11	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	1.000.000	B	1.500.000	B	1.800.000	B	2.000.000	B	250.000	B	6.550.000	Kec. Awang
1	11	01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat			20.000.000		21.000.000		21.500.000		25.000.000		26.500.000		114.000.000	Kec. Awang
1	11	01	27	Program Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa	Cakupan desa yang mendapat pembinaan		100%	86.084.866	100%	87.464.739	100%	89.176.940	100%	118.599.272	100%	155.839.050	100%	537.164.867	Kec. Awang
				JUMLAH				1.122.234.866,03		1.126.214.739,00		1.129.676.940,00		1.230.825.939,00		1.334.495.269,00		5.943.447.753,03	Kec. Awang
				Kecamatan Patangkep Tutui														Kec. Patangkep Tutui	
1	12	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	722.579.000,05	100%	723.579.000	100%	724.579.000	100%	779.979.000	100%	780.079.000	100%	3.730.795.000	Kec. Patangkep Tutui
1	12	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	115.975.300	95%	115.105.300	95%	115.805.300	95%	140.105.300	95%	140.155.300	95%	627.146.500	Kec. Patangkep Tutui

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir		
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu	
1	12	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	10.500.000	95%	11.000.000	95%	11.505.300	95%	15.500.000	95%	16.000.000	95%	64.505.300	Kec. Patangkep Tutui	
1	12	01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan organisasi masyarakat yang diberdayakan			92.850.000		95.233.832		96.984.421		115.284.604		116.041.862		516.394.719	Kec. Patangkep Tutui	
				JUMLAH				941.904.300,05		944.918.132,00		948.874.021,00		1.050.868.904,00		1.052.276.162,00		4.938.841.519,05	Kec. Patangkep Tutui	
				Kecamatan Dusun Timur															Kec. Dusun Timur	
1	13	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	680.310.300	100%	680.895.783	100%	681.089.183	100%	692.889.184	100%	670.889.184	100%	3.406.073.634	Kec. Dusun Timur	
1	13	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	320.609.208	95%	320.709.208	95%	320.809.209	95%	350.909.208	95%	365.909.208	95%	1.678.946.041	Kec. Dusun Timur	
1	13	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	27.000.000	95%	27.100.000	95%	27.600.000	95%	35.700.000	95%	45.000.000	95%	162.400.000	Kec. Dusun Timur	
1	09	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	175.000.000	85%	175.100.000	90%	175.200.000	92,50%	190.300.000	95%	240.000.000	95%	955.600.000	Kec. Dusun Timur	
1	09	01	08	Program kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			48.000.000		48.200.000		48.800.000		70.946.216		98.864.892		314.811.108	Kec. Dusun Timur	
1	09	01	27	Program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa	Cakupan desa yang mendapat pembinaan			186.202.050		186.802.050		186.902.050		280.000.000		295.000.000		1.134.906.150	Kec. Dusun Timur	
1	13	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang			427.386.100		427.786.100		428.479.501		500.480.501		560.480.501		2.344.612.703	Kel. Tamiang layang	
1	13	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			40.525.000		40.825.000		40.925.000		51.200.000		55.326.890		228.801.890	Kel. Tamiang layang	
1	13	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur			5.950.000		6.000.000		7.000.000		13.000.000		15.000.000		46.950.000	Kel. Tamiang layang	
1	13	01	15	Program penataan administrasi kependudukan	tertatanya administrasi kependudukan			7.999.000		8.000.000		9.000.000		15.000.000		20.000.000		59.999.000	Kel. Tamiang layang	
1	13	01	15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan			52.500.000		53.000.000		53.500.000		80.320.000		119.118.466		358.438.466	Kel. Tamiang layang	
				JUMLAH				1.971.481.658,05		1.974.418.141,00		1.979.304.943,00		2.280.745.109,00		2.485.589.141,00		10.691.538.992,05	Kec. Dusun Timur	
				Kecamatan Banua Lima															Kec. Banua Lima	
1	14	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	954.527.604	100%	955.127.604	100%	956.227.604	100%	986.227.604	100%	996.227.604	100%	4.848.338.020	Kec. Banua Lima	
1	14	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	121.240.000	95%	121.540.000	95%	122.940.000	95%	135.940.000	95%	140.940.000	95%	642.600.000	Kec. Banua Lima	
1	14	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	10.850.000	95%	10.950.000	95%	11.550.000	95%	15.000.000	95%	18.000.000	95%	66.350.000	Kec. Banua Lima	

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
1	14	01	17	Program PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		80%	94.380.115	85%	94.480.115	90%	94.580.115	95%	165.430.115	100%	245.430.115	100%	694.300.575	Kec. Banua Lima
1	19	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	331.193.200	100%	331.768.694	100%	332.001.587	100%	352.201.587	#####	382.201.587	100%	1.729.366.655	Kel. Taniran
1	14	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	49.791.250	95%	49.891.250	95%	49.991.250	95%	54.001.250	95%	65.001.250	95%	268.676.250	Kel. Taniran
1	14	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	5.950.000	95%	6.000.000	95%	6.050.000	95%	8.000.000	95%	12.589.702	95%	38.589.702	Kel. Taniran
1	14	01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan organisasi masyarakat yang diberdayakan		95%	41.280.000	95%	41.580.000	95%	41.600.000	95%	71.800.000	95%	101.800.000	95%	298.060.000	Kel. Taniran
1	14	01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		95%	30.192.000	95%	30.492.000	95%	30.692.000	95%	60.888.922	95%	90.943.447	95%	243.208.369	Kel. Taniran
																		-	
				JUMLAH				1.639.404.168,92		1.641.829.663,00		1.645.632.556,00		1.849.489.478,00		2.053.133.705,00		8.829.489.570,92	Kec. Banua Lima
				Kecamatan Paku															Kec. Paku
1	15	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	744.211.000	100%	744.811.000	100%	745.811.000	100%	746.911.000	100%	789.911.000	100%	3.771.655.000	Kec. Paku
1	15	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	87.925.265	95%	88.005.265	95%	88.205.265	95%	89.205.265	95%	98.405.265	95%	451.746.325	Kec. Paku
1	15	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	14.000.000	95%	14.050.000	95%	14.150.000	95%	14.550.000	95%	18.025.400	95%	74.775.400	Kec. Paku
1	15	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	9.800.000	B	10.000.000	B	10.080.000	B	10.200.000	B	15.000.052	B	55.080.052	Kec. Paku
1	15	01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat			162.060.832,60		162.492.600		162.774.708		163.018.800		204.610.489		854.957.430	Kec. Paku
				JUMLAH				1.017.997.097,60		1.019.358.865,00		1.021.020.973,00		1.023.885.065,00		1.125.952.206,00		5.208.214.206,60	Kec. Paku
				Kecamatan Raren Batuah															Kec. Raren Batuah
1	17	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	646.883.299	100%	647.883.299	100%	648.883.299	100%	690.583.299	100%	691.583.299	100%	3.325.816.495	Kec. Raren Batuah
1	17	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	150.946.001	95%	151.046.000	95%	151.146.000	95%	162.146.000	95%	162.546.000	95%	777.830.001	Kec. Raren Batuah
1	17	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	14.800.000	95%	15.000.000	95%	15.500.000	95%	29.000.000	95%	29.500.000	95%	103.800.000	Kec. Raren Batuah
1	17	01	27	Program Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa	Cakupan desa yang mendapat pembinaan		100%	154.208.938	100%	154.508.365	100%	154.675.505	100%	192.193.528	100%	193.142.251	100%	848.728.587	Kec. Raren Batuah
				JUMLAH				966.838.238		968.437.664		970.204.804		1.073.922.827		1.076.771.550		5.056.175.083	Kec. Raren Batuah
				Kecamatan Karusen Janang															Kec. Karusen Janang

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
							target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu		Targe t	Pagu
1	22	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	558.807.450	100%	558.907.450	100%	559.607.450	100%	580.607.450	100%	600.607.450	100%	2.858.537.250	Kec. Karusen Janang
1	22	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	87.000.000	95%	87.500.000	95%	87.800.000	95%	98.500.000	95%	115.500.000	95%	476.300.000	Kec. Karusen Janang
1	22	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	12.250.000	95%	12.300.000	95%	12.800.000	95%	15.085.360	95%	25.085.360	95%	77.520.720	Kec. Karusen Janang
1	22	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	7.000.000	B	7.500.000	B	7.800.000	B	11.000.000	B	19.000.000	B	52.300.000	Kec. Karusen Janang
1	22	01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat			125.000.000		125.600.000		125.800.000		169.300.000		192.208.609		737.908.609	Kec. Karusen Janang
1	22	01	27	Program Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa	Cakupan desa yang mendapat pembinaan		100%	45.000.000	100%	45.300.000	100%	45.800.000	100%	66.700.000	100%	81.700.000	100%	284.500.000	Kec. Karusen Janang
1	22	01	29	Program Peningkatan Penataan Pelayanan Perizinan	Rasio layanan perizinan kecamatan yang tertata		100%	25.000.000	100%	25.243.593	100%	25.454.235	100%	27.500.000	100%	37.500.000	100%	140.697.828	Kec. Karusen Janang
				JUMLAH				860.057.450,22		862.351.043,00		865.061.685,00		968.692.810,00		1.071.601.419,00		4.627.764.407,22	Kec. Karusen Janang
				Kecamatan Paju Epat															Kec. Paju Epat
1	16	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		100%	551.561.796,78	100%	551.861.796	100%	552.456.496	100%	592.461.798	100%	617.816.977	100%	2.866.158.864	Kec. Paju Epat
1	16	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	129.650.000	95%	129.850.000	95%	130.650.000	95%	141.650.000	95%	161.650.000	95%	693.450.000	Kec. Paju Epat
1	16	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	11.200.000	95%	11.500.000	95%	12.000.000	95%	18.500.000	95%	25.345.000	95%	78.545.000	Kec. Paju Epat
4	16	01	08	Program Kebijakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang mendapatkan bantuan			10.500.000		11.000.000		11.500.000		25.000.000		28.450.600		86.450.600	Kec. Paju Epat
4	16	01	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih		60%	23.950.000	65%	23.980.000	70%	24.050.600	75%	38.100.600	80%	45.358.000	80%	155.439.200	Kec. Paju Epat
1	16	01	27	Program Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa	Cakupan desa yang mendapat pembinaan		100%	89.150.000	100%	89.439.095	100%	90.359.328	100%	108.448.555	100%	148.448.555	100%	525.845.533	Kec. Paju Epat
				JUMLAH				816.011.797		817.630.891		821.016.424		924.160.953		1.027.069.132		4.405.889.197	Kec. Paju Epat
				TOTAL PAGU				414.825.876.797		428.985.560.902		453.875.430.342		456.176.125.434		460.114.925.790		2.213.977.919.266	TOTAL



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan visi misi bupati dan wakil bupati beserta jajarannya.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Daerah

Penetapan indikator kinerja utama merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
		2019	2020	2021	2022	2023	
LPE	5,98	6,49	6,74	6,99	7,25	7,5	7,5
IPM	70,57	71,59	72,065	72,53	73	73,5	73,5
IPG	88,16	89,8	90,21	90,62	91,03	91,5	91,5
Indeks Gini	0,307	0,296	0,291	0,286	0,28	0,275	0,275
Angka Kriminalistas	0,16	0,15	0,1	0,1	0	0	0
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	76	78	80	82	84	85
IKLH	NA	61,02	63,15	65,08	65,87	66,65	66,65
LPE Sektor Pertanian	6,54	7,03	7,27	7,51	7,76	8,00	8,00
LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	8,56	8,92	9,28	9,64	10,00	10,00
PDRB Sektor pariwisata	NA	4,2	4,7	5,3	5,8	6,3	7,32
Jumlah kunjungan wisatawan	10.969	11.479	11.735	11.990	12.245	12.500	12.500
Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.222.659	1.291.995	1.361.330	1.430.665	1.500.000	1.500.000
Nilai	12.000	250	300	350	400	500	13.800



INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
		2019	2020	2021	2022	2023	
investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar						
Nilai investasi berskala nasional (PMA)	5,70 Juta US\$ (2013)	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,68	3,79	3,34	2,89	2,45	2,00	2,00
Rata2 lama sekolah	9,04	9,19	9,27	9,35	9,42	9,50	9,50
Harapan Lama Sekolah	12,8	13,48	13,77	14,05	14,34	14,63	14,63
Angka harapan hidup	67,97	68,65	68,99	69,32	69,66	70,00	70,00
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,8 (2015)	80,40	81,55	82,70	83,85	85,00	85,00
Persentase panjang jalan kondisi baik	44,48	54,65	59,74	64,83	69,91	75,00	75,00
Persentase RT yang terakses air bersih	76,2	84,13	88,10	92,07	96,03	100,00	100
Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	34,75	23,17	17,38	11,58	5,79	0	0
Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	100	100
Persentase jumlah sampah yang tertangani	73%	80%	75%	74%	73%	72%	72%
Status Indeks Kualitas Air	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Status Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tutupan Lahan	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	108	72	54	36	18	0	0



INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
		2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase wirausaha baru	NA	20*	30*	40*	50*	60*	70*
Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	231 atlet	250	267	289	300	380	450
Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	3 event budaya	3	4	5	5	6	6
Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	BB	BB	A	A
Jumlah kasus korupsi	4 (2018)	3	2	1	0	0	0
Nilai IKM (Nilai Interval)	3,198	3,225 (Baik)	3,245	3,265	3,285	3,305	3,533

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan menjadi prioritas program pembangunan daerah;serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur pada 2013-2017



merupakan capaian pembangunan. Tahun 2018-2023 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel 8.2 sebagai berikut:

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
01.00	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)	6.320,00	7.539,69	8.235,15	8.994,76	9.824,44	10.730,65
02.00	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	5,98	6,49	6,74	6,99	7,25	7,5
03.00	PDRB per kapita	52,6	59,22	62,87	66,75	70,86	75,22
04.00	Indeks Gini	0,307	0,296	0,291	0,286	0,28	0,275
05.00	IPG	88,16	89,8	90,21	90,62	91,03	91,5
06.00	Angka Kriminalistas	0,16	0,15	0,1	0,1	0	0
07.00	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	76	78	80	82	84
08.00	IKLH	NA	64,23	66,47	68,51	69,34	70,16
09.00	LPE sektor Pertanian	6,54	7,03	7,27	7,51	7,76	8
10.00	LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	8,56	8,92	9,28	9,64	10
11.00	Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.222.659	1.291.995	1.361.330	1.430.665	1.500.000
12.00	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,68	3,79	3,34	2,89	2,45	2
13.00	Rata2 lama sekolah	9,04	9,19	9,27	9,35	9,42	9,5
14.00	Harapan Lama Sekolah	12,8	13,48	13,77	14,05	14,34	14,63
15.00	Angka harapan hidup	67,97	68,65	68,99	69,32	69,66	70
16.00	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	75,8 (2015)	80,4	81,55	82,7	83,85	85



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
17.00	Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	108	72	54	36	18	0
18.00	Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	BB	BB	A
19.00	Jumlah kasus korupsi	4 (2018)	3	2	1	0	0
20.00	Nilai IKM (Nilai Interval)	3,198	3,225 (Baik)	3,245	3,265	3,285	3,305
21.00	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.00	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	7,34	7,49	7,64	7,79	7,95	8,1
23.00	Jumlah penduduk	120.254	127.297	130.971	134.752	138.642	142.644
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
01.00	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.083.989	1.105.669	1.127.782	1.150.338	1.173.345	1.196.811
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
01.00	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	55	68,60	68,65	68,7	68,75	68,8
1.2.	Angka partisipasi kasar						
01.02.01	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109,65	107,24	106,03	104,83	103,62	102,4125



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
01.02.02	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	82,45	82,95	83,45	83,95	84,45	84,95
1.4.	Angka Partisipasi Murni						
01.04.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,47	98,67	98,87	99,07	99,27	99,47
01.04.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75,33	75,85	76,33	76,83	77,33	77,83
02.00	Kesehatan						
02.01.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000
02.03.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000
02.04.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000
02.05.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	50/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000
02.06.	Rasio Posyandu per satuan balita	1.69	2	2	2	2	2
02.07.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1/30.000 pndk	1	1	1	1	1
02.08.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1/100.000 pddk	1	1	1	1	1
02.09.	Rasio Dokter per satuan	28.15	30	30	30	30	30



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	penduduk						
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	80%	100%	100%	100%	100%	100%
02.12	Cakupan Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	79%	90%	90%	90%	90%	90%
02.13	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.16	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	93%	95%	95%	95%	95%	100%
02.17	Cakupan balita pneumonia yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.18	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.19	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.20	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000	0	0	0	0	0	0



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	penduduk)						
02.21	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	80,25%	85%	85%	85%	85%	85%
02.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	94%	100%	100%	100%	100%	100%
02.24	Penderita diare yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.25	Cakupan Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	85%	100%	100%	100%	100%	100%
02.26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%	100%	100%	100%	100%	100%
02.27	Cakupan kunjungan bayi	90%	100%	100%	100%	100%	100%
02.28	Cakupan Puskesmas	1	1	1	1	1	1
02.29	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	82,64	100%	100%	100%	100%	100%
02.30	Cakupan pelayanan ibu nifas yang mendapatkan	77%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan						
02.31	Cakupan neonatus dengan komplekasi yang di tangani	70%	100%	100%	100%	100%	100%
02.32	Cakupan pelayananbayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart	85%	100%	100%	100%	100%	100%
02.33	Cakupan pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	90%	100%	100%	100%	100%	100%
02.34	Presentase balita gizi kurang	0,05%	< 0.045%	< 0.040%	< 0.035%	< 0.030%	< 0.025%
02.35	Prevalensi balita stunting	17%	15%	12%	9%	7%	5%
02.36	Persentase gizi buruk dan gizi kurang yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.37	Cakupan Desa Siaga Aktif	46%	70%	73%	75%	77%	80%
02.38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.39	Cakupan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	20%	100%	100%	100%	100%	100%
02.40	Jumlah Pengunjung usia 15-59 Tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	96,35%	100%	100%	100%	100%	100%
02.41	Jumlah Pengunjung usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	84,43%	100%	100%	100%	100%	100%
02.42	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	18%	100%	100%	100%	100%	100%
02.43	Jumlah Penyandang Diabetis Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu	17%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	tahun						
02.44	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) diwilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	RSUD						
02.47	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit	96	100	110	115	120	
03.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
03.01.	Pekerjaan Umum:						
03.01.01	Persentase panjang jalan kondisi baik	44,48	54,65	59,74	64,83	69,91	75
03.01.02	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,69%	61,69%	69,09%	75,77%	78,77%	83,18%
03.01.04	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	61,69%	61,69%	69,09%	75,77%	78,77%	83,18%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.01.07	Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,29%	77,29%	83,67%	89,77%	92,60%	100%
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	50%	60%	70%	80%	90%
03.01.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	20%	20%	40%	70%	90%	100%
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	20%	20%	40%	70%	90%	100%
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	30%	30%	50%	70%	85%	100%
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	74,07%	74,07%	77,36%	85,13%	92,56%	100%
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	74,07%	74,07%	77,36%	85,13%	92,56%	100%
03.02.	Penataan Ruang:						
03.02.01	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	30%	30%	50%	75%	90%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.02.02	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	30%	30%	50%	75%	90%	100%
03.02.04	Ruang publik yang berubah peruntukannya	30%	30%	50%	75%	90%	100%
04.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
04.01	Persentase RT yang terakses air bersih	76,2	84,13	88,1	92,07	96,03	100
04.02	Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	34,75	23,17	17,38	11,58	5,79	0
04.03	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	97,00	97,35	97,85	98,00	98,15	98,51
04.04.	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	79,00
04.05.	Persentase RTH Publik yang terkelola	1%	1%	5%	5,5%	6%	6,1%
04.06.	Rasio rumah layak huni	94,37%	95,11%	96,21%	97,03%	98,17%	99,02%
04.07	Pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah	13.879	10.000	9.500	9.000	8.500	7.000



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Perkotaan (m')						
04.08	Rehabilitasi Rumah Layak Huni (unit)	1.602	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
04.09	Persentase permukiman yang tertata	60,52%	70%	75%	80%	83%	85%
04.10	Persentase luas permukiman kumuh	0,35%		0,33%	0,31%	0,29%	0,28%
04.11	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5,34%		5,33%	4,31%	3,29%	3,08%
04.12	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	5,63%		5,13%	4,82%	4,51%	4,21%
04.13	Peningkatan Kualitas lingkungan pada kawasan kumuh desa tertinggal, desa tradisional, dan desa nelayan	NA	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	40 Unit
05.00	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
05.01	Persentase pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan		100%	100%	100%	100%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur						
05.02	Persentase Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakarandan Pemadam Kebakaran sebagai Aparatur Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
05.03	Terlaksananya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%
05.04	Cakupan wilayah pelaksanaan deteksi dini ancaman keamanan		100%	100%	100%	100%	100%
05.05	Persentase potensi gangguan keamanan yang terdeteksi		100%	100%	100%	100%	100%
05.06	Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi lainnya		70%	75%	80%	85%	90%
05.07	Cakupan wilayah pendidikan politik masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.08	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi		70%	75%	80%	85%	90%
06.00	Sosial						
06.01.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	26%	100%	100%	100%	100%	100%
06.02.	Prosentase PMKS yang tertangani	36,84%	100%	100%	100%	100%	100%
06.03.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.04.	Prosentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau sekelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.05.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.06.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	0%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	prasarana pelayanan kesejahteraan sosial						
06.07.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	47,81%	100%	100%	100%	100%	100%
06.08.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.09.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	16%	100%	100%	100%	100%	100%
	Target Indikator SPM						
06.10	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	26%	100%	100%	100%	100%	100%
06.11	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti	36,84%	100%	100%	100%	100%	100%
06.12	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	16%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Sosial						
06.13	Prosentase Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.14	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota	47,81%	100%	100%	100%	100%	100%
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
01.	Tenaga Kerja						
01.01.	Angka partisipasi angkatan kerja	59.197 org	61.361	63.629	66.006	68.511	71.173
01.02.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	81,72%	82,18	82,65	83,13	83,61	84,1
01.03.	Tingkat pengangguran terbuka	1,79%	1,66	1,54	1,48	1,3	1,13
01.04.	Rasio penduduk yang bekerja	95,20%	95,41	94,65	94,7	94,76	95,2
01.06.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	80,25%	80,81	81,38	81,9	82,53	83,91
01.07.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	22.00 %	23,13	24,73	25,77	27,39	29,26



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	terhadap total kesempatan kerja						
01.08.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	50 Kasus	50	45	40	35	30
01.09.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45 Buah PB	45	40	35	30	25
01.10	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1.006 org	1.224	1.468	1.761	2.113	2.535
01.12	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	3.454 orang	3.626	3.806	3.996	4.196	4.405
01.16	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	24 org	30	50	85	110	145
01.17	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	35 org	115	130	190	200	220
01.18	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	5 org	5	8	10	13	15
01.19	Rasio lulusan S1/S2/S3	9,18%	9,69	10,23	10,79	11,37	11,97
02.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.01.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,18	53,19	53,21	53,21	53,22	53,27
02.02.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	30	30	30	30	30
02.03.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	41,032	42,065	43,13	44,68	45,07	46,7
02.04.	Rasio KDRT	0,0127	0,0125	0,0122	0,0121	0,0119	0,0114
02.05.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	1,851	1,5	1,2	1	0,5	0
02.06.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,14	95,15	95,18	95,2	95,232	95,25
02.07.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
02.08.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan	100	100	100	100	100	100



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	PPT/PKT di Rumah Sakit						
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
02.20	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	76,46	78	79	81	83	86
03.00	Pangan						
3.1.	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	90,2	91,4	92,6	93,9	95,1	96,3
3.2.	Penguatan cadangan pangan	1 Gapoktan	2 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan
3.3.	Penanganan daerah rawan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
03.04	Ketersediaan energi dan protein perkapita	93,79%	93,79%	93,79%	93,79%	93,79%	94,00%
03.05	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
04.00	Pertanahan						
03.05	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan						
05.00	Lingkungan Hidup	1.620	120	120	120	120	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	0	0	1 dokumen RPPLH & Perda RPPLH	0	0	0
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0 (belum terintegrasi)	0		Terintegritasi	Terintegritasi	Terintegritasi
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1 dokumen KLHS	0	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
05.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	56,66/3 titik	57,32	57,81	57,92	61,36	61,36
05.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	96,35	96	96,45	96,52	96,73	96,99
05.31	Persentase kualitas Tutupan Lahan	47,71	49	50,5	55,35	55,67	60,46
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.33	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	5 orang	0	1	1	1	1
05.42	Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	5 Orang	0	1	1	1	1
		2 gps,	0 gps,	0 gps,	1 gps,	0 gps,	0 gps,
		1 paket alat lab,	1 paket alat lab,	0 paket alat lab,	0 paket alat lab,	0 paket alat lab,	0 paket alat lab,
		1 mobil	1 mobil	0 mobil	0 mobil	0 mobil	0 mobil
		0 motor	6 motor	0 motor	0 motor	0 motor	0 motor
		0 drone	1 drone	0 drone	0 drone	0 drone	0 drone
05.43	Timbulan Sampah yang ditangani	17.556 ton/tahun	17.908 ton/tahun	18.266 ton/tahun	18.631 ton/tahun	19.004 ton/tahun	19.384 ton/tahun
05.44	jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	10 ton/tahun	15 ton/tahun	20 ton/tahun	25 ton/tahun	25 ton/tahun
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	73%	80%	85%	87%	91%	95%
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten	Open dumping	Open dumping	Sanitary Landfill	TPST 3R	TPST 3R	UPTD TPA
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	0	1	1	1	1
05.49	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaku usaha	0 Perusahaan	35	34	34	32	30



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						
05.50	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	1	0	1	1	1	3
05.51	Persentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK)	0%	55	57	57	58	58
05.52	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Ekosistem dan Keanakeragaman Hayati)	55%	58	58	59	59	60
05.53	Presentase lahan kritis yang tertangani	0%	57	58	59	60	61
05.54	Terlaksananya inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)/hak ulayat	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0
05.55	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	201 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
06.00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
06.01.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
06.02.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98
06.03	Persentase Penduduk berKTP-el Per Satuan Penduduk	85,51%	87,66%	89,72%	91,34%	93,86%	95,42%
06.04	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	5.237 Lembar	6.762	7.489	8.503	9.614	10.122
06.05	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	379 Lembar	426	453	532	589	642
06.06	Jumlah Penduduk Kabupaten	112.363 Jiwa	114.048	115.759	117.496	119.258	121.047
07.00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
07.01	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	190	210	215	220	225	230
07.02	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	75	80	85	90	95	100
07.03	Jumlah Desa berstatus swasembada	3	5	7	9	11	13
07.04	Jumlah Desa berstatus swadaya	74	73	72	71	70	69
07.05	Jumlah Desa berstatus swakarya	24	23	22	21	20	19
08.00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
08.01.	Laju Pertumbuhan	2,86%	2,81%	2,75%	2,70%	2,60%	2,44%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Penduduk (LPP)						
08.02.	Total Fertility Rate (TFR)	2,76%	2,53%	2,23%	2,23%	2,20%	2,18%
08.03.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	66,70%	68,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
08.04.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0%	10%	30%	60%	75%	100%
08.05.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	1	2	2	2	2
08.06.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	1	2	3	4	7



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.07.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	10	15	20	25	35
08.08.	rata-rata jumlah anak per keluarga	2,76	2,53	2,23	2,23	2,2	2,18
08.09.	ratio akseptor KB	80,3	80,5	81	83	83	84
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,40%	79,55%	80,45%	80,55%	80,71	81,00%
08.11	angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	30,4	11	9	7	5	0
08.12	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	50%	100%	100%	100%	100%	100%
08.13	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	11,40%	11,20%	11,10%	11%	10,90%	10,80%
08.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	67%	72%	74%	76%	77%	80%
08.15	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	13,46%	14,45%	15,45%	16,45%	17,45%	18,45%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.16	Cakupan anggota keluarga bina keluarga balita (BKB) ber-KB	60%	70%	80%	85%	90%	100%
08.17	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.18	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.19	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	3	3	4	5	6	7
08.20	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /Mahasiswa	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	50%	60%	70%	80%	90%	100%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	mandiri						
08.23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08.25	persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08.26	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	90%	91%	95%	98%	100%	100%
08.27	persentasi remaja yang terkena infensi menular seksual (IMS)	-	-	-	-	-	-



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	18	23	28	33	38	40
08.29	cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	18 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun
08.31	persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembanguna keluarga melalui APBD dan APBDes	60%	70%	75%	80%	90%	100%
09.00	Perhubungan						
09.01.	Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik	65%	70%	75%	80%	85%	90%
09.02.	Persentase cakupan area pelayanan	65%	70%	75%	80%	85%	90%
10.00	Komunikasi dan Informatika						



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.01	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik radio	-	50	60	70	80	100
10.02	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik televisi	-	-	20	30	40	50
10.03	Jumlah Pemirsa Radio dan Televisi milik pemerintah daerah	-	100	200	300	400	500
10.04	Jumlah Radio siaran milik pemerintah daerah	-	-	1	1	1	1
10.05	Jumlah Televisi kabel/UHF milik pemerintah daerah	-	-	-	1	1	1
10.06	Jumlah desa yang diberikan bantuan pesawat radio dan televisi sebagai sarana informasi pedesaan	-	-	20	30	40	50
10.07	Jumlah media luar ruang dan konvensional yang didiseminasikan/dipublikasi kepada masyarakat	-	50	100	200	300	400



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.08	Jumlah Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	2	2	3	4	5	6
10.09	Jumlah pengikut/follower/subscriber Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	100	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
10.10	Jumlah fasilitas layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID	-	-	1	1	1	1
10.11	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	-	-	-	70	80	90
10.12	Rasio pengaduan yang ditangani terhadap pengaduan yang diterima	-	-	60	70	80	90
10.13	Jumlah sarana pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	2	2	3	3	4	4
10.14	Jumlah Data Center (server) milik Pemerintah Daerah	1	1	2	2	3	4
10.15	Jumlah Media Website milik pemerintah daerah	3	5	10	22	30	43
10.16	Jumlah pengunjung website milik pemerintah daerah	100.000	190.000	266.000	372.400	521.360	729.904



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.17	Jumlah Kantor OPD/UPTD Terkoneksi Jaringan Internet/Intranet	5	5	10	20	43	64
10.18	Jumlah Rata-Rata Kecepatan internet/Bandwidth Kantor OPD/UPTD	5	5	6	7	8	10
10.19	Jumlah Media Center milik Pemerintah Daerah	-	-	1	1	1	1
10.20	Jumlah Aplikasi milik Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	-	2	4	6	8	10
10.21	Jumlah Email go.id untuk OPD dan ASN Pemerintah Daerah	5	43	64	128	256	512
10.22	Jumlah Command Center milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1
10.23	Jumlah CCTV terpasang di ruang publik dan fasilitas vital milik Pemerintah Daerah	-	2	5	8	10	15
10.24	Jumlah Security Operation Center (SOC) milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1
10.25	Jumlah Layanan Internet di Ruang	-	1	2	3	4	5



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Publik						
10.26	Jumlah pengunjung/pengguna fasilitas internet di ruang publik	-	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000
10.27	Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau layanan telekomunikasi yang berkualitas	40	60	70	80	90	100
10.28	Jumlah UMKM di Barito Timur yang dilatih/diberdayakan dalam pemanfaatan media online (e-commerce)	-	-	2	4	6	8
10.29	Jumlah UMKM di Barito Timur yang menjalankan usaha melalui media online (e-commerce)	-	-	1	2	4	5
10.30	Prosentase jumlah relawan TIK terhadap desa di Kabupaten Barito Timur	-	-	10	15	20	25
10.31	Jumlah Kelompok Informasi	-	-	1	2	4	5



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Masyarakat/Komunitas Kreatif bidang TIK						
10.32	Jumlah Pusat Komunitas Kreatif	-	-	-	1	1	1
10.33	Jumlah Angkatan Kerja Muda yang difasilitasi untuk memperoleh pelatihan TIK bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	-	-	5	10	15	20
11.00	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.01	Persentase koperasi aktif	44,18	54,18	59,18	64,18	69,18	74,18
11.02	Jumlah Koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam aktif	26	28	30	32	34	36
11.03	Jumlah UMKM aktif	15.328	15.353	15.378	15.403	15.428	15.453
11.04	Jumlah usaha mikro dan kecil yang memiliki IUMK	50	500	1.000	1.500	2.000	2.500
12.00	Penanaman Modal						
12.01	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	570 Milyar (2013)	700	850	800	950	1000



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
12.02	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	5,70 Juta US\$ (2013)	7	8,5	8	9,5	10
12.03	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	79	79	79	79	79	79
12.04	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	447.992.427.605,00	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142
12.05	Rasio daya serap tenaga kerja						
12.06	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	447.992.427.605,00	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537
13.00	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif	65%	70%	75%	80%	85%	90%
13.02	Persentase organisasi olahraga yang aktif	50%	70%	75%	80%	85%	90%
13.04	Jumlah Pelatih yang bersertifikasi	39 Orang	45	65	77	89	92
13.05	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	211 Buah	215	220	225	235	250
13.06	Jumlah atlet berprestasi	72 Orang	186	289	337	405	475
14.00	Statistik						



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.02	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.03	Buku "PDRB"						
14.04	Cakupan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah		60%	65%	70%	75%	80%
14.05	Jumlah Lab Statistik Center milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1
14.06	Jumlah Administrasi Statistik Sektor al yang dipublikasikan secara elektronik	-	-	2	4	6	8
14.07	Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektor al yang dipublikasikan kepada masyarakat	-	1	2	3	4	5
15.00	Persandian						
15.01	Cakupan informasi pemerintah penting yang tersandikan		60%	65%	70%	75%	80%



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
15.02	Tingkat ketersediaan dukungan peralatan persandian		75%	80%	85%	90%	90%
16.00	Kebudayaan						
16.01	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	3 Event	5	6	7	8	9
16.02	Jumlah pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya.	12 Kelompok	14	16	18	20	25
16.03	Jumlah Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan	205 Buah dan 16 Buah	225	230	235	240	250
17.00	Perpustakaan						
17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.801	6.240	7.800	9.360	12.480	14.040
17.02	Koleksi bahan Pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah	19.453	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
17.03	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.052	4.152	4.210	4.300	4.400	4.500
17.04	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	0	1	2	2	3	4



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
17.05	Peningkatan Jumlah:						
17.05.01	Perpustakaan Desa	35	37	39	41	43	45
17.05.02	Tenaga Pengelola Perpustakaan	70	72	74	76	78	79
17.05.03	Koleksi Perpustakaan	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
17.06	Penyediaan Akses Internet kepada Pengunjung	0	1	2	2	2	2
18.00	Kearsipan						
18.01	Pembinaan kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	5	7	10	12	15	20
18.02	Pengolahan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	50	55	60	75	80	85
18.03	Pembinaan Sumber daya Manusia (SDM) Kearsipan	1	2	3	4	5	6
18.04	Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol Masyarakat	1	2	3	4	5	6
Layanan Urusan Pilihan							
01.00	Pariwisata						
01.01	PDRB Sektor pariwisata	8.810.000,- (0,01 %)	0,42%	0,45%	0,50%	0,75%	1,00%
01.02	Jumlah kunjungan wisatawan	10.969 Orang	11.479	11.735	11.990	12.245	12.500



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
01.03	Jumlah obyek wisata yang dipasarkan	30 Obyek	31	32	33	34	35
01.04	Jumlah destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan	12 Obyek	15	17	19	20	22
01.05	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	3 Kelompok	5	7	9	12	15
02.00	Pertanian						
02.01	Luas Sawah	10.313	10.829	11.334	11.860	12.376	12.891
02.02	Produktivitas Padi Sawah	31,47	31,63	31,85	35,035	38,58	40,509
02.03	Produktivitas Padi Ladang	14,65	14,72	14,82	14,93	15,05	15,81
02.04	Produksi Padi	38.387	38.579	38.887	42.776	44.914	47.159
02.05	Jumlah Produksi Daging (Sapi,kambing, babi)	368.382	105,81	107,92	110,08	112,28	114,53
02.06	Jumlah Produksi Dagingayam/unggas	621.463	456,55	474,86	484,36	494,04	503,92
02.07	Rasio kasus temuan bahan pangan asal hewan tidak layak konsumsi yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%
02.08	Jumlah Anjing yang di Vaksin untuk mencegah kasus Rabies	7.985	8.144	8.303	8.462	8.621	8.780



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.09	Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat	54.260,18	54.460,18	54.569,10	54.678,02	54.786,94	54.895,86
02.10	Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat	30,72	66,72	111,72	156,72	201,72	246,72
02.11	Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat	74,01	121,01	168,01	215,01	262,01	309,01
02.12	Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat	449,65	499,65	549,65	599,65	649,65	699,65
03.00	Kehutanan						
03.01.	lahan kritis	71.981,7 Ha	61.698,60 Ha	51.415,50 Ha	41.132,40 Ha	30.849,30 Ha	20.566,20 Ha
03.02.	Kerusakan Kawasan Hutan	59.785 Ha	51.244 Ha	42.704 Ha	34.163,2 Ha	25.622,4 Ha	17.081,6 Ha
04.00	Energi dan Sumber Daya Mineral						
04.01.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	80%					
04.02.	Rasio ketersediaan daya listrik	80%					
05.00	Perdagangan						
05.01	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	6,95	7,12	7,2	7,27	7,35	7,4



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal						
	Jumlah pedagang besar	43	48	53	58	60	65
	Jumlah pedagang menengah	218	220	225	230	235	242
	Jumlah pedagang kecil	210	215	218	221	225	230
05.03.	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.04.	Rasio pasar daerah yang representatif	75	78	80	83	85	90
06.00	Perindustrian						
06.01.	Pertumbuhan industri kecil menengah	637	643	680	710	750	800
06.02	Jumlah kontribusi PDRB dari sector industry (dalam juta rupiah)	125.000	130.000	135.000	145.000	150.000	155.000
06.03	Jumlah IKM baru		5	5	5	5	5
06.04	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,64	8	9	10	11	12
06.05	Jumlah IKM	637	643	680	710	750	800
06.06	Jumlah Tenaga Kerja Industri	1.393	1.320	1.470	1.520	1.570	1.620



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
06.07	Nilai investasi industri (Juta Rupiah)	13.083,95	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
07.00	Transmigrasi						
07.01.	Persentase transmigran swakarsa						
08.00	Kelautan dan Perikanan						
08.01.	Produksi perikanan (Ton)	2.190,04	2.409,04	2.649,95	2.914,94	3.206,44	3.527,08
08.02.	Konsumsi ikan (Org/Kg/Kapita)	25	27,5	30	33	36,3	39,9
08.04.	Jumlah KUB (Kel.Usaha Bersama)	25	27	29	32	35	38
08.05	Jumlah kebijakan bidang IKM yang diterbitkan bidang perikanan	0	1	1	1	1	1
08.06	Koperasi perikanan	0	5	7	9	11	13
Penunjang Urusan							
01.00	Perencanaan Pembangunan						
01.01.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
01.02.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
01.03.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
01.04.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
02.00	Keuangan						
02.01.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
02.02.	Nilai Maturitas SPIP	3,08	3,57	4,33	5,02	5,77	6,38
02.03.	Skor LKIP	CC	B	B	B+	A	A
02.04.	Skor EKPPD	3,05	3,87	5,06	6,32	6,79	7,02
02.05.	Peresentase anggaran dengan realisasi	95,11%	95,20%	95,35%	95,60%	95,80%	96,00%
02.06.	Persentase SILPA terhadap APBD	3,34%	3,33%	3,32%	3,33%	3,34%	3,35%
02.07.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	3,20%	3,19%	3,18%	3,20%	3,22%	3,25%
02.08.	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,66%	22,70%	22,75%	22,85%	22,90%	23,05%
02.09.	Persentase belanja kesehatan (10%)	15,86%	15,89%	15,90%	15,95%	15,98%	16,03%
02.10	Perbandingan antara belanja langsung dengan	57:43:00	56:43:00	53:47:00	52:48:00	51:49:00	50:50:00



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	belanja tidak langsung						
02.11	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.12	Penetapan APBD	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal
03.00	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
03.01	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.02.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1%	6%	10%	14%	17%	20%
03.03.	Persentase Data Kediklatan terdokumentasi dan terpublikasi	50%	100%	100%	100%	100%	100%
03.04.	Persentase Siswa/I SMA/ MA mendapatkan informasi penerimaan IPDN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.05.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	36	36	36	36	36



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.06.	Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	135	149	149	149	149	149
03.07.	Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	401	516	516	516	516	516
03.08.	Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	1052	1100	1075	1050	1025	1000
03.09.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2086	2100	2075	2050	2025	2000
03.10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,198	3,225	3,245	3,265	3,285	3,305
04.00	Penelitian dan pengembangan						
04.01	Rasio kajian litbang yang diterapkan		10%	20%	30%	40%	50%
05.00	Pengawasan						
05.01.	Persentase tindak lanjut temuan	75%	75%	77%	80%	85%	90%
05.02	Jumlah Temuan hasil pemeriksaan APIP Kabupaten	36	30	29	28	26	25



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
06.00	Sekretariat Dewan						
06.01	Jumlah perda inisitaif DPRD yang ditetapkan	2	2	2	2	2	2



8.2 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

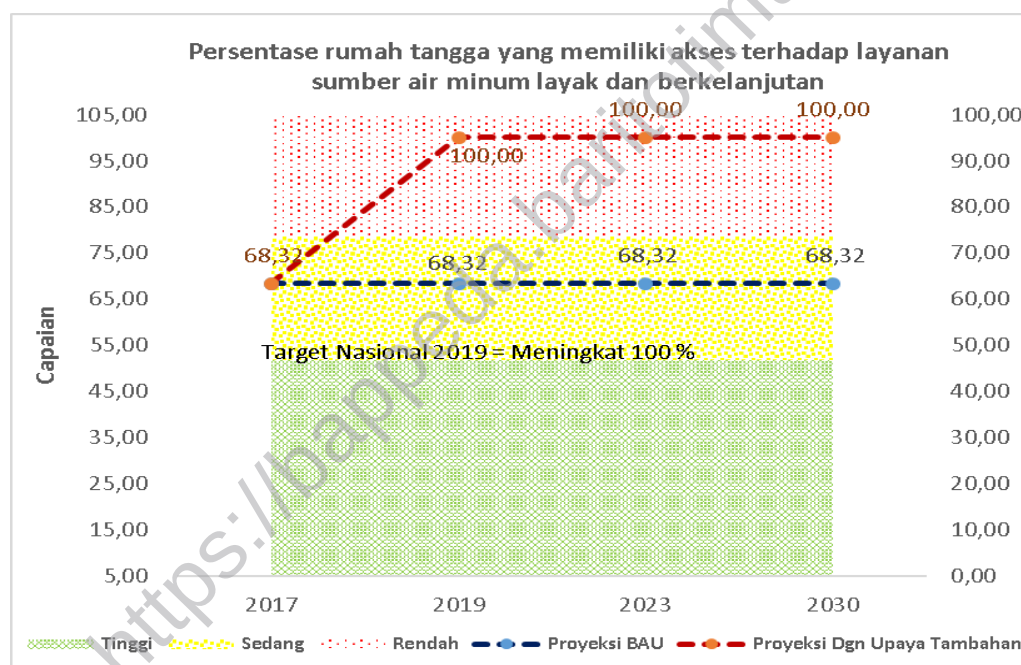
A. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Target : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Nomor Indikator : 1.4.1.(d)
Analisis DDDTLH : Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Penyediaan Air. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Penyediaan Air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori Rendah seluas 101.644,60 Ha (26,51%), Sedang 102.504,47 Ha (26,74%), Tinggi 179.250,93 Ha (46,75%). Secara umum DDLH penyediaan air kurang mencukupi.
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sampai pada tahun 2017 adalah 68,32%, Capaian ini belum mencapai target



yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usually*). Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 100% pada tahun 2023 adalah 100%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	-	
2014	-	
2015	-	
2016	-	
2017	68,32	
Proyeksi		
2019	68,32	100
2023	68,32	100
2030	68,32	100



Isu Strategis : Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi :

a. Sasaran :

- Tercapainya pemerataan pemenuhan kebutuhan air minum yang



layak bagi semua masyarakat
- Optimalnya pemenuhan kebutuhan air dari sumber air baku yang berkelanjutan
b. Strategi dan arak kebijakan :
- Identifikasi sumber daya air
- Pemetaan daya dukung sumber daya air
- Pemenuhan kebutuhan air minum layak bagi semua masyarakat
- Bekerjasama dengan daerah disekitar yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan
c. Outcome/Program :
- Identifikasi sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur
- Penambahan jumlah sumber air minum layak dan berkelanjutan.
- Melakukan kerjasama dengan daerah sekitar yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak berlebihan
- bekerjasama dengan perusahaan daerah (PDAM) dalam hal penyediaan akses terhadap layanan air minum layak.
d. Instansi pelaksana :
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan.

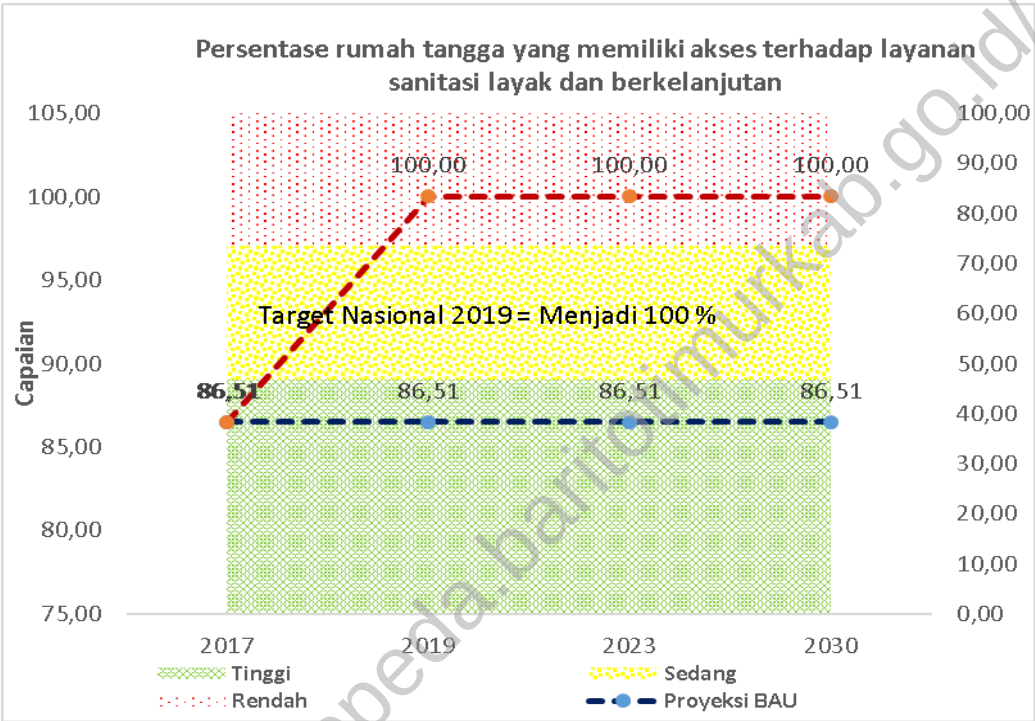
B. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Target : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
Nomor Indikator : 1.4.1.(e)
Analisis DDDTLH : Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Penyediaan Air. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Penyediaan Air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori Rendah seluas 101.644,60 Ha (26,51%), Sedang 102.504,47 Ha (26,74%), Tinggi 179.250,93 Ha (46,75%). Secara umum DDLH penyediaan air kurang mencukupi.
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sampai pada tahun 2017 adalah 70%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat menjadi 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>). Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun



2019 adalah 100% pada tahun 2023 adalah 100%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	-	-
2014	-	-
2015	-	-
2016	86,51	86,51
2017	86,51	86,51
Proyeksi		
2019	86,51	100
2023	86,51	100
2030	86,51	100



Isu Strategis : Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi :

- Sasaran :
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak skala kota, kawasan, dan komunal
- Strategi dan arak kebijakan:
 - Peningkatan infrastruktur sanitasi yang layak untuk pelayanan skala kota, kawasan, dan komunal
 - Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani sanitasi layak
 - koordinasi antar OPD terkait updating data sanitasi
- Outcome/Program :
 - Peningkatan tata kelola, akses informasi dan Regulasi



Lingkungan Hidup
- Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan
- Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan
- Pengelolaan Persampahan
- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Instansi pelaksana :
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup

C. Indikator Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan

Tujuan :	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun															
Target :	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
Nomor Indikator :	1.3.1.(a)															
Proyeksi Capaian Indikator TPB:	Capaian indikator Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan sampai pada tahun 2017 adalah 60,68. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka, dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>). Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 95% pada tahun 2023 adalah 100%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:															
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">14,68</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">38,68</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">37,58</td></tr></table>		Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	14,68		2014	38,68		2015	37,58	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan														
Baseline Data																
2013	14,68															
2014	38,68															
2015	37,58															



2016	41,18	
2017	60,68	
Proyeksi		
2019	60,91	95
2023	74,71	100
2030	98,86	100

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	Target Nasional
2017	60,68	60,68	
2019	60,91	95,00	95%
2023	74,71	100,00	
2030	98,86	100,00	

Isu Strategis : Kemiskinan

Rekomendasi :

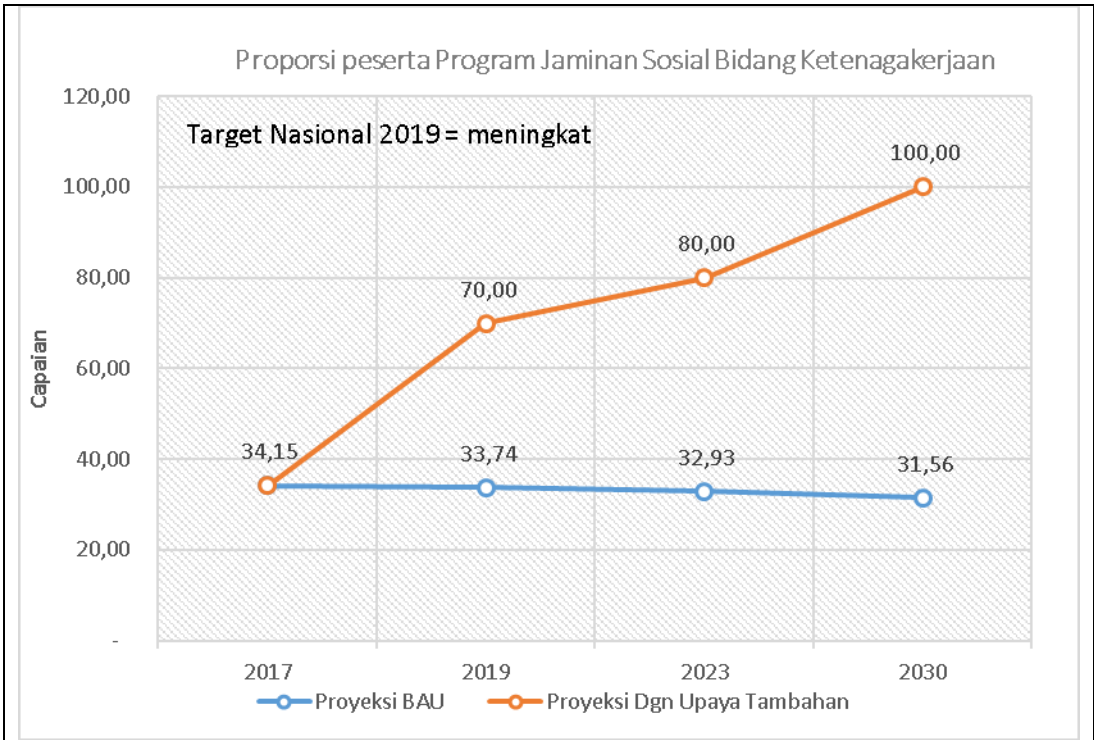
- Sasaran :
meningkatkan proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- Strategi dan arak kebijakan :
Menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan secara bertahap bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur
- Outcome/Program :
 - Pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - Sosialisasi tentang jaminan kesehatan
 - Peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan.
 - Meningkatkan alokasi dana hibah untuk jaminan kesehatan
 - peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
 - Memberikan pelayanan kesehatan secara merata pada seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

pelaksana :
Dinas Kesehatan



D. Indikator Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tujuan :	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun																																	
Target :	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																																	
Nomor Indikator : 1.3.1.(b)																																		
Proyeksi Capaian Indikator TPB :																																		
Capaian indikator Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sampai pada tahun 2017 adalah 34,15%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkatkan. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target untuk meningkat menjadi 100%. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 70% pada tahun 2023 adalah 80%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:																																		
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">35,00</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">34,99</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">35,00</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">35,42</td></tr><tr><td>2017</td><td colspan="2">34,15</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>33,74</td><td>70,00</td></tr><tr><td>2023</td><td>32,93</td><td>80,00</td></tr><tr><td>2030</td><td>31,56</td><td>100,00</td></tr></table>		Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	35,00		2014	34,99		2015	35,00		2016	35,42		2017	34,15		Proyeksi			2019	33,74	70,00	2023	32,93	80,00	2030	31,56	100,00
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																																
Baseline Data																																		
2013	35,00																																	
2014	34,99																																	
2015	35,00																																	
2016	35,42																																	
2017	34,15																																	
Proyeksi																																		
2019	33,74	70,00																																
2023	32,93	80,00																																
2030	31,56	100,00																																



Isu Strategis : Kemiskinan
Rekomendasi : a. Sasaran : meningkatkan Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan b. Strategi dan arah kebijakan : Mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Barito Timur untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan c. Outcome/Program : - Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan - Sosialisasi tentang jaminan ketenagakerjaan - Koordinasi antar pihak terkait data ketenagakerjaan. - Membuat payung hukum daerah. - Meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak karyawan untuk keselamatan kerja. - Terjaminnya kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Barito Timur d. Instansi pelaksana : - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

E. Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Tujuan	: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Target	: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

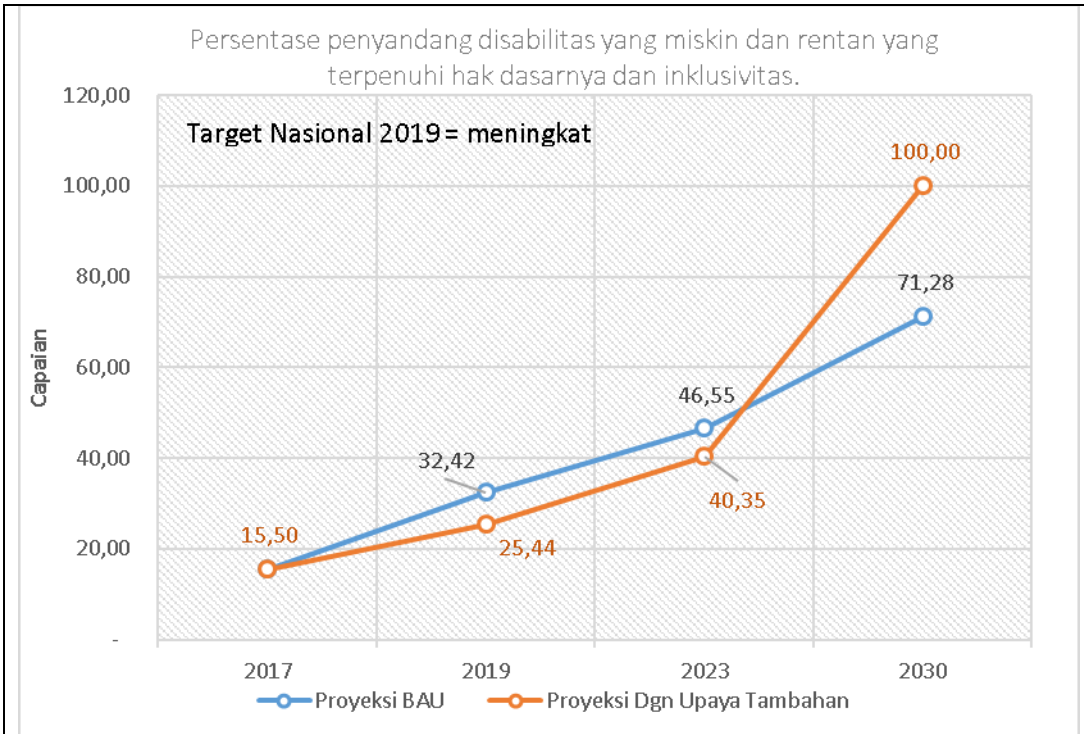


Nomor Indikator : 1.3.1.(c)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas sampai pada tahun 2017 adalah 15,50%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkatkan. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Meningkatkan menjadi 100%. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 25,42% pada tahun 2023 adalah 40,34%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	0,45	
2014	2,27	
2015	83,33	
2016	7,51	
2017	15,50	
Proyeksi		
2019	32,42	25,42
2023	46,55	40,34
2030	71,28	100



Isu Strategis : Kemiskinan

Rekomendasi :

a. Sasaran :

Meningkatkan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

b. Strategi dan arak kebijakan:

Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

c. Outcome/Program :

- Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Menambah sekolah dengan program inklusif
- Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
- Sosialisasi tentang penanganan penyandang disabilitas dan lingkungan sekitar.
- Pemberian Paket Kebutuhan Dasar untuk penyandang disabilitas.
- Pemberian penghargaan dalam bentuk beasiswa, bantuan modal dll bagi penyandang disabilitas.
- Pendataan Penyandang Disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
- Peningkatan kapasitas bagi PMKS secara umum di Barito Timur.
- Pemberian layanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial

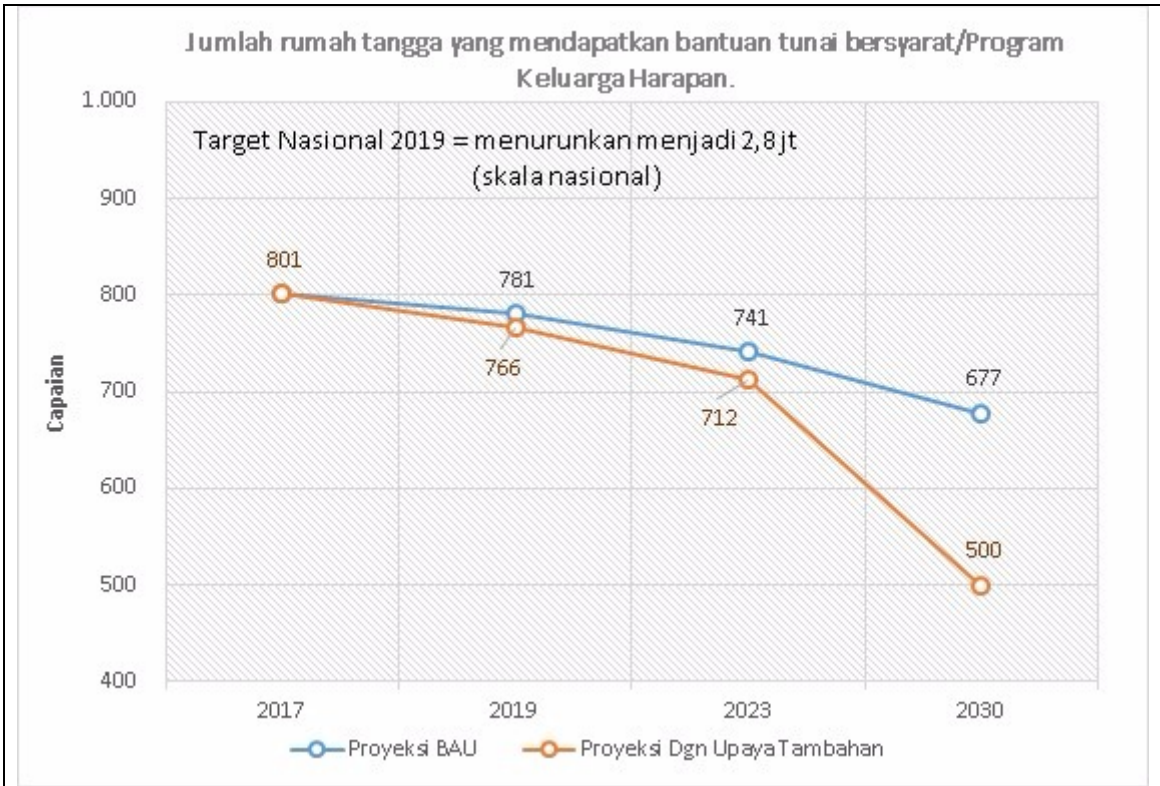
d. Instansi pelaksana :

Dinas Sosial



F. Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun																																			
Target : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																																			
Nomor Indikator : 1.3.1.(d)																																			
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan sampai pada tahun 2017 adalah 822. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 766 pada tahun 2023 adalah 712, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 500. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																			
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">822</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">805</td></tr><tr><td>2017</td><td>801</td><td>801</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>780</td><td>766</td></tr><tr><td>2023</td><td>741</td><td>712</td></tr><tr><td>2030</td><td>677</td><td>500</td></tr></table>			Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	-		2014	-		2015	822		2016	805		2017	801	801	Proyeksi			2019	780	766	2023	741	712	2030	677	500
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																																	
Baseline Data																																			
2013	-																																		
2014	-																																		
2015	822																																		
2016	805																																		
2017	801	801																																	
Proyeksi																																			
2019	780	766																																	
2023	741	712																																	
2030	677	500																																	



Isu Strategis : Kemiskinan

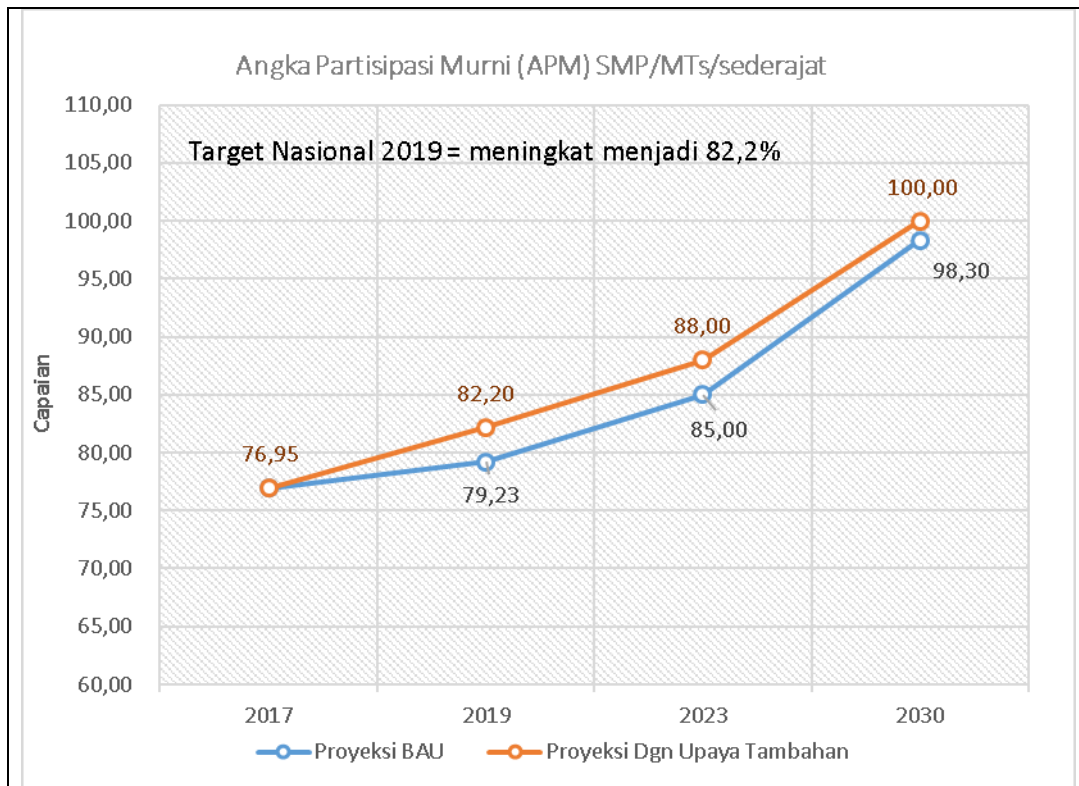
Rekomendasi :

- Sasaran :
Menurunkan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
- Strategi dan arak kebijakan :
Koordinasi dan sinkronisasi data bagi rumah tangga miskin yang akan mendapatkan bantuan tunai bersyarat
- Outcome/Program :
 - Penanggulangan bencana, perlindungan dan jaminan sosial
 - Pemutakhiran data fakir miskin & penyandang disabilitas melalui verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan rentan pada Basis Data Terpadu (BDT)
 - Validasi data calon penerima bantuan tunai bersyarat.
 - Peningkatan alokasi dana pendamping program PKH.
 - Melaksanakan monev pelaksanaan PKH.
 - Meningkatkan capacity building untuk penerima PKH
- Instansi pelaksana :
Dinas Sosial



G. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

Tujuan :	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun																																		
Target :	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																																		
Nomor Indikator :	1.4.1.(h)																																		
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. sampai pada tahun 2017 adalah 76,95% Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Meningkat menjadi 100%. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 82,20% pada tahun 2023 adalah 88%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																		
	<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">30,12</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">59,85</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">60,02</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">59,39</td></tr><tr><td>2017</td><td>76,95</td><td>76,95</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>79,23</td><td>82,20</td></tr><tr><td>2023</td><td>85,00</td><td>88,00</td></tr><tr><td>2030</td><td>98,30</td><td>100,00</td></tr></table>		Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	30,12		2014	59,85		2015	60,02		2016	59,39		2017	76,95	76,95	Proyeksi			2019	79,23	82,20	2023	85,00	88,00	2030	98,30	100,00
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																																	
Baseline Data																																			
2013	30,12																																		
2014	59,85																																		
2015	60,02																																		
2016	59,39																																		
2017	76,95	76,95																																	
Proyeksi																																			
2019	79,23	82,20																																	
2023	85,00	88,00																																	
2030	98,30	100,00																																	



Isu Strategis : Kemiskinan

Rekomendasi :

a. Sasaran :

- Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

b. Strategi dan arak kebijakan :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

c. Outcome/Program :

- Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Meningkatkan sarana dan prasarana bidang pendidikan
- penambahan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan
- peningkatan akses dan mutu layanan SMP/ sederajat

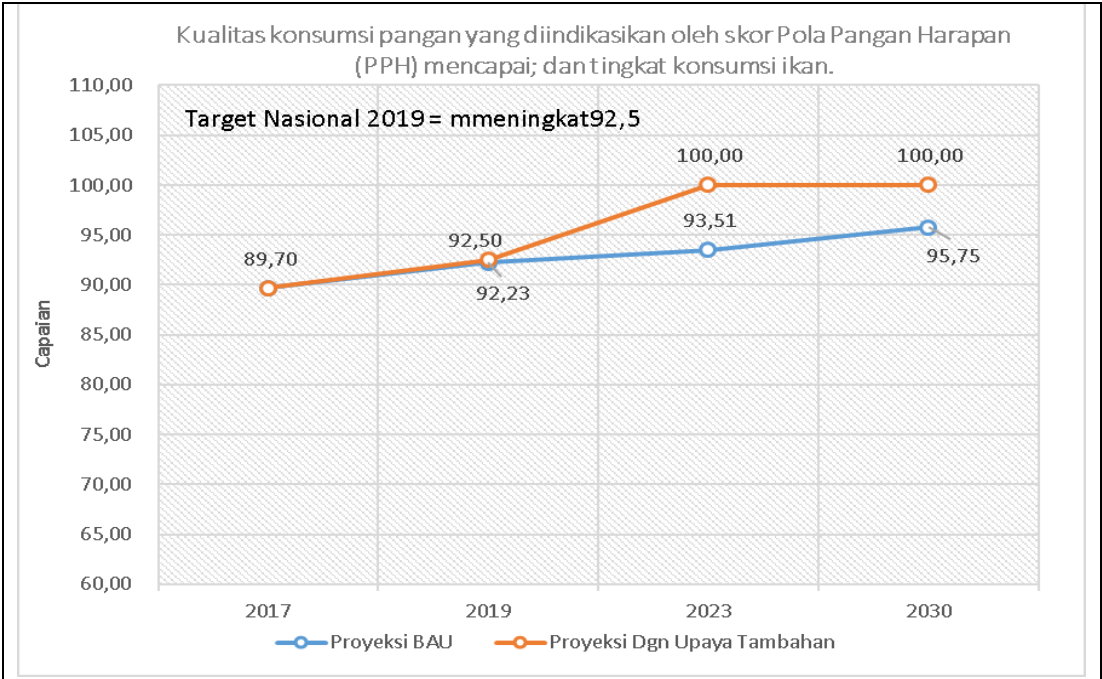
d. Instansi pelaksana :

- Dinas Pendidikan



H. Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan																																	
Target : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																																	
Nomor Indikator : 2.2.2.(c)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan sampai pada tahun 2017 adalah 89,70%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu menurun menjadi 28%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu menurun menjadi 28%. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 92,5 pada tahun 2023 adalah 100, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">81,47</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">78,66</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">88,40</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">86,80</td></tr><tr><td>2017</td><td>89,70</td><td>89,70</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>92,23</td><td>92,5</td></tr><tr><td>2023</td><td>93,51</td><td>100,0</td></tr><tr><td>2030</td><td>95,75</td><td>100,0</td></tr></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	81,47		2014	78,66		2015	88,40		2016	86,80		2017	89,70	89,70	Proyeksi			2019	92,23	92,5	2023	93,51	100,0	2030	95,75	100,0
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2013	81,47																																
2014	78,66																																
2015	88,40																																
2016	86,80																																
2017	89,70	89,70																															
Proyeksi																																	
2019	92,23	92,5																															
2023	93,51	100,0																															
2030	95,75	100,0																															



Isu Strategis : Kelaparan

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
- Menurunkan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Secara berkala melaksanakan perhitungan terhadap angka PPH dan Tingkat Konsumsi Ikan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur dan didukung oleh BPS
- c. Outcome/Program :
- Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Penyusunan Laporan Periode PPH.
 - Kerjasama dengan BPS untuk penyediaan Data terkait pangan daerah
 - Peningkatan SDM terkait dengan petani nelayan
 - penyuluhan tentang pentingnya kecukupan gizi
 - Pemberdayaan kelompok wanita tani dalam pemanfaatan pekarangan
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Penganekaragaman pengolahan pangan
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan

I. Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

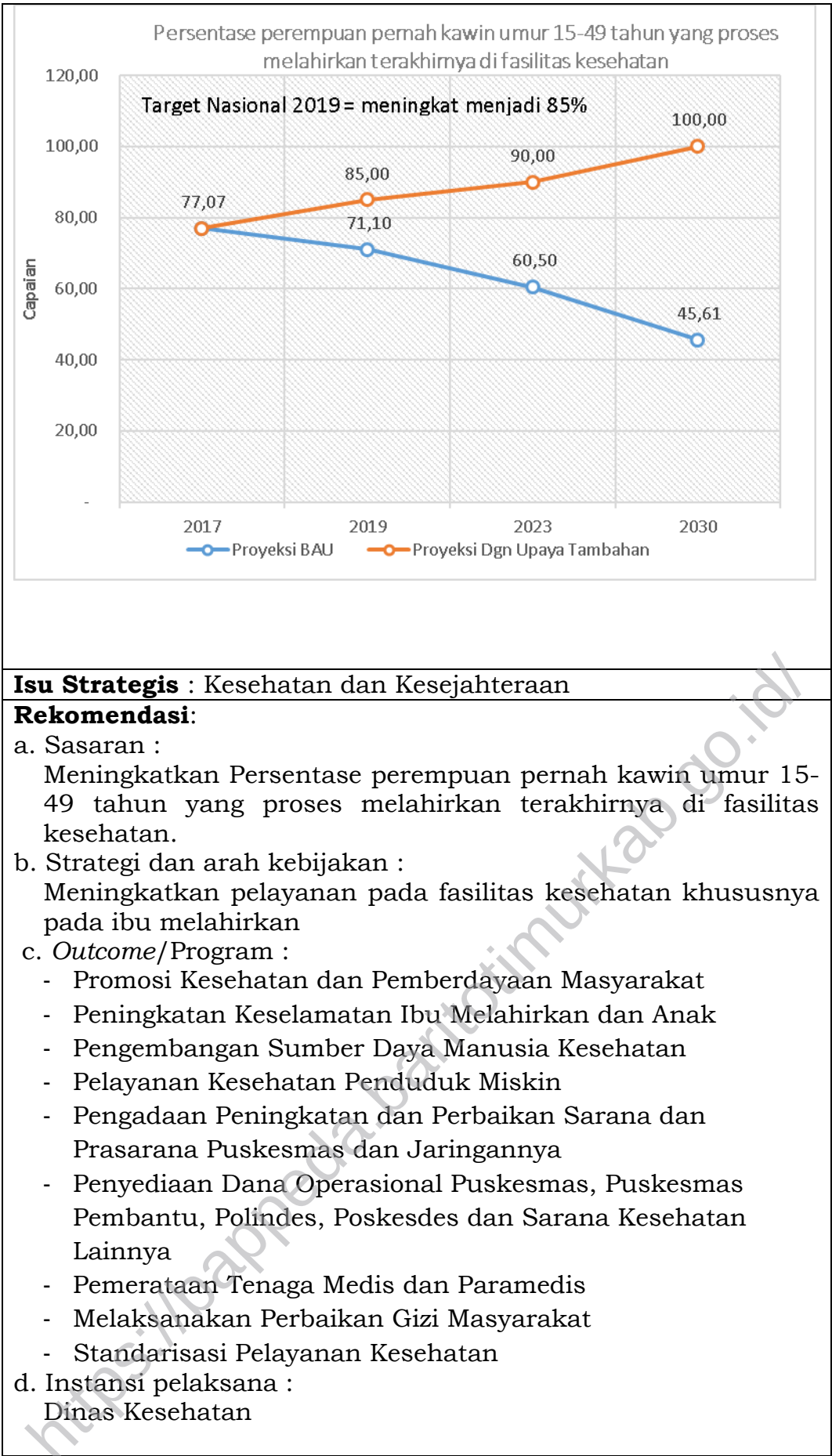
Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Nomor Indikator : 3.1.2.(a)



Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan sampai pada tahun 2017 adalah 77,97%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat menjadi 85%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 85% pada tahun 2023 adalah 90%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

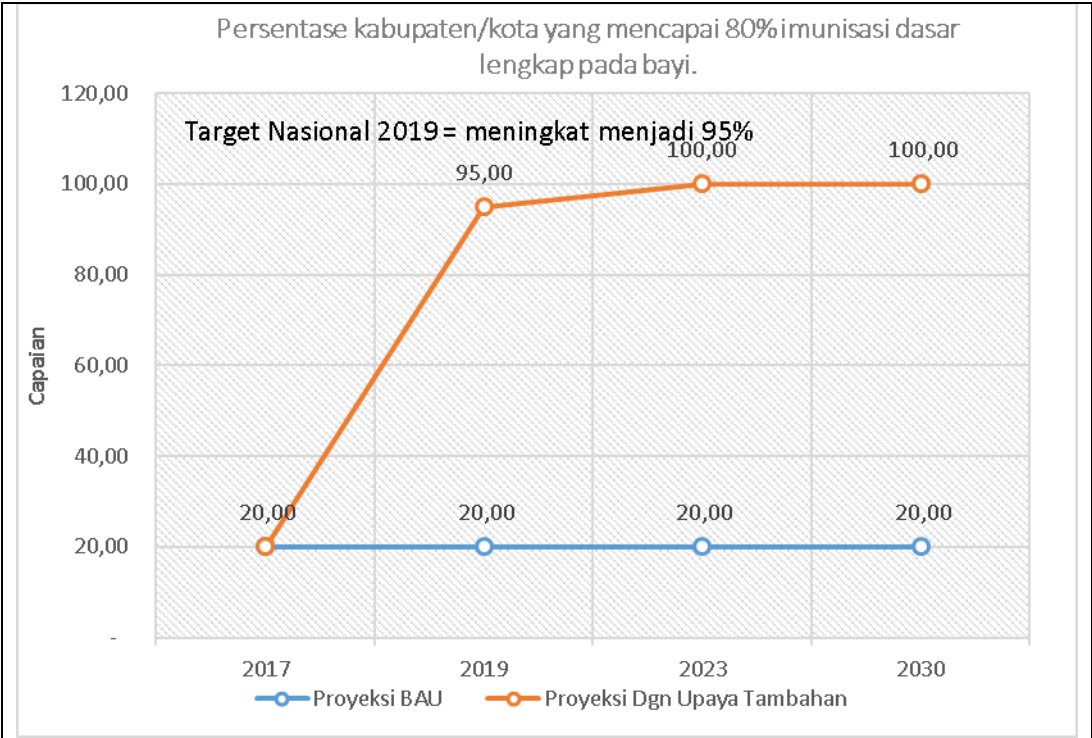
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	90,57	
2014	89,87	
2015	72,87	
2016	70,97	
2017	77,07	
Proyeksi		
2019	71,10	85,00
2023	60,50	90,00
2030	45,61	100,00





Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun

Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia																																	
Target : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																																	
Nomor Indikator : 3.4.1.(a)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun sampai pada tahun 2017 adalah 20%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat menjadi 95 %. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu meningkat menjadi 95%. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 adalah 85% pada tahun 2023 adalah 100%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2014</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2015</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2016</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2017</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>20</td><td>95</td></tr><tr><td>2023</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>2030</td><td>20</td><td>100</td></tr></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	-	-	2014	-	-	2015	-	-	2016	-	-	2017	20	20	Proyeksi			2019	20	95	2023	20	100	2030	20	100
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2013	-	-																															
2014	-	-																															
2015	-	-																															
2016	-	-																															
2017	20	20																															
Proyeksi																																	
2019	20	95																															
2023	20	100																															
2030	20	100																															

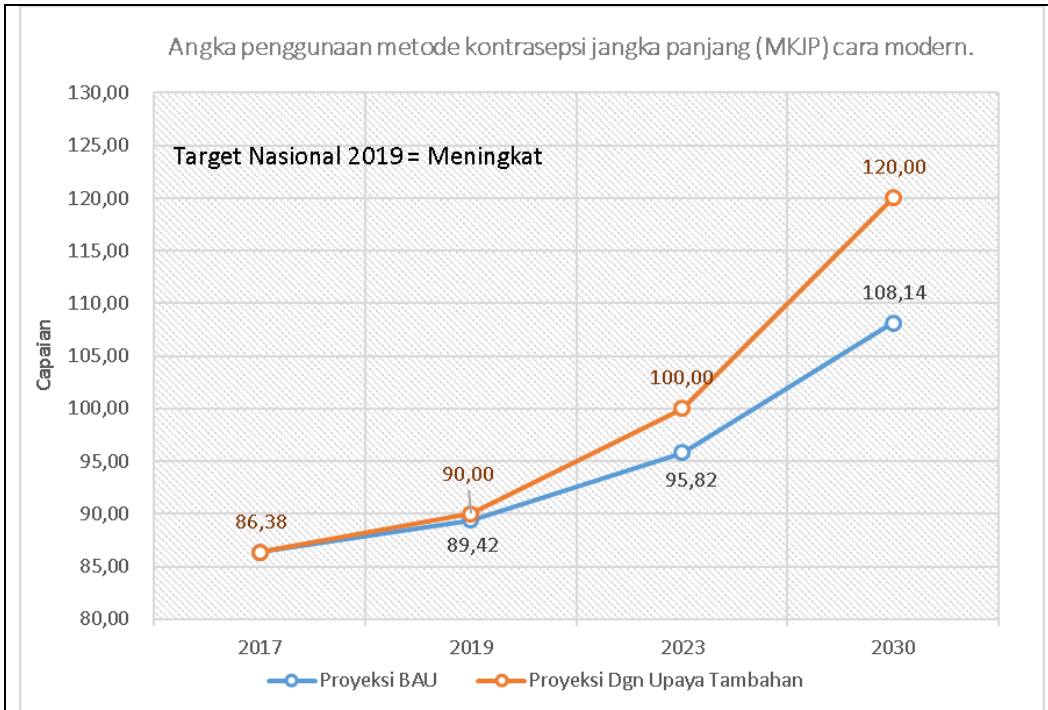


Isu Strategis : Kesehatan dan Kesejahteraan
Rekomendasi :
a. Sasaran :
Penurunan persentase perokok pada penduduk umur ≤18 tahun
b. Strategi dan arah kebijakan :
Penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
c. Outcome/Program :
- Pengesahan Perda KTR
- Promosi Kesehatan Masyarakat
d. Instansi pelaksana :
- Dinas Kesehatan



J. Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern

Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia																																	
Target : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																																	
Nomor Indikator : 3.7.1.(b)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern sampai pada tahun 2017 adalah 86,38%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2019 dengan 90%, dan tahun 2023 meningkat hingga 100%. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 kembali mengalami peningkatan hingga 120%, sedangkan BAU 108, sehingga perlu upaya tambahan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">80,61</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">82,11</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">84,90</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">193,25</td></tr><tr><td>2017</td><td>86,38</td><td>86,38</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>89,42</td><td>90,0</td></tr><tr><td>2023</td><td>95,82</td><td>100,0</td></tr><tr><td>2030</td><td>108,14</td><td>120,0</td></tr></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	80,61		2014	82,11		2015	84,90		2016	193,25		2017	86,38	86,38	Proyeksi			2019	89,42	90,0	2023	95,82	100,0	2030	108,14	120,0
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2013	80,61																																
2014	82,11																																
2015	84,90																																
2016	193,25																																
2017	86,38	86,38																															
Proyeksi																																	
2019	89,42	90,0																															
2023	95,82	100,0																															
2030	108,14	120,0																															



Isu Strategis : Kesehatan dan Kesejahteraan

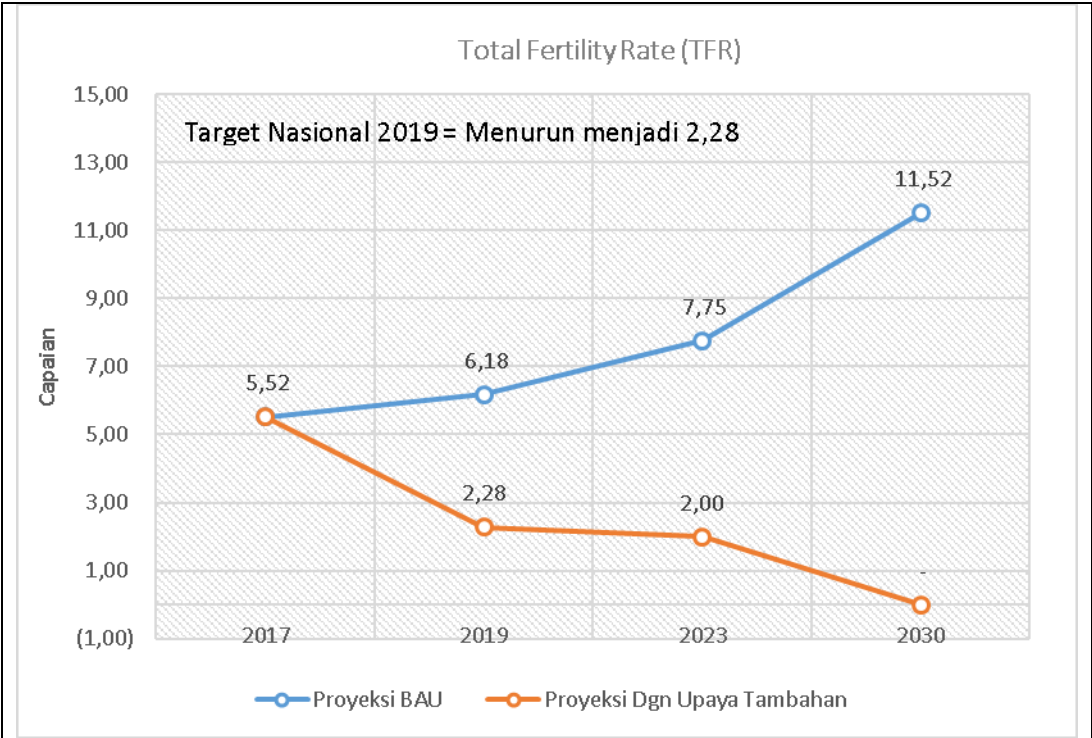
Rekomendasi :

- Sasaran :
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
- Strategi dan arah kebijakan :
 - Meningkatkan kampanye Program Keluarga Berencana
 - Meningkatkan akses pelayanan KB
- Outcome/Program :
 - Program Keluarga Berencana
 - Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - Melakukan pendataan semua elemen kebutuhan KB.
 - Pelayanan Pemasangan Alkon
 - Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
 - Peningkatan Program Keluarga Berencana.
 - Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
 - Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- Instansi pelaksana :
Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



K. Indikator Total Fertility Rate (TFR)

Tujuan	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia																																	
Target	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																																	
Nomor Indikator	3.7.2.(a)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB	Capaian indikator <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) sampai pada tahun 2017 adalah 5,52. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Menurun menjadi 2,28. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Menurun menjadi 2,28. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indicator dapat dipenuhi pada tahun 2019 dengan 2,28%, dan tahun 2023 menurun hingga 2,00%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 kembali mengalami penurunan hingga 0%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">4,40</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">6,71</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">5,88</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">6,19</td></tr><tr><td>2017</td><td colspan="2">5,52</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>6,18</td><td>2,28</td></tr><tr><td>2023</td><td>7,75</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2030</td><td>11,52</td><td>0</td></tr></table>		Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	4,40		2014	6,71		2015	5,88		2016	6,19		2017	5,52		Proyeksi			2019	6,18	2,28	2023	7,75	2,00	2030	11,52	0
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																																
Baseline Data																																		
2013	4,40																																	
2014	6,71																																	
2015	5,88																																	
2016	6,19																																	
2017	5,52																																	
Proyeksi																																		
2019	6,18	2,28																																
2023	7,75	2,00																																
2030	11,52	0																																



Isu Strategis : Kesehatan dan Kesejahteraan

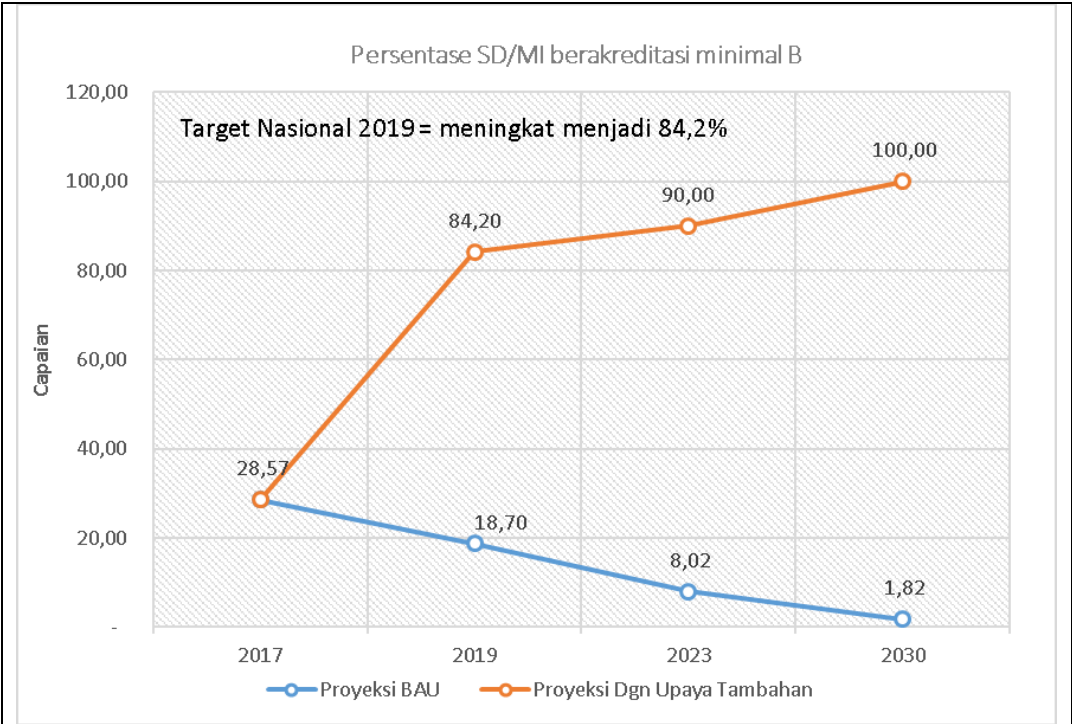
Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Penurunan Total Fertility Rate (TFR)
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan Kampanye Program Keluarga Berencana
- c. Outcome/Program :
 - Program Keluarga Berencana
 - Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - Pelayanan Pemasangan Alkon
 - Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
 - Pencanaan Program Penurunan Angka Kelahiran
- d. Instansi pelaksana :
Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



L. Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua																																	
Target : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																																	
Nomor Indikator : 4.1.1.(a)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. sampai pada tahun 2017 adalah 28,57%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat menjadi 84,2%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2019 dengan 84,2%, dan tahun 2023 meningkat hingga 90%, sehingga perlu upaya tambahan Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 kembali meningkat mencapai hasil 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">66,67</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">66,67</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">57,14</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">28,57</td></tr><tr><td>2017</td><td>28,57</td><td>28,57</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>18,70</td><td>84,2</td></tr><tr><td>2023</td><td>8,02</td><td>90</td></tr><tr><td>2030</td><td>1,82</td><td>100</td></tr></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	66,67		2014	66,67		2015	57,14		2016	28,57		2017	28,57	28,57	Proyeksi			2019	18,70	84,2	2023	8,02	90	2030	1,82	100
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2013	66,67																																
2014	66,67																																
2015	57,14																																
2016	28,57																																
2017	28,57	28,57																															
Proyeksi																																	
2019	18,70	84,2																															
2023	8,02	90																															
2030	1,82	100																															



Isu Strategis : Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi :

- Sasaran :
Meningkatkan Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
- Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar
- Outcome/Program :
 - Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan
 - Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan sekolah
 - Meningkatkan kompetensi SDM.
 - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
 - Peningkatan mutu layanan pendidikan dasar
 - Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan sekolah dasar.
- Instansi pelaksana :
Dinas Pendidikan

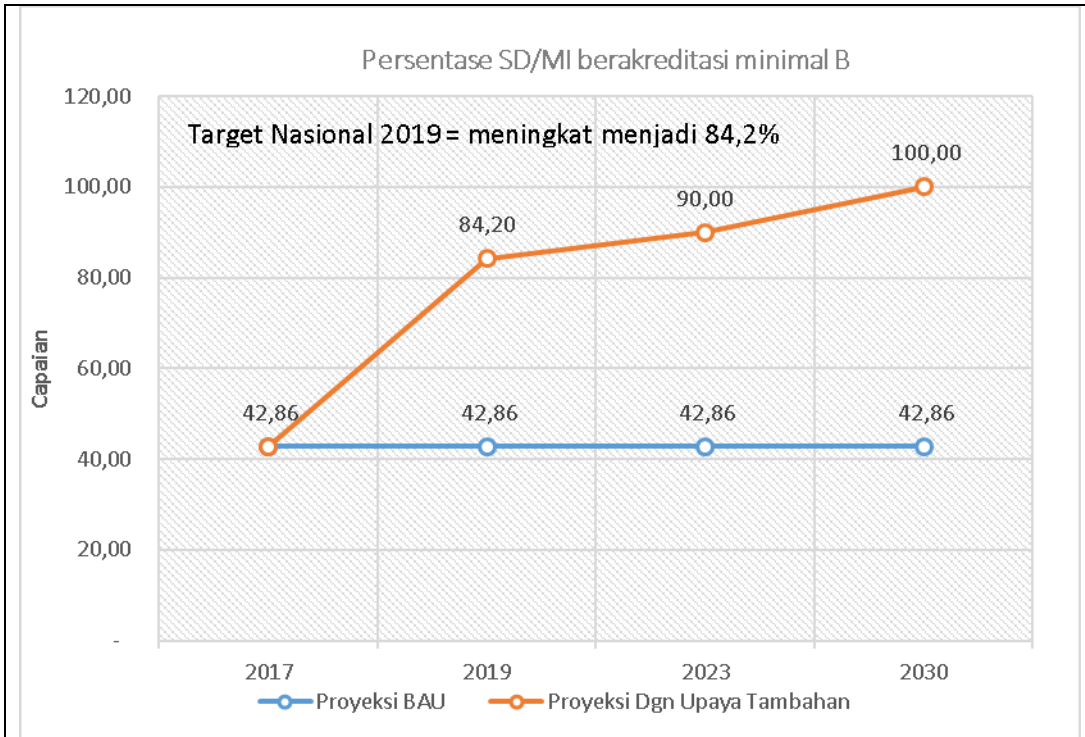
M. Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Target : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
Nomor Indikator : 4.1.1.(b)
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B



sampai pada tahun 2017 adalah 42,86%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkatkan 84,2%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 81%, dan tahun 2023 meningkat hingga 90%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 kembali meningkat mencapai hasil 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	42,86	
2014	42,86	
2015	42,86	
2016	42,86	
2017	42,86	42,86
Proyeksi		
2019	42,86	81
2023	42,86	90
2030	42,86	100



Isu Strategis : Pendidikan Berkualitas

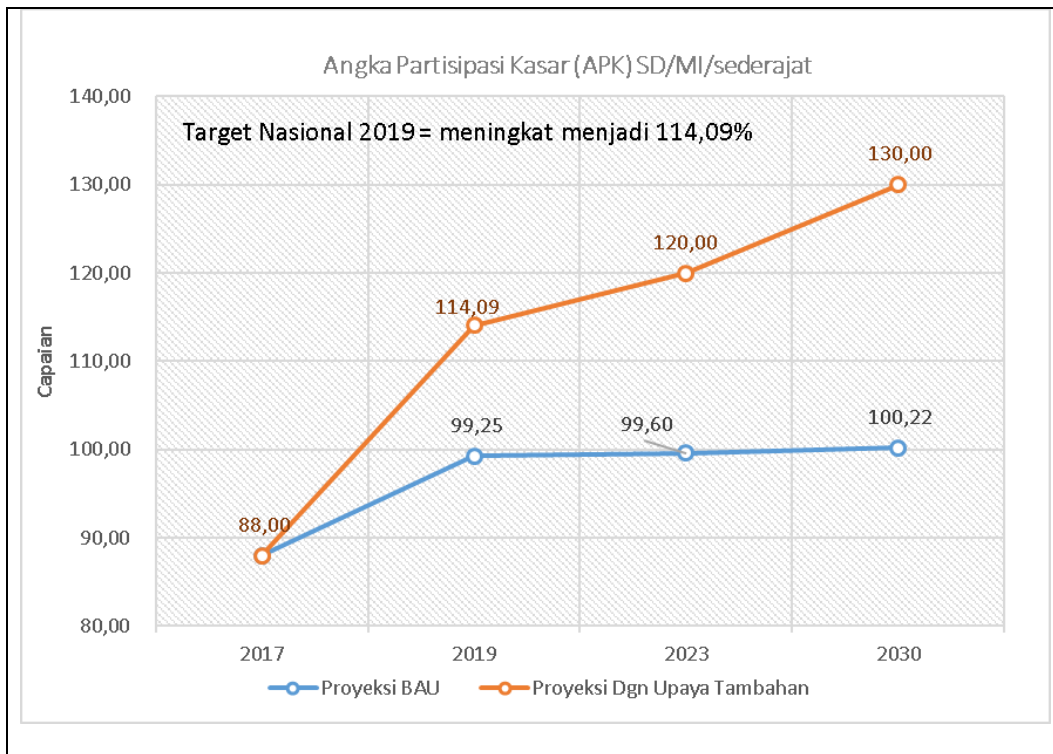
Rekomendasi :

- Sasaran :
Meningkatkan Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
- Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan mutu/kualitas pendidikan SMP/ sederajat.
- Outcome/Program :
 - Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan
 - Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan sekolah.
 - Meningkatkan kompetensi SDM
 - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
 - Peningkatan mutu layanan pendidikan SMP/ sederajat
 - Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan SMP/ sederajat.
- Instansi pelaksana :
Dinas Pendidikan



N. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua																																	
Target : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																																	
Nomor Indikator : 4.1.1.(d)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai pada tahun 2017 adalah 100. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkat 114,09. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu Meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indicator dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 114,09%, dan tahun 2023 meningkat hingga 120,00%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 kembali meningkat mencapai hasil 130,00%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">96,79</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">100,99</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">101,70</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">95,45</td></tr><tr><td>2017</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>99,25</td><td>114,09</td></tr><tr><td>2023</td><td>99,60</td><td>120,00</td></tr><tr><td>2030</td><td>100,22</td><td>130,00</td></tr></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	96,79		2014	100,99		2015	101,70		2016	95,45		2017	100	100	Proyeksi			2019	99,25	114,09	2023	99,60	120,00	2030	100,22	130,00
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2013	96,79																																
2014	100,99																																
2015	101,70																																
2016	95,45																																
2017	100	100																															
Proyeksi																																	
2019	99,25	114,09																															
2023	99,60	120,00																															
2030	100,22	130,00																															



Isu Strategis : Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi :

- Sasaran :
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
- Strategi dan arah kebijakan :
Peningkatan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya pendidikan formal melalui sosialisasi/penyuluhan
- Outcome/Program :
 - Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - Sosialisasi meningkatkan kesadaran pentingnya melaksanakan/menempuh pendidikan formal setingkat SD/ sederajat.
 - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
 - Pemberian subsidi untuk siswa tidak mampu.
- Instansi pelaksana :
Dinas Pendidikan



O. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

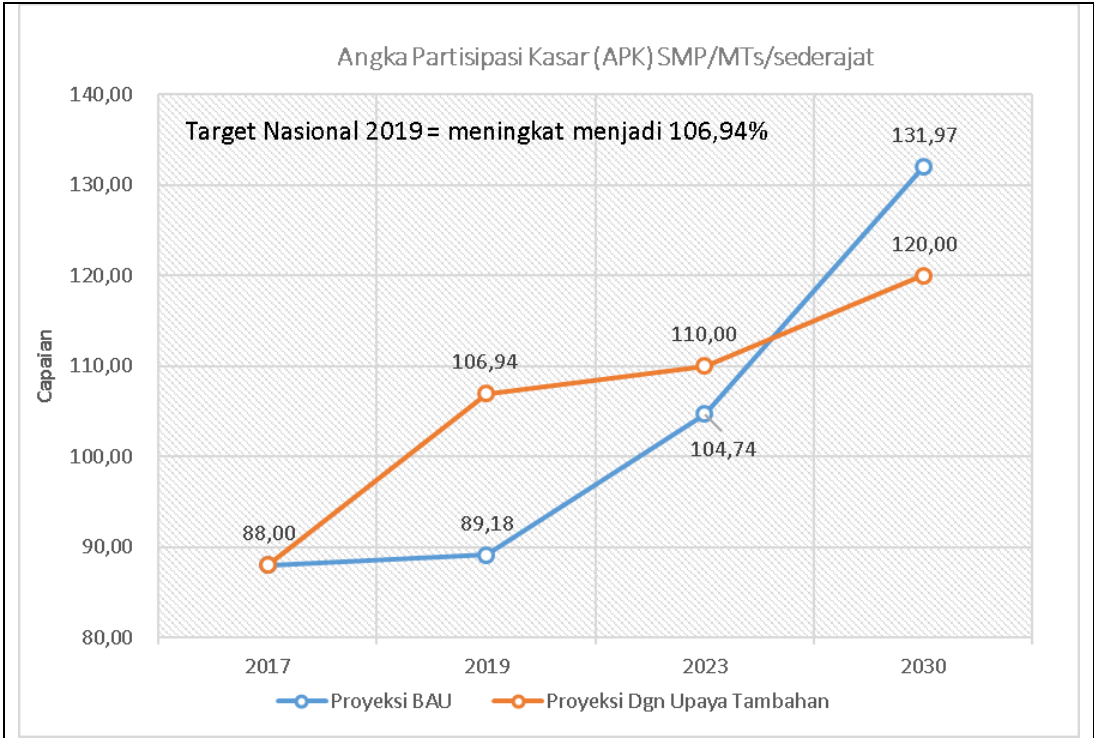
Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator : 4.1.1.(e)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai pada tahun 2017 adalah 88%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 106,94%, dan tahun 2023 meningkat hingga 110,00%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 kembali meningkat mencapai hasil 120,00%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	44,73	
2014	80,32	
2015	79,83	
2016	80,68	
2017	88,00	88,00
Proyeksi		
2019	89,18	106,94
2023	104,74	110,00
2030	131,97	120,00



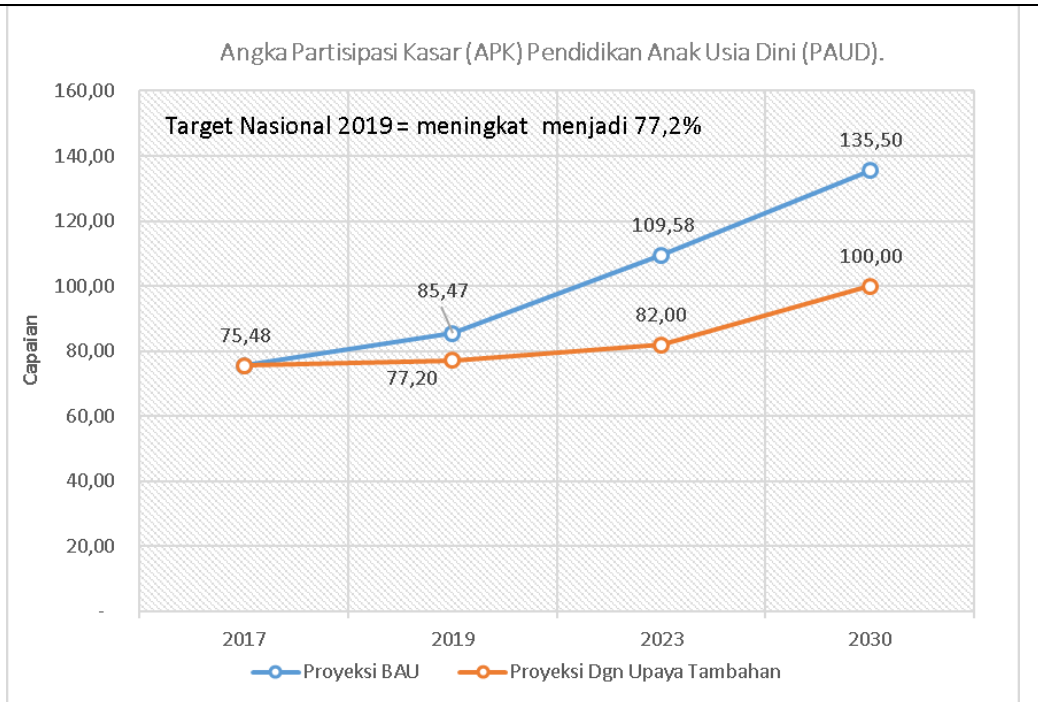
Isu Strategis : Pendidikan Berkualitas	
Rekomendasi :	
a. Sasaran :	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
b. Strategi dan arah kebijakan :	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Dasar, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya pendidikan formal melalui sosialisasi/penyuluhan
c. Outcome/Program :	- Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun - Sosialisasi meningkatkan kesadaran pentingnya melaksanakan/menempuh pendidikan formal setingkat SMP/ sederajat - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah. - Pemberian subsidi untuk siswa tidak mampu.
d. Instansi pelaksana :	- Dinas Pendidikan

P. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tujuan :	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Target :	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.



Nomor Indikator : 4.2.2.(a)		
Proyeksi Capaian Indikator TPB :		
Capaian indikator rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. sampai pada tahun 2017 adalah 75,48%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu Meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi, pada tahun 2019 meningkat dengan 77,2%, dan tahun 2023 meningkat hingga 82%, sedangkan BAU 109,58% sehingga tidak perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 100%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	58,87	
2014	65,59	
2015	69,83	
2016	72,11	
2017	75,48	75,48
Proyeksi		
2019	85,47	77,2
2023	109,58	82,0
2030	135,50	100,0



Isu Strategis : Pendidikan Berkualitas

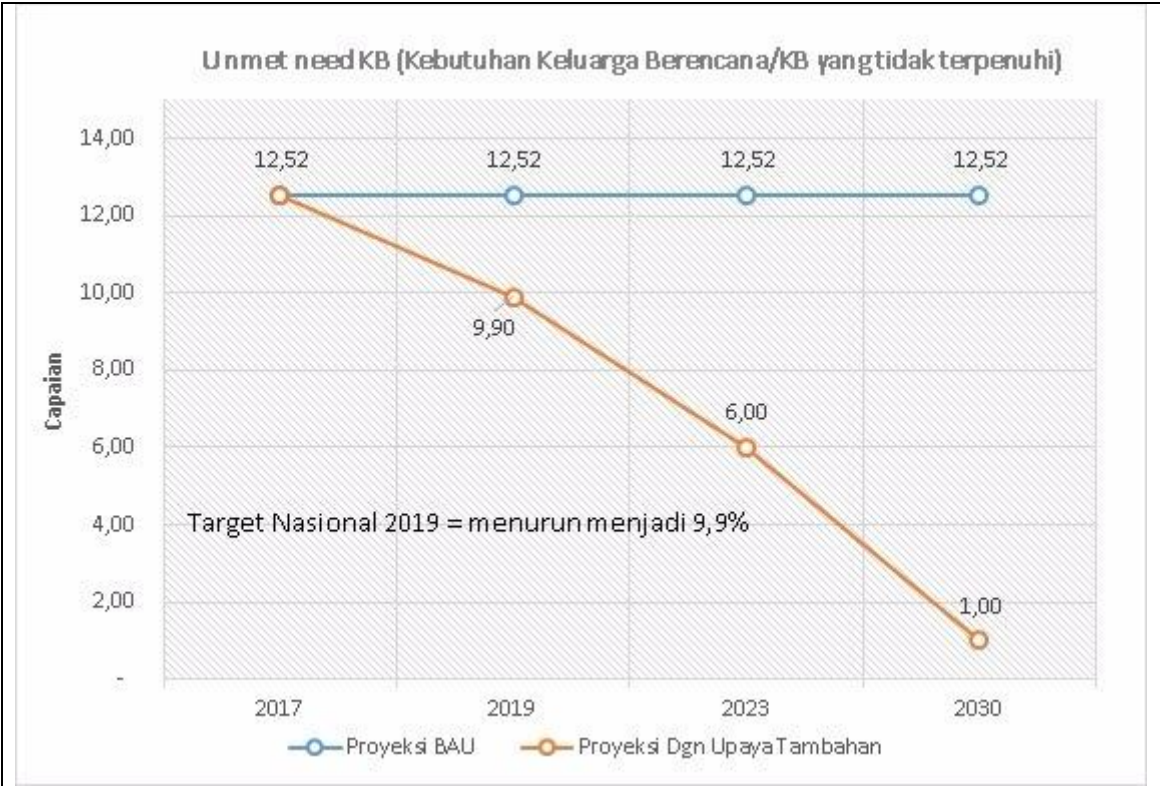
Rekomendasi :

- Sasaran :
Meningkatkan Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya pendidikan formal melalui sosialisasi/penyuluhan
- Outcome/Program :
 - Peningkatan kesadaran pentingnya melaksanakan/menempuh pendidikan formal setingkat PAUD
 - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
 - Pemberian bantuan untuk siswa tidak mampu
 - Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan PAUD
- Instansi pelaksana :
Dinas Pendidikan



Q. Indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)

Tujuan : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan																																	
Target : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.																																	
Nomor Indikator : 5.6.1.(a)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator <i>Unmet need KB</i> (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) sampai pada tahun 2017 adalah 12,52%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indicator dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 9,90%, dan tahun 2023 mningkat hingga 6%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 kembali hanya mencapai hasil 1%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">12,52</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">12,52</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">12,52</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">12,52</td></tr><tr><td>2017</td><td>12,52</td><td>12,52</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>12,52</td><td>9,90</td></tr><tr><td>2023</td><td>12,52</td><td>6,00</td></tr><tr><td>2030</td><td>12,52</td><td>1,00</td></tr></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	12,52		2014	12,52		2015	12,52		2016	12,52		2017	12,52	12,52	Proyeksi			2019	12,52	9,90	2023	12,52	6,00	2030	12,52	1,00
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2013	12,52																																
2014	12,52																																
2015	12,52																																
2016	12,52																																
2017	12,52	12,52																															
Proyeksi																																	
2019	12,52	9,90																															
2023	12,52	6,00																															
2030	12,52	1,00																															



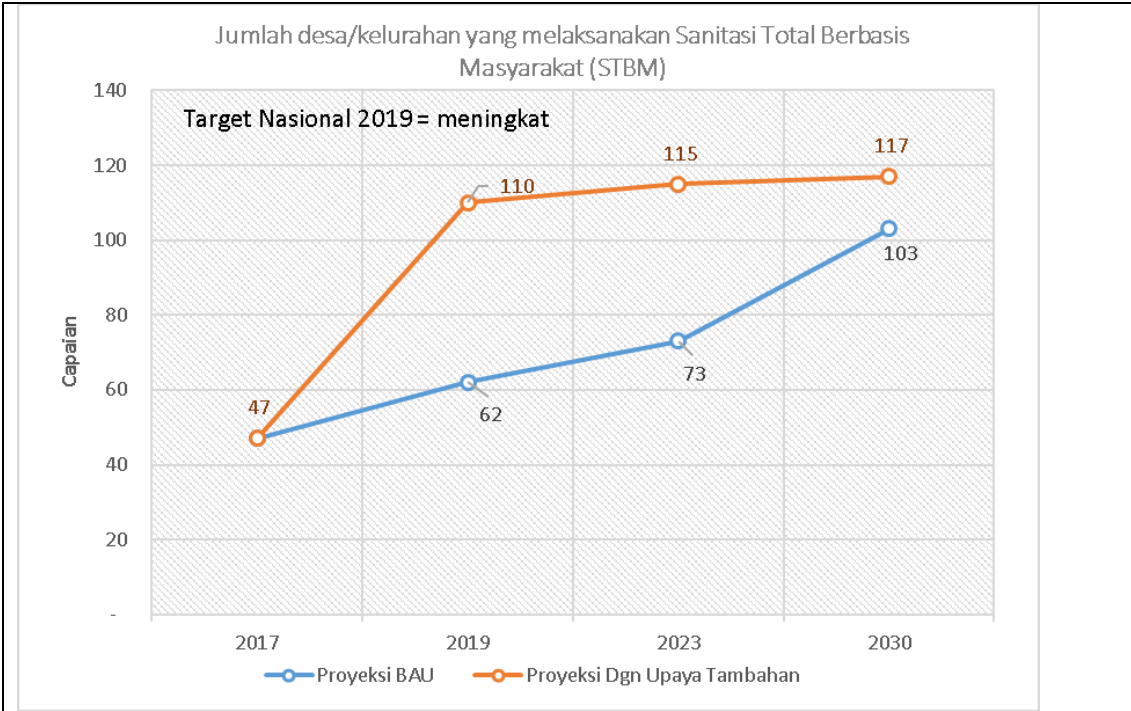
Isu Strategis : Kesenjangan Gender
Rekomendasi : a. Sasaran : Meningkatkan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) b. Strategi dan arah kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan reproduksi c. Outcome/Program : - Program Keluarga Berencana - Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Meningkatkan Akses Pelayanan KB - Penyuluhan Kesehatan Reproduksi - Menggalakan Program Kampung KB - Peningkatan Program Keluarga Berencana - Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja - Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga d. Instansi pelaksana : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

R. Indikator Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.



Nomor Indikator: 6.2.1.(c)		
Proyeksi Capaian Indikator TPB :		
Capaian indikator proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sampai pada tahun 2017 adalah 47%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indicator belum dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 110%, dan tahun 2023 meningkat hingga 115%, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 117%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	-	
2014	-	
2015	-	
2016	24	
2017	47	47
Proyeksi		
2019	62	110
2023	73	115
2030	103	117



Isu Strategis: Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi layak, Meningkatkan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
- c. Outcome/Program :
 - Pemutakhiran data studi sanitasi, stimulasi PAB dan sanitasi desa
 - Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat
 - Pembangunan sarana dan prasarana
 - Penyediaan MCK Kombinasi dan IPAL komunal
 - Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - Promosi Kesehatan
 - Sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat.
 - Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
 - Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- d. Instansi pelaksana :
Dinas Kesehatan

S. Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

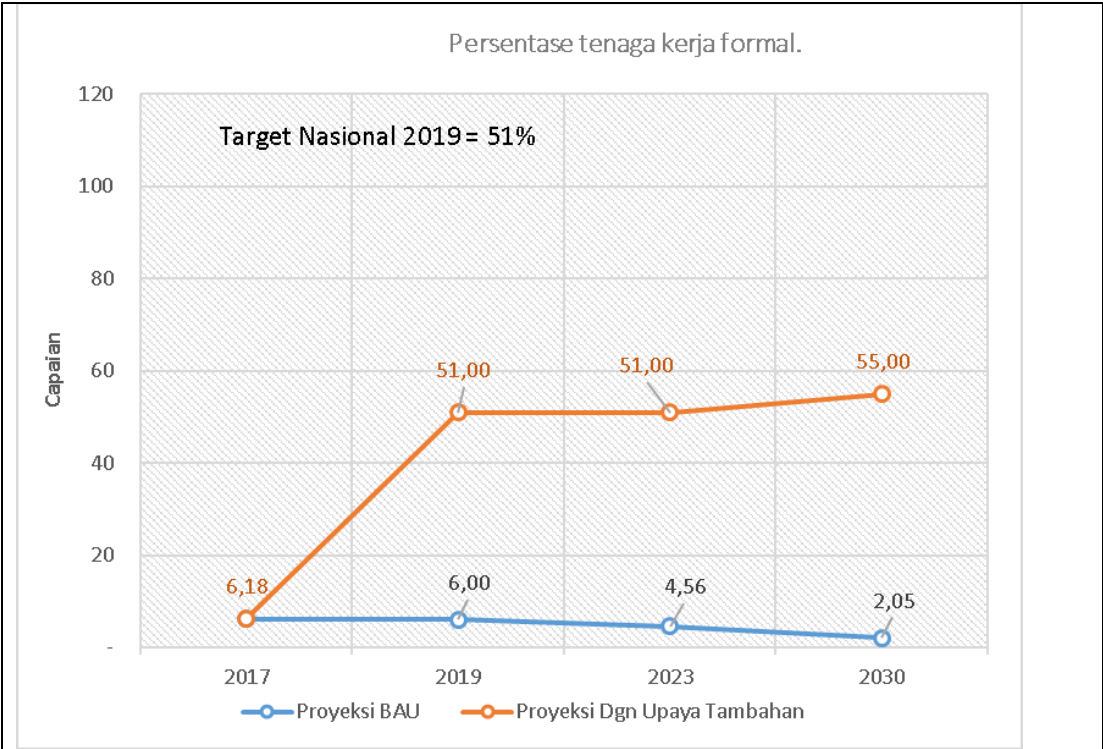


Nomor Indikator : 6.2.1.(d)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sampai pada tahun 2017 adalah 6,18%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu Meningkatkan. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan, sehingga perlu upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 51%, dan tahun 2023 meningkat hingga 52%. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 55%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	7,52	
2014	7,54	
2015	7,54	
2016	6,63	
2017	6,18	6,18
Proyeksi		
2019	6,00	51,00
2023	4,56	52,00
2030	2,05	55,00



Isu Strategis : Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup bersih dan sehat (sadar sanitasi layak)
- b. Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.
- c. Outcome/Program :
 - Sosialisasi / penyuluhan kesehatan lingkungan
 - Pemucuan STBM
 - Pemuktahiran data EHRA
 - Penyediaan MCK Kombinasi dan IPAL komunal
 - Bantuan untuk rumah tidak layak huni
 - Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - Promosi Kesehatan
- d. Instansi pelaksan :
Dinas Kesehatan

T. Indikator Persentase tenaga kerja formal

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Target : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

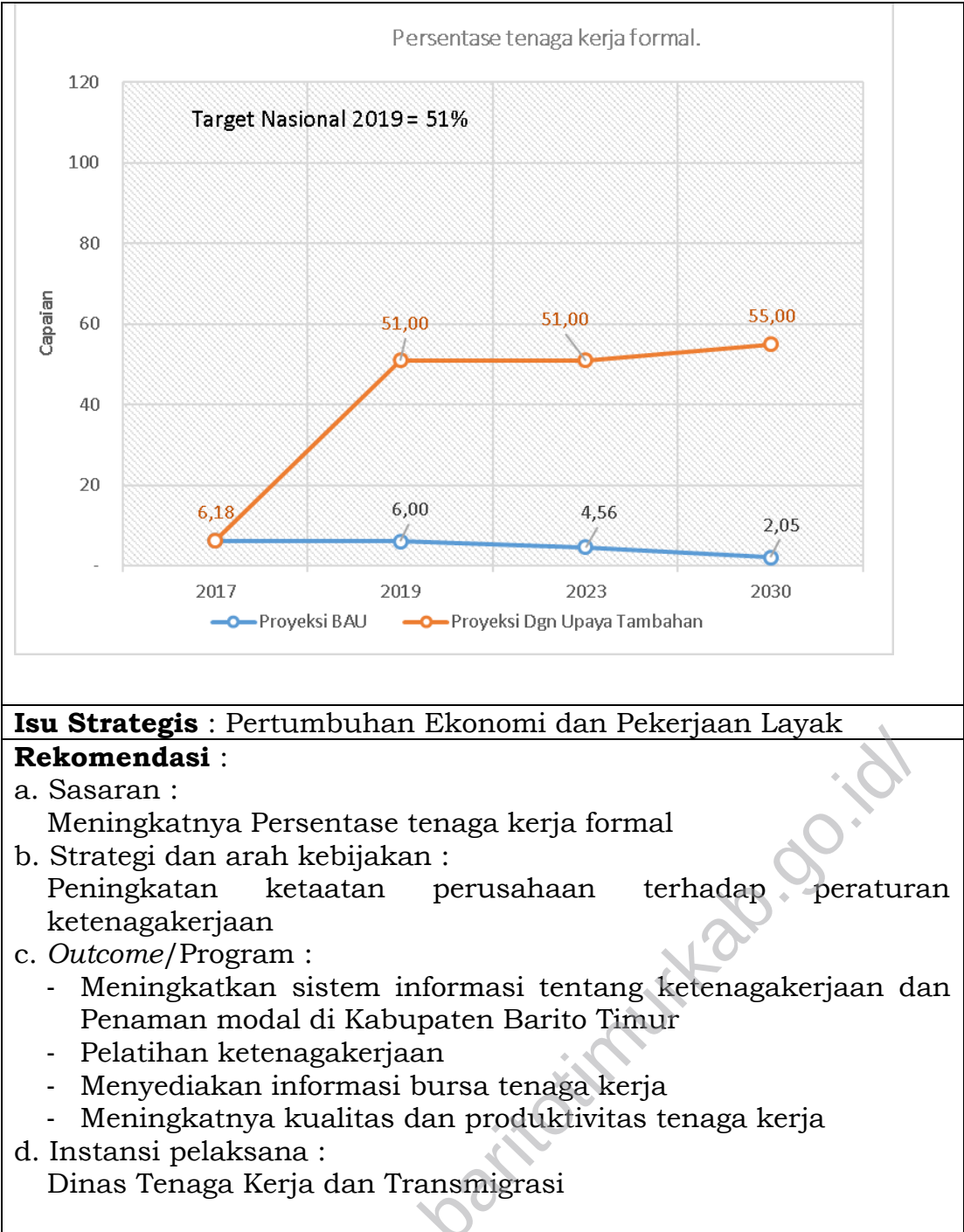


Nomor Indikator : 8.3.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator 6.3.21 indikator persentase tenaga kerja formal sampai pada tahun 2017 adalah 53,37%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkatkan. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu Meningkatkan. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan, sehingga perlu upaya tambahan Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 51%, dan tahun 2023 meningkat hingga 52%. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 55%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	62,23	
2014	59,64	
2015	55,04	
2016	52,23	
2017	53,37	53,37
Proyeksi		
2019	49,42	51
2023	42,38	51
2030	32,39	55



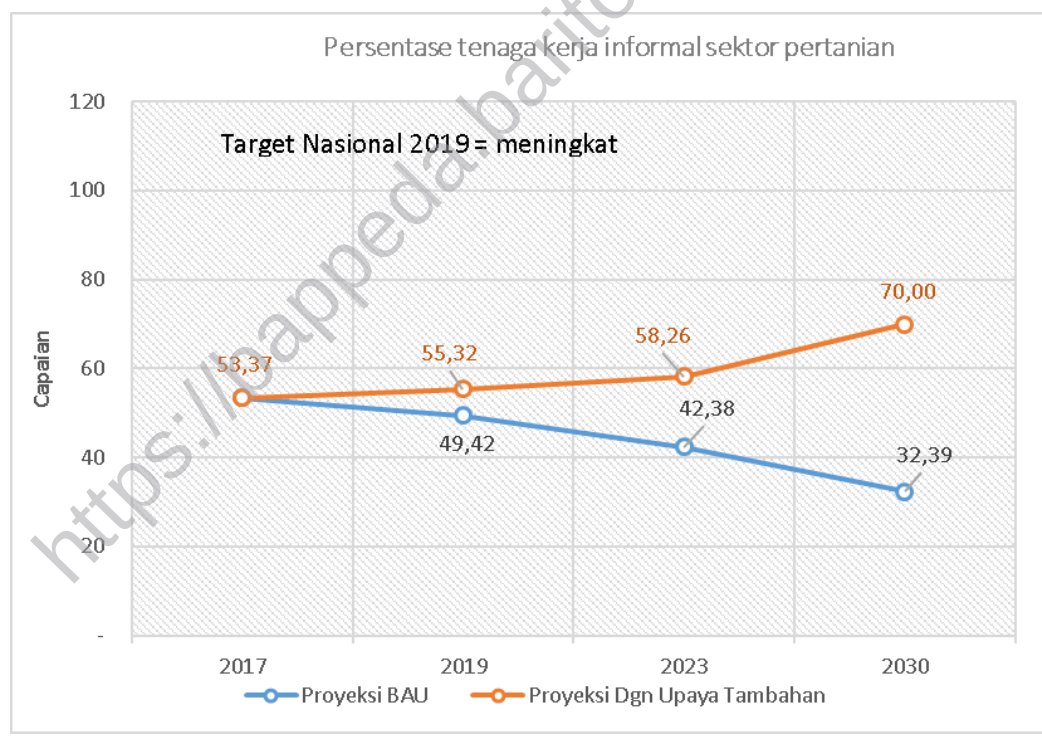
U. Indikator Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Target : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
Nomor Indikator : 8.3.1.(b)
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator persentase tenaga kerja informal sektor pertanian sampai pada tahun 2017 adalah 55,32%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden



Nomor 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan, sehingga perlu upaya tambahan Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indicator belum dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 55,321%, dan tahun 2023 meningkat hingga 58,26%. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 705%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	62,23	
2014	59,64	
2015	55,04	
2016	52,23	
2017	53,37	53,37
Proyeksi		
2019	49,42	55,32
2023	42,38	58,26
2030	32,39	70,00





Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
Rekomendasi : a. Sasaran : Meningkatnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian b. Strategi dan arah kebijakan : Peningkatan kualitas tenaga kerja informal sektor pertanian dan mendorong upaya pendataan dan akurasi data terkait Sosialisasi sarpras pertanian c. <i>Outcome/Program</i> : - Kerja sama dengan BPS terkait ketersediaan data, - Pelatihan peningkatan nilai tambah sektor pertanian - Sosialisasi sarpras pertanian - Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja informal pertanian tentang sarpras d. Instansi pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian

V. Indikator Tingkat setengah pengangguran

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Target : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Nomor Indikator : 8.5.2.(a)
Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator persentase tenaga kerja informal sektor pertanian sampai pada tahun 2017 adalah 20,20%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu Meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan, sehingga perlu upaya tambahan Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 10,17%, dan tahun 2023 meningkat hingga 22,14%. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 70%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan



Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	0,96	
2014	1,71	
2015	2,46	
2016	2,14	
2017	2,20	2,20
Proyeksi		
2019	3,32	10,17
2023	7,56	22,14
2030	31,95	70,00



Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

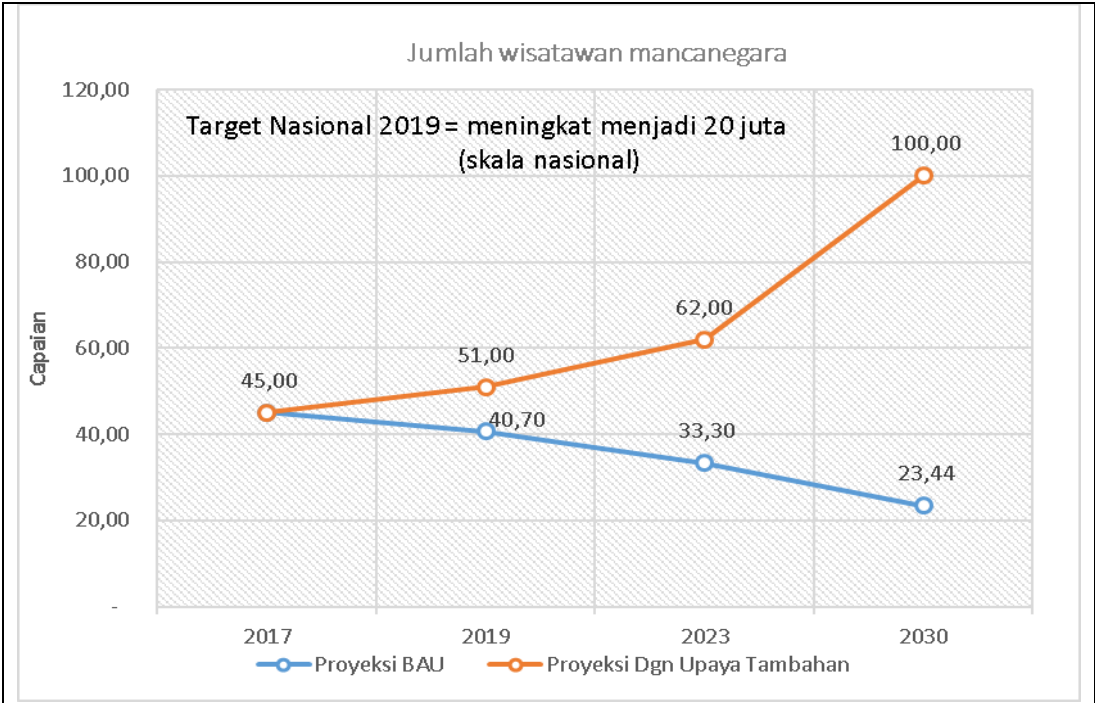
Rekomendasi :

- Sasaran :
Meningkatnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
- Strategi dan arah kebijakan :
Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja daerah
- Outcome/Program :
 - peningkatan kualitas tenaga kerja lokal
 - penguatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
 - pelatihan ketenagakerjaan
 - kemudahan investasi bagi investor
 - peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Instansi pelaksana :
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



W. Indikator Jumlah wisatawan mancanegara

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua																																	
Target : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.																																	
Nomor Indikator : 8.9.1.(a)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator jumlah wisatawan mancanegara sampai pada tahun 2017 adalah 45. Capaian ini mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu Meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan, sehingga perlu upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indicator dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 51, dan tahun 2023 tetap 62. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 100. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :																																	
<table><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th><th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th></tr><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2013</td><td colspan="2">55</td></tr><tr><td>2014</td><td colspan="2">38</td></tr><tr><td>2015</td><td colspan="2">37</td></tr><tr><td>2016</td><td colspan="2">37</td></tr><tr><td>2017</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>40,70</td><td>51</td></tr><tr><td>2023</td><td>33,30</td><td>62</td></tr><tr><td>2030</td><td>23,44</td><td>100</td></tr></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2013	55		2014	38		2015	37		2016	37		2017	45	45	Proyeksi			2019	40,70	51	2023	33,30	62	2030	23,44	100
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2013	55																																
2014	38																																
2015	37																																
2016	37																																
2017	45	45																															
Proyeksi																																	
2019	40,70	51																															
2023	33,30	62																															
2030	23,44	100																															



Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
Rekomendasi : a. Sasaran : Meningkatkan Jumlah wisatawan mancanegara b. Strategi dan arah kebijakan : Pengembangan obyek wisata sehingga mengundang wisatawan mancanegara dan nusantara (dari luar Kabupaten Barito Timur) untuk berkunjung c. Outcome/Program : - Pengembangan destinasi pariwisata - Pembinaan Pokdarwis di lokawisata - Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata - Pembangunan kelembagaan pariwisata - Pemasaran pariwisata daerah. - Mengembangkan destinasi wisata daerah - Integrasi event budaya dan olah raga daerah sebagai destinasi wisata daerah - Pengembangan kemitraan - Meningkatkan promosi wisata daerah - Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah d. Instansi pelaksana : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

X. Indikator Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Target : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.



Nomor Indikator : 8.9.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator jumlah wisatawan mancanegara sampai pada tahun 2017 adalah 11.129. Capaian ini mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini dapat memenuhi target yaitu Meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan, sehingga perlu upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi, pada tahun 2019 dengan 12.000, dan tahun 2023 tetap 13.000. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 mencapai hasil 15.000. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	11.339	
2014	10.977	
2015	10.910	
2016	11.030	
2017	11.129	11.129
Proyeksi		
2019	11.025	12.000
2023	10.821	13.000
2030	10.473	15.000



Isu Strategis : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi :

- a. Sasaran :
Meningkatkan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
Pengembangan obyek wisata sehingga mengundang wisatawan mancanegara/nusantara untuk berkunjung dan promosi obyek wisata di Kabuapten Barito Timur.
- c. Outcome/Program :
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata
 - Pembangunan kelembagaan pariwisata
 - Pemasaran pariwisata daerah.
 - Mengembangkan destinasi wisata daerah
 - Integrasi event budaya dan olahraga daerah sebagai destinasi wisata daerah
 - Pengembangan kemitraan
 - Meningkatkan promosi wisata daerah
 - Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah
- d. Instansi pelaksana :
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Y. Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Tujuan : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Target : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.
Nomor Indikator : 9.c.1.(a)



Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam sampai pada tahun 2017 adalah 67,20. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di ahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka, dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Proyeki capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*). Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu meningkat pada 2019. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi, tetapi dengan upaya tambahan tahun 2019 adalah 70% dan 2030 adalah 74, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 90 Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	-	
2014	-	
2015	-	
2016	-	
2017	67,20	67,20
Proyeksi		
2019	67,20	70
2023	67,20	74
2030	67,20	90



Z. Indikator Proporsi individu yang menggunakan internet

Tujuan : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi



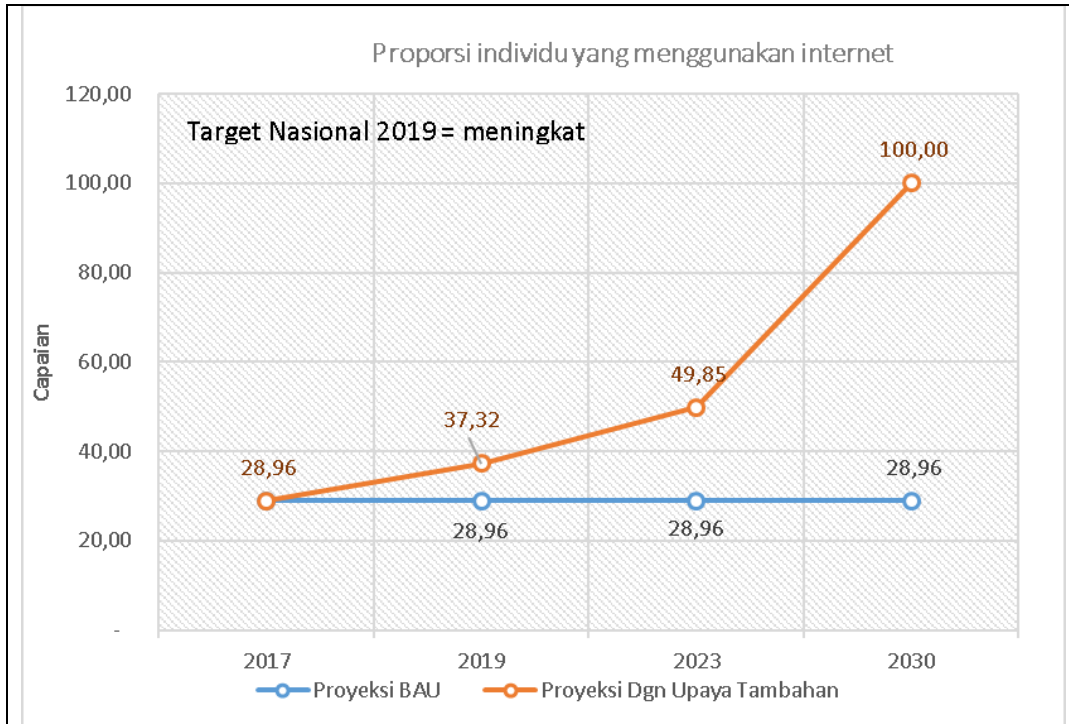
Target : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Nomor Indikator : 9.c.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator proporsi individu yang menggunakan internet sampai pada tahun 2017 adalah 28,96. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di Tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2019, 2023 dan 2030 maka, dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2014 s/d 2017. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*). Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu meningkat pada 2019. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator belum dapat dipenuhi pada tahun 2019, tetapi dengan upaya tambahan tahun 2019 adalah 49,85, sehingga perlu upaya tambahan. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 100 Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2013	28,96	
2014	28,96	
2015	28,96	
2016	28,96	
2017	28,96	28,96
Proyeksi		
2019	28,96	37,32
2023	28,96	49,85
2030	28,96	100,00



Isu Strategis : Infrastruktur

Rekomendasi :

a. Sasaran :

Meningkatkan proporsi individu yang menggunakan internet

b. Strategi dan arak kebijakan :

Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi agar jaringan internet dapat di jangkau seluruh wilayah di Kabupaten Barito Timur

c. Outcome/Program :

- Berkoordinasi dengan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi terkait pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi
- Pembangunan BTS/tower/penguat sinyal pada area blank spot/rendah sinyal.
- Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi untuk seluruh wilayah di Kabupaten Barito Timur.

d. Instansi pelaksana :

Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB IX PENUTUP

RPJMD menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh perangkat daerah dan kolaborasinya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Barito Timur yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman Transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan periode berikutnya setelah terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024, menyusun dokumen.

a. RPJMD Teknokratik Periode 2025-2030

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam



pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan maka disusunlah RPJMD teknokratik 2025-2030 pada tahun 2024.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pada tahun 2024 tepat pada saat berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2018-2023 maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Dengan ini penyusunan RPJMD teknokratik dilakukan dengan pendekatan teknokratis dengan berpedoman pada RPJPD, hasil analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2018-2023), RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMN untuk keselarasan kebijakan pembangunan daerah kabupaten dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kemudian RPJMD teknokratik ini selanjutnya dijadikan acuan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum serentak bulan November 2024. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2018-2023), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. RPJMD teknokratik ini kemudian menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJMD setelah bupati dan wakil bupati terpilih di lantik.

b. RKPD Tahun 2024

Penyusunan RKPD tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RPJPD, pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD tahun 2024 seperti yang dimaksud di atas, digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS tahun 2024 serta APBD tahun anggaran 2024.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program



pembangunan daerah, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Barito Timur tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2019 hingga 2023.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Timur berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Timur dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.



6. RPJMD ini akan menjadi dasar bupati dan wakil bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Barito Timur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur di masa yang akan datang.

BUPATI BARITO TIMUR

AMPERA A.Y. MEBAS